

De koloniale staat (Negara kolonial) 1854 - 1942



Francien van Anrooij

**Panduan
Archief van het Ministerie van Koloniën
(Arsip Kementerian Urusan Tanah Jajahan)
Kepulauan Nusantara**

Panduan penelitian: *Negara kolonial*

De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942

**Panduan
Archief van het Ministerie van Koloniën
(Arsip Kementerian Urusan Tanah Jajahan)
Kepulauan Nusantara**

***Penyusun*
Francien van Anrooij**

***Penerjemah*
Nurhayu W. Santoso
Susi Moeimam**

**Edisi revisi
Leiden, Agustus 2014**

Diterjemahkan oleh Nurhayu W. Santoso dan Susi Moeimam dari buku *De koloniale staat, 1854-1942; Gids voor het archief van het Ministerie van Koloniën; De Indonesische archipel* (Francien van Anrooij, Desember 2009; Den Haag: Nationaal Archief) atas tugas dari Arsip Nasional Den Haag.

Hasil terjemahan dalam edisi revisi ini didasarkan atas konsultasi intensif dengan penyusun buku.

Foto sampul: Para kepala Jawa sekitar tahun 1890 (Koleksi foto KITLV no. 27787).

Daftar Isi

De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942	5
Penjelasan	8
I Binnenlands Bestuur (Pemerintahan Dalam Negeri)	13
1 Het Departement van Binnenlands Bestuur (Departemen Pemerintahan Dalam Negeri)	14
2 Het bestuur in het binnenland (Pemerintahan di dalam negeri)	21
3 De Dienst van het Boswezen (Dinas Kehutanan)	38
4 De Inspectie voor Agrarische Zaken (Inspeksi untuk Urusan Agraria)	43
5 Het Volkskredietwezen (Sistem Kredit Rakyat)	47
6 De Dienst voor Oost-Aziatische Zaken en voorgangers (Dinas Urusan Asia Timur dan pendahulunya)	51
7 J.F.R.S. van den Bossche (1819-1889)	57
8 F.N. Nieuwenhuijzen (1819-1892)	60
9 H.A.F. de Vogel (1825-1899)	64
10 A. Pruys van der Hoeven (1829-1907)	66
11 D.F.W. van Rees (1863-1934)	69
12 J.D.L. le Febvre (1870-1955)	74
13 L.C. Westenek (1872-1930)	78
14 M.B. van der Jagt (1873-1960)	83
15 W.H. van Helsdingen (1888-1985)	87
16 R.K.A. Bertsch (1890-1987)	91
17 Th.A. Fruin (1890-1964)	94
18 G. Jansen (1894-1978)	97
19 G.W. Caudri (1905-1966)	100
20 J. van Baal (1909-1992)	102
II Onderwijs en Eredienst (Pendidikan dan Ibadah)	106
21 Het Departement van Onderwijs, Eredienst (en Nijverheid) (Departemen Pendidikan, Ibadah (dan Industri))	107
22 De Adviseur voor Inlandse (en Arabische) Zaken (Penasihat untuk Urusan Pribumi (dan Arab))	115
23 De Oudheidkundige Dienst (Dinas Purbakala)	121
24 P. Scholten (1875-1946)	128
25 W.F. Theunissen (1882-1961)	132
26 J.C.A. Lichtenbelt (1884-1979)	135
27 A.M. Joekes (1885-1962)	138
28 F.M. Baron van Asbeck (1889-1968)	142
29 C. Adriaanse (1896-1964)	146
30 De Technische Hogeschool / TH Bandoeng (Sekolah Tinggi Teknik Bandung)	149
III Justitie (Kehakiman).....	155
31 De Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof (Jaksa Agung pada Mahkamah Agung)	156

32	Het Departement van Justitie (Departemen Kehakiman)	160
IV Financiën (Keuangan)		168
33	Het Departement van Financiën (Departemen Keuangan)	169
V Landbouw, Nijverheid, Handel en Economische Zaken (Pertanian, Industri Kerajinan, Perdagangan, dan Urusan Ekonomi)		175
34	Het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan)	176
35	Het Departement van Economische Zaken (Departemen Urusan Ekonomi)	182
36	J.Th. Cremer (1847-1923)	189
37	N.V. Deli-Maatschappij	193
38	Suikerpolitiek (Politik Gula)	199
39	Gouvernement en bergcultures (Pemerintah dan budidaya tanaman gunung)	207
40	Gouvernement en ondernemers (Pemerintah dan pengusaha)	218
VI Burgerlijke Openbare Werken, Gouvernementsbedrijven en Verkeer en Waterstaat (Pekerjaan Umum Sipil, Perusahaan Pemerintah, dan Lalu Lintas dan Pengairan)		228
41	Het Departement van Burgerlijke Openbare Werken (Departemen Pekerjaan Umum Sipil)	229
42	Het Departement van Gouvernementsbedrijven (Departemen Perusahaan Pemerintah)	236
43	Het Departement van Verkeer en Waterstaat (Departemen Lalu Lintas dan Pengairan)	243
Sumber dan Bibliografi		248
44	Sumber yang digunakan, dengan penjelasan	249
45	Bibliografi	263
Glosarium		283
Indeks Nama		285
Indeks Kata Kunci		292
Kolofon buku asli <i>De koloniale staat 1854-1942</i>		296
Kolofon edisi revisi <i>De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942</i>		297

De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942

Pengantar

Dalam buku panduan ini periode ± 1850 hingga ± 1940 menduduki tempat utama. Pada paruh kedua abad ke-19 telah diletakkan dasar untuk negara kolonial. Dengan adanya perubahan dalam undang-undang dasar tahun 1848, campur tangan raja terhadap tanah jajahan berakhir. Mulai saat itu, Minister van Koloniën (Menteri Urusan Tanah Jajahan) yang bertanggung jawab.

Perubahan ini tercermin dalam Regeringsreglement / RR (Peraturan Pemerintah) yang baru (1854), yang diberlakukan pada tahun 1855.¹ Pasal 64 dari Indische Grondwet (Undang-Undang Dasar Hindia) berisi ketentuan bahwa ‘verschillende takken van het algemeen bestuur’ (berbagai tugas dari pemerintahan umum) akan dikelola oleh para direktur. Mereka akan melaksanakan tugas di bawah perintah dan pengawasan dari gubernur-jenderal. Raja akan menentukan jumlah direktur, berikut tugas dan tanggung jawab mereka. Reorganisasi pemerintahan itu diberlakukan setelah diumumkannya Indische Comptabiliteitswet (Undang-Undang Perbendaharaan Hindia).² Di dalam undang-undang itu antara lain ditentukan, bahwa setiap bab anggaran pengeluaran tidak boleh mencakup lebih dari satu bagian pemerintahan umum. Jumlah departemen dan bidang pekerjaan mereka harus ditentukan dalam undang-undang. Dengan Koninklijk Besluit (Keputusan Raja) tanggal 21 September 1866³ didirikan empat departemen: Binnenlands Bestuur (Pemerintahan Dalam Negeri); Onderwijs, Eredienst en Nijverheid (Pendidikan, Ibadah, dan Industri Kerajinan); Burgerlijke Openbare Werken (Pekerjaan Umum Sipil); dan Financiën (Keuangan). Pada tahun 1870 ditambahkan lagi Justitie (Kehakiman).⁴

Departemen-departemen tersebut menggantikan keempat direktorat, yang tidak lama setelah pelaksanaan Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) diberlakukan. Dengan pembentukan departemen-departemen itu, pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih jelas. Di dalam situasi lama masalah-masalah yang berada di luar bidang kerja direktorat-direktorat, diajukan kepada seorang (*hoofd*)*commissie* (komisi kepala) yang berada di bawah kepemimpinan seorang anggota Raad van Indië (Dewan Hindia) atau dipercayakan penanganannya kepada seorang fungsionaris khusus.⁵ Meningkatnya perhatian terhadap urusan pemerintahan berkaitan dengan keputusan untuk menghentikan Cultuurstelsel secara bertahap (pasal 55 RR). Cultuurstelsel diberlakukan pada tahun 1830 dengan maksud untuk menjadikan tanah jajahan Hindia menguntungkan dengan cara mengekspor tanaman pertanian tropis. Pemerintah kala itu bertindak sebagai pengusaha, seperti halnya dalam periode VOC. Keuntungan dari penjualan produk, *batig slot* (saldo keuntungan), sebagian besar masuk dalam kas negara

¹ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1855 no. 2.

² *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1864 no. 106. Undang-undang ini diberlakukan pada tahun 1867.

³ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1866 no. 127.

⁴ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1870 no. 42.

⁵ Lihat Bab 21 dalam buku panduan ini.

Belanda. Cultuurstelsel membuat Hindia-Belanda, khususnya Jawa, menjadi bagian dari kapitalisme modern. *Geldeconomie* (Ekonomi uang) itu merasuk sampai ke tingkat pedesaan. Perkembangan ini mendorong kemakmuran dan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 50-an dan 60-an, pemerintah pelan-pelan mulai menarik diri: berbagai budidaya tanaman diberhentikan. Salah satu alasannya adalah karena kurangnya pengetahuan spesialis di kalangan pegawai pemerintahan, sedangkan pegawai di perusahaan swasta memiliki pengetahuan tersebut. Terlebih lagi, para pendukung *vrije arbeid* (kerja bebas) mendapatkan kemenangan ketika seorang pemuka di jajaran mereka, mantan produsen gula I.D. Fransen van de Putte, menjadi Minister van Koloniën (Menteri Urusan Tanah Jajahan) (1863-1866, 1872-1874). Dia berpendapat bahwa orang-orang Indonesia '*blijmoedig*' (dengan senang hati) akan membantu peningkatan kemakmuran Hindia-Belanda dan negeri Belanda apabila Belanda memerintah secara '*rechtvaardig*' (adil). Itu artinya: menghilangkan kendala yang menyulitkan pekerjaan (*gedwongen arbeid*, kerja paksa) dan merangsang perkembangan intelektual, khususnya melalui pendidikan.⁶ Sikap lugas dan bertanggung jawab itu sudah sejak lama menjadi pedoman kebijakan kolonial.

Awalnya, pengaruh badan-badan pemerintah pusat terbatas. Titik berat pekerjaan pemerintah berada di Corps Binnenlandse Bestuursambtenaren (Korps Pegawai Pemerintahan Dalam Negeri). Hal itu berubah pada sekitar tahun 1900. Krisis ekonomi yang melanda Hindia-Belanda pada kuartal terakhir abad ke-19 menjadikan pemerintah menyadari bahwa liberalisme ekonomi tidak secara otomatis menyebabkan kemakmuran bagi semua orang. Kabinet-Kuyper yang agamis, yang muncul pada bulan Agustus 1901, berpendapat bahwa *naast liefde* (cinta terhadap sesama manusia) harus menjadi dasar kebijakan kolonial. Troonrede (Pidato Raja) pada tahun itu mengandung pernyataan yang kemudian menjadi terkenal, bahwa Belanda sebagai '*Christelijke Mogendheid*' (Negara Kristen) memiliki kewajiban untuk '*geheel het regeeringsbeleid te doordringen van het besef, dat Nederland tegenover de bevolking dezer gewesten een zedelijke roeping heeft te vervullen*' (menjalankan seluruh kebijakan pemerintah dengan kesadaran, bahwa terhadap rakyat di wilayah tersebut Belanda harus memenuhi suatu panggilan moral). Pernyataan itu segera diikuti dengan persetujuan untuk mengadakan suatu penyelidikan terhadap penyebab '*mindere welvaart*' (kurangnya kemakmuran) pada penduduk Indonesia.⁷ Dengan penelitian itu dimulailah periode *Ethische Politiek* (Politik Etis) secara resmi. Menurut definisi yang dikenal, Politik Etis bertujuan menempatkan seluruh Kepulauan Nusantara di bawah otoritas pemerintah Belanda yang '*reëel*' (nyata) dan dengan di bawah pimpinan Belanda mengembangkan tanah dan rakyatnya ke arah pemerintahan mandiri dengan model Barat.⁸

⁶ Lihat N.G. Pierson (1902-1903), '*Levensbericht van I.D. Fransen van de Putte*', *Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden*, hlm. 17-79. Juga: Nationaal Archief, arsip Kabinet des Konings, kode akses 2.02.04, nomor inventaris 1627, verbal 21 September 1866-66, surat dari Minister van Koloniën (Menteri Urusan Tanah Jajahan) Fransen van de Putte kepada raja, 26 Februari 1866 no. 56.

⁷ Lihat E. van Raalte ed. (1964), *Troonredes; Openingsredes; Inhuldigingsredes 1814-1963* ('s-Gravenhage), hlm. 193-194. Juga lema *Welvaartsonderzoek* (Penelitian kemakmuran) dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, IV* (1921; Cetakan ke-2; Den Haag-Leiden), hlm. 751-758.

⁸ Lihat E.B. Locher-Scholten (1981), *Ethiek in fragmenten; Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische archipel 1877-1942* (Utrecht: Hes), hlm. 201.

‘Voogdijpolitiek’ (Politik perwalian), begitulah disebutnya oleh orang pada zaman itu, mengakibatkan adanya peluasan dan pengintensifan urusan pemerintah. Proses itu disertai dengan modernisasi dan spesialisasi. Demikianlah, pada tahun 1904 didirikan Departement van Landbouw (Departemen Pertanian), yang kemudian ditambah dengan Nijverheid en Handel (Industri Kerajinan dan Perdagangan), dan pada tahun 1907 didirikan Departement van Gouvernementsbedrijven (Departemen Perusahaan Pemerintah).⁹

Aparat negara kolonial semakin banyak menawarkan lapangan kerja bagi pegawai baru dari kalangan elite Indonesia berpendidikan barat yang berasal dari kelas (bangsawan) priyaji yang lebih rendah dan kelas menengah yang muncul.

Krisis ekonomi global pada tahun 1930 memaksa pemerintah Hindia mengambil tindakan drastis dan langkah yang lebih efektif dalam bidang sosial-ekonomi. Dalam rangka itu berlangsung reorganisasi pemerintahan besar yang ketiga pada tingkat pusat: penggantian Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan) menjadi Departement van Economische Zaken (Departemen Urusan Ekonomi), dan penggabungan antara Departement van Burgerlijke Openbare Werken (Departemen Pekerjaan Umum Sipil) dan Departement van Gouvernementsbedrijven (Departemen Perusahaan Pemerintah) menjadi Departement van Verkeer en Waterstaat (Departemen Lalu Lintas dan Pengairan) yang baru (1933).¹⁰

Di tahun 20-an dan 30-an Politik Etis mendapat tekanan. Hal itu menyebabkan negara kolonial kehilangan dukungan sosial. Guncangan yang disebabkan Perang Dunia Pertama dan Revolusi Rusia di kalangan luas, membuat munculnya kebijakan yang menempatkan penegakan wibawa Belanda sebagai hal utama. Krisis ekonomi 1920 dan 1930 memperkuat kecenderungan itu. Penghematan yang drastis meredam program-program reorganisasi. Ketenangan dan ketertiban dianggap sebagai syarat yang penting untuk menarik investor. Dalam hubungan itu, seorang mantan Adviseur voor Inlandse Zaken (Penasihat untuk Urusan Pribumi) menyebutnya sebagai *politiestaat* (negara kepolisian).¹¹ Kalangan elite pemerintahan Indonesia dan nasionalis Indonesia berbalik melawan penguasa kolonial.

⁹ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1904 no. 380; 1907 no. 406; 1911 no. 467 dan 480.

¹⁰ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1933 no. 509.

¹¹ Lihat Bab 22 dalam buku panduan ini.

Penjelasan

The possibility of transcendence of cultural limits is ... the single most important fact about human life (E. Gellner 1998)¹²

Kutipan dari Gellner tersebut cocok untuk panduan penelitian tentang arsip kolonial. Arsip-arsip tersebut memuat catatan tertulis pertemuan-pertemuan dalam konteks kolonial. Pada abad ke-19 dan 20, Belanda mempunyai kepentingan di Asia, Afrika, dan Amerika. Buku panduan ini membahas arsip-arsip dengan segala berkasnya yang berhubungan dengan Kepulauan Nusantara / Indonesia. Dalam kategori tersebut ‘Archief van het Ministerie van Koloniën 1814-1963’ (Arsip Kementerian Urusan Tanah Jajahan tahun 1814-1963) menduduki tempat penting. Arsip yang berada di Nationaal Archief / Arsip Nasional Den Haag (sebelum tahun 2002 disebut Algemeen Rijksarchief) itu, dilengkapi dengan *particuliere archieven* (arsip pribadi) dari para pegawai pemerintahan, perusahaan budidaya tanaman, dan bank-bank: kesemua bahan data itu panjangnya sekitar 3 km. Sejak tahun 1983, lebih dari 200 meter arsip itu diperdagangkan sebagai publikasi mikro untuk kebutuhan universitas dan lembaga penelitian luar negeri. Yang termasuk dalam publikasi ini adalah seri-seri yang sering dipakai seperti *Memories van Overgave* (Memori Serah-Terima) dan *mailrapporten* (laporan surat).

Pada tahun 1983 terbit buku panduan *Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands* yang disusun oleh F.G.P. Jaquet.¹³ Buku panduan itu merupakan buku paparan arsip Belanda yang pertama untuk wilayah itu. Arsip-arsip yang ada di dalamnya diatur menurut tempat arsip itu tersimpan. Pada setiap arsip ada informasi tentang ukuran, aksesibilitas, pembentuk arsip, isi, dan metode pencarian. Arsip-arsip ‘Hindia’ dari Algemeen Rijksarchief menduduki tempat yang penting dalam buku panduan itu: arsip-arsip itu banyak dicari. Pada tahun 2004, F.J.M. Otten mempublikasikan *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940*.¹⁴ Dalam bab yang khusus diperuntukkan Ministerie van Koloniën, ia membahas organisasi, tugas, dan penyusunan arsip. Berkas-berkas itu disusun sesuai dengan apa yang disebut *verbaalstelsel* (sistem verbal), suatu rangkaian kronologis berdasarkan tanggal penyelesaian. Mencari informasi dalam *verbaalarchief* (arsip verbal) dimungkinkan apabila diketahui kapan seseorang itu bertindak atau kapan suatu masalah itu terjadi. Otten membahas berbagai seri verbal, akses-akses asli pada masa itu dan juga akses-akses yang dibuat belakangan, seri-seri tersendiri yang tidak dimasukkan ke dalam verbal, seperti *mailrapporten* dan *Memories van Overgave*

¹² E. Gellner (1998), *Language and solitude. Wittgenstein, Malinowski and the Habsburg dilemma* (Cambridge University Press), hlm. 187.

¹³ München: Saur. Buku panduan ini merupakan bagian dari seri paparan arsip tentang Afrika Utara, Asia, dan Oseania, yang diterbitkan di bawah pengawasan Internationale Archiefraad (Dewan Arsip Internasional).

¹⁴ Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Buku panduan ini merupakan bagian dari seri panduan penelitian yang diterbitkan oleh Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Den Haag).

yang tadi telah disebutkan, dan *kaarten- en tekeningenmateriaal* (bahan-bahan kartu dan gambar).¹⁵

Ministeriearchief (arsip kementerian) terkait dengan isinya, juga dibuat lebih mudah pengaksesannya. Pada tahun 1960 Historisch Genootschap (Ikatan Sejarah) memberikan tugas kepada suatu komisi untuk menerbitkan sumber-sumber yang berkaitan dengan sejarah Hindia-Belanda sekitar tahun 1900-1942. Periode itu dikenal sebagai periode *Ethische Politiek* (Politik Etis), yang bertujuan meningkatkan masyarakat pribumi dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya secara lebih sistematis daripada sebelumnya.¹⁶ Publikasi-publikasi sumber tersebut memiliki ciri apologetis: memberikan imbalan terhadap penulisan sejarah ‘tendensius’ tentang Indonesia di luar negeri.¹⁷ Pada tahun 1963-1982 para mantan pegawai pemerintahan kolonial menyusun publikasi-publikasi sumber mengenai ‘onderwijsbeleid’ (kebijakan pendidikan), ‘staatkundige ontwikkeling’ (pengembangan kenegaraan), ‘nationalistische beweging’ (gerakan nasionalis), dan ‘economisch beleid’ (kebijakan ekonomi).¹⁸ Tempat ditemukannya dokumen yang dimuat, juga berlaku sebagai titik awal untuk penelitian lebih lanjut.

Dengan buku panduan penelitian ini diupayakan agar isi arsip *Ministerie van Koloniën* dapat diakses dari sudut pandang institusional: aparat pemerintahan kolonial Hindia. Buku panduan ini berisi ‘biografi-biografi’ singkat dari *departementen van algemeen bestuur* (departemen-departemen pemerintahan umum), beberapa *gouvernementsdiensten* (dinas pemerintah), dan *regeringsadviseurs* (penasihat-penasihat pemerintah). Sejarah dari organisasi-organisasi ini dan para fungsionarisnya ditempatkan dalam pengembangan negara kolonial: untuk hal ini dibahas dalam bab tersendiri. Sebagian dari laporan, surat, dan advis yang diberikan kepada gubernur-jenderal oleh para kepala departemen, kepala dinas, dan penasihat, dikirimkan dari Batavia ke kementerian di Den Haag. Setelah ditangani, berkas-berkas itu disimpan dalam arsip. Untuk mencari berkas-berkas itu harus digunakan *indices* (indeks). Indeks itu memperlihatkan berkas-berkas yang dikelompokkan per rubrik dengan menyebutkan tanggal dan nomor selesai ditangani. Dalam buku panduan dibuat suatu pengaitan antara tugas dan wewenang dari dinas-dinas dan para fungsionaris di satu sisi dan di sisi lainnya dengan judul rubrik dalam indeks. Acuan-acuan hanya memberikan indikasi, tidak mencakup keseluruhan. Acuan-acuan itu berhubungan dengan indeks dari *openbaar verbaalarchief* (arsip verbal umum), yang hampir selalu menjadi tempat pertama untuk mencari. Penataan *ministeriearchief* dipaparkan secara rinci oleh Otten.

¹⁵ Untuk informasi lebih rinci lihat Bab 44 ‘Geraadpleegde bronnen, met toelichting’ (Sumber yang digunakan, dengan penjelasan) dalam buku panduan ini.

¹⁶ Lihat dalam Kata Pengantar pada S.L. van der Wal ed. (1963), *Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940*; Groningen: Wolters, hlm. IX: ‘... meer stelselmatig dan te voren de verheffing van de inheemse bevolking in economisch, sociaal en cultureel opzicht’.

¹⁷ Lihat E.B. Locher-Scholten (1996), ‘Een bronnenpublicatie als signaal van koloniaal trauma? Ontstaan en ontvangst van de Officiële bescheiden’, *Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden* Vol. 111 No. 4, hlm. 473-492, catatan 13.

¹⁸ Lihat untuk informasi lengkapnya di Bab 44 dalam buku panduan ini.

Penelitian arsip tampak seperti permainan merangkai: tidak semua berkas yang dibutuhkan oleh peneliti harus ada dalam SATU arsip. Untuk sejarah Indonesia, ‘Archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken’ (Arsip Kementerian Luar Negeri) juga penting: dalam sejumlah kasus yang terjadi ada perujukan ke sana. Nationaal Archief Den Haag juga mengelola ratusan arsip pribadi, terutama arsip dari pegawai pemerintah. Arsip-arsip pribadi itu memberikan kemungkinan untuk mendekati permasalahan melalui individu, wilayah, atau (sub)topik. Jika diinginkan, dari arsip-arsip itu bisa dilanjutkan ke penelitian *departementsarchief* (arsip departemen): lihat pada acuan. Sejumlah fungsionaris mendapatkan 'biografi' mereka sendiri. Demikianlah, upaya saya memberikan pengertian akan keberagaman dari fungsi-fungsi dan arsip-arsip itu.

Perusahaan terutama ditangani berdasarkan organisasi pelayang, seperti Ondernemersraad (Dewan Pengusaha).

Di samping arsip, publikasi pemerintah yang tercetak mengandung harta karun akan data. Anggaran Hindia ditentukan di Belanda. Laporan diskusi pembicaraan dimuat dalam *Handelingen van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal* (Notula dari Majelis Tinggi dan Rendah pada Dewan Perwakilan Rakyat). Perkembangan Hindia-Belanda dari *zelfbestuur* (kepemerintahan wilayah yang otonom) ke arah pemerintahan model Barat, yang ditetapkan setelah tahun 1900, menyebabkan terbentuknya *plaatselijke en gewestelijke raden* (dewan lokal dan regional), kemudian *provinciale-, regentschaps- en gemeenteraden* (dewan provinsi, dewan kabupaten, dan dewan kotapraja), dan sampai terbentuknya *Volksraad* (Dewan Rakyat). *Handelingen* (Notula) dan *Verslagen* (Laporan) dari badan-badan tersebut juga ada di perpustakaan Belanda. Dalam setiap bab dimuat sumber asli yang tercetak pada masa itu dan daftar pustaka yang relevan.

Untuk kebutuhan peneliti Indonesia, teks asli dalam buku ini disesuaikan sebagai berikut:

- Di setiap bab pada pencantuman pertama dari suatu penyebutan fungsi atau jabatan; nama lembaga; nama undang-undang dan peraturan lain; istilah hukum dan ketatanegaraan; penyebutan periode tertentu dalam sejarah; dan istilah arsip, diberikan terjemahan Indonesianya sesudah penyebutan Belandanya.
- Di setiap bab pada paragraf ‘Arsip dan sumber tercetak’, judul-judul rubrik dari Indeks-indeks diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Juga pada Bab 44 setiap judul rubrik dilengkapi dengan terjemahan Indonesianya.
- Judul publikasi, yang diletakkan di bawah ‘Sumber asli yang tercetak’, juga disertai dengan terjemahan Indonesianya.
- Semua publikasi, yang tercantum di bawah ‘Daftar Pustaka’ dari setiap bab, juga dapat ditemukan dalam Bab 45 (Bibliografi), dengan sejumlah karya umum yang memberikan gambaran.
- Beberapa istilah Belanda yang seringkali muncul dalam teks, dimuat dalam Glosarium. Buku panduan ini tidak perlu dibaca secara sistematis dari awal sampai akhir; pengguna akan sering menemukan acuan ke publikasi yang sama.

Buku panduan ini disusun dengan tujuan untuk memperkenalkan para peneliti tentang *ministeriearchief Koloniën* (Arsip Kementerian Urusan Tanah Jajahan). Dalam buku ini diupayakan memperlihatkan struktur-struktur dan jaringan hubungan dan merangsang timbulnya perhatian dan minat untuk mengetahui lebih lanjut data yang kaya ini.

Berkas-berkas arsip membawa peneliti masa kini berkontak dengan orang-orang dari masa lalu, dengan motivasi dan ambisi mereka. *De gordel van smaragd* (sabuk zamrud)¹⁹ membuat orang Eropa yang pergi ke sana menjadi terharu. Dari warga asing, mereka menjadi *Indisch burger* (warga Hindia), sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh wartawan abad ke-19 W.L. Ritter. Setelah meninggalkan Hindia, masih terbekas rasa *nostalgie tropique* (nostalgia daerah tropika), yang oleh seorang mantan pegawai pemerintah Hindia-Belanda diungkapkan dengan pepatah ‘Djaoeh dari mata, dekat di hati’.²⁰ Aspek itu juga tersirat dalam bahan arsip itu.

Leiden, Agustus 2014

Francien van Anrooij

¹⁹ Sebutan untuk Hindia-Belanda.

²⁰ Rob Nieuwenhuys (1973), *Oost-Indische spiegel; Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden* (Amsterdam: Querido), hlm. 12-13.

Rob Nieuwenhuys (1974), ‘Voorwoord’, dalam kedua bunga rampai *Het laat je niet los* dan *Om nooit te vergeten; Een keuze uit de Indisch-Nederlandse letterkunde van 1935 tot heden*, yang diterbitkan sendiri (2 jilid; Amsterdam).

R.C. Kwantes (1977), ‘Taga’samo tinggi, doedoeé samo randah’, dalam: S.L. van der Wal (ed.), *Besturen overzee; Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië* (Franeker: Wever), hlm. 235.



Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat, bupati di Jawa.(Djajadiningrat 1936: di antara hlm. 288 dan 289). Lihat Bab 2 dalam buku panduan ini.

I Binnenlands Bestuur (Pemerintahan Dalam Negeri)

1 **Het Departement van Binnenlands Bestuur (Departemen Pemerintahan Dalam Negeri)**

Dalam Koninklijk Besluit (Keputusan Raja) tanggal 21 September 1866 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1866 no. 127) dibentuk empat departemen pemerintahan umum. Departement van Binnenlands Bestuur / BB (Departemen Pemerintahan Dalam Negeri) adalah salah satu di antaranya. Tujuan pendirian departemen tersebut adalah agar ada penstrukturan kebijakan dalam negeri yang lebih baik. Badan pemerintahan yang baru itu mempunyai lapangan kerja yang luas, sepenuhnya seperti yang diharapkan oleh Minister van Koloniën (Menteri Urusan Tanah Jajahan) I.D. Fransen van de Putte (1863-1866, 1872-1874). Sejumlah tugas menyangkut pendirian dan pengelolaan pemerintahan dalam negeri, melakukan kerja sama dengan dan mengawasi pegawai pemerintah Eropa dan pribumi, dan melakukan penjalinan hubungan dengan *inlandse vorsten en groten* (raja dan petinggi pribumi). Sistem pemerintahan bersifat dualistis. Pasal 67 dari Regeringsreglement / RR (Peraturan Pemerintah) memutuskan bahwa penduduk pribumi, selama situasinya memungkinkan, sebisa mungkin harus dibiarkan di bawah wewenang kepala daerah mereka sendiri. Para kepala itu harus diangkat atau diakui oleh gubernur-jenderal. Dengan cara demikian, di daerah pemerintahan-langsung Jawa dan Madura para bupati diangkat, dan dengan cara yang sama para kepala Vorstenlanden (Keempat Wilayah Kerajaan)²¹ di Jawa dan para kepala wilayah otonom (kebanyakan di Buitengewesten ‘Wilayah Luar Jawa dan Madura’) diakui. Para pegawai pemerintah pribumi dan *zelfbestuurders* (para pemimpin wilayah yang otonom), bekerja sama dengan kolega Eropa mereka pada berbagai tataran.

Departemen juga mengambil alih tugas berbagai direktorat, yang bekerja pada masa Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa), terutama Directie der Cultures en Landelijke Inkomsten (Direktorat Budidaya Tanaman dan Pendapatan Negeri): menyangkut antara lain ‘gouvernementscultures, meer in het algemeen de landbouw, de veeteelt, het bosbeheer en de herendiensten’ (budidaya tanaman pemerintah, yang lebih umum adalah pertanian, peternakan, pengelolaan hutan, dan kerja pengabdian); ‘het verhuren van gouvernementgrondten (aan particuliere ondernemers)’ (penyewaan tanah pemerintah kepada pengusaha swasta); ‘kadastrale aangelegenheden en statistiek’ (perihal kadastral dan statistik); ‘de opslag en verkoop van gouvernementproducten, het beheer van ’s lands pakhuizen’ (penyimpanan dan pembelian produk-produk pemerintah, pengelolaan gudang negeri); ‘de brieven- en paardenposterij, de pakketvaart, het vervoer van gouvernementreizigers’ (dinas pos persuratan berkuda, dinas pelayaran (pelayanan pos), angkutan bagi pegawai pemerintahan yang melakukan perjalanan dinas); ‘schutterijen en inlandse korpsen’ (pertahanan sipil / hansip dan korps pribumi); ‘pandelingschap (schuldslavernij)’ (perbudakan); ‘zeeroverij’ (perompakan); ‘strandvonderij’ (perihal barang temuan pantai); ‘de uitroeijng van tijgers en krokodillen’ (pemberantasan harimau dan buaya).

²¹ Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kerajaan Mangkunegara, dan Kerajaan Paku Alam.

Wewenang departemen sebagai badan pemerintahan pusat adalah terbatas, terutama pada masa sebelum tahun 1900. Keterbatasan ini sebagian berkaitan dengan kawasan geografisnya. Pada tahun '60-an abad ke-19 pemerintah kolonial membatasi dirinya terutama pada Jawa dan Madura.

Keterbatasan yang kedua menyangkut hubungan dengan para kepala pemerintahan daerah. Para kepala ini langsung di bawah gubernur-jenderal. Kepala-kepala departemen boleh memberikan arahan untuk melaksanakan aturan umum, tetapi para kepala pemerintahan daerah itu memiliki hak melakukan protes kepada penguasa negeri. Surat dan laporan yang ditujukan kepada gubernur-jenderal, pertama-tama dibahas lebih dahulu di departemen yang berkaitan dengan permasalahan itu, dan selanjutnya dengan ulasan dan advis, surat dan laporan itu diteruskan ke gubernur-jenderal.

Namun, pengaruh Departemen BB terhadap pegawai pemerintah lebih besar daripada pengaruh dari departemen lainnya. Urusan agraria merupakan unsur utama dalam pekerjaan pemerintahan di tempat. Bagian pekerjaan itu menjadi makin penting setelah adanya Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) pada tahun 1870 yang memungkinkan pengusaha swasta dapat menyewa tanah dari pemerintah atau swasta, atau mendapatkannya sebagai tanah erfpach. Pelaksanaan undang-undang tersebut memakan banyak pekerjaan, juga dalam bidang kadastral dan statistik. Sebaliknya, 'pandelingschap' (perbudakan) dan 'strandvonderij' (perihal barang temuan pantai) dipindahkan ke Departement van Justitie (Departemen Kehakiman) yang didirikan pada tahun 1870.

Krisis ekonomi pada akhir abad ke-19 merangsang modernisasi dan spesialisasi. Perkembangan ini juga ada dampaknya pada Departemen BB. Tugas-tugas dalam bidang agraria, antara lain budidaya tanaman pemerintah, pertanian, peternakan, dan perhutanan, diserahkan kepada departemen yang baru dibentuk, yaitu Departement van Landbouw (Departemen Pertanian) (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1904 no. 380). Turut campur yang intensif dalam penataan undang-undang dan peraturan agraria yang semakin rumit itu menyebabkan pada tahun 1903 dibentuk dinas Inspectie voor Agrarische Zaken (Inspeksi untuk Urusan Agraria) yang harus mengurus keseragaman kebijakan. Dinas Inspeksi Urusan Agraria itu terkait dengan Departemen BB. Ketika menjadi jelas bahwa untuk 'volkskredietwezen' (sistem kredit rakyat) dan 'volksonderwijs' (pendidikan rakyat) diperlukan pengetahuan spesialis dan penanganan struktural, maka tanggung jawab untuk bidang kebijakan tersebut dicabut dari korps pegawai pemerintah dan dimasukkan ke Departemen BB.

Pelaksanaan Decentralisatiewet (Undang-Undang Desentralisasi) (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1903 no. 329) juga merupakan salah satu tugas dari departemen itu. Undang-undang itu dimaksudkan agar masyarakat di tingkat lokal dan regional lebih dapat ikut berpartisipasi dengan adanya dewan setempat dan daerah. Sejak tahun 1908 departemen itu melalui Afdeling Bestuurszaken voor de Buitengewesten (Bagian Urusan Pemerintahan Wilayah Luar Jawa dan Madura) mempunyai pengaruh yang lebih besar di Wilayah Luar

Jawa dan Madura. Bagian Urusan Kepemerintahan itu memberi advis kepada gubernur-jenderal tentang semua hal, juga tentang urusan kenegaraan termasuk masalah politik seperti kontrak politik atau Korte Verklaringen (Perjanjian Pendek), yang dilakukan dengan *zelfbestuurders* (para pemimpin wilayah yang otonom). Sebelum tahun 1908 urusan-urusan itu ditangani oleh Algemene Secretarie (Sekretariat Umum), kabinet penguasa negeri. Bagian yang baru itu juga menangani pemeriksaan akhir pengelolaan 'landschapskas' (kantor perbendaharaan kas wilayah). Kantor-kantor itu didirikan pada tahun 1902 untuk memisahkan uang milik umum dari pendapatan dan pengeluaran swasta dari para pemimpin wilayah yang otonom (*zelfbestuurders*).

Di bawah bagian itu dibentuk Encyclopaedisch Bureau, yang berusaha membangkitkan minat pengusaha di wilayah-wilayah itu dengan mempublikasikan bahan dari pelbagai berkas resmi. Kepala bagian itu, yang disebut Adviseur (Penasihat), berhubungan langsung dengan direktur BB, para kepala departemen lain, dan pemerintah. Jika ada ketidaksepakatan, kepala bagian itu harus mengemukakan pendapatnya secara tertulis, sehingga pemerintah bisa memaklumi masalah tersebut.

Pada tahun 1916 dan 1922 dua penasihat yang penting ditambahkan pada Departemen BB, yaitu penasihat untuk Urusan Cina dan penasihat untuk Urusan Jepang. Perkembangan yang terjadi di Cina dan Jepang dan dampaknya terhadap Hindia-Belanda menyebabkan perlunya penanganan kebijakan di tingkat pusat.

Setelah Wet op de Bestuurs Hervorming (Undang-Undang Reformasi Pemerintahan) diumumkan (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1922 no. 216), Departemen BB dibebani dengan pelaksanaan undang-undang tersebut. Undang-Undang Reformasi itu susunannya lebih luas dari Undang-Undang Desentralisasi yang pernah disebut sebelumnya. Reformasi, yang telah diterapkan untuk Nederlandse Provinciewet (Undang-Undang Provinsi Belanda), memiliki tujuan kenegaraan dan administratif. Dengan perubahan pembagian teritorial yang ada, maka masyarakat hukum adat otonom yang lebih besar akan tercipta. Masyarakat hukum adat itu akan bisa mengambil alih tugas-tugas dari badan pemerintah pusat, termasuk sarana keuangannya. Perubahan itu juga akan berdampak pada aparat pemerintah setempat. Dengan demikian, wewenang pegawai pemerintahan Eropa akan dialihkan ke pegawai BB pribumi. Oleh karena undang-undang itu diterapkan dalam skala kecil (baik dalam hal kenegaraan maupun administratif), maka Departemen BB tetap mempunyai pengaruh.

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip Kementerian Urusan Tanah Jajahan mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.²²

²² Akses arsip kementerian tersedia dalam bentuk microfiche. Lihat Bab 44 dalam buku panduan ini.

Untuk bab ini dilakukan penelitian arsip. Berkas-berkas yang tercantum di bawah ini yang menyangkut organisasi Departemen BB, tertera dalam akses (*indices* 'indeks') di *openbaar archief* (arsip umum), dalam rubrik-rubrik berikut: 'Regering der Koloniën' (Pemerintah Tanah Jajahan); 'Drukkerijen en dagbladen' (Percetakan dan surat kabar harian); 'Justitiwezen in Oost-Indië' (Sistem yustisi di Hindia-Timur); 'Belastingen in Oost-Indië' (Pajak di Hindia-Timur); 'Geneeskundige dienst in de Koloniën' (Dinas kesehatan di tanah jajahan); 'Landbouw in het algemeen' (Pertanian secara umum); 'Departementen van algemeen bestuur' (Departemen-departemen pemerintahan umum); 'Bestuur, binnenlands' (Pemerintahan dalam negeri).

Untuk bab ini digunakan *verbalen / exhibita* (arsip-arsip verbal / pelbagai ekshibitum): 26 Februari 1866 no. 56; 19 Juni 1869 no. 29; 9 Desember 1869 no. 38; 20 Agustus 1870 no. 1a; 26 Januari 1871 no. 33; 11 Juli 1877 no. 3; 2 Oktober 1877 no. 16; 13 November 1884 no. 18; 20 Juli 1904 no. 64; 25 Juli 1904 no. 16; 25 Maret 1905 no. 15 / 918; 13 Desember 1906 no. 45; 20 Desember 1906 no. 61; 18 April 1907 no. 32; 24 Mei 1907 no. 47; 30 Desember 1909 no. 45; 2 Februari 1910 no. 19; 7 Februari 1911 no. 12; 21 Juli 1911 no. 8; 11 September 1918 no. 26; 24 September 1918 no. 43; 31 Juli 1918 nr. 30; 11 September 1918 no. 26; 6 September 1924 no. 59.

Berkas-berkas tentang pelaksanaan tugas Departemen BB (secara garis besar), advis dan laporan dari direktur BB dapat ditemukan dengan menggunakan akses (*indices* 'indeks') di arsip umum, dalam rubrik-rubrik berikut:

- a. Periode 1850-1900** (kode akses 2.10.02; 2.10.10): 'Afstand en verhuringen van land' (Pelepasan dan penyewaan tanah); 'Agrarische aangelegenheden' (Urusan Agraria); 'Benoeming van ambtenaren' (Pengangkatan pegawai pemerintah); 'Belastingen' (Perpajakan); 'Binnenlandse aangelegenheden' (Urusan dalam negeri); 'Boswezen' (Perhutanan); 'Cultures (ook gespecificeerd op soort)' (Pembudidayaan tanaman; juga dispesifikasikan berdasarkan jenisnya); 'Drukkerijen en dagbladen' (Percetakan dan surat kabar harian); 'Gewestelijk en plaatselijk Europees bestuur' (Pengurus daerah dan setempat Eropa); 'Herendiensten' (Kerja pengabdian); 'Inlands bestuur en politie' (Pemerintahan pribumi dan kepolisian); 'Inlandse vorsten en inlandse hoofden' (Raja dan kepala pribumi); 'Justitiwezen' (Sistem yustisi); 'Koloniale ambtenaren in het algemeen' (Pegawai kolonial pada umumnya); 'Landbouw en veeteelt' (Pertanian dan peternakan); 'Landelijke inkomsten' (Pendapatan Negeri); 'Nationale militie en schutterijen' (Milisi nasional dan pertahanan sipil); 'Onlusten' (Kerusuhan); 'Oost-Indische archipel (ook gespecificeerd op regio)' (Kepulauan Hindia-Timur; juga dispesifikasikan berdasarkan wilayahnya); 'Postwezen' (Perposan); 'Regering der koloniën' (Pemerintah tanah jajahan); 'Slavenstand' (Kaum budak), 'Slavenhandel' (perdagangan budak); 'Statistiek' (Statistik); 'Transportwezen' (Sistem transportasi); 'Verkoop van producten' (Penjualan produk); 'Zeerooverijen / zeeroof' (Perompakan); 'Zeevrachten en transporten' (Angkutan dan transportasi laut).

- b. Periode setelah 1900** (kode akses 2.10.36.011, 2.10.36.04, 2.10.36.02; 2.10.36.03):
'Agrarische aangelegenheden' (Urusan Agraria); 'Bestuur (Europees; Inlands)' (Pemerintahan Eropa; Pribumi); 'Betrekkingen met inlandse vorsten en staten' (Hubungan dengan raja dan pemerintahan pribumi); 'Chineze aangelegenheden (-zaken)' (Perihal / Urusan Cina); 'Decentralisatie' (Desentralisasi); 'Departementen van algemeen bestuur' (Departemen-departemen pemerintahan umum); 'Herendiensten' (Kerja pengabdian); 'Inkomsten' (Pendapatan); 'Inlandsen gemeenten' (Masyarakat adat); 'Inlandse zelfbesturen' (Kepemerintahan wilayah otonom pribumi); 'Japanse zaken' (Urusan Jepang); 'Kadaster' (Kadaster); 'Landbouw' (Pertanian); 'Nijverheid' (Industri kerajinan); 'Onderwijs (inlands)' (Pendidikan pribumi); 'Onteigening(-sordonnantie)' (Ordonansi pencabutan hak milik); 'Pakketvaart / stoomwezen' (Dinas pelayaran pelayanan pos / sistem tenaga uap), 'Politie' (Kepolisian); 'Reisreglement' (Peraturan perjalanan); 'Statistiek' (Statistik); 'Veeteelt' (Peternakan); 'Volkskredietwezen' (Sistem kredit rakyat); 'Vreemde Oosterlingen' (Orang Timur Asing).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan menggunakan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang Departemen BB setelah tahun 1921, akses *4de afdeling* (bagian ke-4) adalah penting: lihat kode akses 2.10.36.011.

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia) beserta *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 juga berisi bahan yang penting. Untuk periode 1850-1900 lihat kode akses 2.10.02, untuk periode setelah tahun 1900 lihat kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

Advis dan laporan direktur BB dimuat dalam publikasi sumber:

- P. Creutzberg ed. (1972-1975), *Het economisch beleid in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Wolters-Noordhoff).
- R. C. Kwantes ed. (1975-1982), *De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Tjeenk Willink).
- S. L. van der Wal ed. (1963), *Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940* (Groningen: Wolters).
- S. L. van der Wal ed. (1964-1965), *De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië* (2 jilid; Groningen: Wolters).
- S. L. van der Wal ed. (1967), *De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indië* (Groningen: Wolters).

2. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta, melalui halaman ikhtisar Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Untuk laporan masing-masing dinas lihat Bab 3 s/d 6 dalam buku panduan ini.

Handleidingen ten dienste van de Inlandsche bestuursambtenaren op Java en Madoera (Panduan untuk pegawai pemerintah pribumi di Jawa dan Madura), yang diterbitkan oleh Departemen BB (1918-1931; Batavia: Landsdrukkerij).

Catatan: seri ini berisi bagian-bagian mengenai antara lain ‘Mohammedaans-Inlandse zaken’ (Urusan Muslim pribumi); ‘Erfpacht’ (erfpah); ‘Desahoofdverkiezingen’ (Pemilihan kepala desa); ‘Opiumregie’ (Pengaturan opium); ‘Bepalingen betreffende post-, telegraaf en telefoondiensten’ (Ketentuan tentang dinas pos, telegraf, dan telepon).

Handelingen en bijlagen van de Volksraad (Berkas dan lampiran dari Dewan Rakyat).

Di dalamnya dimuat antara lain teks-teks pidato direktur BB.

Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen / Mededeelingen van de Afdeling Bestuurszaken der Buitengewesten (Laporan dari Biro Urusan Pemerintahan Wilayah Luar Jawa dan Madura / Laporan Bagian Urusan Kepemerintahan Wilayah Luar Jawa dan Madura) (1911-1931; Den Haag, Weltevreden).

Catatan: nomor 10, jilid 1 dari *Mededeelingen* berjudul *De Buitenbezittingen 1904 tot 1914* (‘Wilayah Luar Jawa dan Madura tahun 1904 s/d 1914’, diolah oleh Encyclopaedisch Bureau, Semarang, 1915).

Staatsblad van Nederlandsch-Indië, met Bijbladen (Lembaran Negara Hindia-Belanda, dengan Lembaran Tambahan).

Untuk berkas ini lihat: *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1866 no. 127; 1869 no. 105; 1870 no. 42; 1871 no. 92; 1872 no. 19; 1878 no. 11; 1885 no. 7; 1904 no. 380; 1909 no. 540; 1910 no. 253; 1911 no. 467; 1916 no. 377; 1919 no. 2; 1924 no. 576. *Bijblad* no. 7145; 7658; 7737.

Daftar Pustaka

Bongenaar, Karel E.M. [2005], *De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië 1855-1942* (Zutphen: Walburg Pers).

Bertsch, R.K.A. (1941), ‘Het binnenlandsch bestuur’, dalam: W.H. van Helsdingen dan H. Hogenberk ed., *Daar wèrd wat groots verricht ... Nederlandsch-Indië in de XXste eeuw* (Amsterdam: Elsevier), hlm. 458-470.

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; ’s-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *Bestuur* (I, hlm. 279-288), dan lema *Departementen van algemeen bestuur* (I, hlm. 585-588).

Kemp, P.H. van der (1899), ‘Het departement van Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indië’, *Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur* XVII, hlm. 277-303.

Kleintjes, Ph. (1933), *Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië* (Jilid 2; Cetakan ke-6; Amsterdam: De Bussy), Bab IX, XIV.

Waal, E. de (1867), *Aanteekeningen over koloniale onderwerpen, XI, De departementen van algemeen bestuur in Nederlandsch-Indië* ('s-Gravenhage: Nijhoff).

2 Het bestuur in het binnenland (Pemerintahan di dalam negeri)

Binnenlands Bestuur / BB (Pemerintahan Dalam Negeri) di Hindia-Belanda adalah dualistik. Ada dua korps pemerintahan: pribumi dan Eropa. Pasal 67 dari Regeringsreglement / RR (Peraturan Pemerintah) menentukan bahwa masyarakat pribumi sedapat mungkin harus diperintah oleh para kepala mereka sendiri. Di daerah pemerintahan langsung para kepala ini diangkat oleh gubernur-jenderal dan di daerah-daerah pemerintahan tidak langsung mereka diakui.

Jawa dan Madura sebagian besarnya diperintah langsung. Kesatuan pemerintahan pribumi yang terbesar adalah kabupaten: di awal abad ke-20 ada 70. Para bupati diangkat dari keluarga bangsawan yang tua, kebanyakan berdasarkan penggantian karena keturunan. Bupati mengepalai para pegawai pemerintah pribumi dalam daerah jabatannya. Di bawahnya adalah patih (pejabat penggantinya, juga diangkat oleh gubernur-jenderal), wedono (kepala distrik), dan asisten-wedono (kepala anak distrik). Menurut instruksi tahun 1859 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1859 no. 102) salah satu tugas bupati adalah menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan; mengurus pelaksanaan peraturan, ditujukan bagi masyarakat pribumi; mengembangkan pertanian dan perawatan kesehatan (yang terakhir ini dengan menstimulasi kupok atau vaksinasi cacar); mengawasi sekolah-sekolah pribumi dan para pemuka agama Islam. Tugas-tugas pemerintahan ini dikombinasikan dengan tugas-tugas di daerah pengadilan pribumi: bupati adalah hakim kabupaten dan duduk di dewan negara. Ia harus memiliki pengetahuan yang mendasar akan daerah jabatannya dan pengetahuan itu harus diteruskan kepada para pegawai pemerintah Eropa: residen, 'kakak laki-lakinya', asisten-residen, dan pengawas. Ia tidak diperbolehkan secara mandiri menetapkan peraturan (pemerintah) tetapi hanya diperbolehkan mengajukan usulan.

Termasuk daerah pemerintahan langsung adalah Vorstenlanden (Keempat Negara Kerajaan)²³ di Jawa dan wilayah otonom di Buitengewesten (Wilayah Luar Jawa dan Madura). Para pemimpin wilayah otonom itu menjalin perjanjian dengan gubernur-jenderal sebagai wakil dari kepala negara di Belanda. Dalam perjanjian ini mereka melepas hak kedaulatan untuk selanjutnya melaksanakan pemerintahan di daerah mereka sebagai Leenman (Vasal). Perjanjian semacam itu, yang mencakup hak dan kewajiban timbal balik, secara berkala diperbaharui. Di samping Lang Contract (Kontrak Panjang) di tahun 90-an abad ke-19 beredar Korte Verklaring (Perjanjian Pendek), yang menjadikan *zelfbestuurder* (pemimpin wilayah yang otonom) lebih tergantung kepada pemerintah Hindia. Perjanjian-perjanjian itu menentukan keleluasaan dari para pegawai pemerintah Eropa. Setelah tahun 1900 keleluasaan

²³ Juga lihat penjelasan pada catatan kaki 1 dari Bab 1 dalam buku panduan ini.

itu menjadi lebih besar, di saat *zelfbesturen* (kepemerintahan wilayah yang otonom) terus lebih disesuaikan dalam negara kolonial yang berkembang.

Dalam bab ini perkembangan-perkembangan di daerah pemerintahan langsung menjadi pokok perhatian utama.

Dalam korps pegawai pemerintah Eropa, residen adalah penguasa tertinggi. Ia adalah kepala pemerintah daerah dan dalam fungsinya itu ia diangkat oleh gubernur-jenderal. Pada abad ke-20 Jawa dan Madura meliputi 17 daerah. Suatu daerah mencakup dua atau lebih kabupaten: pada umumnya perbandingannya kira-kira 1 banding 4. Semua pegawai pemerintah Eropa dan pribumi dan – jika ada – kepala-kepala Orang Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) seperti kapten, mayor, letnan Cina dan Arab, dst²⁴ dalam suatu daerah berada di bawah residen. Residen juga mengangkat para pejabat Eropa dan pribumi rendahan (mulai tingkat wedono). Berdasarkan instruksinya tahun 1859 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1859 no. 102) residen bertanggung jawab atas pelaksanaan pengaturan undang-undang dan aturan di wilayah jabatannya. Dalam hal itu ia harus memperhatikan ‘ketentuan dan perintah’ dari para direktur dari Centrale Directies / Direktorat Pusat (yang di kemudian waktu dari Departemen-departemen Pemerintahan Umum). Apabila ada perubahan pemikiran ia dapat membubarkan atau menghapus aturan-aturan itu: perihal ini harus dilaporkannya kepada gubernur-jenderal. Juga untuk acara kenegaraan, residen boleh langsung menghubungi penguasa negeri. Ia memiliki kewenangan menentukan pilihan polisional dan pembuatan aturan dan mengumumkannya di *Javasche Courant*. Ia bertanggung jawab atas keuangan daerah; ia mengatur penjagaan ketenangan, ketertiban, dan keamanan, dan juga mengatur pengembangan pertanian dan perawatan kesehatan; ia melakukan pengawasan sekolah, lembaga pengurusan orang miskin dan amal, penjara; ia adalah ketua dewan negeri pribumi dan sebagai *residentsrechter* (hakim residen) mengadili orang-orang Eropa. Dalam menjalankan fungsinya ia harus sebanyak mungkin bertumpu pada aparat pemerintah pribumi dan memperhitungkan advis bupati. Ia diharapkan menstimulasi pegawai Eropa bawahannya untuk mendalami bahasa, negeri, dan rakyatnya, dan bahkan juga untuk menyumbang peluasan pengetahuan yang ada tentang wilayah jabatannya. Tentang yang terakhir, antara lain *Memories van Overgave* (Memori Serah-Terima) menyatakan bahwa residen di saat turun dari jabatannya merancang penggantinya. Asisten-residen, diangkat oleh gubernur-jenderal, sebagai kepala pemerintah setempat mengepalai suatu bagian daerah. Bagian daerah itu dalam aturan luasnya sebesar kabupaten. Secara hierarkis pemerintahan asisten-residen sebanding dengan bupati. Kewenangannya tidak disebut dalam instruksi tersendiri, tetapi disimpulkan dari instruksi residen.

Pada akhirnya pengawas berada di bawah asisten-residen. Di Jawa dan Madura gelar menunjukkan golongan, bukan fungsinya. Pengawas tidak menjalankan wewenang. Sebagai perantara antara pemerintah Eropa dan pribumi ia menduduki posisi inti. Pekerjaannya

²⁴ Para kepala dari kelompok Orang Timur Asing diangkat oleh gubernur-jenderal di daerah-daerah tempat banyak teman senegarannya tinggal. Mereka menerima instruksi dari kepala pemerintah daerah. Tugas mereka terbatas pada penjagaan ketertiban dan keamanan dan pemungutan pajak. Mereka tidak memiliki kewenangan menetapkan ordonansi dan hukum. Sejauh diketahui, tidak ada banyak bahan pustaka tentang para pejabat pemerintah ini. Lihat Ph. Kleintjes (1933) dan M. Lohanda (2001).

meliputi antara lain menjelaskan penataan peraturan kepada para pejabat pemerintah pribumi; melakukan inspeksi budidaya tanaman, sekolah, rumah sakit, penjara, jalan, jembatan, pekerjaan irigasi; menghadiri rapat bulanan para asisten-wedono di tempat wedono dan rapat bulanan wedono di tempat bupati. Ia betul-betul pekerja lapangan.

Pengumuman RR tahun 1854 dan instruksi tahun 1859 terjadi dalam periode pergeseran tekanan dalam pelaksanaan pemerintahan kolonial. Pada pertengahan abad ke-19 di kalangan pemerintahan mulai disadari bahwa masa jaya Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) telah lewat. Sistem itu diberlakukan pada tahun 1830 dengan maksud untuk menjadikan tanah jajahan menghasilkan keuntungan melalui ekspor produk pertanian tropisnya. Pemerintah menduduki kembali peran pengusaha, seperti di masa VOC. Keuntungan, saldo kredit, sebagian besarnya masuk ke kas negara Belanda. Hindia-Belanda, terutama Jawa, masuk dalam lalu lintas dunia; perekonomian uang diperkenalkan. Proses itu mempengaruhi perkembangan sosial-ekonomi dan demografinya. Seputar tahun 1850 kelemahan-kelemahan sistem itu semakin terlihat. Pelbagai panen yang gagal menyebabkan turunnya harga dan bencana kelaparan pada rakyat. Para pegawai pemerintahan tidak dapat lagi mengimbangi perkembangan teknologi. Perusahaan gula swasta, yang dijalankan dengan efisien dan sarana modern, mencapai sukses. Lagipula dilontarkan kritik tajam atas aspek-aspek etis dari sistem tersebut, antara lain pemungutan dari para bupati. Itu semuanya menyebabkan munculnya keputusan (RR pasal 55) untuk memberhentikan Sistem Tanam Paksa dan memberikan jalan untuk inisiatif swasta. Untuk pemerintah, kepengurusan merupakan hal utama. Lembaga dari lima departemen pemerintahan umum (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1866 no. 127; 1870 no. 42) sebagai pengganti direktorat-direktorat yang ada, di antaranya direktorat budidaya tanaman dan pendapatan negeri, memperlihatkan suatu penanganan yang luas dan lebih terstruktur. Muncul lebih banyak undang-undang dan peraturan, tetapi pemerintah bersikap hati-hati: pemerintah mengikuti dan mendukung dunia usaha. Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) tahun 1870 memberikan kemungkinan bagi para pengusaha swasta untuk menyewa tanah dari pemerintah atau swasta, atau mendapatkan tanah itu dalam bentuk erfpach. Pada pelaksanaannya para pegawai pemerintah dipasang dengan tugas untuk melindungi kepentingan masyarakat pribumi. Penambahan beban tugas dan sistematisasi mengakibatkan pembagian ulang kepengurusan dari daerah pemerintahan langsung di Jawa dan Madura. Pada tahun 1874 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1874 no. 72 dan 73) batas bagian, kabupatenan, distrik, dan anak distrik ditetapkan ulang. Infrastruktur diperbaharui dan diperluas.

Dengan pembaharuan ini para pegawai pemerintah Eropa tidak kehilangan kemandirian mereka. Mereka mendapatkan lebih banyak pekerjaan. Mereka lebih sering berurusan dengan badan-badan pemerintah pusat, tetapi residen tetap memiliki hubungan langsung dengan penguasa negeri. Jaraknya begitu besar dan komunikasi berjalan kurang lancar. Kehidupan dari para pegawai pemerintah dalam negeri bervariasi, penuh petualangan dan tantangan. Di abad ke-20 periode ini dikenang kembali, antara lain oleh J.W. de Meijer Ranneft. Dalam artikelnya 'De verwording van het B.B. op Java' (1917) ia mencirikan paruh kedua abad ke-19 sebagai masa pemerintah 'empiris otokratis' di mana pemerintah hanya mengatur hal yang paling perlu dan sisanya diserahkan bebas kepada kekuatan masyarakat. Maka untuk hal itu

dibentuklah kelompok laki-laki kekar yang lama sesudah kepergian mereka masih diingat oleh masyarakat. Bagi para pegawai pemerintah pribumi pada paruh kedua abad ke-19 dimulainya periode di mana mereka secara berangsur-angsur disekolahkan menjadi pejabat birokrasi pemerintahan yang profesional. Setelah tahun 1900 proses ini berjalan lebih cepat. Pada tahun 1908 sekolah-sekolah kepala (1879) mengalami reorganisasi menjadi *Opleidingsscholen voor Inlandse Ambtenaren / OSVIA* (Sekolah Pendidikan untuk Pegawai Pribumi). Melalui sejenis *Hormatcirculaires* (Surat edaran tentang etiket penampilan) (antara lain *Bijbladen / Lembaran Tambahan* no. 6118 dan 6496) ditentukan etiket pemakaian tanda-tanda kehormatan pada saat tampil di depan umum. Aparat pemerintahan feodal disehatkan dan dimodernisasikan: selanjutnya gaji dibayarkan dalam uang. Pada tahun 1913 pemerintah memformulasikan syarat-syarat baru untuk pengangkatan bupati: mereka harus menyelesaikan OSVIA atau pendidikan yang setara dengan sukses, menguasai bahasa Belanda secara aktif dan pasif, dan telah bekerja sebagai wedono dan patih dengan memuaskan. Penggantian berdasarkan keturunan tetap sebisa mungkin dipertahankan. Banyak pegawai pemerintahan Eropa yang muda, di bawah pengaruh mantan kolega dan penulis Eduard Douwes Dekker, mulai bersikap lebih kritis terhadap korps pemerintahan dalam negeri pribumi. Bagi generasi ini buku bestseller *Max Havelaar* (1860) merupakan pedoman dan sumber inspirasi. Itu memberi dampak, bahwa mereka lebih menganggap para pegawai pemerintahan pribumi sebagai ‘ornamen pemerintah’ (mengutip *Adviseur voor Inlandse Zaken / Penasihat untuk Urusan Pribumi*, C. Snouck Hurgronje)²⁵ daripada sebagai kolega-kolega yang memiliki tanggung jawab sendiri. Snouck berulang-ulang berbalik menentang sikap yang cupet ini. Ia menganjurkan pemberhentian sementara dari dualisme sehingga perlu dibebaskan jalan untuk aparat pemerintahan pribumi yang berfungsi.

Krisis ekonomi, yang dialami Hindia pada dekade akhir abad ke-19, bagi pemerintah menjadi alasan untuk ikut campur secara lebih aktif dalam mengembangkan kesejahteraan. Pidato raja pada tahun 1901, yang menyebutkan *zedelijke roeping* (panggilan akan tanggung jawab etis) Belanda terhadap Hindia, dianggap sebagai awal resmi *Ethische Politiek* (Politik Etis). Politik itu bertujuan mengembangkan tanah jajahan di bawah kepemimpinan Belanda menjadi kemandirian yang besar. Arah baru itu menyebabkan modernisasi lebih lanjut dan spesialisasi aparat pemerintahan. Didirikan dua departemen pemerintahan umum baru dan dinas pemerintahan baru. Pendidikan mendapatkan banyak perhatian. Korps BB lebih dikebawahkan dan tergantung pada badan pemerintahan pusat. Secara teratur para pegawai pemerintah dikerahkan mengumpulkan data untuk pengaturan undang-undang dan aturan. Pengetahuan spesialis mereka terlalu kurang, tetapi pengetahuan umum tentang tanah dan rakyatnya besar. Mereka adalah orang-orang yang ditunjuk untuk menciptakan landasan tumpuan masyarakat pada waktu memperkenalkan prasarana, seperti sekolah rendah pribumi dan lembaga kredit rakyat. Mereka menjadi *opheffers* (pembubar). Residen G.L. Gonggrijp membuat dengan cara lucu laporan dari pengalamannya dalam *Brieven van Opheffer* (Surat-surat dari pembubar) yang menjadi populer, yang pada tahun 1911-1941 dipublikasikan dalam *Bataviaasch Nieuwsblad* dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku.

²⁵ Ph. Kleintjes 1933 II: 33.

Birokratisasi yang meningkat menimbulkan perlawanan di antara kelompok masyarakat Eropa, terutama di tempat-tempat yang lebih besar. Di sana diperjuangkan untuk pengalihan wewenang kepada badan-badan pemerintahan yang lebih rendah dan hak ikut bicara. Decentralisatiewet (Undang-Undang Desentralisasi) (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1903 no. 329) dan Decentralisatiebesluit (Keputusan Desentralisasi) (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1905 no. 137) membuka kemungkinan untuk membentuk dewan-dewan daerah dan setempat. Anggota-anggotanya mewakili 3 kelompok resmi masyarakat: orang-orang Eropa, pribumi, dan Timur Asing. Mereka dipilih melalui hak pilih sensus atau diangkat oleh gubernur-jenderal. Dalam beberapa hal keanggotaan dewan terikat dengan fungsi jabatan. Kepala pemerintahan daerah adalah ketua dewan daerah, asisten-residen pemerintah setempat. Dewan-dewan yang tersebut terakhir berfungsi lebih baik daripada yang pertama karena mereka dalam ukuran yang lebih kecil dan memerintah suatu daerah dengan batas yang lebih jelas. Dewan-dewan itu berwenang mengangkat para pegawai (residen kehilangan hak itu), menetapkan ordonansi (yang diberitakan di *Javasche Courant*), dan membuat perubahan pada berbagai peraturan itu. Mereka juga mengelola anggaran lokal dan memungut pajak. Residen dan asisten-residen yang menjadi ketua dewan, harus lebih memberikan koordinasi dan supervisi. Residen menjaga keseragaman kebijakan: kepada gubernur-jenderal ia dapat mengajukan penghapusan ordonansi yang bertentangan dengan pengaturan umum.

Dewan-dewan itu memiliki karakter pemerintahan yang condong Eropa. Pembatasan dari ini menjadi lebih jelas dengan lebih berkembangnya gerakan nasionalistis Indonesia. Masyarakat lebih bersuara dan sadar politik. Hal ini menstimulasi diskusi tentang reformasi pemerintahan yang lebih luas, di mana pembagian pemerintahan yang baru dikaitkan dengan peluasan hak ikut bicara dan pembebasan dari perwalian (pengalihan wewenang dari pegawai pemerintahan Eropa ke pegawai pemerintahan pribumi). Dalam hubungan ini kritik dari Snouck Hurgronje atas dualisme yang terongrong itu juga penting.

Pada tahun 1918, ketika Volksraad (Dewan Rakyat) pertama dibentuk, pemerintah mencoba membebaskan kabupaten dari perwalian sehingga pengaruh pemerintahan Eropa di daerah itu banyak berkurang. Krisis ekonomi pada tahun 1920 bagi Minister van Koloniën (Menteri Urusan Tanah Jajahan) S. de Graaff yang baru diangkat menjadi alasan untuk mengerem proses pembaharuan. De Graaff dalam karirnya intensif mengerjakan pembaharuan pemerintahan, yang terakhir ketika sebagai *regeringscommissaris* (komisaris pemerintah) (1913). Oleh karena segala advisnya di Batavia dan Den Haag dinilai sebagai konservatif dan teknis-administratif, maka pada tahun 1915 ia mengundurkan diri. Bahwa karirnya beberapa tahun kemudian mendapat arah yang baru, dapat dijelaskan sebagai dampak kaget yang disebabkan oleh Perang Dunia Pertama dan revolusi Rusia di kalangan luas. De Graaff, dengan didukung oleh semua lainnya di pemerintah, menganggapnya dalam situasi itu sebagai kewajibannya untuk membantu pemertahanan cengkeraman kekuasaan Belanda di Hindia. Dalam reformasi pemerintahan yang baru itu cengkeraman itu antara lain mendapatkan wujudnya.

Wet op de Bestuurshervorming (Undang-Undang Reformasi Pemerintahan) yang diumumkan pada tahun 1922 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1922 no. 216), tiga tahun kemudian berjalan bersama dengan Provinciale- en Regentschapsordonnantie (Ordonansi Provinsi dan Kabupaten) (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1924, masing-masing no. 78 dan 79). Pembagian daerah dalam pemerintahan langsung di Jawa dan Madura diganti dengan pembagian dalam tiga provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* masing-masing 1925 no. 378, 1929 no. 227, 1928 no. 295). Dalam provinsi-provinsi itu tercakup 36 daerah. Daerah-daerah baru itu kira-kira seluas bagian-bagian sebelumnya. Jumlah kabupaten naik dari 70 ke 76. Dengan demikian, perbandingan daerah-kabupaten adalah 1 banding 2. Dalam provinsi, kotapraja merupakan kesatuan pemerintahan (Stadsgemeenteordonnantie ‘Ordonansi Kotapraja’, *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* no. 365). Undang-undang itu juga mengatur pembentukan ‘wilayah-wilayah lain’ (gubernemen). Pada tahun 1936 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1936 no. 68) di Wilayah Luar Jawa dan Madura dibentuk tiga gubernemen: Sumatra, Borneo, dan Grote Oost (Timur Besar).

Provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, yang diangkat oleh gubernur-jenderal. Ia mengepalai para pegawai provinsi dalam wilayah jabatannya, tetapi juga dapat memberikan tugas kepada para pegawai pemerintahan. Dialah yang mengangkat para pegawai pemerintahan mulai pangkat wedono. Bersama dengan College van Gedeputeerden (Dewan Pemerintahan Harian Provinsi) ia melaksanakan tugas kepengurusan sehari-hari. Ia adalah ketua Provinciale Raad (Dewan Provinsi). Dewan ini terdiri atas para wakil yang terpilih dan diangkat dari tiga kelompok masyarakat yang resmi, yaitu masyarakat Eropa, masyarakat pribumi, dan masyarakat Orang Asing Timur. Dewan itu antara lain mempunyai wewenang untuk mengangkat pegawai, memungut pajak, menetapkan ordonansi, mewakili provinsi dalam perkara hukum, mengawasi pengelolaan keuangan dari dewan kotapraja dan dewan kabupaten. Ordonansi provinsi diumumkan di *Provinciaal Blad* (Majalah Provinsi) mengenai provinsi. Gubernur dapat mengusulkan kepada penguasa negeri agar ordonansi yang bertentangan dengan ordonansi umum dibatalkan atau dihapus.

Residen ‘gaya baru’ dapat disamakan dengan asisten-residen ‘gaya lama’: kepala pemerintah setempat. Wilayah jabatannya menjadi lebih kecil, kemandiriannya dibatasi sebagiannya oleh kedudukannya sebagai bawahan gubernur. Ia mengawasi para pegawai pemerintahan dan gubernemen di wilayah jabatannya, dan di dewan-dewan kabupaten. Ia bertindak sebagai koordinator di antara pelbagai dinas pekerjaan; ia adalah kepala kepolisian, dan ia menjaga adanya ketenangan, ketertiban, dan keamanan. Deskripsi tugas asisten-residen ‘gaya baru’ menyerupai tugas dari pengawas ‘gaya lama’: ia tidak memiliki jabatan penguasa lagi tetapi jabatan administratif. Dalam situasi baru tidak ada lagi pengawas, kecuali di Wilayah Luar Jawa dan Madura.

Kotapraja dikepalai oleh seorang walikota yang diangkat oleh gubernur-jenderal. Di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya ia menjalankan tugas kepengurusan sehari-hari dengan College van Burgemeesters en Wethouders / B&W (Dewan Pemerintahan Harian Kotapraja). Dewan itu terdiri dari para anggota yang terpilih dan diangkat dari tiga kelompok

masyarakat. Gemeenteraad (Dewan Kotapraja) memiliki antara lain hak untuk mengangkat pegawai kotapraja, untuk menetapkan anggaran tahunan dan memungut pajak, dan dewan itu juga mempunyai wewenang mengatur. Dengan perantaraan Provinciale Raad (Dewan Provinsi), walikota dapat mengusulkan kepada gubernur-jenderal agar ordonansi yang menurutnya bertentangan dengan ordonansi provinsi dan umum dibatalkan atau dihapus.

Dalam situasi yang baru, bupati adalah kepala kabupaten yang 'otonom'. Semua pegawai kabupaten dan pegawai provinsi dan gubernemen yang bekerja di wilayahnya adalah bawahannya. Ia adalah ketua Regenschapsraad (Dewan Kabupaten) yang sebagian anggotanya dipilih dan sebagiannya lagi diangkat. Bersama dengan College van Gecommitteerden (Dewan Pemerintahan Harian Kabupaten), ia menjalankan tugas kepengurusan sehari-hari. Dewan Kabupaten itu berwenang untuk mengangkat pegawai kabupaten dan menetapkan suatu ordonansi. Bupati lah yang mengatur agar ordonansi itu diumumkan di *Provinciale Blad* (Majalah Provinsi), atau apabila ordonansi itu bertentangan dengan peraturan umum maka dengan perantaraan residen, ia mengusulkan kepada gubernur-jenderal untuk menghapusnya. Ordonansi kabupaten otomatis tidak berlaku lagi jika topik-topik yang berkaitan dengan ordonansi umum telah diatur. Anggaran kabupaten setiap tahun ditetapkan oleh gubernur-jenderal. Ia juga mengatur pemungutan pajak.

Reformasi pemerintahan memberikan dampak bahwa dualisme itu mendapatkan bentuk vertikal daripada bentuk horisontal. Dalam konstelasi yang lama, para pegawai pemerintahan Eropa dan pribumi di berbagai tingkatan bekerja berdampingan; dalam situasi yang baru korps pemerintahan pribumi menduduki tingkat bawahan, korps pemerintahan Eropa tingkat atasan. Perubahan ini kurang menyenangkan BB Eropa. Pengecilan wilayah jabatan residen, penurunan status kedudukannya dan asisten-residen mendapat kritik keras dari para pegawai pemerintahan Eropa, terutama pada generasi lebih tua. Mereka merasa diturunkan menjadi pegawai administratif yang terutama harus melakukan pekerjaan administratif dan dengan demikian akan kehilangan kontak dengan masyarakat. Di segi politik, reformasi menimbulkan kekecewaan yang besar pada para pegawai pemerintahan pribumi dan nasionalis Indonesia. Di antara kedua kelompok itu, yang juga disebutkan masing-masing sebagai kalangan pejabat dan politisi, tumbuh suatu kesenjangan. Kesenjangan itu melebar akibat pemerintahan kolonial, yang di satu pihak di tingkat pusat mempertahankan wibawa Belanda, di pihak lain menggunakan aparat pemerintahan pribumi untuk membatasi pengaruh kalangan nasionalis atas masyarakat.

Keluhan dari para pegawai pemerintahan Eropa adalah bahwa mereka kehilangan kontak dengan masyarakat akibat reformasi pemerintahan. Keluhan itu ternyata benar ketika pada tahun 1926-1927 di Jawa dan Sumatra terjadi pemberontakan. Khususnya dari kelompok masyarakat Eropa ada desakan agar dilakukan tindakan pemerintah yang tegas. Yang 'tetap tinggal' dari kelompok ini menunjukkan secara jelas bahwa mereka hanya mau diperintah oleh orang-orang BB Eropa. Krisis ekonomi pada tahun 1929 dan depresi yang menyusul menambah sikap yang lebih konservatif dari pemerintahan kolonial. Perkembangan-perkembangan ini menjadi latar belakang terjadinya reformasi pemerintahan pada tahun 1931,

yang terkenal sebagai ‘Taakverdeling’ (Pembagian tugas) (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1931 no. 378).

Lagi-lagi pembagian pemerintahan mengalami perubahan. Jumlah daerah dipotong setengahnya menjadi 19. Kabupatenan dibagi ulang: jumlahnya dikecilkan dari 76 menjadi 39. Hal ini memberikan dampak bahwa kabupatenan itu menjadi besar. Selanjutnya perbandingan karesidenan-kabupaten tetap 1 banding 2. Residen mendapatkan wilayah jabatan lebih besar. Kewenangannya tetap sama, tetapi tugasnya menjadi lebih berat karena wilayah jabatannya lebih luas. Asisten-residen mendapatkan kembali wewenang pemerintahan: ia harus memberikan penerangan dan advis kepada bupati, dan ia menjadi pemimpin harian kepolisian lapangan. Banyak asisten-residen menjadi anggota Dewan Kabupaten. Pengawas ada lagi. Baik pengawas maupun asisten-residen dalam kedudukannya yang baru dapat menjadi gangguan bagi bupati, dan mereka dapat merintangai bupati dalam menjalankan pekerjaannya yang mandiri. Namun, banyak bupati muda berpendidikan baik dan mampu membela diri dengan kokoh. J. van Baal menceritakan ingatannya tentang seorang bupati yang secara teratur menegur seorang asisten-residen yang malas dengan cara kebapakan.²⁶

Dalam praktek diupayakan untuk menjaga kedua situasi pemerintahan itu terpisah. Aparat pemerintahan pribumi mengerjakan urusan desa, pendidikan pribumi, perawatan kesehatan, penerangan pertanian, dan pemungutan pajak. Korps BB Eropa pada prinsipnya menjalankan kepengurusan tentang orang-orang Eropa dan Timur Asing, dan hanya mencampuri kelompok pribumi jika kepentingannya bersinggungan dengan kepentingan dua kelompok masyarakat lainnya. Hal ini misalnya terjadi dengan urusan tanah. Pada dasawarsa terakhir sebelum Perang Dunia Kedua, dualisme dengan cepat tidak mendapatkan arti lagi. Oleh karena sistem itu sampai saat terakhir tetap dipertahankan, maka Hindia-Belanda, terutama di tahun 30-an, dicirikan sebagai Beamtenstaat (Pemerintahan birokratis teknokratis).

Arsip dan sumber yang tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Arsip kementerian pada prinsipnya hanya mencakup pelbagai laporan dan advis dari para pegawai pemerintahan Eropa, khususnya residen, gubernur, dan asisten-residen. Kadang-kadang pada berkas-berkas ini ditambahkan laporan pegawai pemerintahan pribumi. Ada laporan dari pengawas, terutama orang-orang yang bekerja di Wilayah Luar Jawa dan

²⁶ J. van Baal (1986-1989), *Ontglipt verleden, verhaal van mijn jaren in een wereld die voorbijging* (2 jilid; Franeker: Wever). Lihat I, hlm 339.

Madura: dalam hal itu mereka adalah kepala pemerintah setempat. Di dalam arsip tidak mungkin ditemukan laporan-laporan dari para kepala Orang Timur Asing: tugas mereka adalah melaksanakan.

Para pegawai pemerintahan memiliki lapangan kerja yang luas. Mereka adalah generalis dan membuat laporan tentang pelbagai topik yang berbeda-beda. Sebagian besar surat dan advis mereka dapat ditelusuri dengan bantuan pengaksesan (*indices* 'indeks') di *openbaar archief* (arsip umum). Di bawah ini diberikan seleksi dari rubrik-rubrik.

- a. Periode tahun 1850-1900** (Kode akses 2.10.02; 2.10.10): 'Afstand en verhuring van land' (Pelepasan dan penyewaan tanah); 'Agrarische aangelegenheden' (Perihal agraria); 'Binnenlandse aangelegenheden' (Perihal dalam negeri); 'Boswezen' (Perhutanan); 'Cultures (ook gespecificeerd op soort)' (Budidaya tanaman, yang juga dispesifikasikan berdasarkan jenis); 'Gewestelijk en plaatselijk Europees bestuur' (Pemerintahan daerah dan setempat Eropa); 'Herendiensten' (Kerja pengabdian); 'Inlands bestuur en politie' (Pemerintahan pribumi dan kepolisian); 'Justitiwezen' (Sistem yustisi); 'Kolonisatie (landverhuizing en koelies)' (Kolonisasi: emigrasi dan kuli); 'Naamloze maatschappijen' (Perseroan Terbatas); 'Onlusten' (Kerusuhan); 'Oost-Indische archipel (ook gespecificeerd op regio)' (Kepulauan Hindia-Timur, yang juga dispesifikasikan berdasarkan regio); 'Rechtswezen' (Sistem hukum); 'Schoolwezen' (Perihal sekolah); 'Vreemde Oosterlingen' (Orang Timur Asing).
- b. Periode sesudah tahun 1900** (Kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03): 'Bestuur (binnenlands; gewestelijk en plaatselijk; Europees; inlands; inlands en politie)' (Pemerintahan: dalam negeri; daerah dan setempat; Eropa; pribumi; pribumi dan kepolisian); 'Bestuursvorming' (Reformasi pemerintahan); 'Boswezen' (Perhutanan); 'Chinese aangelegenheden' (Perihal Cina); 'Cultures' (Budidaya tanaman); 'Coöperatie, Volkscredietwezen' (Koperasi, Sistem kredit rakyat); 'Decentralisatie' (Desentralisasi); 'Desawezen' (Perihal desa); 'Erfpacht' (Erfpah); 'Grondbezit' (Pemilikan tanah); 'Herendiensten' (Kerja pengabdian); 'Inlandse aangelegenheden' (Perihal pribumi); 'Inlandse gemeenten' (Masyarakat pribumi); 'Inlands onderwijs' (Pendidikan pribumi); 'Inlandse zelfbesturen' (Kepemerintahan wilayah otonom pribumi); 'Koffie' (Kopi); 'Kolonisatie' (Kolonisasi); 'Politieke stromingen' (Aliran politik); 'Politieke en economische toestanden' (Keadaan politik dan ekonomi); 'Politieke verslagen (en berichten)' (Laporan dan berita politik); 'Rechtswezen' (Sistem hukum); 'Regentschappen' (Kabupatenan); 'Verenigingen' (Perhimpunan); 'Volkscredietwezen en coöperatie' (Sistem kredit rakyat dan koperasi); 'Vreemde Oosterlingen' (Orang Asing Timur).

Klapper (Register kata kunci) pada rubrik indeks mulai tahun 1900, kode akses 2.10.36.011, berisi juga sebuah register kata kunci berdasarkan nama-nama geografis.

Untuk paparan keseluruhan rubrik yang disebut dalam panduan ini, lihat Bab 44 dalam buku panduan ini.

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks-indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang pemerintahan dalam negeri sesudah tahun 1921, akses-akses *4de afdeling* (bagian ke-4) sangat penting: lihat kode akses 2.10.36.011.

Surat dan advis dari para pegawai pemerintahan juga dapat ditemukan dalam *geheim- en kabinetsarchief* (arsip kabinet dan rahasia) serta di dalam *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914. Untuk periode 1850-1900 lihat kode akses 2.10.02, untuk periode sesudah tahun 1900 lihat kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07. Seri laporan surat rahasia juga memuat notula dari pelbagai konferensi bupati.

Laporan dan advis dari para pegawai pemerintahan Eropa (residen, gubernur, dan asisten-residen) dimuat dalam publikasi-publikasi sumber:

- P. Creutzberg ed. (1972-1975), *Het economisch beleid in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Wolters-Noordhoff).
- R. C. Kwantes ed. (1975-1982), *De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Tjeenk Willink).
- S. L. van der Wal ed. (1963), *Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940* (Groningen: Wolters).
- S. L. van der Wal ed. (1964-1965), *De volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië* (2 jilid; Groningen: Wolters).
- S. L. van der Wal ed. (1967), *De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indië* (Groningen: Wolters).

Serie Memories van Overgave (Seri Memori Serah-Terima), 1852-1962, kode akses 2.10.39: mencakup memori serah-terima residen, gubernur, asisten-residen, dan (untuk Wilayah Luar Jawa dan Madura) pengawas.

Serie politieke verslagen en berichten uit de Buitengewesten (Seri laporan dan berita politik dari Wilayah Luar Jawa dan Madura), 1898-1940, kode akses 2.10.52.01: berisi informasi tentang keadaan politik dan ekonomi daerah.

Serie openbare Oost-Indische besluiten (besluiten van gouverneur-generaal) (Seri keputusan umum Hindia-Timur: keputusan gubernur-jenderal), tahun 1850 - Januari 1932, kode akses 2.10.02: berisi keputusan pengangkatan para pegawai pemerintahan Eropa dan pribumi dan para kepala Orang Asing Timur. Indeks pada seri ini, kode akses 2.10.02, mencakup periode tahun 1850-1924: lihat di bawah rubrik-rubrik 'Binnenlands bestuur' (Pemerintahan dalam negeri); 'Inlanders, Chinezen en Vreemde Oosterlingen, en op de namen van de betrokkenen' (Orang-orang pribumi, Cina dan Asing Timur, dan berdasarkan nama-nama yang bersangkutan).

Catatan: lampiran-lampiran pada pelbagai keputusan gubernur-jenderal tersimpan dalam arsip Algemene Secretarie (Sekretariat Umum), Arsip Nasional Jakarta.

Serie stamboeken en stamkaarten van burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indië (Seri buku induk dan kartu induk dari para pegawai sipil di Hindia-Belanda) tahun 1814-1963, kode akses 2.10.36.015, sebagian dengan register kata kunci (kode akses 2.10.06 s/d 2.10.08): berisi daftar kegiatan dinas dari antara lain para pegawai pemerintahan Eropa (yang dikirim dari Belanda) dengan ringkasan karir mereka. Lihat juga *serie personeelsdossiers* (seri dosir / berkas kepegawaian), kode akses 2.10.36.10.

Arsip *Commissariaat voor Indische Zaken* / CIZ (Komisariat Urusan Hindia), (1880) 1927-1949 (1950), kode akses 2.10.49.

CIZ didirikan pada tahun 1927 sebagai kantor perwakilan dari pemerintah Hindia-Belanda di Belanda. CIZ muncul karena diberlakukannya Wet op de Staatsinrichting (Undang-Undang Tata Negara) pada tahun 1925, yang menjadikan Hindia-Belanda di dalam wilayah Kerajaan memperoleh otonomi. CIZ mengambil alih sejumlah tugas, bagian, biro, dan dinas dari Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan). Termasuk ini adalah urusan tentang pendidikan dan pengiriman pegawai untuk dinas sipil Hindia-Belanda.

Peta dan gambar termasuk dalam arsip kementerian, kode akses 4.Miko.

2. Daftar arsip pribadi dari para pegawai pemerintahan Eropa

Di bawah ini tertera rincian tentang *archiefvormers* (pembentuk arsip), *archieffaren* (tahun arsip), *code van toegang* (kode akses), *regio* (regio / daerah) tempat dinas yang bersangkutan dan perihal yang disebut dalam berkas-berkas arsip. Sedapat mungkin diacu ke bab-bab dalam buku panduan ini.

Catatan: arsip-arsip ini juga dapat berisi berkas-berkas tentang daerah-daerah lain selain daerah tempat dinas pegawai pemerintah itu.

- D.F. van Alphen, 1799-1841, kode akses 2.21.004.19. Java (Jawa).
- C.S.W. van Hogendorp, 1806-1857, kode akses 2.21.008.69. Java (Jawa).
- E.M. Francis, 1816-1857, kode akses 2.21.030. Borneo (Kalimantan), Sumatra.
- L.M. Rollin Couquerque, 1829-1836, kode akses 2.21.142. Java (Jawa).
- C.P.J. Elout, 1816-1840, kode akses 2.21.059. Sumatra, Riouw (Riau).
- R. de Fillietaz-Bousquet, 1830-1856, kode akses 2.21.063.02. Celebes (Sulawesi), Java (Jawa).
- A.H.W. de Kock, 1838-1849, kode akses 2.21.004.13. Java (Jawa).
- J.A. Bakkers, 1859-1876, kode akses 2.21.205.05. Celebes (Sulawesi).
Catatan: hanya ada berupa film.
- D.C.A. van Hogendorp, 1838-1882, kode akses 2.21.008.69. Java (Jawa).
- J.F.R.S. van den Bossche, 1841-1888, kode akses 2.21.030. Sumatra, Banka (Bangka), Java (Jawa). Lihat Bab 7 dalam buku panduan ini.
- F.N. Nieuwenhuijzen, 1835-1875, kode akses 2.21.205.44. Celebes (Sulawesi), Madoera (Madura), Riouw (Riau), Java (Jawa), Borneo (Kalimantan), Sumatra (Atjeh / Aceh). Lihat Bab 8 dalam buku panduan ini.
- O. van Rees, 1837-1888, kode akses 2.21.301. Java (Jawa).

- H.A.F. de Vogel, 1852-1881, kode akses 2.21.205.66. Java (Jawa). Lihat Bab 9 dalam buku panduan ini.
- A. Pruys van der Hoeven, 1865-1888, kode akses 2.21.301. Sumatra (Atjeh / Aceh). Lihat Bab 10 dalam buku panduan ini.
- A.M. Joekes, 1867-1918, kode akses 2.21.094. Sumatra, Riouw (Riau).
Catatan: bagian arsip pribadi mr. A.M. Joekes. Lihat Bab 27 dalam buku panduan ini.
- J.D.L. le Febvre, 1893-1959, kode akses 2.21.205.01. Sumatra. Lihat Bab 12 dalam buku panduan ini.
- W.H.A. Hijnekamp, 1870-1894, kode akses 2.21.205.25. Ambon.
- A. Hoorweg, sekitar 1920-1930, kode akses 2.21.281.19. Java (Jawa), Molukken (Maluku).
- J.M. Jordaen, 1866-1927, kode akses 2.21.413. Java (Jawa).
- C.J. van Kempen, 1917-1955, kode akses 2.21.097.01. Sumatra, Timor, Borneo (Kalimantan).
- L.C. Westenenk, 1893-1928, kode akses 2.21.205.71. Sumatra. Lihat Bab 13 dalam buku panduan ini.
- M.B. van der Jagt, 1897-1957, kode akses 2.21.205.26. Java. Lihat Bab 14 dalam buku panduan ini.
- J.Th. Petrus Blumberger, 1891-1953, kode akses 2.21.205.46. Java (Jawa).
- P.R.W. van Gesseler Verschuur, 1905-1960, kode akses 2.21.069. Java (Jawa).
- W.E. Rappard, 1906-1921, kode akses 2.21.281.13. Java (Jawa).
- A. Groothoff, 1895-1969, kode akses 2.21.076. Java (Jawa).
- A.M. Joekes jr., 1858-1962, kode akses 2.21.094. Java (Jawa). Lihat Bab 27 dalam buku panduan ini.
- J.W. Meijer Ranneft, 1907-1967, kode akses 2.21.121. Java (Jawa). Lihat Bab 4 dalam buku panduan ini.
- H.R. Rookmaker, 1906-1937, kode akses 2.21.200. Sumatra.
- W.H. van Helsdingen, 1904-1978, kode akses 2.21.183.30. Java (Jawa). Lihat Bab 15 dalam buku panduan ini.
- R.K.A. Bertsch, 1923-1939, kode akses 2.22.09, lampiran 3. Java. Lihat Bab 16 dalam buku panduan ini.
- L.C. Heyting, 1913-1923, kode akses 2.22.09. Bali, Java (Jawa).
- M.H.A. Sitsen, 1917-1934, kode akses 2.21.205.56. Borneo (Kalimantan).
- G.L. Tichelman, 1916-1952, kode akses 2.21.097.01. Ambon, Ceram (Seram), Borneo, Sumatra (Atjeh / Aceh).
- G. Jansen, 1908-1960, kode akses 2.21.228. Sumatra. Lihat Bab 18 dalam buku panduan ini.
- G. van Dam, 1914-1941, kode akses 2.21.281.34. Java (Jawa).
- W.Ph. Coolhaas, 1905-1963, kode akses 2.21.225. Ternate, Sumatra.
- J.J. van Kempen Valk, 1928-1934, kode akses 2.21.205.56. Borneo (Kalimantan), Soenda-eilanden (Kepulauan Sunda).
- C.W. Schüller, 1932-1950, kode akses 2.21.275. Timor.
- P.A. Lanting, 1937-1950, kode akses 2.21.219. Java (Jawa).
- H.W.J. Sonius, 1923-1956, kode akses 2.21.205.59. Java (Jawa).
- J. Prins, 1936-1950, kode akses 2.22.09. Lombok.

Catatan: berkas-berkas Prins dikumpulkan oleh A. Teeuw, koleksi itu berada atas namanya.

- J.A. Vorstman, 1939-1947, kode akses 2.21.205.85. Borneo (Kalimantan).
- L.L.A. Maurenbrecher, 1934-1970, kode akses 2.21.221. Java (Jawa), Celebes (Sulawesi).
- J.J. van de Velde, 1928-1986, kode akses 2.21.205.65. Sumatra (Atjeh / Aceh).
- G.W. Caudri, 1925-1955, kode akses 2.21.205.14. Sumatra, Celebes (Sulawesi). Lihat Bab 19 dalam buku panduan ini.
- Th.J. van der Peyl, 1933, kode akses 2.22.09. Borneo (Kalimantan).
- L.I. Graf, 1936-1950, kode akses 2.22.09. Sumatra.
- J. van Baal, 1934-1988, kode akses 2.21.205.02. Nieuw-Guinea. Lihat Bab 20 dalam buku panduan ini.
- A.H. Böhm, 1925-1989, kode akses 2.21.205.09. Borneo (Kalimantan).
- A.J. Piekaar, 1933-1990, kode akses 2.21.283. Sumatra (Atjeh / Aceh).
- A.J. Vleer, 1932-1955, kode akses 2.21.216. Sumatra (Atjeh / Aceh).
- H.J. Heynen, 1940, kode akses 2.22.09. Flores.
- L.H. de Langen, 1931-1934, kode akses 2.21.183.46. Java (Jawa).
- H.R. Venema, 1936-1938, kode akses 2.22.09. Celebes (Sulawesi), Santi-eilanden (Kepulauan Santi).
- A.H. Ruibing, 1938-1948, kode akses 2.22.09. Ambon.

Banyak berkas pegawai BB berkaitan dengan Timor dan wilayahnya, Maluku, Nieuw-Guinea, dan Sumatra tersimpan dalam arsip pribadi C.C.F.M. le Roux, 1773-1938, kode akses 2.21.097.02.

Le Roux sendiri tidak pernah bekerja pada korps BB.

Berkas-berkas pegawai BB berkaitan dengan Sumba tersimpan di koleksi L. Onvlee, 1936-1947, kode akses 2.22.09.

3. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Handelingen en bijlagen van de Volksraad (Notula dan lampiran dari Dewan Rakyat)

Banyak pegawai pemerintahan yang menjadi anggota Dewan ini. Di sini dibahas antara lain hal-hal yang berkaitan dengan BB (pemerintahan dalam negeri), korps BB (pribumi dan Eropa).

Suratkabar Hindia (antara lain *Soerabajaasch Handelsblad* / Suratkabar Surabaya, *Bataviaasch Nieuwsblad* / Suratkabar Batavia)

Untuk pelbagai laporan rapat dari dewan daerah dan setempat, dewan kotapraja dan provinsi. Koninklijk Bibliotheek / KB mengelola koleksi besar dari koran-koran Hindia-Belanda: www.kb.nl, lihat di bawah katalog koran.

Javasche Courant (Koran Jawa)

Untuk ‘politieele keuren en regelingen van residenten’ (peraturan kepolisian dan kebijakan aturan dari residen); ‘verordeningen van gewestelijke en plaatselijke raden’ (ordonansi dari dewan daerah dan setempat); ‘instructies van gewestelijke bestuurshoofden aan hoofden van Vreemde Oosterlingen’ (instruksi dari para kepala pemerintahan daerah kepada Orang Asing Timur).

Provinciale Bladen van West-, Midden- en Oost-Java (Suratkabar provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur)

Untuk ‘verordeningen van de provinciale raden, regentschappen en stadsgemeentenraden’ (ordonansi dari dewan provinsi, dewan kabupaten, dan dewan kotapraja).

Regeringsalmanak van Nederlandsch-Indië (Almanak pemerintah Hindia-Belanda)

‘Regelgeving met betrekking tot het binnenlands bestuur’ (Penataan aturan sehubungan dengan pemerintahan dalam negeri); ‘overzicht van het gewestelijk / provinciaal bestuur op Java en Madoera en de Buitengewesten’ (gambaran dari pemerintah daerah / provinsi di Jawa dan Madura, dan Wilayah Luar Jawa dan Madura), dan ‘overzicht van de personele bezetting (gouvernementdienst en zelfbesturen)’ (gambaran penempatan posisi pegawai: dinas gubernemen dan pemerintahan wilayah yang otonom).

Staatsblad van Nederlandsch-Indië, met Bijbladen (Lembaran Negara Hindia-Belanda, dengan Lembaran Tambahan)

Untuk berkas ini digunakan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1855 no. 2; 1859 no. 102; 1866 no. 127; 1870 no. 42; 1874 no. 72-73; 1903 no. 329; 1905 no.137; 1922 no. 216; 1924 no. 78-79; 1925 no. 378; 1926 no. 365; 1928 no. 295; 1929 no. 227; 1931 no. 378.

Daftar Pustaka

1. Umum

Bertrand, Romain (2005), *État colonial, noblesse et nationalisme à Java. La tradition parfaite* (Parijs: Karthala).

Bertsch, R.K.A. (1941), ‘Het binnenlandsch bestuur’, dalam: W.H. van Helsdingen dan H. Hogenberk ed., *Daar wèrd wat groots verricht ... Nederlandsch-Indië in de XXste eeuw* (Amsterdam: Elsevier), hlm. 458-470.

Bongenaar, Karel E.M. [2005], *De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië: 1855-1942* (Zutphen: Walburg).

Bosma, U., A. Sens, dan G. Termorshuizen (2005), *Journalistiek in de tropen; De Indisch- en Indonesisch-Nederlandse pers 1850-1958* (Amsterdam: Aksant, Persmuseum).

- Cribb, R. (2000), *Historical atlas of Indonesia* (Richmond, Surrey: Curzon Press).
Catatan: lihat hlm. 125-126 untuk peta dasar Jawa dan Madura kira-kira tahun 1832-1942 dengan gambar pelbagai karesidenannya.
- Doel, H.W. van den (1994), *De stille macht; Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera 1808-1942* (Amsterdam: Bakker).
- Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië*, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema-lema *Bestuur* (I, hlm. 279-288; V, hlm. 455-491).
- Fasseur, C. (1975), *Kultuurstelsel en koloniale baten: de Nederlandse exploitatie van Java, 1840-1860* (Leiden: Universitaire Pers).
- Fasseur, C. dan D.H.A. Kolff (1986), 'Some remarks on the development of colonial bureaucracies in India and Indonesia', *Itinerario*, jilid X, no. 1, hlm. 31-55.
- Furnivall, J.S. (1967), *Netherlands India; A study of plural economy* (Cetakan ke-2; Cambridge: University Press).
- Gorkom, K.W. van (1896), *Gids voor de controleurs bij het Binnenlandsch Bestuur op Java en Madoera* (Cetakan ke-2; Batavia: Kolff).
- Harst, S. van der (1945), *Overzicht van de bestuurshervorming in de Buitengewesten van Nederlandsch-Indië, in het bijzonder op Sumatra* (Utrecht: Oosthoek).
- Kartodirdjo, Sartono (1984), 'The regents of Java as middlemen; A symbolic action approach', *Modern Indonesia; Tradition and transformation; A sociohistorical perspective* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 150-179.
- Kleintjes, Ph. (1933), *Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië* (Jilid 2; Cetakan ke-6; Amsterdam: De Bussy), Bab XV s/d XIX.
- Kommers, J.H.M. (1979), *Besturen in een onbekende wereld; Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië: 1800-1830; Een antropologische studie* (Meppel: Krips Repro).
- Lohanda, M. (2001), *The kapitan Cina of Batavia 1837-1942; A history of Chinese establishment in colonial society* (Cetakan ke-2; Jakarta: Djambatan).
- Meijer Ranneft, J.W. (1917), 'De verwording van het B.B. op Java', *Koloniaal Tijdschrift* I, hlm. 145-180.
- Prins, J. dkk (1956), *Wij gedenken ... Gedenkboek van de Vereniging van Ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië* (Utrecht: Oosthoek).

Sutherland, H. (1979), *The making of a bureaucratic elite; The colonial transformation of the Javanese priyaji* (Singapore: Heinemann).

Zijlmans, G.C. (1985), *Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst: het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950* (Amsterdam: Bataafsche Leeuw).

2. Buku kenangan pribadi dari para pegawai pemerintahan yang tercetak

Baal, J. van (1986-1989), *Ontglipt verleden; Verhaal van mijn jaren in een wereld die voorbijging* (2 jild; Franeker: Wever).

Coolhaas, W.Ph. (1985), *Controleur BB; Herinneringen van een jong bestuursambtenaar in Nederlands-Indië* (Utrecht: HES).

Djajadiningrat, Achmad (1936), *Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat*. Diolah oleh Diet Kramer (Amsterdam: Kolff).

Drewes, G.W.J. (1985), 'The life-story of an old-time Priangan regent as told by himself', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 141, hlm. 399-422.

Fasseur, C. ed. (1980), 'Dagboek van een Nederlands bestuursambtenaar uit het midden van de 19e eeuw; H.A.F. de Vogel', dalam: C. Fasseur, *Geld en geweten: een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische archipel* (2 jild; Den Haag: Nijhoff), I, hlm. 163-172.

Francis, E. (1864), *Herinneringen uit mijnen dienstdtijd in Nederlandsch-Indië* (Leiden: Francis).

Friedericy, H.J. (1984), 'De eerste etappe' dan 'De Raadsman', dalam: H.J. Friedericy, *Verzameld werk* (Amsterdam: Querido), hlm. 243-287 dan hlm. 175-241.

Gonggrijp, G.L. (1944), *Brieven van Opheffer* (Cetakan ke-3; Maastricht: Leiter-Nypels).

Jagt, M.B. van der (1955), *Mémoires van M.B. van der Jagt; Oud-gouverneur van Soerakarta* (Den Haag: Leopold).

Jaquet, L.G.M. (1978), *Aflossing van de wacht. bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indië* (Rotterdam: Ad Donker).

Pruys van der Hoeven, A. (1894), *Veertig jaren Indische dienst* (Den Haag: Belinfante).

Velde, J.J. van de (1982), *Brieven uit Sumatra 1928-1949* (Franeker: Wever).

Visser, A. (1982), *Een merkwaardige loopbaan; Herinneringen van een bestuursambtenaar in Nederlandsch-Indië/Indonesië (1932-1950)* (Franeker: Wever).

Wal, S.L. van der ed. (1977), *Besturen overzee; herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië* (Franeker: Wever).

3 De Dienst van het Boswezen (Dinas Kehutanan)

Asal mula dari dinas ini pada tahun 1858, ketika pemerintah mengangkat Inspecteur van het Boswezen (Inspektur Kehutanan) untuk dapat memantau pengelolaan hutan di Jawa dan Madura. Penerapan Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) di tahun 30-an telah mengakibatkan adanya pembukaan lahan dalam skala besar. Kayu yang ditebang dari hutan jati dan hutan liar digunakan untuk membuat gudang-gudang dan rumah-rumah, untuk meluaskan jaringan jalan, dan untuk membangun kapal dan irigasi. Kayu jati juga merupakan barang ekspor yang populer: kayu itu keras, kuat, dan tahan air. Pada waktu itu, penduduk Indonesia masih memanfaatkan hasil hutan secara bebas untuk kebutuhan hidup mereka. Mereka mengumpulkan dan menebang kayu untuk keperluan rumah tangga. Sebagian produksi padi dibudidayakan pada lahan tanpa air, yang disebut ladang: untuk bisa berladang, pertama-tama orang harus menebang hutan. Lahan yang dibuka itu digunakan hanya untuk satu atau dua kali panen saja dan selanjutnya (untuk jangka waktu panjang) dibiarkan tidak ditanami lagi. Pertambahan penduduk membuat kebutuhan lahan pertanian meningkat: hal ini menyebabkan lebih banyak terjadi penebangan hutan. Pada tahun 50-an, pemerintah Hindia menyadari bahaya yang mengancam akibat penebangan hutan dan pembuangan modal. Penunjukan inspektur kehutanan merupakan upaya pertama untuk menghentikan perkembangan yang mengancam itu. Pejabat fungsi baru itu, awalnya ada di bawah Directie der Cultures (Direktorat Budidaya Tanaman). Setelah reorganisasi pemerintahan negeri pada tahun 1866, pejabat itu bersama dengan kantor bagiannya sendiri pada tahun 1870 pindah ke Departement van Binnenlands Bestuur / BB (Departemen Pemerintahan Dalam Negeri).

Dengan berlakunya Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) pada tahun 1870, inisiatif swasta mendapat keleluasaan. Pemerintah mengikuti dan mendukung dunia usaha. Untuk perihal kehutanan berarti bahwa eksploitasinya tetap ada di tangan swasta. Hal ini ditetapkan dalam Bosreglement (Peraturan Hutan) untuk Jawa dan Madura (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara 1874 no. 110), yang juga memuat aturan untuk pengelolaan dan perlindungan hutan yang lebih baik. Sejak tahun 1875 *bospolitie* (polisi hutan) harus mengawasi terjadinya pelanggaran dan kerusakan. Sejak tahun 1865 penduduk Indonesia tidak boleh lagi memasuki hutan secara sembarangan. Penebangan, penyeretan, pengumpulan kayu dan hasil hutan, membiarkan ternak merumput di hutan, sekarang – di tempat-tempat khusus yang ditunjuk untuk itu – hanya diperbolehkan di bawah pengawasan setelah mendapatkan izin atau dengan pembayaran uang. Terhadap ketentuan ini muncul perlawanan, baik secara individu maupun dalam kelompok. Contoh perlawanan kelompok adalah perlawanan Saminbeweging (Gerakan Samin). Para pengikut Samin mulai bergerak pada tahun 90-an abad ke-19. Sesaat sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama (1914-1918) aktivitas mereka mencapai puncaknya, tetapi juga dalam dekade berikutnya suara mereka masih terdengar. Perlawanan mereka adalah dengan kepasrahan dan tanpa kekerasan. Untuk para pengikut paham Saminisme, mata pencaharian mereka sebagian besar tergantung pada hutan karena mereka tidak ingin berurusan dengan pengaturan uang.

Perkembangan ekonomi yang terjadi bersamaan dengan adanya pertumbuhan penduduk mengakibatkan permintaan kayu dan penebangan pohon di hutan meningkat pada perempat akhir abad ke-19. Permintaan lahan pertanian juga meningkat. Demi kepentingan dunia usaha, lahan-lahan disewakan dalam bentuk erfpach secara besar-besaran. Jalan kereta api dan tram, dan sistem irigasi dibangun. Bangunan untuk publik menjadi lebih banyak.

Pada tahun 1897 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1897 no. 61) diberlakukan Peraturan Hutan yang baru untuk Jawa dan Madura. Dengan peraturan itu pemerintah berusaha memperkuat pengawasan terhadap hutan negara, terutama hutan jati. Selain eksploitasi yang dilakukan oleh pihak swasta, juga ada kemungkinan eksploitasi oleh negara. Polisi hutan, yang beroperasi sejak awal tahun 80-an di bawah pengawasan pejabat pemerintah, dipindahkan kembali di bawah Dienst van het Boswezen (Dinas Kehutanan). Mulai saat itu secara sistematis penebangan, penanaman, dan pemeliharaan hutan harus dilaksanakan melalui rencana bisnis yang sistematis.

Pada tahun 1904 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* no. 380) Dinas Kehutanan pindah dari Departemen BB ke departemen bidang yang baru, Departement van Landbouw (Departemen Pertanian). Pada tahun 1913 spesialisasi yang semakin meningkat menyebabkan adanya pembentukan *bosproefstation* (balai penelitian hutan). Penghapusan budidaya tanaman pemerintah yang terakhir (kopi, tahun 1920) mengakibatkan sebagian dari lahan perkebunan yang tidak digunakan lagi ditarik kembali ke arah hutan. Juga sebagian dari 'lahan liar' dijadikan 'lahan peruntukan hutan'. Perubahan dari pertanian ladang ke pertanian intensif memiliki dampak menguntungkan bagi penebangan hutan. Setelah tahun 1910 Dinas itu memperluas kegiatannya ke Buitengewesten (Wilayah Luar Jawa dan Madura), terutama ke Sumatra. Pengelolaan dan perlindungan hutan di daerah tersebut meminta lebih banyak perhatian ketika pemerintah mulai berusaha untuk memerangi kepadatan penduduk di Jawa dengan cara mendorong orang-orang Jawa untuk tinggal di Wilayah Luar Jawa dan Madura. Ketika pada tahun 1927 terjadi reorganisasi pada dinas tersebut (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1927 no. 221), seorang penasihat ditunjuk secara khusus untuk menangani pengelolaan hutan di Wilayah Luar Jawa dan Madura. Penasihat itu bersama dengan kepala perusahaan jati, para kepala dinas dari masing-masing hutan kayu liar yang dibawahinya di Jawa dan Madura, bagian penataan hutan, dan balai penelitian hutan, kesemuanya berada di bawah Hoofdingspecteur van het Boswezen (Inspektur Kepala Kehutanan). Pejabat itu berada langsung di bawah Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel (Direktur Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan).

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Akses (*indices* ‘indeks’) di *openbaar archief* (arsip umum) mulai tahun 1850 berisi rubrik ‘Boswezen (in Oost-Indië)’ (Kehutanan di Hindia-Timur). Untuk periode 1850-1900, lihat kode akses pada arsip umum 2.10.02; 2.10.10. Untuk periode setelah 1900, lihat kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03.

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) periode 1850-1921 dapat diakses dengan menggunakan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas tentang kehutanan setelah tahun 1921, akses *4de afdeling* (bagian ke-4) adalah penting; lihat kode akses 2.10.36.011. Berkas tentang ‘boswezen’ (kehutanan) juga dapat ditemukan di dalam *geheim- en kabinetsarchief* (arsip kabinet dan rahasia) dan di dalam *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) sejak tahun 1914. Untuk periode 1850-1900, lihat kode akses 2.10.02. Untuk periode setelah 1900, lihat kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

Berkas-berkas mengenai ‘verzet van de Indonesische bevolking tegen de bosreglementen’ (perlawanan rakyat Indonesia terhadap peraturan hutan) dapat dicari dengan menggunakan akses (*indices* ‘indeks’) dalam arsip umum mulai tahun 1850. Lihat rubrik-rubrik: ‘Mohammedaanse erediensten’ (Ibadah orang Islam); ‘Rechtswezen’ (Sistem hukum), ‘Naamloze Vennootschappen en verenigingen’ (Perusahaan Terbatas dan perhimpunan-perhimpunan). Kode-kode akses itu tercantum di atas. Untuk periode setelah tahun 1921, akses *4de afdeling* (bagian ke-4) adalah penting; lihat kode akses 2.10.36.011.

Untuk penelitian itu, *geheim- en kabinetsarchief* (arsip kabinet dan rahasia) dan di dalam *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) sejak tahun 1914 juga diperlukan. Untuk periode 1850-1900, lihat kode akses 2.10.02. Untuk periode setelah tahun 1900, lihat kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

2. Arsip Directeur der Cultures (Direktur Budidaya Tanaman) dan berkas lainnya berkaitan dengan budidaya tanaman, 1726-1902, kode akses 02.10.13

Catatan: tersedia dalam mikrofilm. Berkas-berkas asli disimpan di Arsip Nasional Jakarta.

3. Arsip pribadi J.W. Meijer Ranneft, 1907-1967, kode akses 2.21.121

Meijer Ranneft pada periode 1918-1925 adalah Adjunct-Inspecteur voor Agrarische Zaken (Wakil Inspektur Urusan Pertanian). Nomor Inventaris 15 berisi laporan mengenai perjalanan dinas ke Banyumas, untuk menyelesaikan sengketa tentang lahan hutan lindung.

4. Arsip pribadi C.H. Japing, 1911-1967, kode akses 2.21.205.27

Japing pada periode 1914-1938 bekerja sebagai *houtvester* (pengelola hutan) dan inspektur pada Dinas Kehutanan. Foto dan bahan dokumentasi yang terlampir pada arsip itu tersimpan di Universiteitsbibliotheek / UB, Leiden.

5. Arsip pribadi G.L. Tichelman, 1916-1937, kode akses 2.21.097.01

Tichelman adalah pegawai BB. Nomor inventaris 16 berisi berkas-berkas – antara lain, *opperhoutvester* (kepala kehutanan) yang berdinis di Departemen Kehutanan – menyangkut permasalahan sekitar konsesi kepada perusahaan swasta untuk penebangan dan transportasi kayu di Bagian Tenggara Borneo.

6. Arsip pribadi A. Groothoff, 1895-1969, kode akses 2.21.076

Groothoff bekerja antara lain sebagai insinyur kepala pada Dienst voor Waterkracht en Electriciteit (Dinas Pembangkit Listrik dan Tenaga Air) di Bandung. Nomor inventaris 109 berisi berkas-berkas kegiatannya di komisi yang harus memberikan advis tentang adanya kemungkinan penambahan lahan untuk dijadikan hutan lindung, yaitu lahan yang dulunya disediakan untuk budidaya kopi pemerintah di Jawa.

7. Arsip N.V. Nederlandse Maatschappij untuk Nieuw-Guinea, 1892-1964, kode akses 02.20.29

Dalam arsip ini laporan *houtvester* (pengelola hutan) dari Dinas Kehutanan tentang eksplorasi hutan dan (kemungkinannya untuk melakukan) eksploitasi hutan di pulau ini.

8. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta, melalui halaman ikhtisar Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Verslag van den Dienst van het Boschwezen in Nederlandsch-Indië, 1901-1948 (Laporan Dinas Kehutanan di Hindia-Belanda), Batavia: G. Kolff.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië

Untuk berkas ini lihat *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1865 no. 96; 1866 no. 127; 1874 no. 110; 1897 no. 61; 1904 no. 380; 1913 no. 495; 1927 no. 221.

Daftar Pustaka

Benda, Harry J. dan Lance Castles (1969), 'The Samin movement', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 125, hlm 207-241.

Boomgaard, Peter (1994), 'Colonial forest policy in Java in transition', dalam: R. Cribb (ed.), *The late colonial state; Political and economic foundations of the Netherlands Indies 1880-1942* (Leiden: KITLV Press), hlm 117-137.

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *Boswezen* (I, hlm 385-392; VI, hlm 629-640).

Peluso, Nancy Lee (1992), *Rich forests, poor people; Resource control and resistance in Java* (Berkeley-Los Angeles-Oxford: University of California Press).

4 De Inspectie voor Agrarische Zaken (Inspeksi untuk Urusan Agraria)

Dinas Inspeksi ini dimulai berdasarkan Gouvernementsbesluit (Keputusan Pemerintah) 24 April 1903 no. 21. Inspektur pertama adalah S. de Graaff, yang kemudian menjadi Menteri van Koloniën (Menteri Urusan Tanah Jajahan) (1919-1925, 1929-1933). Di bawah perintah direktur Binnenlands Bestuur / BB (Pemerintahan Dalam Negeri) ia harus mengawasi perjalanan yang baik dari semua peraturan yang muncul dari Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) pada tahun 1870.

Undang-undang itu memungkinkan para pengusaha swasta menyewa tanah dari pemerintah atau penduduk pribumi atau mendapatkannya sebagai tanah erfpah. Masyarakat Indonesia masih menyandang sifat feodal. Hukum adat, yaitu di bidang hukum kepemilikan, berbeda secara mendasar dari Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang didasarkan pada hukum Romawi. Oleh karena itu, tidak lama setelah pengumuman Undang-Undang Agraria di kalangan pemerintah dianjurkan adanya pengangkatan Inspecteur Agrarische Zaken (Inspektur Urusan Agraria). Ia tidak hanya akan sebagai pengawas dan koordinator tetapi juga harus menjadi tempat bertanya dan juru penerang. Dalam fungsinya sebagai juru penerang, di saat diperlukan, ia perlu menjelaskan kepada masyarakat pribumi makna dan konsekuensi dari penyewaan tanah dengan segala hak dan kewajiban yang terkait. Dengan cara itu diharapkan adanya jaminan keseragaman kebijakan dan dukungan bagi masyarakat pribumi dalam bernegosiasi dengan pengusaha barat. Dengan pertimbangan penghematan, berdasarkan Gouvernementsbesluit (Keputusan Pemerintah) tanggal 5 Desember 1872 tugas-tugas inspeksi itu didudukkan di bawah Inspecteur voor de 'Bewaterde Velden' (Inspektur Lahan yang Diairi), yang terkait pada Departement van Burgerlijke Openbare Werken (Departemen Pekerjaan Umum Sipil).

Penataan peraturan agraria dengan cepat meluas dan menjadi lebih tidak transparan. Persaingan yang meningkat antarpengusaha memperbesar tekanan terhadap rakyat. Para pegawai pemerintah, yang harus menjalankan aturan-aturan itu dalam praktek, menginterpretasikan ketentuan-ketentuan itu tidak senada dan seringkali cenderung melindungi rakyat. Hal ini menyebabkan timbulnya pelbagai keluhan terutama dari pabrik gula. Ketika pada tahun 1900 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1900 no. 240) revisi peraturan penyewaan tanah di Jawa dan Madura diumumkan, Algemene Secretaris (Sekretaris Umum) D.F.W. van Rees yang intensif sibuk dengan materi ini untuk sementara diangkat menjadi pengawas atas pelaksanaan peraturan itu. Pleidoinya yang kuat untuk mengangkat seorang pejabat khusus pada tahun 1903 dikabulkan. Inspektur baru itu juga mendapat tugas untuk menyusun usulan guna menstimulasi pertanian dan perkebunan kecil di antara orang (Indo) Eropa dan guna memberantas pauperisme di kelompok ini. Pada tahun 1914 tugasnya ditambah lagi dengan mengatur 'van aangelegenheden betreffende de verplichte diensten' (hal-hal menyangkut kerja wajib). Pada pertengahan tahun 30-an gelar Inspecteur voor Agrarische Zaken en Verplichte Diensten

(Inspektur Urusan Agraria dan Kerja Wajib) menjadi Adviseur voor Agrarische Zaken en Kolonisatie (Penasihat Urusan Agraria dan Kolonisasi).

Arsip pribadi J.W. Meijer Ranneft, wakil inspektur Urusan Agraria selama tahun 1918-1925, memberikan gambaran tentang kegiatan pekerjaan dinas ini. Dalam laporannya tentang perjalanan dinas ke Cirebon di bagian utara Jawa (1919), ia menyatakan bahwa peningkatan penduduk dan hutang yang tinggi berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi. Tanah pertanian dijadikan agunan dalam meminjam uang. Karena pinjaman tidak dilunasi maka ada ancaman tanah akan diambil. Kebijakan pemerintah justru terarah membiasakan penduduk pribumi akan kepemilikan tanah individual berdasarkan warisan. Menurut Meijer Ranneft masalah itu dapat dipecahkan dengan membagi kembali tanah (komunal) itu, mendaftarkan *gronduitgifte* (pengeluaran tanah) itu secara teliti, mencatat hutang-hutang, dan menyusun aturan pelunasannya. Dinas Inspeksi juga menjembatani konflik antara pemerintah dan rakyat tentang *rechtstitels op de grond* (status hak atas tanah). Permasalahan tanah yang menyangkut mesjid (*goederen in de dode hand* ‘barang-barang yang tidak bisa diwariskan’) atau pertikaian tanah dalam hal lahan pertanian swasta (antara pemilik tanah dan penduduk pribumi di satu sisi dan antara pihak-pihak itu dan pemerintah di sisi lain) juga diserahkan kepada Dinas Inspeksi, sama halnya dengan pengalihan dari sewa tanah ke bentuk erfpah. Dilakukan kerja sama yang erat dengan para pegawai pemerintahan Eropa dan pribumi dan, jika mungkin, dengan perhimpunan pribumi seperti Sarekat Islam. Kegiatan pekerjaan dari Dinas Inspeksi di daerah kolonisasi membuat inspektur menjadi anggota Commissie voor grondbezit voor Indo-Europeanen (Komisi untuk kepemilikan tanah bagi orang-orang Indo-Eropa) pada tahun 1931 dan Centraal Kolonisatie Comité (Komite Kolonisasi Pusat) pada tahun 1930. Komite ini mengajukan usulan tindakan untuk mendorong transmigrasi masyarakat pribumi ke daerah yang kurang padat penduduknya (pengeluaran tanah dalam bentuk sewa atau erfpah).

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Berkas-berkas tentang pelaksanaan tugas Dinas Inspeksi dapat ditemukan dengan menggunakan akses (*indices* ‘indeks’) di *openbaar archief* (arsip umum), dalam rubrik-rubrik berikut:

- a. **Periode 1850-1900** (kode akses 2.10.02; 2.10.10): ‘Afstand en verhuringen van land’ (Pelepasan dan penyewaan tanah); ‘Agrarische aangelegenheden’ (Urusan agraria); ‘Kolonisatiën / kolonisatie, landverhuizingen, koelies’ (Kolonisasi, emigrasi, kuli).

- b. Periode setelah 1900** (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03): ‘Agrarische aangelegenheden / zaken’ (Hal-hal / urusan agraria); ‘Erfpacht’ (Erfpah); ‘Grond (-bezit, -rechten) / gronden’ (Kepemilikan tanah, hak atas tanah / lahan-lahan tanah); ‘Kolonisatie (emigratie, inlandse en transmigratie)’ (Kolonisasi: emigrasi pribumi, transmigrasi); ‘Landerijen, particuliere-’ (Kawasan tanah luas swasta).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang ‘inspectie na 1921’ (dinas inspeksi sesudah tahun 1921), akses *4de afdeling* (bagian ke-4) sangat penting: lihat kode akses 2.10.36.011.

Kemungkinan *geheim- en kabinetsarchief* (arsip kabinet dan rahasia) beserta *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 berisi bahan yang penting. Untuk periode 1850-1900, lihat kode akses 2.10.02; untuk periode setelah 1900, lihat kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.30.07.

Serie openbare Oost-Indische besluiten, besluiten van de gouverneuer-generaal (Seri keputusan Hindia-Timur umum, keputusan-keputusan gubernur-jenderal), tahun 1850 – Januari 1932, kode akses 2.10.02.

Untuk berkas ini, lihat keputusan 5 Desember 1872 no.13; keputusan 27 Agustus 1900 no. 12; keputusan 26 Maret 1902 no. 26; keputusan 24 April 1903 no. 21.

2. Arsip pribadi keluarga Van Rees, 1837-1950, kode akses 2.21.301

Termasuk ini adalah berkas-berkas dari ‘D.F.W. van Rees (1863-1934), Sekretaris Umum, anggota dan selanjutnya sebagai wakil-ketua Dewan Hindia’. Nomor inventaris 167, 168, dan 73 berisi berkas-berkas tentang ‘pengangkatan seorang Inspektur Urusan Agraria dan kegiatan pekerjaannya’.

3. Arsip pribadi J.W. Meijer Ranneft, 1907-1967, kode akses 2.21.121

Lihat nomor inventaris 9, 11-12, 15-17.

4. Arsip Deli-Maatschappij, 1869-1967, kode akses 2.20.46

Nomor inventaris 7 berisi berkas-berkas ‘pengalihan konsesi pertanian ke erfpah, dengan penataan peraturannya’. Hal ini termasuk dalam lapangan kerja Dinas Inspeksi Urusan Agraria. Lihat juga Bab 37 dalam buku panduan ini.

5. Arsip Nederlands-Indisch Landsyndicaat (Sindikat Tanah Hindia-Belanda), 1910-1964, kode akses 2.20.01

Nomor inventaris 12036 berisi laporan dari Centraal Kolonisatie Comité (Komite Kolonisasi Pusat) yang dibentuk pada tahun 1930, yang harus mengajukan permohonan untuk menstimulasi kolonisasi. Inspektur Urusan Agraria adalah anggota Komite.

6. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië (Almanak Pemerintah untuk Hindia-Belanda). Di dalam almanak ini terdapat gambaran formasi pegawai Dinas Inspeksi dan perubahan-perubahan nama dicantumkan.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië, met Bijbladen (Lembaran Negara Hindia-Belanda, dengan Lembaran Tambahan)

Untuk berkas ini digunakan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1905 no. 268; 1914 no. 171.

Daftar Pustaka

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *Agrarische wet* (I, hlm. 18-24) dan lema *Kolonisatie* (II, hlm. 421-424).

Maassen, C.C.J. dan A.P.G. Hens (1934), *Agrarische regelingen voor het gouvernementsgebied van Java en Madoera* (2 jilid, 3 bundel; Batavia: Ruygrok).

5 Het Volkskredietwezen (Sistem Kredit Rakyat)

Dinas pemerintah yang didirikan pada tahun 1912 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1912 no. 210) ini, berada di bawah Departement van Binnenlands Bestuur / BB (Departemen Pemerintahan Dalam Negeri). Di bagian atas organisasi terdiri dari seorang penasihat dan staf kecil. Mereka menentukan kebijakan dan mendukung para pegawai di lapangan, antara lain dengan cara menulis panduan untuk mendirikan dan mengelola berbagai lembaga kredit. Pada tingkat lokal dan regional, *buitendienst* (bagian dinas lapangan: Eropa dan Indonesia) mencoba mendorong rakyat untuk membangun *rijtschuren* (gudang beras / lumbung padi), *dorpsbankjes* (bank desa), dan *afdelingsbanken* (bank cabang). Ada penasihat yang bertugas membimbing mereka dalam mendirikan semua itu dan juga membantu dalam pengelolaan dan penyelesaian masalah sehari-hari. Tugas lapangan ini diambil alih dari pegawai pemerintah Eropa dan pribumi.

Ketika pada awal abad ke-20 pemerintah memutuskan untuk mendorong pembentukan *landbouwkredietinstellingen* (lembaga kredit pertanian) atas dasar koperasi dalam rangka meningkatkan kemakmuran, para pegawai itu mendapatkan peran memelopori pelaksanaan pekerjaan tersebut. Namun, ternyata tugas itu terlalu membebani korps pegawai BB. Berbeda dengan harapan sebelumnya, gagasan koperasi ternyata tidak berjalan. Lagipula, untuk melaksanakan tugas itu, dibutuhkan pengetahuan khusus. Pemerintah memahami bahwa adanya pendekatan yang lebih terstruktur dibutuhkan demi keberhasilan rencana itu dan bahwa pemerintah, bertentangan dengan tujuan awalnya, sementara ini harus berperan aktif. Pemerintah lalu membentuk dinas khusus untuk tujuan itu.

Ada tiga jenis *volkskredietinstellingen* (lembaga kredit rakyat)

- *Rijtschuren* (Gudang beras / lumbung padi) ditemukan terutama di Jawa: pada tahun-tahun 20-an, saat pembangunan mencapai puncaknya, ada 6.000 lumbung. Persediaan padi dapat digunakan pada masa kurang pangan dan dapat dijual pada waktu yang tepat bagi petani. Dengan cara begitu pula, kebebasan pembeli partikular dibatasi. Dana cadangan dari gudang, sebagian terdiri dari bunga yang berupa uang, hasil dari beras yang dipinjamkan. Jadi, lumbung sejalan dengan *productenhuishouding* (pengaturan produk) yang masih ada di masyarakat desa, tetapi pada saat yang sama usaha desa itu diperluas dengan *geldhuishouding* (pengaturan keuangan).
- *Dorpsbanken* (Bank desa) adalah bank uang, yang meminjamkan uang dengan bunga untuk pembelian benih, pupuk, peralatan pertanian kecil, pendirian usaha kecil, dan sebagainya. Pada tahun 1941 ada lebih dari 1.100 bank yang tersebar di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Juga orang Cina memanfaatkan bank-bank tersebut.
- *Afdelings (Java)-, en Gewestelijke (Buitengewesten) banken* (Bank cabang di Jawa dan bank daerah di luar Jawa dan Madura) mengelola uang para pegawai pemerintah, swasta, masyarakat hukum adat pribumi, dan dana yang dikelola bank desa. Uang ini diinvestasikan dalam proyek-proyek regional untuk pertanian, perikanan, pembuatan

jalan, perumahan, dan sebagainya. Pada tahun 1941 ada lebih dari 100 bank di Kepulauan Nusantara.

Dienst voor het Volkskredietwezen (Lembaga Kredit Rakyat) bergerak dalam bidang kebijakan, administratif, dan teknis. Centrale Kas (Dinas Kas Keuangan Pusat) dibebani dengan masalah keuangan. Kantor itu didirikan pada tahun 1912 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1912 no. 393). Kantor yang merupakan bagian dari Departemen BB itu, bertugas memberikan saran dan mengontrol semua yang ada kaitannya dengan anggaran uang dari lembaga-lembaga kredit yang disebut tadi. Bersamaan itu, dengan modal yang diputuskan oleh pemerintah, dan dengan dana hasil kelolaan bank desa, bank cabang di Jawa, dan bank daerah di luar Jawa dan Madura, orang harus mendirikan proyek-proyek ekonomi besar-besaran di seluruh Nusantara. Dengan sangat cepat aspek keuangan menjadi lebih penting daripada aspek teknis administratifnya.

Akibatnya, Dienst voor het Volkskredietwezen menjadi bagian dari Centrale Kas pada tahun 1927 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1927 no. 77). Pada tahun 1934 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1934 no. 82) Centrale Kas bergabung dengan *afdelingsbanken* (bank cabang) dan *gewestelijke banken* (bank daerah) menjadi Algemene Volkskredietbank / AVB (Bank Kredit Rakyat Umum). AVB mendanai proyek-proyek dalam kerja samanya dengan instansi pemerintah lainnya seperti Landbouwvoorlichtingsdienst (Dinas Penyuluhan Pertanian), dan juga mengontrol *dorpsbanken* (bank desa) dan *rijstschuren* (gudang beras / lumbung padi). Pada tahun-tahun krisis, bank berusaha untuk lebih banyak meminjamkan uang pada pelbagai gudang beras itu untuk mencegah rakyat petani beralih meminjam uang ke pihak swasta. AVB berada di bawah *commissie van toezicht en bijstand* (komisi pengawasan dan bantuan) yang diketuai oleh direktur Departement van Economische Zaken (Departemen Urusan Ekonomi) yang baru didirikan (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1934 no. 490). Seperti layanan pemerintah lainnya, Volkskredietwezen (Sistem Kredit Rakyat) menawarkan kesempatan kerja kepada elite pegawai Indonesia yang baru, yang berasal dari kaum priyaji rendah dan kaum menengah yang mulai bertambah.

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) setelah tahun 1900

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Berkas-berkas tentang ‘volkskredietwezen’ (sistem kredit rakyat) bisa ditemukan dengan menggunakan akses (*indices* ‘indeks’) dalam *openbaar archief* (arsip umum) mulai tahun 1900 (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03), di dalam rubrik: ‘Bestuur, binnenlands’ (Pemerintahan dalam negeri); ‘Coöperatie’ (Koperasi); ‘Credietwezen’ (Sistem Kredit); ‘Landbouw en cultures’ (Pertanian dan budidaya tanaman); ‘Volkscredietwezen en

coöperatie' (Sistem Kredit Rakyat dan koperasi); Welvaartsdiensten (Dinas layanan kesejahteraan).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1900-1921 dapat diakses dengan menggunakan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas tentang 'kredietwezen' (sistem kredit) setelah tahun 1921, akses *4de afdeling* (bagian ke-4) adalah penting, lihat kode akses 2.10.36.011.

Tidak mungkin bahwa *geheim- en kabinetsarchief* (arsip rahasia dan arsip kabinet) dan *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) dari tahun 1914 berisi banyak berkas tentang 'volkskredietwezen' (sistem kredit rakyat). Penelitian data itu yang terbaik dapat dilakukan berdasarkan (mungkin saja) acuan dalam *openbaar archief* (arsip umum).

Berkas-berkas yang berkaitan dengan 'oprichten van volkskredietbanken' (pendirian bank kredit rakyat) dimuat dalam publikasi sumber:

- P. Creutzberg ed. (1972-1975), *Het economisch beleid in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Wolters-Noordhoff).

2. Arsip pribadi keluarga Fruin, 1749-1994, kode akses 2.21.222

Lihat berkas-berkas dari mr. Th.A. Fruin (1890-1964), antara lain 'adjunct-adviseur voor het Volkskredietwezen' (wakil penasihat untuk Sistem Kredit Rakyat), 'directeur van de Centrale Kas' (direktur Centrale Kas), dan 'president van de Algemene Volkskredietbank / AVB' (presiden AVB), nomor inventaris 69-119 dan 219-227. Lihat juga Bab 17 dalam buku panduan ini.

3. Arsip Nederlandsch-Indische Handelsbank / Nationale Handelsbank (Bank Dagang Hindia-Belanda / Bank Nasional), 1863-1967, kode akses 02.20.03

Directeur Batavia van Nederlandsch-Indische Handelsbank / NIH (Direktur NIH Batavia) adalah anggota 'Commissie van toezicht en bijstand van de Centrale Kas' (Komisi Pengawasan dan Bantuan dari Dinas Keuangan Pusat). Nomor inventaris 1652 berisi berkas tentang 'volkskredietwezen' (sistem kredit rakyat).

4. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber itu lihat Picarta, melalui halaman ikhtisar Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Verslag van het Volkscredietwezen (Laporan Sistem Kredit Rakyat) (1912-1934; Batavia); berlanjut menjadi *Verslag der Algemeene Volkscredietbank* (Laporan Sistem Kredit Umum) (1933-1949; Batavia).

Het Blaadje van de Centrale Kas (Majalah Dinas Keuangan Pusat) (1918-1921; Weltevreden); berlanjut menjadi *Het Blaadje voor het Volkscredietwezen* (Majalah Sistem Kredit Rakyat) (1922-1930; Weltevreden); berlanjut menjadi *Volkscredietwezen* (Sistem Kredit Rakyat) (1931-1941; Batavia).

Bagian-bagian dari arsip pribadi Th.A. Fruin, nomor inventaris 220.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië, met Bijbladen (Lembaran Negara Hindia-Belanda, dengan Lembaran Tambahan)

Untuk berkas ini digunakan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1912 no. 210; 1912 no. 393; 1912 no. 552; 1918 no. 848; 1924 no. 88; 1925 no. 105; 1926 no. 343; 1927 no. 77; 1934 no. 82; 1934 no. 490.

Bijbladen no. 6462; 6649; 7727; 11290; 13253.

Daftar Pustaka

Cramer, J.C.W. (1929), *Het volkscredietwezen in Nederlandsch-Indië* (Amsterdam: Paris).

Djojohadikoesoemo, R.M. Soemitro (1943), *Het volkscredietwezen in de depressie* (Haarlem: De Erven F. Bohn).

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill): lema *Volkskredietwezen* (IV, hlm. 605-610; VI, hlm 713-717).

Fruin, Th.A. (1935), *Voorloopige handleiding voor het credietbedrijf der Algemeene volkscredietbank* (Batavia: Algemeene Volkscredietbank).

Catatan: pada tahun 1994 publikasi ini diterbitkan kembali oleh Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling Voorlichting Ontwikkelingssamenwerking (Kementerian Luar Negeri, Bagian Penerangan Kerja Sama Pembangunan) dengan judul *Provisional manual for the credit business of the General Popular Bank* (2 jilid; Den Haag, Klaas Kuiper ed.).

Fruin, Th.A. (1941), 'Het credietwezen', dalam: W.H. van Helsdingen dan H. Hogenberk ed., *Daar wèrd wat groots verricht ... Nederlandsch-Indië in de XXste eeuw* (Amsterdam: Elsevier), hlm. 369-379.

Vries, E. de (1961), 'De welvaartsdiensten', dalam: H. Baudet dan I.J. Brugmans, *Balans van beleid; Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië* (Assen: Van Gorcum), hlm. 267-289.

6 De Dienst voor Oost-Aziatische Zaken en voorgangers (Dinas Urusan Asia Timur dan pendahulunya)

Dienst voor Oost-Aziatische Zaken / DOAZ (Dinas untuk Urusan Asia Timur) adalah badan hukum penerus dari Dienst der Chineesche Zaken en Oost-Aziatische Aangelegenheden (Dinas Urusan Cina dan Perihal Asia-Timur). Dinas itu terbentuk sebagai hasil fusi dari dua kantor yang beroperasi sendiri-sendiri, yaitu Kantoren voor Chinese en Japanse Zaken (Kantor Urusan Cina dan Kantor Urusan Jepang) (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1932 no. 583). Pemerintah Jepang tidak bisa menerima bahwa Cina dalam nama organisasi baru itu dicantumkan secara eksplisit, sementara Jepang berada di bawah peristilahan umum ‘Oost-Aziatische aangelegenheden’ (Urusan Asia-Timur). Pemerintah Hindia menanggapi iritasi Jepang itu dengan serius dan pada bulan Juli 1935 bagian nama Chineesche Zaken (Urusan Cina) dihapus dari nama organisasi itu (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1935 no. 311).

DOAZ adalah dinas penerangan yang atas perintah dari Direktorat Binnenlands Bestuur / BB (Pemerintahan Dalam Negeri) mengumpulkan data orang Cina dan Jepang di Nusantara dan menggarap data tersebut untuk pemerintah. Pada tahun 30-an hidup 2 juta orang Cina dan 7.000 orang Jepang di Hindia-Belanda. Masyarakat Cina memiliki hubungan yang erat, terorganisir dengan baik, dan menjalin hubungan dekat dalam hal keuangan dan politik dengan negara asalnya, Cina. Di bidang ekonomi, masyarakat Cina menduduki tempat yang menonjol. Masyarakat Jepang yang tinggal di Hindia, terutama pada tahun 30-an, sebagian besar dipakai oleh ekspansionis Jepang dalam kegiatan spionase di Nusantara. Dampak dari perkembangan politik antara Jepang dan Cina, yang pada tahun 1937 mengarah ke perang juga, membuat DOAZ terpaksa beroperasi secara internasional.

Pada pertengahan abad ke-19, pemerintah merasa perlu untuk mempunyai juru bahasa dan penerjemah yang terdidik dan dapat dipercaya, yang bisa langsung menolong dalam perkara persidangan yang menyangkut orang Cina dan juga yang bisa menerjemahkan publikasi Cina. Sejak tahun 1860 hanya orang Eropa saja yang bisa mengikuti pendidikan resmi untuk menjadi juru bahasa. Para juru bahasa itu harus bekerja di tempat orang-orang Cina tinggal. Mereka ada di bawah tanggung jawab kepala pemerintahan daerah. Kepala pemerintahan daerah itu bisa memperoleh advis tentang perihal Cina dan juga bisa meminta mereka untuk ikut mengiringi jika ia akan melakukan perjalanan dinas. Perkembangan dunia usaha menyebabkan tumbuhnya imigrasi buruh pekerja Cina pada masa setelah tahun 1870. Oleh sebab itu, pemerintah menginginkan para juru bahasa itu lebih terlibat dalam urusan pemerintahan. Pada Koninklijk Besluit (Keputusan Raja) tertanggal 26 April 1895 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1895 no. 135) ditentukan bahwa para juru bahasa di Nusantara akan digantikan dengan lima pegawai pemerintah untuk Urusan Cina. Kepala baru mereka adalah Directeur van Justitie (Direktur Kehakiman). Pada tahun 1896 (*Staatsblad van Nederlandsch-*

Indië 1896 no. 43), gubernur-jenderal menentukan lingkungan kerja dan deskripsi tugas²⁷ dari para pegawai pemerintah itu. Hindia dibagi menjadi lima wilayah dengan masing-masing pangkalannya sendiri (Batavia, Surabaya, Medan, Makasar, dan Tanjung Pinang). Para pegawai Urusan Cina ditempatkan di pangkalan mereka. Mereka harus memberikan advis kepada *burgerlijke en rechterlijke autoriteiten* (pihak otoritas sipil dan hukum) di daerah pemerintahan mereka dan kepada Direktur Kehakiman. Dalam kerangka ini, mereka menjalin hubungan dengan para kapten, mayor, dan letnan dari masyarakat Cina dan dengan pelbagai *Chinese raden* (Dewan Cina) di berbagai kota.²⁸ Mereka juga harus memperhatikan apakah ketentuan dan peraturan bagi buruh pekerja Cina di perusahaan swasta di daratan dan pertambangan tetap ditaati. Jika di pangkalan mereka terdapat *weeskamer* (balai harta peninggalan), maka mereka adalah anggota luar biasa balai tersebut. Mereka harus tetap melaksanakan pekerjaan sebagai juru bahasa dan penerjemah dan diizinkan untuk melakukan perjalanan dinas secara mandiri, juga (dengan izin) ke luar daerah pemerintahan mereka.

Setelah tahun 1900, dalam rangka *Ethische Politiek* (Politik Etis), pemerintah mulai ikut campur secara intensif dengan perihal *pandhuizen* (rumah pegadaian) dan *opiumregie* (jawatan pengaturan opium). Pada kedua bidang itu, orang Cina memegang monopoli yang tidak selalu menguntungkan pihak masyarakat Indonesia. Demikian pula industri batik pribumi semakin terganggu oleh konkurensi dengan orang Cina. Meningkatnya ketegangan di antara kelompok penduduk dipengaruhi oleh perkembangan di negeri Cina, di mana pada tahun 1912 kekaisaran di sana digantikan dengan pemerintahan republik. Perubahan itu sangat membangkitkan kesadaran diri sebagai orang Cina, juga pada orang Cina di Hindia. Dalam keadaan seperti itu muncul kebutuhan untuk membuka *Centraal Kantoort voor Chinese Zaken* (Kantor pusat untuk Urusan Cina). Kantor itu didirikan pada bulan Mei 1916 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1916 no. 377) dan ditempatkan di bawah Departemen BB. Kepala kantornya, yang disebut Adviseur voor Chinese Zaken (Penasihat untuk Urusan Cina), harus mengajukan laporan tahunannya kepada Direktur BB. Dia juga menjalin kontak dengan kepala departemen lain dan dengan otoritas dan dewan sipil dan hukum. Kantor itu mengumpulkan dan mengolah informasi yang diterima, dan berdasarkan informasi itu menyusun ikhtisar dari berita pers Cina dan Melayu-Cina dan, apabila dibutuhkan, juga menyediakan juru bahasa dan penerjemah.

Kebutuhan akan pegawai Eropa yang bisa berbahasa Jepang juga muncul dalam hal masalah hukum. Pada tahun 1906, seorang pegawai Urusan Cina dikirim ke Jepang untuk mendapatkan pengetahuan bahasa, negeri, dan kemasyarakatan dari negara itu. Pejabat itu melaporkan bahwa pengkajian terhadap hubungan antara Jepang dan Cina memberikan wawasan baru kepadanya dalam menanggapi masalah Cina yang dihadapinya di Hindia. Pada tahun 1908, pemerintah yang menyadari peningkatan pesat arti Jepang, untuk sementara juga membebani pegawai untuk Urusan Cina itu dengan tugas menangani Urusan Jepang. Pada bulan Juni tahun 1922 didirikan *Kantoort voor Japanse Zaken* (Kantor untuk Urusan Jepang)

²⁷ Pembagian tugas ini beberapa kali mengalami perubahan: lihat dalam *Staatsbladen* (Lembaran-lembaran Negara).

²⁸ Lihat catatan kaki 2 pada Bab 2 dan dua publikasi Mona Lohanda (2001, 2002).

yang terpisah (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1922 no. 404). Perincian tugasnya hampir sama dengan tugas pada *Kantoor voor Chinese Zaken* (Kantor untuk Urusan Cina), dengan syarat bahwa Penasihat untuk Urusan Jepang juga boleh memberikan informasi kepada orang Jepang yang mengunjungi Hindia, yang tinggal di sana, atau yang ingin menjalin hubungan dengan Hindia. Sebuah usulan untuk melibatkan kantor itu dalam meningkatkan hubungan perdagangan dengan Jepang ditolak, karena kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan). Karena perkembangan Jepang di tahun 20-an tidak mengancam Hindia, maka gubernur-jenderal memutuskan untuk menutup kantor itu pada musim panas 1931. Dalam hal ini pertimbangan penghematan ekonomi juga memainkan peran. Urusan Jepang selanjutnya harus ditangani oleh *Kantoor voor Chinese Zaken*. Setelah invasi Jepang di Mansuria (1931) penguasa negeri menarik kembali keputusannya. Setahun kemudian fusi kedua kantor yang disebut sebelumnya terwujud.

DOAZ dalam waktu yang singkat mendapatkan posisi yang kuat. Tidak seperti para pejabat pendahulunya, kepala DOAZ dalam beberapa kasus yang terjadi dapat langsung menghubungi gubernur-jenderal. Setelah invasi Jerman di Belanda (Mei 1940), kantor ini tampil dalam kancah internasional dengan cara memberikan informasi tentang Timur Jauh kepada para sahabat negara Barat.

Arsip DOAZ dimusnahkan sebelum pendudukan Jepang.

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Untuk bab ini dilakukan penelitian arsip. Berkas-berkas tentang organisasi yang tercantum di bawah ini dapat ditemukan dengan menggunakan akses (*indices* 'indeks') di *openbaar archief* (arsip umum), dalam rubrik-rubrik berikut: 'Ambtenaren (in het algemeen; oosterse talen en zaken)' (Pegawai pemerintah secara umum; bahasa dan urusan Timur); 'Japanse zaken' (Urusan Jepang); 'Onderwijs' (Pendidikan); 'Chinezen-Dienst voor Chinese Zaken' (Orang-orang Cina - Dinas untuk Urusan Cina); 'Japanners- Kantoor voor Japanse Zaken' (Orang-orang Jepang – Dinas untuk Urusan Jepang); 'Dienst der Oost-Aziatische Zaken' (Dinas untuk Urusan Asia-Timur).

Untuk berkas ini digunakan arsip verbal: 22 April 1895 no. 23; 12 September 1905 no. 11; 28 Mei 1909 no. 48; 30 Maret 1915 no. 26; 29 April 1916 no. 55; 23 Oktober 1916 no. 21a; 11 September 1917 no. 1; 19 April 1920 no. 39; 29 Desember 1932 no. 26; 24 Juli 1935 no. 10.

Berkas-berkas tentang pelaksanaan tugas pegawai / penasihat, advis dan laporan mereka, dapat ditemukan melalui akses (*indices* 'indeks') di *openbaar archief* (arsip umum) dalam rubrik-rubrik:

a. Periode 1850-1900 (kode akses 2.10.02; 2.10.10): 'Ambtenaren (in het algemeen; Oosterse talen en zaken)' (Pegawai pemerintah secara umum; bahasa dan urusan Timur); 'Drukkerijen en Dagbladen' (Percetakan dan Surat kabar Harian); 'Justitiwezen in O-Indië' (Sistem yustisi Hindia-Timur); 'Kolonisatiën' (Kolonisasi); 'Regering in de koloniën' (Pemerintah di tanah jajahan). Lihat juga rubrik berdasarkan nama daerah.

b. Periode setelah 1900 (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03): 'Ambtenaren oosterse talen en zaken' (Pegawai bahasa dan urusan Timur); 'Betrekkingen met vreemde mogendheden' (Hubungan dengan negara-negara asing), 'Chinese aangelegenheden / zaken' (Perihal / urusan Cina); 'Chinezen' (Orang Cina); 'Japanse zaken' (Urusan Jepang); 'Japanners' (Orang-orang Jepang); 'Kolonisatie, landverhuizers en koelies' (Kolonisasi, emigran, dan kuli); 'Oost-Aziatische zaken' (Urusan Asia-Timur); 'Rechtswezen' (Sistem hukum), 'Regering in de koloniën' (Pemerintah di tanah jajahan); 'Vreemde Oosterlingen' (Orang Timur Asing).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan menggunakan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas mengenai dinas-dinas setelah tahun 1921 akses *4de en 1ste afdeling* (bagian ke-1 dan ke-4) sangat penting: lihat kode akses 2.10.36.011. Akses ini juga memuat register kata kunci berdasarkan nama-nama geografi.

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia), khususnya untuk periode setelah tahun 1900, memuat banyak bahan penting. Untuk periode 1850-1900, lihat kode akses 2.10.02. Untuk periode setelah tahun 1900, lihat kode akses 2.10.36.013 dan 2.10.36.051. Dalam bagian arsip setelah tahun 1900 terdapat laporan dinas tahunan. Untuk berkas ini lihat *geheim archief* (arsip rahasia): *verbaal* (arsip verbal) tanggal 10 Agustus 1931 huruf N14.

Serie geheime mailrapporten (Seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 (kode akses 2.10.36.06 dan 2.10.36.07) berisi antara lain *Overzichten van de Maleis-Chinese en Chinese pers* (Ikhtisar berita Cina dan Melayu-Cina), dan *Mededelingen van de Dienst der Chinese Zaken en Oost-Aziatische Aangelegenheden* (Laporan dari Dinas Urusan Cina dan DOAZ).

Akses yang baik menuju seri ini (dan *openbare mailrapporten* 'laporan surat umum') adalah *List of mailreports on the Japanese activities in Dutch East Indies from 1901 to 1940*, yang disusun oleh Kenji Tsuchiya dan Takashi Shiraishi (1979; Kyoto-Tokyo).

Advis dan laporan dari para penasihat dimuat dalam publikasi sumber berikut:

- R. C. Kwantes ed. (1975-1982), *De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Tjeenk Willink).

- S. L. van der Wal ed. (1964-1965), *De volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië* (2 jilid; Groningen: Wolters).
- S. L. van der Wal ed. (1967), *De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indië* (Groningen: Wolters).

2. Arsip Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kementerian Luar Negeri)

Laporan dari juru bahasa, para pegawai, dan penasihat, misalnya, dalam *Serie A-dossiers* (Seri dosir A), 1871-1940, kode akses 2.05.03 dan 2.05.21; arsip *Afdeling Kabinet en Protocol* (Bagian Kabinet dan Protokol), 1871-1940, kode akses 2.05.18; arsip *Nederlands consulaat-generaal in Hongkong* (Konsulat-Jenderal Belanda di Hong Kong), 1891-1921, kode akses 2.05.27.01; arsip *Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in China* (Perwakilan diplomatik Belanda di Cina), 1862-1954, kode akses 2.05.90; arsip *Nederlandse consulaat-generaal in Shanghai, China* (Konsulat-Jenderal Belanda di Shanghai, Cina), (1852) 1877-1951, kode akses 2.05.91 (lihat nomor inventaris 313); arsip *Nederlands gezantschap in Japan* (Kedutaan Belanda di Jepang), 1880-1942, kode akses nomor 2.05.115 (nomor inventaris 177 berisi berkas-berkas tentang kelangsungan keberadaan Kantor untuk Urusan Jepang di Hindia-Belanda).

3. Arsip pribadi L.G.M. Jaquet, 1936-1989, kode akses 2.21.278

Jaquet bekerja beberapa tahun di bagian Jepang DOAZ. Lihat nomor inventaris 2.

4. Arsip pribadi A.H.J. Lovink, 1942-1987, kode akses 2.21.281.02

Lovink adalah kepala DOAZ pada tahun 30-an. Lihat nomor inventaris 1-3.

5. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta, melalui halaman ikhtisar Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Mededeelingen van den Dienst der Chineesche Zaken en Oost-Aziatische Aangelegenheden (Laporan dari Dinas Urusan Cina dan Perihal Asia-Timur) (1933; Batavia).

Wekelijksche persoverzichten van den Dienst der Chineesche Zaken en Oost-Aziatische Aangelegenheden (Ikhtisar berita mingguan dari Dinas Urusan Cina dan Perihal Asia-Timur) (1933-1934; Batavia).

Mededeelingen van den Dienst der Oost-Aziatische Zaken (Laporan dari Dinas Urusan Asia-Timur) (1936-1940; Batavia).

Staatsblad van Nederlandsch-Indië met Bijbladen (Lembaran Negara Hindia-Belanda dengan Lembaran Tambahan).

Untuk berkas ini lihat *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1863 no. 39; 1895 no. 135; 1896 no. 96; 1903 no. 135; 1904 no. 100; 1906 no. 476; 1912 no. 245; 1916 no. 377; 1919 no. 643; 1922 no. 404; 1925 no. 195; 1932 no. 583; 1935 no. 311. *Bijblad* no. 7666.

Daftar Pustaka

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *Chinese zaken* (I, hlm. 477-478 ; VI, hlm 717).

Haslach, R.D. (1985), *Nishi no kaze, hare; Nederlands-Indische inlichtingendienst contra agressor Japan* (Weesp: Van Kampen).

Jaquet, L.G.M. (1978), *Aflossing van de wacht; Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indië* (Rotterdam: Ad Donker).

Lohanda, Mona (2001), *The kapitan Cina of Batavia 1837-1942; A history of Chinese establishment in colonial society* (Cetakan ke-2; Jakarta: Djambatan).

Lohanda, Mona (2002), *Growing pains; The Chinese and the Dutch in colonial Java, 1890-1942* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka).

Steenhoek, R. (1987), 'De Dienst der Oost-Aziatische Zaken (1935-1942); Zijn bijdrage aan de kennis van Japan in Nederlands-Indië', dalam: E. Locher-Scholten (ed.), *Beelden van Japan in het vooroorlogse Nederlands-Indië; Resultaten van een doctoraal-werkcollege* (Leiden: Werkgroep Europese Expansie).

7 J.F.R.S. van den Bossche (1819-1889)

Jules Félicien Romain Stanislas van den Bossche (1819-1889) tumbuh di Hindia dan memilih berkarir di Corps Binnenlands Bestuur / BB (Korps Pemerintahan Dalam Negeri). Pada tahun 1845 ia menjadi pengawas di Dataran Tinggi Padang (Pesisir Barat Sumatra), di mana ia beberapa tahun sebelumnya sebagai tentara KNIL berperang melawan para pemberontak. Pengangkatannya sebagai asisten-residen di daerah itu menyusul pada tahun 1852. Tiga tahun kemudian ia meninggalkan Hindia dan pada tahun 1859 ia kembali lagi. Kemudian ia berturut-turut menjadi residen Bangka (1859-1861), residen Besuki (1861-1862), dan gubernur Pesisir / Pantai Sumatra Barat (1862-1869). Keanggotaannya di Raad van Indië (Dewan Hindia) menjadi puncak karir jabatannya (1869-1871). Dewan itu memberikan advis kepada gubernur-jenderal dan juga memiliki kewenangan ikut mengatur. Di dalam peraturan itu ada dua anggota dewan yang berasal dari korps BB: satu untuk Jawa dan satu untuk Wilayah Luar Jawa dan Madura.

Van den Bossche memulai karirnya pada masa Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa). Ia turut campur dengan budidaya padi dan kopi, sewa tanah, aparat pemerintahan pribumi, dan keadaan kesehatan masyarakat. Dari arsipnya ternyata bahwa ia memiliki banyak perhatian terhadap adat, tata susila dan kebiasaan di Sumatra, legenda, syair, dan pelbagai sejarah keturunan raja-raja. Ia adalah anggota dari Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Ikatan Kesenian dan Ilmu Pengetahuan Batavia) dan menyumbang ke lembaga ini antara lain bermacam model perahu dan rumah Bangka. Banyak berkas tertulis dalam bahasa Melayu dan Arab.

Sebagai gubernur Pesisir Barat Sumatra bersama dengan mr. T.H. der Kinderen ia mempersiapkan ordonansi umum perihal hukum. Ahli hukum Der Kinderen pada tahun 1863 diangkat menjadi komisaris pemerintah dengan tugas melakukan reorganisasi sistem hukum di Buitenwesten (Wilayah Luar Jawa dan Madura). Ia mulai dengan daerah terpenting, daerah jabatan dari Van den Bossche. Kedua pegawai pemerintah itu dalam melaksanakan pekerjaannya harus memperhatikan apa yang disebut dengan Lange Plakkaat (Plakat Panjang), yang dinyatakan pada tahun 1833 ketika Pesisir Barat didudukkan di bawah pemerintahan-langsung. Dalam berkas resmi masyarakat dijanjikan antara lain bahwa pemerintah tidak akan mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintahan yang sudah ada dan pengadilan. Dengan bantuan gubernur, Der Kinderen berhasil menyusun peraturan bahwa adat dan kedudukan kepala pribumi diperlakukan dengan adil. Notanya, dengan catatan dari Van den Bossche, dapat ditemukan di dalam arsipnya.

Pelaksanaan hukum baru itu menjadikan hukum adat juga dinyatakan tertulis. Arsip itu berisi suatu kumpulan peraturan adat Minangkabau dan Palembang, dengan penjelasan sejarah (1851).

Setelah pensiun, Van den Bossche menekuni eksploitasi barang tambang. Bersama dengan beberapa rekannya pada tahun 1882 ia mendirikan perusahaan batubara Borneo-Timur. Untuk itu ia telah mendapat konsesi dari Sultan Kutai yang pada tahun 1864 tunduk kepada penguasa Belanda. Pada tahun 1886 menyusul didirikannya perusahaan pertambangan Tambang Salida (Sumatra) untuk menambang emas, perak, perunggu, dan bahan-bahan dengan kandungan timah. Berkas-berkas di dalam arsip memberikan gambaran cara pemerolehan konsesi-konsesi itu.

Arsip

1. Arsip pribadi J.F.R.S.. van den Bossche, 1841-1888, kode akses 2.21.030

Untuk berkas ini lihat pengantar dan nomor inventaris 11; 18; 39; 43-44; 51-54; 60; 93-94; 106; 129; 139.

Catatan: arsip itu juga berisi berkas-berkas pegawai pemerintah E.M. Francis.

2. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1814

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Laporan dan advis dari Van den Bossche dapat ditemukan dengan bantuan akses (indeks) di arsip umum, dalam rubrik-rubrik:

a. Periode 1814-1849 (kode akses 2.10.01): ‘Binnenlandse aangelegenheden’ (Perihal dalam negeri); ‘Oost-Indische archipel’ (Kepulauan Hindia-Timur); ‘Sumatra’.

Alat bantu penting untuk periode ini adalah *Aantekeningenregisters van het Bureau Algemene Zaken* (Register Pencatatan dari Biro Urusan Umum), kemudian *Bureau A* (Biro A) dan *afdeling 1* (bagian 1) tentang periode sekitar 1830-1859 (kode akses 2.10.02, nomor inventaris 9199-9201), lihat rubrik-rubrik ‘Sumatra’; ‘Banka en Billiton’ (Bangka dan Biliton).

b. Periode 1850-1900 (kode akses 2.10.02; 2.10.10): ‘Binnenlandse aangelegenheden’ (Perihal dalam negeri); ‘Oost-Indische archipel’ (Kepulauan Hindia-Timur); ‘Banka’ (Bangka); ‘Java en Madoera’ (Jawa dan Madura); ‘Sumatra’; ‘Justitiewezen in Oost-Indië’ (Sistem yustisi di Hindia-Timur).

Bandingkan dengan paparan rubrik-rubrik tentang periode-periode ini dalam Bab 2 ‘Het bestuur in het binnenland (Pemerintahan dalam negeri)’.

Untuk penelitian, *geheim en kabinetsarchief* (arsip kabinet dan rahasia) tahun 1814-1900 juga perlu diketahui. Untuk periode 1814-1849, lihat kode akses 2.10.01; untuk periode 1850-1900, lihat kode akses 2.10.02.

Raadsadviezen (Advis Dewan). Dewan Hindia memberi advis dalam segala hal untuk kepentingan umum atau khusus. Untuk mencari advis-advis ini hampir semua rubrik indeks perlu diketahui. Untuk paparan rubrik itu lihat Bab 44 dalam buku panduan ini.

Daftar Pustaka

Berg, L.W.C. van den (1898-1899), 'Levensbericht van mr. T.H. der Kinderen', *Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden*, hlm. 158-210.

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *Rechtswezen* (III, hlm. 558-575) dan lema *mr. Timon Henricus der Kinderen* (II, hlm. 323-324).

Kinderen, T.H. der (1875), *De algemeene verordeningen tot regeling van het regtswezen in het gouvernement Sumatra's Westkust, toegelicht uit officieele bescheiden* (2 jilid; Batavia: Ogilvie).

Kinderen, T.H. der (1882), *Formulierboek ten gebruike bij de toepassing van het reglement tot regeling van het regtswezen in het gouvernement Sumatra's Westkust (Staatsblad 1874 no. 94b), voor zooveel betreft de regtspleging bij de Distrikts-, Magistraatsgeregten, de Landraden en Rapats, benevens de uitoefening der politie* (Batavia: Landsdrukkerij).

8 F.N. Nieuwenhuijzen (1819-1892)

Frederik Nicolaas Nieuwenhuijzen (1819-1892) masuk ke Corps Binnenlands Bestuur / BB (Korps Pemerintahan Dalam Negeri) pada tahun 1842. Sebelumnya ia bekerja selama delapan tahun di Algemene Secretarie (Sekretariat Umum), kabinet dari gubernur-jenderal. Sekretariat itu menduduki posisi kunci dalam administrasi pusat. Selama bekerja di Departemen BB, ia ditempatkan di daerah-daerah di Jawa dan Buitenbezittingen (Wilayah Luar Jawa dan Madura). Dia pernah menjadi asisten-residen di distrik bagian utara Makasar (Sulawesi, 1847-1849) dan Madura (1853-1855), residen di Riau (1855-1857), dan *gouvernementscommissaris* (komisaris gubernemen) di bagian tenggara Kalimantan (1859-1860).

Berdasarkan paparan statistik dari distrik-distrik bagian utara itu yang disusun oleh Nieuwenhuijzen pada tahun 1849, ternyata bahwa ia beroperasi sebagai pelopor di daerah yang menunjukkan sikap aneh dan curiga terhadap pemerintahan Belanda. Dia melihat adanya keengganan masyarakat untuk mendapatkan bantuan penanganan dari dokter Eropa bagi orang sakit. Pendidikan mereka ada pada tingkat yang rendah, banyak pegawai pemerintah pribumi yang buta huruf. Permintaan Nieuwenhuijzen untuk mendapatkan uang guna mendirikan sekolah, ditolak.

Rumah dan kantornya dibangun dari bambu, seperti halnya penjara di situ. Nieuwenhuijzen terpaksa memasung kaki para tahanan untuk mencegah mereka melarikan diri. Upayanya dalam memajukan pertanian berhasil, yaitu antara lain dengan membuat saluran-saluran pengairan untuk budidaya padi dan dengan mendatangkan benih-benih impor dari Havana untuk memperbaiki budidaya tembakau.

Pengalaman Nieuwenhuijzen memberikan gambaran tentang posisi pegawai pemerintah di Wilayah Luar Jawa dan Madura pada waktu itu. Pada paruh pertama abad ke-19 pemerintah Hindia-Belanda berpusat di Jawa. Terhadap daerah-daerah lain – dengan pengecualian Sumatra – dilakukan *onthoudingspolitiek* (kebijakan tidak ikut campur). Tanah jajahan harus menghasilkan uang melalui Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa). Hal ini berubah pada sekitar pertengahan abad itu, di bawah pemerintahan Gubernur-Jenderal J.J. Rochussen (1845-1851).

Hasil dari sejumlah tanaman yang mengurang, kekurangan akan pengetahuan spesialis pada para pegawai pemerintah yang semakin meningkat, dan kritik yang bertambah terhadap aspek-aspek etis dari sistem tersebut menyebabkan timbulnya pandangan bahwa pemerintah sebagai pihak pemberi pekerjaan harus memberikan ruang bagi inisiatif swasta. *Landbouwkolonisatie* (Kolonisasi pertanian) dipertimbangkan. Negeri-negeri asing (Inggris) semakin aktif di Wilayah Luar Jawa dan Madura. Sebagai dampak perkembangan industri, tumbuhlah kebutuhan akan bahan-bahan dasar dan daerah pemasaran. Batavia mulai secara bertahap memperkuat cengkeramannya pada wilayah di luar Jawa. Perang Aceh secara definitif membuat berakhirnya *onthoudingspolitiek*.

Pada masa Nieuwenhuijzen, Madura mempunyai *zelfbestuur* (kepemerintahan wilayah yang otonom), tetapi pada paruh kedua abad ke-19 Madura lebih sering dihadapkan pada campur tangan langsung dari pemerintah. Atas usul komisaris gubernemen, pada tahun 1860 kerajaan Banjarmasin (Bagian Tenggara Kalimantan) dijadikan sebagai daerah yang diperintah langsung. Situasi itu menjelaskan mengapa dalam *Memorie over Madoera van Nieuwenhuijzen* (Memori Nieuwenhuijzen tentang Madura) dan gambaran yang panjang lebar tentang Banjarmasin yang disusun oleh Residen A. van der Veer pada tahun 1855, pemerintah pribumi menjadi pokok utama dan pengaruh Belanda hampir tidak dibicarakan.

Pada tahun 1858-1864 Nieuwenhuijzen adalah residen Surakarta, dan pada tahun 1863 ia juga menjadi *waarnemend resident* (penjabat pengganti residen) Yogyakarta. Arsipnya berisi peraturan tentang penyewaan tanah pertanian di Vorstenlanden²⁹ kepada pihak lain selain penduduk Indonesia pada tahun 1839-1861. Jadi, tanah tidak boleh disewakan kepada orang Cina dan orang Arab. Penyewa tanah harus memiliki pengetahuan bahasa (bahasa Jawa dan Melayu) dan adat-istiadat penduduk Jawa. Tanpa persetujuan rakyat, mereka tidak boleh menggunakan sawah tersebut untuk kebun kopi, tebu, nila, dan mereka wajib merawat jalan dan jalur setapak yang ada yang melalui atau di sepanjang tanah yang disewakan itu.

Berdasarkan pengalaman kepengurusan yang luas, pada tahun 1865 Nieuwenhuijzen ditunjuk menjadi anggota Dewan Hindia, suatu dewan penasihat gubernur-jenderal yang mempunyai kewenangan ikut menentukan peraturan. Pada tahun 1868 ia menjadi penjabat pengganti wakil presiden, satu tahun sesudahnya menjadi wakil presiden.

Pada tahun 1873, sebagai komisaris gubernemen ia dengan tentara ekspedisi ke Aceh untuk mencoba agar Sultan Aceh mau mengakui kedaulatan Belanda. Misi itu berakhir dengan penyerahan pernyataan perang yang ditandatangani oleh Gubernur-Jenderal J. Loudon (1872-1875), dan dengan demikian terjadilah Perang Aceh. Selanjutnya, Loudon mencoba meminta pertanggungjawaban Nieuwenhuijzen atas pecahnya perang Aceh. Pada tanggal 18 Mei 1873 ia menunjuk suatu komisi yang ditugasi menyelidiki jalannya ekspedisi.

Nieuwenhuijzen menolak untuk bekerja sama. Berkat hubungan baiknya dengan Minister van Koloniën (Menteri Urusan Tanah Jajahan) I.D. Fransen van de Putte (1872-1874), tak lama kemudian ia berhasil mengatur pemberhentiannya dengan terhormat dari jabatannya itu. Namun, hal itu bukan berarti akhir dari celaan dan tuduhan pendukung Loudon terhadap dirinya. Arsip Nieuwenhuijzen mengandung banyak bahan tentang episode ini.

²⁹Empat kerajaan Jawa pada masa Hindia-Belanda, yaitu susuhunan Surakarta, kesultanan Yogyakarta, kerajaan Mangkunegara, dan kerajaan Pakualam.

Arsip

1. Arsip pribadi F.N. Nieuwenhuijzen, 1835-1875, kode akses 2.21.205.44

Untuk bagian ini digunakan ‘inleiding’ (pengantar) dan nomor inventaris 4 ; 9; 10; 35; 42; 67; 69; 72; 77; 79.

2. Arsip pribadi James Loudon, 1831-1893, kode akses 2.21.183.50

Arsip ini berisi surat-surat dari dan kepada F.N. Nieuwenhuijzen .

3. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1814

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Laporan dan advis pegawai BB Nieuwenhuijzen dapat ditemukan dengan menggunakan akses (*indices* ‘indeks’) di *openbaar archief* (arsip umum) dalam rubrik-rubrik berikut:

- a. Periode 1814-1849** (kode akses 2.10.01): ‘Binnenlandse aangelegenheden’ (Perihal dalam negeri); ‘Oost-Indische archipel’ (Kepulauan Hindia-Timur); ‘Java en Madoera’ (Jawa dan Madura); Celebes (Sulawesi).

Alat bantu yang penting untuk periode ini adalah *Aantekeningenregisters van het Bureau Algemene Zaken* (Register Pencatatan dari Biro Urusan Umum), kemudian *Bureau A* (Biro A) dan *afdeling 1* (bagian 1) tentang periode sekitar 1830-1859 (kode akses 2.10.02, nomor inventaris 9199-9201), lihat rubrik ‘Binnenlandse zaken’ (Urusan dalam negeri); ‘Celebes’ (Sulawesi); ‘Inlandse vorsten en groten’ (Raja dan petinggi pribumi); ‘Regenten en hoofden’ (Bupati dan kepala); ‘Residenties op Java’ (Keresidenan di Jawa); ‘Riouw’ (Riau).

- b. Periode 1850-1900** (kode akses 2.10.02; 2.10.10): ‘Binnenlandse aangelegenheden’ (Perihal dalam negeri); ‘Borneo’ (Kalimantan); ‘Oost-Indische archipel’ (Kepulauan Hindia-Timur); ‘Java en Madoera’ (Jawa dan Madura); ‘Riouw’ (Riau); ‘Tractaten, contracten of overeenkomsten met inlandse vorsten in de kolonie’ (Traktat, kontrak atau perjanjian dengan raja-raja pribumi di tanah jajahan).

Bandingkan dengan paparan rubrik di Bab 2 ‘Het bestuur in het binnenland (Pemerintahan di dalam negeri)’ dalam buku panduan ini.

Nomor inventaris 6551A s/d 6551D (kode akses 2.10.02) berisi masing-masing berkas-berkas resmi tentang ‘het ontstaan van de Atjeh oorlog’ (asal-usul perang Aceh); ‘het rapport van de door Loudon benoemde onderzoeksc commissie’ (laporan komisi penyelidikan yang ditunjuk oleh Loudon); ‘processen verbaal van de door deze commissie afgenomen verhoren’ (berita

acara interogasi yang dilakukan oleh komisi ini); dan ‘het rapport van de legercommandant in Nederlandsch-Indië over het verloop van de Atjeh-expeditie, in reactie op het rapport van de onderzoekscommissie (laporan komandan tentara Hindia-Belanda tentang berjalannya ekspedisi Aceh itu, sebagai tanggapan atas laporan komisi penyelidikan).

Untuk penelitian lebih lanjut, *geheim- en kabinetsarchief* (arsip kabinet dan rahasia) tahun 1814-1900 diperlukan: Untuk periode 1814-1849, lihat kode akses 2.10.01. Untuk periode 1850-1900, lihat kode akses 2.10.02.

Raadsadviezen (Advis Dewan). Dewan Hindia memberi advis dalam segala hal dari perihal umum sampai khusus. Untuk menemukan advis ini hampir semua rubrik indeks diperlukan. Untuk paparan rubrik-rubrik itu, lihat Bab 44 dalam buku panduan ini.

4. Arsip pribadi I.D. Fransen van de Putte, 1838-1934, kode akses 2.21.066

Nomor inventaris101 berisi surat-surat masuk dari F.N. Nieuwenhuijzen.

Daftar Pustaka

Boels, Henk, Janny de Jong, dan C.A. Tamse (2003), *Eer en fortuin; Leven in Nederland en Indië 1824-1900; Autobiografie van gouverneur-generaal James Loudon* (Amsterdam: Bataafsche Leeuw).

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *Atjeh* (I, hlm. 68-89).

Rochemont, J.I. de (1875), *Loudon en Atsjin* (Batavia: Ernst).

Catatan: De Rochemont adalah ajudan dan intendant dari James Loudon.

9 H.A.F. de Vogel (1825-1899)

Pada awalnya Henri Adrien Frederic de Vogel (1825-1899) bekerja di dinas pemerintahan sebagai *controleur van landelijke inkomsten en cultures* (pengawas pendapatan negeri dan budidaya tanaman) di Karesidenan Semarang dan Rembang (1853-1859). Arsipnya berisi antara lain jurnal-jurnal dari masa itu. Ia beralih ke dunia usaha karena ia menyimpulkan bahwa penerapan pembudidayaan yang bebas dan penentuan upah yang juga bebas pastilah akan menaikkan harga-harga tetapi bukan gaji pegawai negeri. Berturut-turut ia menjadi pemilik perusahaan tembakau dan administrator perusahaan gula. Kedua perusahaan itu terletak di Karesidenan Rembang.

Rembang di masa itu memegang peranan penting di dalam diskusi sosial-politik tentang keuntungan dan kerugian kerja bebas dan kerja paksa. Pembudidayaan tembakau swasta di Jawa yang sejak tahun 1855 mengalami masa jaya, membuahkan hasil yang sangat bagus. Padahal pembudidayaan tembakau pemerintah yang diterapkan sebelumnya tidak berkembang. Lagipula daerah itu sangat menarik banyak perhatian karena berdasarkan tugas pemerintah ada dua penyelidikan (tahun 1859 dan 1862) dilakukan terhadap praktek penyelewengan dari para pegawai pemerintahan Eropa dalam memberikan lisensi kepada para pengusaha swasta. Hal itu menyebabkan adanya sejumlah brosur, beberapa di antaranya dari De Vogel.

Di dalam salah satu brosur itu, *Hinderpalen die vrijen arbeid en vrije kultuur op Java in de weg staan* ‘Rintangan yang menghalangi pembudidayaan bebas dan kerja bebas di Jawa’ (1862, manuskrip di dalam arsipnya), ia menyatakan antara lain perlunya *herendiensten* (kerja pengabdian). Kepemilikan tanah komunal mengakibatkan orang Jawa hanya dapat memakai tanah itu: ia bukan pemilik tanah, tidak merasa bertanggung jawab atas tanah itu, dan dalam keadaan tersebut ia hanya dapat menghasilkan sesuatu di bawah paksaan. Penerapan kepemilikan tanah swasta dan pendidikan akan memperbaiki keadaan itu. Pembudidayaan bebas dan kerja bebas merupakan hasil dari masyarakat yang lebih baik dan beradab. Pemerintah perlu menjalankan proses perubahan ini secara keras, adil, dan tegas.

Beberapa tahun kemudian dalam notanya tentang *De vrees voor gebrek aan voedingsmiddelen welke thans heerscht op Java* ‘Kekhawatiran akan kekurangan sarana pangan yang sedang melanda Jawa’ (1873, konsep dalam arsipnya), ia melontarkan kritiknya atas birokrasi pemerintahan. ‘De pen regeert’ (Pena berkuasa), demikianlah ia tulis. Kurangnya kontrol atas pekerjaan orang Jawa dan sikap fatalistis yang dimilikinya, menurut pendapatnya, menjadi sebab keterbelakangan keadaan yang dialami oleh budidaya tanaman pribumi, terutama budidaya padi.

Arsip

1. Arsip pribadi H.A.F. de Vogel, 1852-1881, kode akses 2.21.205.66

Untuk bagian ini digunakan pengantar dan nomor inventaris 1; 2; 3; 6; 10; 12; 13; 19; 24; 25.

2. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1814

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Tidaklah mungkin kalau arsip yang meliputi tahun 50-an berisi laporan-laporan dari pengawas De Vogel: untuk hal itu ia menduduki jabatan yang terlalu rendah. Data tentang daerah-daerah tempatnya bekerja dapat dicari dengan menggunakan akses (*indices* ‘indeks’) pada *openbaar archief* (arsip umum) tahun 1850-1900 (kode akses 2.10.02; 2.10.10), dalam rubrik-rubrik Oost-Indische archipel (Kepulauan Hindia-Timur); Java en Madoera (Jawa dan Madura); Kultuurstelsel op Java (Sistem Tanam Paksa di Jawa).

Alat bantu penting untuk penelitian tahun 50-an abad ke-19 adalah *Aantekeningenregisters van het Bureau Algemene Zaken* (Register Pencatatan Biro Urusan Umum), kemudian *Bureau A* (Biro A) dan *Afdeling 1* (Bagian 1) tentang periode sekitar 1830-1859 (kode akses 2.10.02, nomor inventaris 9199-9201), lihat rubrik-rubrik berikut:

‘Residenties op Java’ (Karesidenan-karesidenan di Jawa), ‘Kultures (ook gespecificeerd op soort) en landelijke inkomsten’ (Pembudidayaan tanaman yang dispesifikasikan berdasarkan jenisnya dan pendapatan negeri); ‘Kultuurstelsel in het algemeen’ (Sistem Tanam Paksa pada umumnya).

Untuk penelitian terhadap ‘situatie in residentie Rembang’ (keadaan di Karesidenan Rembang), *geheim- en kabinetsarchief* (arsip kabinet dan rahasia) juga diperlukan: untuk periode 1850-1900, lihat kode akses 2.10.02.

Daftar Pustaka

Fasseur, C. (1975), *Kultuurstelsel en koloniale baten; de Nederlandse exploitasi van Java, 1840-1860* (Leidse Historische Reeks 20; Leiden: Universitaire Pers).

Fasseur, C. ed. (1980), ‘Dagboek van een Nederlands bestuursambtenaar uit het midden van de 19e eeuw; H.A.F. de Vogel’, dalam: C. Fasseur, *Geld en geweten; een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische archipel* (2 jilid; Den Haag: Nijhoff), I, hlm. 163-172.

10 A. Pruys van der Hoeven (1829-1907)

Abraham Pruys van der Hoeven (1829-1907) memulai karirnya sebagai *scheepsjongen* (pelayar) dan pada tahun 1854 masuk ke korps pegawai pemerintah. Dia ditempatkan di Sumatra, dan bekerja di sana sampai keberangkatannya pada tahun 1883. Sebagai pengawas, ia berprestasi sangat gemilang selama dua ekspedisi militer. Hal itu memberikan efek yang menguntungkan pada karirnya. Setelah pada tahun 1862 ia diangkat menjadi asisten-residen, menyusul kemudian pengangkatannya menjadi residen Bengkulu (1870-1873) dan sesudah itu Palembang (1873-1879). Pada tahun 1880 ia menjadi *regeringscommissaris van Atjeh* (komisaris pemerintah Aceh), tiga tahun kemudian ia menjadi gubernur daerah itu. Setelah pensiun (1883) ia diminta untuk menjadi anggota Raad van Indië (Dewan Hindia: dewan penasihat gubernur-jenderal dengan kewenangan ikut menentukan aturan). Jabatan itu dia duduki pada periode 1886-1893.

Pruys van der Hoeven mempunyai beberapa publikasi atas namanya. Tentang pengalamannya sebagai pegawai negeri, ia membuat laporan dalam *Veertig jaren Indische dienst* (Empat puluh tahun berdinasi di Hindia). Tentang permasalahan yang menyangkut Aceh, ia mempersembahkan dua brosur (The Hague 1886, 1896, juga ada dalam arsipnya). Ia juga menulis dalam *De Gids* (Panduan) dan dalam *Vragen des Tijds* (Pertanyaan di masa itu) ('Stemmen uit het Oosten' – Suara dari Timur – pada tahun 1899, juga ada dalam arsipnya).

Berdasarkan ingatannya, Pruys van der Hoeven menceritakan bagaimana dia sebagai pegawai pemerintah di Sumatra telah mencoba mengatasi kendala yang menghambat pembangunan ekonomi, yang mengganggu kepuasan penduduk, dan yang mengancam ketenangan. Demikianlah, dia didudukkan sebagai residen Palembang dengan tugas untuk membuat sungai-sungai lebih mudah dilayari dan jalan-jalan lebih baik, untuk mengurangi dan sedapat mungkin menghapuskan kerja wajib. Hasilnya adalah bahwa pertanian pribumi menjadi maju, demikian juga halnya dengan perdagangan. Menurutnya, penduduk Jawa juga dapat mengalami perkembangan sejenis seperti yang secara sistematis terjadi pada penghapusan kerja paksa dan kerja pengabdian. Pada pelaksanaan *agrarische wet- en regelgeving* (undang-undang dan peraturan agraria) di Jawa, orang terlalu sedikit memperhitungkan pentingnya arti adat. Menurut Pruys van der Hoeven, pengetahuan tentang negeri, rakyat, dan adat-istiadat dianggap perlu untuk bisa mendapatkan kedekatan dengan dan dukungan dari rakyat. Kekurangan pengetahuan juga yang menyebabkan kegagalan pemerintah di Aceh. Perang Aceh yang berkelanjutan semakin menumbuhkan kurangnya minat terhadap Hindia, sehingga membuat perkembangan ekonomi mengalami stagnasi. Yang tersebut terakhir itu juga terstimulasi oleh pelaksanaan pemerintahan yang sentralistis, yang menjadikan Batavia harus terlalu banyak memperhatikan Den Haag. Menurut Pruys van der Hoeven, Den Haag boleh saja menentukan arah, tetapi Hindia harus menentukan sendiri pelaksanaannya. Dalam artikelnya 'Stemmen uit het Oosten', ia menggabungkan dirinya dengan para pendukung

desentralisasi. Dewan lokal (Jawa) dan daerah (Buitengewesten / Wilayah Luar Jawa dan Madura), di mana ‘unsur pribumi’-nya seharusnya terwakili, juga semestinya mengelola anggaran mereka sendiri. Pruys van der Hoeven berpendapat bahwa kerja sama yang baik antara *overheersers* (penguasa) dan *beheersten* (yang dikuasai) penting untuk kemakmuran Hindia, dan dengan demikian juga untuk Belanda. Dengan cara demikian pula, negeri asing dapat dipertahankan dari jarak jauh. Decentralisatiewet (Undang-Undang Desentralisasi) tahun 1903 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1903 no. 329) agak mendekati harapan yang terutama hidup di Hindia.

Arsip

1. Arsip pribadi keluarga Van Rees, 1837-1950, kode akses 2.21.301

Berkas-berkas dari Pruys van der Hoeven ada dalam nomor inventaris 182-188.

Untuk bagian ini digunakan nomor inventaris 185 dan 187.

Catatan: Pruys van der Hoeven adalah mertua D.F.W. van Rees (1863-1934, Algemeen Secretaris (Sekretaris Umum) dan lid (anggota), kemudian vice-president van de Raad van Indië (wakil presiden Dewan Hindia)). Berkas-berkas Van Rees juga menjadi bagian dari arsip ini, lihat Bab 11 dalam buku panduan ini.

2. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Laporan dan advis dari Pruys van der Hoeven dapat ditemukan dengan bantuan akses (*indices* ‘indeks’) di *openbaar archief* (arsip umum), dalam rubrik-rubrik:

- a. **Periode 1850-1900** (kode akses 2.10.02; 2.10.10): ‘Binnenlandse aangelegenheden’ (Perihal dalam negeri); ‘Kunsten en wetenschappen’ (Seni dan ilmu pengetahuan); ‘Oost-Indische archipel’ (Kepulauan Hindia-Timur); Sumatra.

Alat bantu penting untuk penelitian tahun 50-an abad ke-19 adalah

Aantekeningenregisters van het Bureau Algemene Zaken (Register Pencatatan dari Biro Urusan Umum), kemudian *Bureau A* (Biro A) dan *afdeling 1* (bagian 1) tentang periode sekitar 1830-1859 (kode akses 2.10.02, nomor inventaris 9199-9201), lihat rubrik-rubrik ‘Sumatra’.

Bandingkan dengan paparan rubrik-rubrik tentang periode ini dalam Bab 2 ‘Het bestuur in het binnenland / Pemerintahan di dalam negeri’ di buku panduan ini.

Nomor inventaris 6558A-6558B, 6559-6560 (kode akses 2.10.02) berisi laporan politik Aceh yang disusun oleh Pruys van der Hoeven, dari periode April 1881-Maret 1883.

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia) tahun 1850-1900 juga diperlukan untuk penelitian: lihat kode akses 2.10.02.

Raadsadviezen (Advis dari dewan). De Raad van Indië (Dewan Hindia) memberi advis dalam semua kepentingan umum atau khusus. Untuk mencari advis-advis ini hampir semua rubrik indeks perlu diketahui. Untuk paparáannya lihat Bab 44 dalam buku panduan ini.

Daftar Pustaka

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *Abraham Pruys van der Hoeven* (III, hlm. 516).

Kuitenbrouwer, M. (1985), *Nederland en de opkomst van het moderne imperialisme; Koloniën en buitenlandse politiek 1870-1902* (Amsterdam-Dieren: Bataafsche Leeuw).

Locher-Scholten, E. (1994), *Sumatraans sultanaat en koloniale staat; De relatie Djambi-Batavia (1830-1907) en het Nederlandse imperialisme* (Leiden: KITLV Uitgeverij).

Pruys van der Hoeven, A. (1894), *Veertig jaren Indische dienst* (Den Haag: Belinfante).

11 D.F.W. van Rees (1863-1934)

Dalam *Biografisch Woordenboek van Nederland* (Kamus Biografis Belanda), Daniël François Willem van Rees (1863-1934) dicirikan sebagai ‘de perfecte secretarie-ambtenaar die de sterk centralistisch georganiseerde Indische administratie van zijn dagen tot in al haar onderdelen kende en beheerste’ (pegawai sekretariat yang sempurna yang mengetahui dan menguasai administrasi Hindia pada zamannya yang terorganisasi secara sentralistis kuat, sampai ke semua bagiannya). Van Rees masuk ke Algemene Secretarie (Sekretariat Umum) sebagai pengawas (1888) dan naik jabatan menjadi Sekretaris Umum (1905). Sekretariat Umum itu, kabinet gubernur-jenderal, menduduki posisi kunci dalam administrasi Hindia. Tugas-tugasnya mencakup mengolah keputusan gubernur-jenderal hingga menjadi keputusan pemerintah; melakukan korespondensi pemerintahan; menangani hal-hal pemerintahan untuk Buitengewesten (Wilayah Luar Jawa dan Madura) (hingga lembaga bagian khusus untuk hal ini pada tahun 1908);³⁰ mempublikasikan *Indisch Staatsblad* (Lembaran Negara Hindia), *Bijbladen* (Lembaran Tambahan), dan *Regeringsalmanak van Nederlandsch-Hindië* (Almanak Pemerintah Hindia-Belanda). Para pegawai Sekretariat Umum dapat memperoleh tugas dan perintah khusus dari gubernur-jenderal. Tugas Van Rees terletak di bidang urusan agraria dan pemberantasan pauperisme. Arsipnya berisi terutama pelbagai nota dan laporan mengenai topik itu. Sejumlah berkas itu muncul dari tangannya sendiri, yang lainnya terbentuk di bawah kepemimpinannya. Dalam bahan arsip itu, seperti lazimnya di masa itu, latar belakang historis permasalahan mendapat perhatian yang cukup besar.

Berbagai berkas tentang urusan agraria timbul karena Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) pada tahun 1870. Dengan undang-undang ini para pengusaha swasta (di Jawa dan Madura terutama pengusaha pabrik gula dan pengusaha tembakau) mendapatkan kemungkinan untuk menyewa tanah dalam bentuk erfpach untuk maksimal 75 tahun. Pada transaksi dengan orang-orang Indonesia hubungan hukum adat memainkan peranan penting. Pemerintah ingin menawarkan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melakukan perundingan dengan para pengusaha barat.

Secara bersamaan disadari bahwa dengan lebih masuknya berbagai perusahaan pertanian besar barat ke dalam kehidupan masyarakat yang terutama masih feodal akan memberikan dampak yang menstimulasi dalam proses emansipasi. Dalam pelbagai ordonansi dicoba menemukan keseimbangan antara kepentingan dari kedua belah pihak dalam hal penyewaan tanah oleh ‘orang pribumi’ kepada ‘orang bukan pribumi’ dan dalam hal menyediakan cukup air untuk kebutuhan berbagai perusahaan barat dan pertanian pribumi. Persyaratan pemilihan kepala desa harus menghasilkan pemerintahan desa yang beroperasi secara memadai dan tegas. Pengalihan kepemilikan tanah komunal ke kepemilikan tanah individual berdasarkan warisan juga distimulasi: kepemilikan tanah swasta dilihat sebagai syarat untuk kemajuan. Nota Van Rees tentang penyewaan tanah oleh orang pribumi kepada orang bukan pribumi di

³⁰ Lihat Bab 1 dalam buku panduan ini.

Jawa dan Madura menyebabkan munculnya Grondhuurordonnantie (Ordonansi Penyewaan Tanah) yang baru (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1895 no. 247). Ketika Ordonansi itu ditinjau kembali (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1900 no. 240), maka Van Rees untuk sementara ditunjuk sebagai pengawas pelaksanaannya. Ia mendesak agar pekerjaan itu dilakukan oleh seorang ahli. Penataan aturan agraria semakin meluas dan kompleks: berbagai interpretasi merongrong keseragaman kebijakan. Pada tahun 1903 pleidoinya dikabulkan dengan didirikannya Inspectie voor Agrarische Zaken (Dinas Inspeksi untuk Urusan Agraria).

Berdasarkan Gouvernementsbesluit (Keputusan Pemerintah) 2 Desember 1901 no. 18 Van Rees mendapat perintah untuk meneliti tindakan-tindakan mana yang dapat diambil pemerintah untuk memberantas pauperisme di antara orang-orang Eropa yang ‘kurang baik’ di Jawa dan Madura. Termasuk kelompok itu adalah para tentara KNIL yang direkrut di Belanda dan sesudah masa dinasnya menetap di Hindia, dan anak-anak yang ‘tidak resmi’ dari jalinan hubungan antara ayah Eropa dan ibu Cina atau pribumi.

Bukanlah untuk pertama kali masalah ini mendapat perhatian yang resmi. Orang-orang (Indo) Eropa yang miskin ini merugikan posisi terpendang dari kelompok masyarakat Eropa di Hindia. Arsip itu memuat dua penelitian awal (1902) dari komisi Van Rees dan laporan akhir (1903). Di dalamnya disebutkan antara lain anjuran untuk pengadaan lebih banyak sekolah yang baik; penempatan orang-orang Eropa itu dalam fungsi pekerjaan pemerintahan yang rendah, dalam ketentaraan, angkatan laut; pendirian koloni-koloni pertanian; pemberantasan atas pemeliharaan selir di tangsi-tangsi. Inspecteur voor Agrarische Zaken (Inspektur Urusan Agraria) yang baru diangkat, juga mendapat tugas untuk mengajukan permohonan guna menstimulasi pertanian dan perkebunan kecil di antara orang-orang (Indo) Eropa yang miskin. Dengan didirikannya Indische Partij (Partai Hindia) pada tahun 1912 yang justru mendapatkan banyak pengikut orang Indo-Eropa, masalah pauperisme mendapat suatu dimensi partai politik.

Pada tahun 1903 Van Rees diangkat menjadi Directeur van Binnenlands Bestuur / BB (Direktur Pemerintahan Dalam Negeri). Ia mengkombinasikan fungsi ini dengan pekerjaannya pada Sekretariat Umum hingga pada tahun 1908 ia menjadi anggota dan tidak lama kemudian wakil ketua (1908-1914) dari Raad van Indië (Dewan Hindia). Dewan itu adalah dewan penasihat tertinggi di Hindia dan memiliki wewenang ikut mengatur, yang terakhir ini dalam menjalankan Wet op de Staatsinrichting (Undang-Undang Tata Negara) pada tahun 1925. Dilihat secara formal pengangkatan ini sesuai dengan tradisi: satu anggota dewan berasal dari administrasi pusat.

Sesudah kembali di Belanda (1914) Van Rees masih menjabat fungsi di Koloniaal Instituut (Institut Kolonial; sekarang disebut Tropeninstituut) dan Volkenbond (Perhimpunan Rakyat).

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip pribadi keluarga Van Rees, 1837-1950, kode akses 2.21.301

Berkas-berkas Van Rees dipaparkan di nomor inventaris 16-180. Untuk berkas ini gunakan nomor 56-60; 71-74; 76-79; 84-89; 91-94; 100-103; 128-133; 139-153; 156; 160-161; 170; 176.

Catatan: satu bagian arsip keluarga, dengan berkas-berkas dari D.F.W. van Rees selama ini tersimpan di KITLV Leiden, dan mulai 1 Juli 2014 menjadi bagian koleksi arsip Universiteitsbibliotheek / UB di Leiden. Inventarisnya dimuat sebagai lampiran dalam kode akses 2.21.301.

2. Arsip pribadi J.B. van Heutsz, 1882-1935, kode akses 2.21.008.79

Van Rees adalah kepercayaan dari Van Heutsz. Nomor inventaris 2 berisi surat-surat masuk darinya.

3. Arsip pribadi J.B. van der Houven van Oordt, 1888-1946, kode akses 2.21.088

Van der Houven bekerja sebagai pegawai pada Sekretariat Umum pada periode 1889-1903. Pada tahun 1913 ia menjadi anggota dari Dewan Hindia. Setahun kemudian ia menggantikan Van Rees sebagai wakil ketua. Nomor inventaris 13 berisi surat-surat masuk dari Van Rees.

4. Arsip dari Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Kode akses *openbaar archief* (arsip umum) 1850-1900: 2.10.02; 2.10.10.

Kode akses mulai tahun 1900: 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03.

Advis dan laporan dari D.W.F. van Rees mengenai hal-hal agraria dapat dicari melalui rubrik-rubrik indeks, yang tercantum dalam Bab 4 'De Inspectie voor Agrarische Zaken / Inspeksi dari Urusan Agraria' dari buku panduan ini.

Advis dan laporan dari Van Rees, yang disusun ketika menjabat direktur BB, dapat dicari melalui rubrik-rubrik indeks, yang tercantum dalam Bab 1 'Departement van Binnenlands Bestuur / Departemen Pemerintahan Dalam Negeri' di buku panduan ini.

Advis dan laporan mengenai 'bestrijding van het pauperisme' (pemberantasan pauperisme) dapat dicari dengan bantuan akses (*indices* 'indeks') pada *openbaar archief* (arsip umum)

dalam rubrik ‘Binnenlands Bestuur’ (Pemerintahan Dalam Negeri).

Raadsadviezen (Advis Dewan). Dewan Hindia memberi advis dalam semua hal kepentingan umum atau khusus. Untuk mencari advis-advis ini hampir semua rubrik indeks diperlukan. Lihat ikhtisar dalam Bab 44 dari buku panduan ini.

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia) mulai tahun 1850 dan *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 untuk penelitian juga diperlukan. Untuk periode 1850-1900, lihat kode akses 2.10.02. Untuk periode mulai tahun 1900, lihat kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

Advis dari D.W.F. van Rees sebagai direktur BB dan wakil ketua Dewan Hindia dalam publikasi-publikasi sumber berikut:

- S. L. van der Wal ed. (1963), *Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940* (Groningen: Wolters).
- S. L. van der Wal ed. (1967), *De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indië* (Groningen: Wolters).

Daftar Pustaka

Biografisch Woordenboek van Nederland, versi digital. (<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/rees>), lema *D.F.W. van Rees*.

Coté, Joost (2001), ‘Being white in tropical Asia; Racial discourses in the Dutch and Australian colonies at the turn of the twentieth century’, *Itinerario* jilid XXV no. 3-4, hlm. 112-141.

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; ’s-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *D.F.W. van Rees* (VIII, hlm 1701-1703) dan lema *pauperisme* (III, hlm. 366-368).

Kleintjes, Ph. (1932-33), *Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië* (Cetakan ke-6; Amsterdam: De Bussy), Bab II, VII, VIII.

Marle, A. van (1951-1952), ‘De groep der Europeanen in Nederlands-Indië, iets over ontstaan en groei’, *Indonesië* no. 5, hlm. 97-121; 314-341; 481-507.

Rees, D.F.W. van ed. (1895), *Verzameling van agrarische verordeningen in Nederlandsch-Indië* (2 jilid; Batavia: H. Prange).

Rees, D.F.W. van (1901), *De staatsarmenzorg voor Europeanen in Nederlandsch-Indië* (Batavia: Landsdrukkerij).

Catatan: juga dalam arsipnya, nomor inventaris 139-143.

Rees, D.F.W. van (1901-1902), *Het pauperisme onder de Europeanen in Nederlandsch-Indië* (Batavia: Landsdrukkerij).

Catatan: juga dalam arsipnya, nomor inventaris 144-149.

Rees, D.F.W. van (1903), *Rapport der pauperisme-commissie, ingesteld bij artikel 2 van het regeeringsbesluit van 29 juni 1902 no. 9* (Batavia: Landsdrukkerij).

Catatan: juga dalam arsipnya, nomor inventaris 156.

Zalingen, P.J.A.F. Vos van (1973), *Douwes Dekker en de Indische Partij: een onderzoek naar de achtergronden van 'onafhankelijkheidsbeweging' van 1912* (skripsi sarjana, Leiden).

12 J.D.L. le Febvre (1870-1955)

Pada tahun 1892, Johan David Leo le Febvre (1870-1955) datang di Hindia sebagai pegawai pemerintah yang baru. Dia mulai bekerja sebagai *aspirant-controleur* (pengawas muda), kemudian sebagai *controleur* (pengawas), pertama-tama di Padangse Bovenlanden (Dataran Tinggi Padang), Sumatra's Westkust (Pantai Barat Sumatra) sampai tahun 1903, kemudian di Palembang (1903-1905) dan di Sumatra's Oostkust (Pantai Timur Sumatra) (1905-1907). Dalam memorinya yang tidak dipublikasikan (di dalam arsipnya), ia menceritakan kekagumannya yang besar tentang orang-orang Minangkabau (penduduk Pantai Barat). Dia mempelajari bahasa dan adat mereka, dan pada saat melakukan perjalanan daerah ia mendengarkan cerita-cerita mereka dengan penuh perhatian, yang mengisahkan bahwa pihak yang kalah dari Belanda dibicarakan dengan cekikikan. Ia menyimpulkan bahwa orang Minangkabau menganggap orang Belanda lebih sebagai sekutu daripada penguasa. Ia sangat kritis terhadap perubahan drastis yang terjadi di daerah itu.

Di bawah Gubernur-Jenderal J. B. Heutsz (1904-1909) Belanda bergerak memasuki Buitengewesten (Wilayah Luar Jawa dan Madura) dari pantai menuju pedalaman. Dengan senjata modern mereka, yaitu *repeteergeweren* (senapan kokang) yang digunakan pertama kalinya pada Perang Aceh, mereka mematahkan perlawanan Indonesia. Militerisme merajalela. Para perwira tentara diangkat menjadi pegawai pemerintah. Agar dapat lebih cepat menyerang masuk, maka dibangun jalur-jalur kendaraan militer dan jalan-jalan yang sudah ada diperkeras. Oleh karena adanya jalan penghubung yang lebih baik, maka berakhirilah kebiasaan untuk menginap di desa-desa dan bercakap-cakap dengan penduduk setempat selama mereka melakukan perjalanan daerah. Pemerintah kehilangan kontak dengan penduduk. Dalam waktu yang singkat diberlakukan *geldhuishouding* (pengaturan keuangan). Pemerintah memberikan beban tambahan dalam bentuk pajak dan kerja pengabdian. Untuk bisa membayarnya, orang kurang lebih dipaksa bekerja sebagai kuli.

Pada tahun 1907 Le Febvre pindah ke Arbeidsinspectie (Inspeksi Buruh): dia tetap bekerja di Pantai Timur Sumatra. Dia tidak bisa menghargai situasi kondisi kerja di perusahaan-perusahaan. Para kuli sering mendapatkan tempat yang buruk; upah mereka dibayar dalam apa yang disebut 'Estategeld', tanda bayaran yang hanya bisa mereka tukarkan untuk makanan (yang buruk) di toko-toko perusahaan; mereka didenda kalau mereka datang terlambat ke tempat kerja; mereka harus membayar *veldhulp* (bantuan kerja di lapangan), dan sebagainya. Laporan-laporan Le Febvre begitu tidak menguntungkan bagi pengusaha, sampai-sampai dia terpaksa mengundurkan diri (1909) setelah dua tahun bekerja. Dia kembali lagi masuk korps pegawai pemerintah dan diangkat menjadi asisten-residen di Benkoelen (Bengkulu). Pada tahun 1915 dia menjadi residen Sumatra's Westkust (Pantai Barat Sumatra). Setahun kemudian pecah pemberontakan Jambi, Sumatra Tengah. Ketika keadaan tenang kembali lagi, pemerintah Hindia menginstruksikan seorang anggota Raad van Indië (Dewan Hindia) J.H. Liefrinck untuk menyelidiki *belastingheffing* (pemungutan pajak) dan tuntutan kerja pengabdian di Sumatra. Liefrinck juga mengunjungi Pantai Barat. Residen Le Febvre

mendorong penduduk untuk menyatakan keluhan mereka dan ia sendiri juga menyampaikan kritiknya atas kebijakan yang dipakai. Ketika dia tidak menemukan pernyataan kritiknya di dalam laporan resmi (Batavia 1917), dia lalu mengolahnya dalam suatu brosur (di dalam arsipnya) yang diterbitkannya dan didistribusikannya sendiri.

Pada tahun 1919 dia diberhentikan dari dinas pemerintah karena masa kerjanya telah habis. Namun, Le Febvre sendiri memiliki kesan bahwa pemerintah menggunakan alasan resmi ini untuk memberhentikannya. Dia, seperti yang diungkapkannya sendiri, bagi pemerintah ‘*geen gemakkelijke resident geweest*’ (bukan residen yang mudah) dan juga tidak mudah bagi ‘*de Europeanen, vooral niet voor de knoeiers onder hen*’ (orang-orang Eropa, terutama bagi di antaranya yang bekerja serampangan). Pada bulan Mei 1919, berbagai kelompok orang Indonesia mengajukan petisi ke Gubernur-Jenderal J.P. van Limburg Stirum (1916-1921) yang meminta agar Le Febvre untuk sementara waktu masih menjabat sebagai residen. Tindakan itu menggambarkan simpati mereka, yang menunjukkan bahwa dalam kalangan luas ia dihargai sebagai: *vriend der Indonesiërs* (sahabat orang Indonesia), begitulah sebutan Sjahrir, pemimpin kelompok Republik di kemudian hari.

Setelah meninggalkan Hindia, ia membuat tulisan-tulisan untuk *Het Volk* dan *De Groene Amsterdammer* tentang kebijakan kolonial dan pembentukan imperium kolonial Belanda. Menurutnya, kerusuhan tahun 1926 / 1927 di Jawa dan Sumatra telah bisa diramalkan (*Socialistische Gids* 1928). Tindakan penghematan dari Gubernur-Jenderal D. Fock (1921-1926), yang diinstruksikan Den Haag untuk mengatasi kekurangan anggaran, telah memprovokasi perlawanan itu.

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip pribadi J.D.L. le Febvre, 1893-1959, kode akses 2.21.205.01

Lihat untuk bagian ini pendahuluan dan nomor inventaris 8-13; 20; 22-23; 26; 34-35; 39; 43.

2. Arsip dari Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Laporan dan advis Le Febvre dapat dicari dengan bantuan akses (*indices* ‘indeks’) pada *openbaar archief* (arsip umum) dalam rubrik-rubrik berikut:

a. Periode 1850-1900 (kode akses 2.10.02; 2.10.10): ‘Oost-Indische archipel’ (Kepulauan Hindia-Timur); ‘Sumatra’.

Controleur (pengawas) di Buitengewesten (Wilayah Luar Jawa dan Madura) adalah kepala pemerintah setempat. Ada kemungkinan arsip periode ini memuat berkas-berkas tentang pengawas Le Febvre.

- b. Periode na 1900** (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03):
'Arbeidsinspectie' (Inspeksi Buruh); 'Belastingen' (Pajak); 'Benkoelen' (Bengkulu);
'Herendiensten' (Kerja pengabdian); 'Kolonisatie, landverhuizing en koelies' (Kolonisasi,
emigrasi, dan kuli); 'Politieke stromingen' (Aliran politik); 'Politieke en economische
toestanden' (Keadaan ekonomi dan politik); 'Sumatra's Oostkust' (Pantai Timur
Sumatra); 'Sumatra's Westkust' (Pantai Barat Sumatra).

Bandingkan paparan rubrik dalam Bab 2 (Het bestuur in het binnenland / Pemerintahan di dalam negeri).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks pusat).

Untuk penelitian, *geheim- en kabinetsarchief* (arsip kabinet dan rahasia) mulai tahun 1850 dan *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 juga diperlukan. Untuk periode 1850-1900, lihat kode akses 2.10.02. Untuk periode setelah tahun 1900, lihat kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.236.07.

Serie Memories van Overgave (Seri Memori Serah-Terima), 1852-1962, kode akses 2.10.39, berisi memori serah-terima dari Le Febvre sebagai residen Pantai Barat Sumatra (1919, nomor inventaris 165).

Serie politieke verslagen en berichten uit de Buitengewesten (Seri laporan dan berita politik dari Wilayah Luar Jawa dan Madura), 1898-1940, kode akses 2.10.52.01, berisi laporan Residen Le Febvre tentang Pantai Barat Sumatra (microfiches, nomor fiche 245-247).

Berkas-berkas tentang kerusuhan 1926/1927, dengan keterangan, dimuat di dalam:

- R. C. Kwantes ed. (1975-1982), *De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Tjeenk Willink).

Daftar Pustaka

Febvre, J.D.L. Le (1928), 'Het rapport over den Sumatra-opstand', *De Socialistische Gids*, hlm. 680-692.

Hamerster, A.J. dkk (1928), *Rapport van de Commissie van onderzoek, ingesteld bij gouvernementsbesluit van 13 februari 1927 no. 1a* [sejenis Laporan Pantai Barat] (Weltevreden: Landsdrukkerij).

Liefcrinck, J.H. (1917), *Onderzoek naar de heffing van belasting en de vordering van heerendiensten in eenige deelen der buitenbezittingen* (Batavia: Landsdrukkerij).

Locher-Scholten, E. (1994), *Sumatraans sultanaat en koloniale staat; De relatie Djambi-Batavia (1830-1907) en het Nederlandse imperialisme* (Leiden: KITLV Uitgeverij).

Liefrinck, J.H. (1917), *Onderzoek naar de heffing van belasting en de vordering van heerendiensten in eenige deelen der buitenbezittingen* (Batavia: Landsdrukkerij).

Locher-Scholten, E. (1994), *Sumatraans sultanaat en koloniale staat; De relatie Djambi-Batavia (1830-1907) en het Nederlandse imperialisme* (Leiden: KITLV Uitgeverij).

13 L.C. Westenenk (1872-1930)

Dalam bukunya *Hoe wij Insulinde besturen* (Bagaimana kita memerintah Insulinde / Kepulauan Hindia, 1913-14) wartawan J. Bekaar menulis satu bab tentang ‘een vriend der Dajaks’ (seorang teman Dayak), seorang *controleur-woudloper* (pengawas-penjelajah hutan) yang menyimpan tembakau pipanya dalam sebuah tengkorak harimau. Di balik sosok itu, terutama bukan sebutannya, tersembunyi Louis Constant Westenenk (1872-1930), anak laki-laki pengusaha kopi di Semarang, yang memulai karir pemerintahannya pada tahun 1893 di Westerafdeling van Borneo (Bagian Barat Borneo) yang masih primitif. Setelah lima tahun ia dipindah ke Sumatra. Di sana ia berturut-turut menjadi *controleur* (pengawas) di Sumatra’s Westkust (Pantai Barat Sumatra) dan di Aceh (1897-1909), asisten-residen di Padangse Bovenlanden (Dataran Tinggi Padang) (1909-1910), residen di Bengkulu (1915-1920) dan Palembang (1920), dan gubernur di Sumatra’s Oostkust (Pantai Timur Sumatra) (1920-1924). Ia mengakhiri karir Hindianya sebagai anggota Dewan Hindia (1924-1925), dewan penasihat tertinggi dari gubernur-jenderal: di dalam dewan ini, menurut aturan, duduk seorang mantan pegawai pemerintahan dari Buitengewesten (Wilayah Luar Jawa dan Madura).

Westenenk sebagai pengawas Pantai Barat Sumatra berhadapan dengan kerusakan pada tahun 1908. Sebabnya terletak pada penghapusan budidaya kopi wajib (yang telah lama tidak rendabel) dan pelaksanaan pajak pendapatan. Perlawanan terhadap tindakan ini disulut oleh para kepala rakyat dan sekte mistik Islam (tarekat). Oposisi mendasarkan diri pada Plakat Panjang yang dikeluarkan pada tahun 1833 ketika daerah itu ditempatkan di bawah pemerintahan langsung. Di dalam plakat itu pemerintahan menjamin hak rumah tangga dan politik dari masyarakat dan menjanjikan tidak akan memungut pajak. Menekan pemberontakan itu memakan jiwa sejumlah orang muslim. Ketika keadaan kembali tenang, Westenenk meminta pendapat kepada *Mohammedaanse schriftgeleerden* (para ahli tafsir) apakah pemberontakan itu bisa dianggap sebagai perang agama yang sah. Para ahli tafsir itu menyangkalnya: menurut mereka pemberontakan itu tidak sah dan tidak tepat, dan pajak yang dikenakan harusnya langsung dibayar. Dalam notisi yang tak bertanggal³¹, Westenenk menulis bahwa jihad (perang suci) menurut ajaran Islam tetap diperbolehkan. Tentang hal itu ia mendasarkan diri pada penelitian yang terbit di tahun 90-an mengenai orang-orang Aceh, yang dilakukan oleh ahli Islam Chr. Snouck Hurgronje, yang kemudian menjadi Adviseur voor Inlandse Zaken (Penasihat untuk Urusan Pribumi). Pernyataan dari para ahli tafsir itu menjadi titik tolak bahwa untuk sementara tidak ada perang suci kalau keadaan sosial-politik menguntungkan bagi para kafir (orang tidak beragama). Kebencian terhadap kafir dan fanatisme menjadi berkurang sebagai dampak pengaruh Eropa yang meningkat. Westenenk merasa malu harus menyatakan bahwa *wij* (kita orang barat) oleh para orang muslim dicap sebagai *minderwaardige wezens* (makhluk yang rendah) dan bahwa korban orang muslim menurut hukum Islam murni adalah martir.

³¹ Lihat arsipnya.

Pada tahun 1910 pemerintah Hindia menugaskannya untuk menulis studi tentang ‘nagari Minangkabau, masyarakat (hukum adat) pribumi di Pantai Barat Sumatra’. Arsip Westenenk berisi banyak bahan tentang hubungan hukum adat di Minangkabau, yang didasarkan pada matriarkat. Lapornya terbit pada tahun 1912 dan dicetak ulang dua kali. Laporan itu menjadi dasar dari *Nagari-ordonnantie* (Ordonansi Nagari) tahun 1914 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1914 no. 774) yang bertujuan membentuk masyarakat hukum adat ini menjadi masyarakat pribumi menurut model barat.

Westenenk adalah pegawai pemerintahan yang sejati. Perhatiannya yang besar dan di pelbagai segi terhadap Sumatra terbukti dengan adanya berkas yang tak terhitung jumlahnya dalam arsipnya. Ia mempelajari adat-istiadat dari berbagai kelompok masyarakat dan menuliskan cerita-cerita rakyatnya; ia melakukan penelitian arkeologi dan korespondensi tentang hal ini dengan pustakawan Bataviaasch Genootschap J.L.A. Brandes; ia mendalami Melayu-Kubu (bahasa dari salah satu suku tertua di Sumatra) dan menyusun daftar katanya. Termasuk publikasi-publikasinya yang terkenal adalah buku *Waar mensch en tijger buren zijn* (Di mana manusia dan harimau bertetangga, 1927) dan buku *Het rijk van Bittertong* (Kerajaan Si Pahit Lidah, 1932). Lama sesudah kepergiannya, ‘Westenenk-weggetjes’ (jalanan setapak Westenenk) masih dikenal: jalanan setapak yang dibuatnya dengan parang di sekitar Fort de Kock di Pantai Barat, di titik-titik bagian yang indah dilengkapi dengan bangku-bangku untuk turis.

Setelah kembali di Belanda (1925) ia diangkat menjadi Raadsman voor Studerenden (Penasihat bagi yang Sedang Belajar) pada Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan). Selama empat tahun ia mengawasi kalangan muda, yang dengan bantuan pemerintah mempersiapkan diri untuk dinas Hindia, dan ia memberikan nasihat dan bantuan kepada *Nederlandse onderdanen en andere personen van Indische afkomst* (warga Belanda dan orang-orang lain keturunan Hindia). Ia mengajar bahasa Minangkabau di Instituut Kern Leiden (1927-1930) dan mulai bulan Februari 1929 sampai meninggal ia adalah komisar pemerintah pada Koninklijk Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij / KNILM (Maskapai Angkutan Udara Kerajaan Hindia-Belanda) dan Koninklijke Paketvaart Maatschappij / KPM (Maskapai Pelayaran Kerajaan Belanda).

Arsip dan sumber yang tercetak

1. Arsip pribadi L.C. Westenenk, 1893-1928, kode akses 2.21.205.71

Banyak berkas ditulis dalam bahasa Melayu dan Arab.

Untuk berkas ini digunakan pengantar dan nomor inventaris 4: 6-12; 34-35; 59; 63; 65.

Catatan: berkas-berkas Westenenk tersimpan juga pada keluarga dan, yang selama ini pada Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde / KITLV di Leiden, mulai 1 Juli 2014 dipindahkan ke Universiteitsbibliotheek / UB di Leiden. Demikian juga dengan berkas-berkasnya yang semula berada di Koninklijk Instituut voor de Tropen / KIT di Amsterdam, telah dipindahkan ke Universiteitsbibliotheek / UB di Leiden.

2. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Laporan dan advis pegawai BB Westenenk dapat ditemukan dengan bantuan akses (*indices* 'indeks') di arsip umum, dalam rubrik-rubrik berikut:

- a. **Periode 1850-1900** (kode akses 2.10.02; 2.10.10): 'Borneo' (Kalimantan); 'Justitiwezen' (Sistem yustisi); 'Onlusten' (Kerusuhan); 'Sumatra in het algemeen' (Sumatra pada umumnya); 'Sumatra's Westkust' (Pantai Barat Sumatra); 'Atjeh' (Aceh). Westenenk sebagai pengawas di Wilayah Luar Jawa dan Madura adalah juga kepala pemerintah setempat.
- b. **Periode setelah tahun 1900** (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03): 'Benkoelen' (Bengkulu); 'Inlandse gemeenten' (Masyarakat pribumi); 'Padangse boven- en benedenlanden' (Dataran tinggi dan rendah Padang); 'Palembang' (Palembang); 'Politieke stromingen' (Aliran politik); 'Politieke en economische toestanden' (Keadaan politik dan ekonomi); 'Sumatra ('s Oostkust)' (Pantai Timur Sumatra).

Bandingkan dengan paparan rubrik dalam Bab 2 di buku panduan ini.

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan menggunakan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang Westenenk setelah tahun 1921, akses *4de afdeling* (bagian ke-4) adalah penting: lihat kode akses 2.10.36.011.

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia) mulai tahun 1850, dan *serie geheime mailrapporten* (Seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 berisi juga laporan-laporan dari Westenenk, antara lain tentang 'pemberontakan di Pantai Barat Sumatra'. Untuk periode 1850-1900, lihat kode akses 2.10.02. Untuk periode setelah tahun 1900, lihat kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

Series Memories van Overgave (Seri Memori Serah-Terima), 1852-1962, kode 2.10.39, berisi memori serah-terima dari Residen Westenenk, yaitu Benkoelen (Bengkulu) (1920, nomor inventaris 199) dan Palembang (Palembang) (sekitar 1921, nomor inventaris 209).

Serie politieke verslagen en berichten uit de Buitengewesten (Seri laporan dan berita politik dari Wilayah Luar Jawa dan Madura), 1898-1940, kode akses 2.10.52.01, berisi laporan-laporan dari Residen / Gubernur Westenenk tentang Bengkulu, Palembang, dan Pantai Utara

Sumatra (microfiches, nomor fiche 380, 370, 194-195).

Raadsadviezen (Advis Dewan). Raad van Indië (Dewan Hindia) memberi advis untuk semua hal dari yang umum atau yang sangat penting. Untuk mencari advis-advis ini, hampir semua rubrik indeks diperlukan. Untuk paparannya, lihat Bab 44 dalam buku panduan ini.

Advis dan laporan Westenenk sebagai Raadsman voor Studerenden (Penasihat bagi yang Sedang Belajar), dapat ditemukan dalam:

- arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) setelah tahun 1900, dengan bantuan akses (*indices* ‘indeks’) di *openbaar archief* (arsip umum) (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03), dalam rubrik: Onderwijs (Pendidikan);
- arsip Commissariaat voor Indische Zaken (Komisariat Urusan Hindia), (1880) 1927-1949 (1950), kode akses 2.10.49, nomor inventaris 2691, dan seterusnya.

Advis dan laporan Westenenk sebagai *regeringscommissie* (komisaris pemerintah) pada KNILM dan KPM dapat ditemukan dalam:

- arsip ‘Regeringscommissaris bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij’ (Komisaris pemerintah pada Maskapai Pelayaran Kerajaan Belanda), 1930-1952, kode akses 2.10.46.01.
- arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) setelah tahun 1900, akses *4de afdeling* (bagian ke-4) dan *5de afdeling* (bagian ke-5) (lihat kode akses 2.10.36.011, nomor inventaris 583-591 dan 632-634).

Advis-advis Westenenk dimuat dalam publikasi sumber:

- R. C. Kwantes ed. (1975-1982), *De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Tjeenk Willink).

3. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta, melalui halaman Ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Handelingen en bijlagen van de Volksraad 1918-1942 (Notula dan lampiran dari Dewan Rakyat 1918-1942)

Westenenk menjadi anggota dewan ini dari bulan Januari sampai Mei 1920.

Daftar Pustaka

Bekaar, J. (1913-1914), *Hoe wij insulinde besturen* (2 jilid; Haarlem: Tjeenk Willink).

Damsté, H.T. (1932-1933), ‘Levensbericht van Louis Constant Westenenk’, *Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden*, hlm. 183-194.

Kwantes, R.C. (1977), 'Taga' samo tinggi, doedoeé samo randah', dalam: S.L. van der Wal (ed.), *Besturen overzee; Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië* (Franeker: Wever), hlm. 217-235.

Oki, Akira (1977), *Social change in the West Sumatra village: 1908-1945*. PhD thesis, Australian National University, Canberra.

Snouck Hurgronje, C. (1893-1895), *De Atjehers* (2 jilid dalam 3 bundel; Batavia: Landsdrukkerij).

Westenenk, L.C. (1918), *De Minangkabausche Nagari* (Cetakan ke-3; Weltevreden: Visser). Catatan: terbit dalam Serie Mededelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen (Seri Pemberitaan Biro Urusan Pemerintahan di Wilayah Luar Jawa dan Madura), dalam olahan Encyclopaedisch Bureau.

Westenenk, L.C. (1962), *Waar mensch en tijger bureen zijn* (Cetakan ke-4, cetakan pertama 1927; Den Haag: Leopold).

Westenenk, L.C. (1932), *Het rijk van Bittertong* (anumerta; Den Haag: Leopold).

14 M.B. van der Jagt (1873-1960)

Max Buttner van der Jagt (1873-1960) adalah seorang pegawai pemerintah di Jawa. Dia mulai sebagai *controleur* (pengawas) di karesidenan Banyumas (1900-1902), Kediri (1902-1907), Pekalongan (1907-1910), dan (setelah sebentar sebagai selingan menjabat Sekretaris Daerah di Priangan) Semarang (1915-1916). Dia kemudian menjadi asisten-residen di Kedu (1916-1920) dan Surabaya (1920-1922), setelah itu ia kembali ke Kedu sebagai residen (1922). Pada tahun 1927 ia dipindahkan ke Surakarta, salah satu dari Vorstenlanden.³² Jabatan itu dia pegang sampai masa pensiunnya (1930).

Buku harian di arsipnya mencerminkan hidup dan pekerjaannya. Di kemudian hari, bagian tentang pekerjaannya sebagai residen Kedu ia terbitkan sebagai buku *mémoires* (memoar) pada tahun 1955. Dalam pengantar, ia mengenang G.L. Gonggrijp (1859-1939), penulis *Brieven van Opheffer*³³ yang di kalangan korps Binnenlands Bestuur / BB (Pemerintahan Dalam Negeri) memiliki ketenaran yang besar. Gonggrijp baginya dan rekan sezamannya merupakan contoh pegawai pemerintah dengan gaya lama: seorang yang berwibawa, keras, dan adil, yang menjaga ketenangan dan ketertiban, sangat menjunjung 'Kromo' dan bekerja untuk mencapai kemakmuran. Singkat kata, Gonggrijp adalah seorang residen 'tulen', seperti dirinya sendiri. Setelah diberlakukannya Wet op de Bestuurs Hervorming (Undang-Undang Reformasi Pemerintahan) pada tahun 1925, birokratisasi mulai melanda.

Undang-undang itu memang ada dampaknya, sehingga di Jawa karesidenan 'gaya lama' dihapus. Sebagai gantinya, dibentuk tiga provinsi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Pejabat itu juga dapat memberi perintah kepada pegawai pemerintah, termasuk juga kepada para residen. Residen kehilangan sebagian dari kewenangannya yang mandiri dan mendapat wilayah jabatan yang lebih kecil: kedudukan barunya bisa dibandingkan dengan kedudukan dari seorang asisten-residen dari 'gaya lama'. Ia memberi supervisi dan koordinasi; ia merupakan mata rantai dalam aparat pemerintahan daerah.³⁴ Van der Jagt menganggap undang-undang itu sebagai produk kesekian kali dari, yang menurutnya, Politik Etis yang tak terhentikan itu. Prinsip-prinsip demokrasi Barat dijalankan oleh orang-orang luar yang tidak berpengalaman di suatu daerah yang belum matang untuk penerapannya. Pendapat dari para ahli yang betul-betul mengenali negeri dan rakyat itu tidak didengarkan lagi.

Reformasi yang dijalankan terlalu awal itu membuat penduduk pribumi menjadi asing terhadap budaya dan lingkungan mereka sendiri; menjadi materialistis; menjadi ada rasa ketidakpuasan sosial yang bisa dimanfaatkan oleh pengacau politik dengan mudah; menjadikan orang Eropa memiliki *passantenmentaliteit* (mentalitas orang lewat), bagi siapa

³² Termasuk Vorstenlanden adalah Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kerajaan Mangkunegara, Kerajaan Paku Alam.

³³ Lihat Bab 2 dalam buku panduan ini.

³⁴ Juga lihat Bab 2 dalam buku panduan ini.

yang berpendapat bahwa berkarir lebih penting daripada mengikat diri pada negeri tempat mereka tinggal.

Berulang kali Van der Jagt menyatakan pendapatnya: bukan hanya dalam buku memoarnya, tetapi juga di *Koloniaal Tijdschrift*, suatu majalah dari Vereniging van Ambtenaren (Perhimpunan Pegawai Negeri) di BB, di mana ia aktif selama bertahun-tahun. Sebagai anggota Volksraad (Dewan Rakyat) (1918-1924) ia mengkritik Politik Etis yang keluar jalur dalam *donderrede* 'pidato kritiknya' (pengkarakterisasiannya sendiri), yang ia kemukakan pada hari-hari yang penuh gejolak di bulan November 1918, dan ditulisnya secara panjang lebar dalam buku memoarnya.

Pengangkatannya sebagai residen (pada tahun 1928 diubah menjadi gubernur) Surakarta memungkinkannya untuk pindah ke suatu pusat *Javaansche cultuur en Javanisme* (budaya Jawa dan Kejawaen) yang lebih 'asli'. Dalam *Memorie van Overgave* (Memori Serah-Terima), ia menulis 'Het Zelfbestuur vormt nog een natuurlijken dam tegen de verkeerde of onverteerbare, tegen nationalistische en revolutionaire uitwassen van onze uit het Westen naar het Oosten overgebrachte en opgelegde bestuursbeginselen' (Kepemerintahan wilayah yang otonom masih membentuk tanggul alami terhadap ekses-ekses yang salah atau tak dapat dicerna, terhadap ekses-ekses nasionalis dan revolusioner dari asas pemerintahan yang ditetapkan dan dipindahkan dari Barat ke Timur).

Sesaat sebelum pensiun, Van der Jagt menjadi anggota Vaderlandsche Club (Perhimpunan / Klub Nasional). Dengan itu ia menegaskan sikap kritisnya terhadap Politik Etis. Setelah kembali di Belanda, selama bertahun-tahun ia memainkan peran penting dalam Vereeniging Indië-Nederland (Perhimpunan Hindia-Belanda) (1931), yang mempropagandakan *rijkseenheidgedachte* (gagasan negara kesatuan).

Arsip dan Sumber tercetak

1. Arsip pribadi M.B. van der Jagt, 1897-1957, kode akses 2.21.205.26

Untuk bagian ini digunakan *inleiding* (pengantar) dan nomor inventaris 2-30; 36; 41; 57.

2. Arsip pribadi J.W. Meijer Ranneft, 1907-1967, kode akses 2.21.121

Nomor inventaris 216 berisi antara lain sebuah konsep artikel dari Meijer Ranneft tentang buku *mémoires* dari Van der Jagt dan artikel-artikel koran tentang buku ini.

3. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1900

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Laporan dan advis Van der Jagt bisa ditemukan dengan menggunakan akses (*indices* 'indeks') pada *openbaar archief* (arsip umum), dalam rubrik-rubrik berikut:

- a. **periode setelah tahun 1900** (kode akses: 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03): 'Bestuur' (Pemerintahan); 'Decentralisatie' (Desentralisasi); 'Java en Madoera' (Jawa dan Madura); 'Politieke stromingen' (Aliran politik); 'Politieke en economische toestanden' (Keadaan ekonomi dan politik); 'Vorstenlanden' (Keempat kerajaan di Jawa: Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kerajaan Mangkunegara, Kerajaan Paku Alam).

Bandingkan paparan rubrik di Bab 2 dalam buku panduan ini.

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang Van der Jagt setelah tahun 1921, *4de afdeling* (bagian ke-4) sangat penting: lihat kode akses 2.10.36.011.

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia) mulai tahun 1900 dan *serie geheime mailrapporten* (Seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 juga diperlukan untuk penelitian: kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

Seri Memories van Overgave (Memori Serah-Terima) 1852-1962, kode 2.10.39, berisi memori residen / gubernur Van der Jagt, masing-masing tentang Kedu (1927, nomor inventaris 64) dan Surakarta (1929, nomor inventaris 154).

4. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: Untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Handelingen en bijlagen van de Volksraad (Notula dan lampiran dari Dewan Rakyat) Van der Jagt adalah anggota dari dewan ini pada periode Mei 1918-Mei 1924.

Daftar Pustaka

Bertsch, R.K.A. (1941), 'Het binnenlandsch bestuur', dalam: W.H. van Helsdingen dan H. Hogenberk ed., *Daar wèrd wat groots verricht ...: Nederlands-Indië in de XXste eeuw* (Amsterdam: Elsevier), hlm. 458-470.

Bongenaar, Karel E.M. [2005], *De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië: 1855-1942* (Zutphen: Walburg).

Drooglever, P.J. (1980), *De Vaderlandse Club, 1929-1942; Totoks en de Indische politiek* (Franeker: Wever).

Jagt, M.B. van der (1915), 'Ethische koers en bestuursambtenaar', *Koloniaal Tijdschrift*, hlm. 1191-1215, 1328-1345.

Catatan: cetak lepas dalam arsipnya, nomor inventaris 41.

Jagt, M.B. van der (1955), *Mémoires van M.B. van der Jagt; Oud-gouverneur van Soerakarta* (Den Haag: Leopold).

Kleintjes, Ph. (1932-33), *Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië* (Cetakan ke-6; Amsterdam: De Bussy), II, Bab XIV dan XVII.

Nieuwenhuys, R. (1973), *Oost-Indische spiegel; Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden* (Cetakan ke-2; Amsterdam: Querido).

15 W.H. van Helsdingen (1888-1985)

Setelah beberapa tahun menjadi *griffier* (panitera) pada Raad van Justitie (Dewan Yustisi) di Batavia dan *commies-redacteur* (editor-komis) pada Departement van Onderwijs en Eredienst (Departemen Pendidikan dan Ibadah), Willem Henri van Helsdingen (1888-1985) pada tahun 1920 menjadi *adjunct-secretaris* (wakil sekretaris) dan tahun 1927 sekretaris Volksraad (Dewan Rakyat). Dewan itu (1918, mulai tahun 1925 60 anggota) mewakili tiga kelompok masyarakat yang resmi di Hindia-Belanda: Eropa, pribumi, dan Timur Asing (yang kemudian disebut sebagai *Nederlandse onderdanen* ‘masyarakat Belanda’, *in- en uitheemse onderdanen-niet Nederlanders* ‘masyarakat asli / pribumi yang berstatus bukan Belanda dan masyarakat pendatang yang juga berstatus bukan Belanda’). Anggota-anggota Dewan itu sebagian dipilih (oleh dewan-dewan setempat, mulai tahun 1925 juga oleh dewan-dewan kotapraja dan kabupatenan), sebagiannya lagi diangkat oleh gubernur-jenderal.

Pada awalnya Dewan Rakyat itu hanya memiliki kewenangan memberi advis; dengan diberlakukannya Wet op de Staatsinrichting (Undang-Undang Tata Negara) ditambah dengan kewenangan ikut mengatur. Dewan itu bukanlah parlemen sepenuhnya tetapi beroperasi sebagai badan dengan hak ikut bicara dalam hubungan kolonial. Van Helsdingen membuat ringkasan-ringkasan dari kegiatan pekerjaannya pada periode 1918-1928 dan 1928-1938: ringkasan-ringkasan itu terbit dengan judul *Tien jaar Volksraad Arbeid* (Sepuluh tahun pekerjaan Dewan Rakyat).

Pada tahun 1932 menyusul pengangkatannya sebagai walikota kota pelabuhan Surabaya, salah satu kota terbesar di Jawa (sekitar 350.000 penduduk). Pada tahun 1928 Surabaya mendapat status sebagai *stadsgemeente* (kotapraja) dalam provinsi baru Jawa Timur. Terdapat *gemeenteraad* (dewan kotapraja) dan *college van Burgemeesters en Wethouders* / B&W (Dewan Pemerintahan Harian Kotapraja), keduanya diketuai oleh Van Helsdingen. Pengelolaan keuangan diawasi oleh College van Gedeputeerden (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dari Provinciale Raad van Oost-Java (Dewan Provinsi Jawa Timur). Melalui dewan ini, walikota mengusulkan kepada gubernur-jenderal agar ordonansi kotapraja, yang menurutnya bertentangan dengan ordonansi umum atau provinsial, dibatalkan atau dihapus.³⁵

Krisis ekonomi pada tahun 1929 dan depresi yang mengikutinya, juga tidak luput melanda Surabaya. Dari klipang arsip Van Helsdingen diketahui bahwa setelah tahun 1933 perlu dilakukan penghematan atas infrastruktur dan perbaikan kampung. Jumlah orang Indonesia yang semakin meningkat, mengharapakan bantuan melalui *volkskredietwezen* (sistem kredit rakyat) dan *pandhuisdienst* (dinas rumah pegadaian). Pada pembukaan rumah penampungan bagi pengangguran ‘pribumi’, walikota itu menyatakan bahwa wilayah pedesaan tidak dapat lagi menampung jumlah pengangguran yang semakin meningkat.

³⁵ Lihat Bab 2 dalam buku panduan ini.

Pada tahun 1935 Van Helsdingen diangkat oleh Kroon (Pemerintahan Kerajaan) menjadi ketua Dewan Rakyat, untuk masa empat tahun. Dalam fungsi itu ia antara lain menangani petisi Soetardjo (1936), yang berisi permintaan untuk mengadakan konferensi para wakil Belanda dan Hindia-Belanda, yang *op den voet van gelijkgerechtigheid* (berdasarkan persamaan hak) harus menyusun suatu rencana agar Hindia secara berangsur-angsur dapat mandiri dalam hubungan kerajaan. Ketika petisi itu diajukan dalam pemungutan suara, maka Van Helsdingen memberi suara tidak setuju. Ia berpendapat bahwa desentralisasi dan reformasi pemerintahan pertama-tama haruslah bekerja lebih mendalam. Lagipula permasalahan keuangan dengan Belanda harus dipecahkan lebih dahulu: Belanda menjamin hutang Hindia yang besar. Juga di Belanda permintaan itu menemui perlawanan di kabinet dan parlemen: petisi Soetardjo ditolak (1938).

Dalam pidato pesta, yang disampaikan dalam perayaan duapuluh tahun Dewan Rakyat (Juni 1938) Van Helsdingen menyatakan bahwa di kalangan luas muncullah kesadaran akan perlunya memperkenalkan *onbegrepen westerse instituten* (lembaga-lembaga barat yang tidak dipahami) ke dalam kehidupan timur. Sebagai anggota Christelijk-Staatkundige Partij (Partai Politik-Kristen) ia mendukung asosiasi itu. Dalam advis kepada gubernur-jenderal sehubungan dengan pengangkatan anggota-anggota Dewan Rakyat (1939, salinan dalam arsip) ia menyebutkan beberapa garis haluan untuk itu. Salah satunya adalah suatu dewan dapat dibentuk dengan melalui pengangkatan, yang dapat berlaku sebagai *de meest juiste vertegenwoordiging van de Indische maatschappij* (perwakilan yang paling tepat dari masyarakat Hindia).

Arsip dan sumber yang tercetak

1. Arsip pribadi W.H. van Helsdingen, 1904-1978, kode akses 2.21.183.30

Untuk berkas ini digunakan nomor-nomor berikut: 1; 2; 4-9; 13-14; 46; 53-54; 59.

2. Arsip pribadi J.W. Meijer Ranneft, 1907-1967, kode akses 2.21.121 dan arsip pribadi J.A. Jonkman, 1910-1976, kode akses 2.21.298

Arsip-arsip ini berisi berkas-berkas tentang Van Helsdingen.

Meijer Ranneft adalah ketua Volksraad (Dewan Rakyat) pada periode 1929-1933.

Jonkman menjabat fungsi tersebut pada periode 1939-1942.

3. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1900

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Surat dan advis Van Helsdingen dapat ditemukan dengan bantuan akses (*indices* ‘indeks’) di *openbaar archief* (arsip umum) mulai tahun 1900 (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03), dalam rubrik-rubrik berikut: Regering en hoge colleges (Pemerintah dan dewan-dewan tinggi); Bestuur (binnenlands) (Pemerintahan dalam negeri); Bestuurshervorming (Reformasi pemerintahan); Politieke en economische toestanden (Keadaan politik dan ekonomi); Volksraad (Dewan Rakyat).

Bandingkan dengan paparan rubrik dalam Bab 2 dari buku panduan ini.

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang Van Helsdingen setelah tahun 1921, akses *4de afdeling* adalah perlu: lihat kode akses 2.10.36.011.

Juga *geheim en kabinetsarchief* (arsip kabinet dan rahasia) setelah tahun 1900 dan *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) setelah tahun 1914 untuk penelitian juga diperlukan: kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

Surat dan advis Van Helsdingen dimuat dalam publikasi sumber:

- S. L. van der Wal ed. (1964-1965), *De volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië* (2 jilid; Groningen: Wolters).

4. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Provinciaal Blad van Oost-Java, 1929-1939 (Soerabaja)

(Majalah Provinsi Jawa Timur, 1929-1939: Surabaya)

Catatan: di dalamnya dimuat ordonansi-ordonansi kotapraja Surabaya.

Soerabajaasch Handelsblad, 1865-1942 (Soerabaja)

(Suratkabar Surabaya, 1865-1942: Surabaya)

Catatan: berisi antara lain laporan-laporan rapat dewan kotapraja.

Verslag van den toestand der stadsgemeente Soerabaja, 1929-1940 (Soerabaja)

(Laporan keadaan kotapraja Surabaya, 1929-1940: Surabaya)

Handelingen en bijlagen van de Volksraad

(Notula dan lampiran Dewan Rakyat)

Daftar Pustaka

Biografisch Woordenboek van Nederland, versi digital (<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/helsdingen>): lema *W.H. van Helsdingen*.

Broeshart, A.C. , J.R. van Diessen, R.G. Gill, J.P. Zeydner ed. (1994), *Soerabaja; Beeld van een stad* (Purmerend: Asia Maior).

Gouka, N.G.B. (2001), *De petitie-Soetardjo: een Hollandse misser in Indië? (1936-1938)* (Amsterdam: Rozenberg).

Helsdingen, W.H. van (1928), *Tien Jaar Volksraadarbeid, 1918-1928* (Weltevreden: Landsdrukkerij).

Heldingen, W.H. van (1938), *Tien Jaar Volksraadarbeid, 1928-1938* (Batavia: Landsdrukkerij).

Helsdingen, W.H. van (1941), 'Het centraal en regionaal bewind', dalam: W.H. van Helsdingen dan H. Hogenberk ed., *Daar wèrd wat groots verricht ...: Nederlands-Indië in de XXste eeuw* (Amsterdam: Elsevier), hlm. 447-457.

Helsdingen, W.H. van (1961), 'De staatkundige ontwikkeling', dalam: H. Baudet dan I.J. Brugmans (ed.), *Balans van beleid; Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlands-Indië* (Assen: Van Gorcum), hlm. 187-207.

Kleintjes, Ph. (1932-33), *Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië* (Cetakan ke-6; Amsterdam: De Bussy), Bab VI, Bab XIX.

16 R.K.A. Bertsch (1890-1987)

Rudolf Karel August Bertsch (1890-1987) menjadi pegawai pemerintah pada tahun 1911. Dia adalah *controleur* (pengawas) di Pasuruan (sampai tahun 1917) dan di salah satu Vorstenlanden,³⁶ Surakarta (1917-1920). Pada tahun 1927 ia kembali ke Surakarta sebagai asisten-residen. Setelah diberlakukannya Wet op de Bestuurshervorming (Undang-Undang Reformasi Pemerintahan) pada tahun 1925, asisten-residen di Jawa tidak memiliki *bestuursressort* (wilayah pemerintahan) sendiri lagi: ia adalah pegawai administrasi untuk residen. Demikian yang terjadi dengan Bertsch. Awalnya, ia sibuk dengan urusan pertanian; pada tahun 1928 ia ditempatkan pada dinas pemerintahan umum. Atas permintaan residen, ia menyusun satu kumpulan kontrak politik yang terjadi sejak mulai masa kontrak VOC dengan susuhunan. Satu eksemplar kontrak itu tersimpan dalam arsipnya. Pada tahun 1929 menyusul pemindahannya ke *bestuursdienst van het gouvernement Midden-Java* (dinas pemerintahan gubernemen Jawa Tengah) sampai tahun 1931. Dua tahun kemudian ia menjadi residen, pertama-tama di Kediri (1933-1934), kemudian di Malang (1934-1935, 1936-1937). Ia mengakhiri karirnya sebagai gubernur provinsi Jawa Tengah (1937-1939).³⁷

Provinsi Jawa Tengah (1929) mulai berfungsi pada tanggal 1 Januari 1930. Bertsch menjabat ketua Provinciale Raad (Dewan Provinsi) dan College van Gedeputeerden (Dewan Pemerintahan Harian Provinsi). Ia bertugas mengawasi kegiatan pemerintahan di *regentschappen* (kabupatenan) dan *stadsgemeenten* (kotapraja) di wilayah jabatannya. Keputusan dari dewan provinsi dan dewan pemerintahan hariannya, yang dalam pandangannya bertentangan dengan peraturan umum atau dengan kepentingan umum, untuk pembatalan dan penghapusannya harus diajukan kepada gubernur-jenderal.

Arsipnya berisi salinan *Provinciaal Blad van Midden-Java* (Majalah Provinsi Jawa Tengah) dari bulan Desember 1939 dengan sebuah laporan tentang turunnya dari jabatan. Dalam pidato-pidatonya diungkapkan keterlibatannya dengan pertanian, perikanan sungai, pembangunan jalan, jembatan dan irigasi, dan seringnya ia mengadakan kontak dengan penduduk. Dalam sebuah memorandum, yang ditulisnya pada akhir masa jabatannya (salinan dalam arsipnya), ia memperingatkan pelaksanaan perubahan yang dilakukan dalam tempo yang terlalu cepat:

Een juiste methode van welvaartsbevordering zal ... voortdurend acht moeten slaan op de mate, waarin de aanbevolen maatregelen zich in hoofd en hart der bevolking een plaats gaan veroveren. Eerst dan is er plaats voor meerjarenplannen, mits ook deze bij voortduring op hun invloed en gevolgen getoetst worden ... Het is niet de plicht om belastingen te betalen, welke den Javaan het meest bezwaart, doch wel de talloze herhaalde aanslagen op zijn rust, de vele experimenten waarin men hem betreft om zijn levensdoeleinden te verbeteren, de zucht om hem vooruit te helpen ... naar westersch inzicht.

³⁶ Empat kerajaan di Jawa: Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kerajaan Mangkunegara, dan Kerajaan Paku Alam.

³⁷ Lihat Bab 2 dalam buku panduan ini.

(Sebuah metode yang tepat dalam memajukan kemakmuran ... harus terus-menerus mengindahkan cara di mana tindakan yang dianjurkan tersebut akan diingat dan merebut hati rakyat. Baru kemudian bisa ada tempat untuk rencana beberapa tahun, itu pun dengan syarat pengaruh dan dampak rencana tersebut terus-menerus diuji... Bukanlah kewajiban membayar pajak yang paling memberatkan orang Jawa, tetapi terutama gangguan yang berulang kali pada ketenangan mereka, banyaknya eksperimen yang melibatkan mereka demi memperbaiki tujuan hidup mereka, keinginan untuk membantu memajukan mereka ... sesuai pandangan barat).

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip pribadi R.K.A. Bertsch, 1923-1939

Kumpulan 'losse aanwinsten Indische bestuursambtenaren' (arsip-arsip lepas pegawai pemerintah Hindia), kode akses 2.22.09, lampiran 3.

Untuk berkas ini digunakan nomor inventaris 1, 5, dan 6.

2. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1900

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Laporan dan advis Bertsch dapat ditemukan dengan menggunakan akses-akses (*indices* 'indeks') di *openbaar archief* (arsip umum), dalam rubrik-rubrik berikut:

- a. periode setelah tahun 1900** (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03): '(Binnenlands) Bestuur' (Pemerintahan Dalam Negeri); 'Burgerlijke openbare werken' (Departemen Pekerjaan Umum); 'Java en Madoera' (Jawa dan Madura); 'Landbouw' (Pertanian); 'Vorstenlanden' (Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kerajaan Mangkunegara, Kerajaan Paku Alam); 'Wegen' (Jalan-jalan).

Bandingkan dengan paparan rubrik dalam Bab 2 di buku panduan ini.

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang Bertsch sesudah tahun 1921, akses *4de afdeling* (bagian ke-4) sangat penting: lihat kode akses 2.10.36.011

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia) sesudah tahun 1900 dan *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 juga diperlukan untuk penelitian: kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

Seri memories van Overgave (Memori Serah-Terima), 1852-1962, kode 2.10.39, berisi berkas memori Bertsch sebagai residen Kediri (1934, nomor inventaris 105 en 566) dan sebuah memorandum sebagai gubernur Jawa Tengah (1939, nomor inventaris 43). Memorandum itu berisi kumpulan hal-hal penting yang menyangkut seluruh provinsi. Bertsch boleh menulis memorandum itu ringkas saja, karena pendahulunya pada tahun 1937 telah menulis memori serah-terima yang panjang lebar.

3. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: Untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini, lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Provinciaal Blad van Midden-Java (Majalah Provinsi Jawa Tengah), 1930-1939 (Semarang).

Jaarverslagen van de provincie Midden-Java (Laporan-laporan tahunan provinsi Jawa Tengah), 1931-1941 (Semarang).

Staatsblad van Nederlandsch-Indië (Lembaran Negara Hindia-Belanda).

Untuk berkas ini, lihat *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1927 no. 559; 1929 no. 227.

Daftar Pustaka

Bertsch, R.K.A. (1941), 'Het binnenlandsch bestuur', dalam: W.H. van Helsdingen dan H. Hogenberk ed., *Daar wèrd wat groots verricht ...: Nederlandsch-Indië in de XXste eeuw* (Amsterdam: Elsevier), hlm. 458-470.

Kleintjes, Ph. (1932-33), *Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië* (Cetakan ke-6; Amsterdam: De Bussy), Bab XIV, XVII s/d XIX.

17 Th.A. Fruin (1890-1964)

Thomas Anthonij Fruin (1890-1964) selama beberapa tahun bekerja sebagai *advocaat* (advokat) merangkap *procureur* (jaksa) pada Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) sebelum ia pada tahun 1918 menjadi pegawai Binnenlands Bestuur / BB (Pemerintahan Dalam Negeri). Selama dua tahun ia menjadi *controleur* (pengawas) di Sumatra's Westkust (Pantai Barat Sumatra). Arsipnya dari periode itu berisi salinan suratnya kepada kepalanya langsung, asisten-residen Tanah Datar (1919), yang isinya menunjukkan penerapan yang tidak tepat dari *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* (Lembaran Negara Hindia-Belanda) 1910 no. 659. Di dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* itu ditentukan bahwa hanya orang-orang yang ditunjuk oleh kepala pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan 'om huwelijken tussen Mohammedanen te sluiten' (untuk menikahkan orang-orang muslim), 'om kennis te nemen van verstotingen' (untuk memaklumi penjatuhan talak) atau 'om verstotingen te herroepen' (untuk mencabut talak). Tindakan-tindakan itu harus dicatat dalam register khusus. Dengan begitu, pemerintah mencoba mengontrol 'Mohammedaanse geestelijken' (para ulama) demi melindungi 'gelovigen' (orang-orang beragama) itu, dan bersamaan itu melakukan 'de invoering van een burgerlijke stand' (pelaksanaan pencatatan sipil). Fruin menyatakan bahwa aturan-aturan itu dalam praktek kurang diterapkan tegas dan ia mengajukan usulan-usulan untuk perbaikannya.

Pada tahun 1920 ia berdinastikan pada Volkskredietwezen (Sistem Kredit Rakyat). Pada dinas ini karirnya naik menjadi *adjunct-adviseur* (wakil-penasihat) pada tahun 1923 dan *directeur van de Centrale Kas* (direktur Kas Pusat) pada tahun 1927. Fusi antara *Centrale Kas* (Kas Pusat) dengan *afdelings- en gewestelijke banken* (bank-bank cabang dan daerah) menjadi Algemene Volkskredietbank / AVB (Bank Kredit Rakyat Umum) pada tahun 1934 adalah pekerjaannya. Ia adalah presiden AVB sampai masa pensiunnya (1935).

Fruin adalah jenis orang praktek. Ia sangat berpatokan pada nilai pelaksanaan pekerjaan yang efisien dan terarah pada tujuan, kerja sama antara pimpinan dan orang-orang di lapangan. Para pegawai Indonesia dalam jabatan yang rendah menurutnya harus memiliki tanggung jawab sendiri dan mendapatkan kritik yang konstruktif jika mereka melakukan kesalahan. Berdasarkan sudut pandang itu, ia menulis *Handleiding voor de controle door de plaatselijke ambtenaar voor het volkskredietwezen* (Pedoman pengawasan oleh pegawai setempat untuk sistem kredit rakyat) dan *Leidraad voor de inrichting en controle van volksbanken* (Panduan penataan dan pengawasan bank-bank rakyat). Selain publikasi-publikasi itu, arsipnya juga berisi edisi-edisi dari jurnal bidang *Volkskredietwezen* dan *Het Blaadje voor het Volkskredietwezen*. Juga di dalam jurnal-jurnal itu banyak perhatian diberikan pada pengalaman praktek. Dengan demikian, 'krediet- en opkoopstelsels van particuliere geldschietters / instellingen' (sistem kredit dan pemborongan dari lembaga / pendana swasta) dianalisis dengan maksud untuk memperlengkapi bank-bank kredit rakyat itu dengan lebih baik untuk pelaksanaan tugasnya: membantu menunjang ketahanan ekonomi rakyat Indonesia. Artikel-artikel Fruin sendiri tentang budidaya tembakau untuk pasar pribumi di

beberapa kabupaten di Jawa (1923) dan tentang ‘kerftabak’ (tembakau rajangan halus) di Jawa (1923), menjadi contoh pendekatan itu.

Bersama dengan seorang guru pertanian pribumi ia dengan menyamar melakukan perjalanan menjelajahi daerah yang bersangkutan untuk mengumpulkan datanya. Bukunya *Voorloopige handleiding voor het credietbedrijf der Algemeene Volkscredietbank* (Panduan sementara usaha kredit pada Bank Kredit rakyat, 1935), yang ditulisnya dalam rangka kepergiannya dari AVB, pada tahun 1994 diterbitkan kembali oleh Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kementerian Luar Negeri).

Arsip dan sumber yang tercetak

1. Arsip pribadi keluarga Fruin, 1749-1994, kode akses 2.21.222

Berkas-berkas Th.A. Fruin dipaparkan dalam nomor inventaris 69-119 dan 219-227. Untuk berkas ini digunakan *inleiding* (pengantar) dan nomor 75; 77; 219-220; 224; 244; 246. Catatan: arsip ini juga berisi berkas-berkas dari isteri Fruin: Willemine Mees (1887-1967).

2. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan)

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Laporan dan advis Fruin dapat ditemukan dengan bantuan akses (*indices* ‘indeks’) di *openbaar archief* (arsip umum), dalam rubrik-rubrik berikut:

- a. Periode setelah tahun 1900** (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03): ‘Bestuur, binnenlands’ (Pemerintahan dalam negeri); ‘Coöperatie’ (Koperasi); ‘Credietwezen’ (Sistem kredit); ‘Landbouw en cultures’ (Pertanian dan budidaya); ‘Sumatra’s Westkust’ (Pantai Barat Sumatra) (Catatan: di Buitengewesten ‘Wilayah Luar Jawa dan Madura’, pengawas adalah kepala pemerintah setempat); ‘Volkscredietwezen en coöperatie’ (Sistem kredit rakyat dan koperasi); ‘Welvaartsdiensten’ (Dinas layanan kesejahteraan).

Bandingkan dengan paparan rubrik dalam Bab 2 di buku panduan ini. Lihat juga Bab 5 ‘Het Volkskredietwezen / Sistem Kredit Rakyat’.

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang Fruin dan Volkskredietwezen setelah tahun 1921, akses *4de afdeling* (bagian ke-4) diperlukan: lihat kode akses 2.10.36.011.

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia) mulai tahun 1900 dan *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 untuk penelitian juga diperlukan: lihat kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

3. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini, lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Staatsblad van Nederlandsch-Indië (Lembaran Negara Hindia-Belanda)

Untuk berkas ini gunakan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1910 no. 659.

Daftar Pustaka

Fruin, Th.A. (1923), 'Een en ander over de tabakscultuur voor de inlandse markt in de regenschappen Bandjarnegara, Wonosobo, Temanggoeng en Magelang', *Het Blaadje voor het Volkscredietwezen* (September), hlm. 267-326.

Fruin, Th.A. (1923), 'Kerftabak op Java', *Koloniale Studiën* II, hlm. 347-384.

Fruin, Th.A. (1926), *Handleiding voor de controle door de plaatselijke ambtenaar voor het volkscredietwezen* (sebagian dalam bahasa Melayu; Batavia).

Fruin, Th.A. (1927), *Leidraad voor de inrichting en controle van volksbanken* (Batavia).

Fruin, Th.A. (1935), *Voorloopige handleiding voor het credietbedrijf der Algemeene Volkscredietbank* (Batavia).

Catatan: Pada tahun 1994 publikasi ini diterbitkan kembali oleh Kementerian Luar Negeri (bagian Voorlichting Ontwikkelingssamenwerking 'Penerangan Kerja Sama Pembangunan') dengan judul *Provisional manual for the credit business of the General Popular Credit Bank* (Klaas Kuiper ed.; Den Haag).

Fruin, Th.A. (1938), 'Het credietwezen', dalam: W.H. van Helsdingen dan H. Hogenberk ed., *Daar wèrd wat groots verricht ...: Nederlands-Indië in de XXste eeuw* (Amsterdam: Elsevier), hlm. 369-379.

Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938), (Amsterdam: Van Holkema), hlm. 500-501.

18 G. Jansen (1894-1978)

Pada tahun 1914 Gerard Jansen (1894-1978) berangkat ke Hindia-Belanda. Dia mulai sebagai *landmeter* (juru pengukur tanah) pada kantor kadaster kotapraja Bandung (Jawa Barat) dan lima tahun kemudian menjadi kepala Gemeentelijk Bureau voor Grondzaken (Biro Urusan Tanah Kotapraja) yang baru didirikan di Medan (Sumatra).

Pada tanggal 1 Januari 1919 Medan menjadi daerah yang diperintah secara langsung. Sebelum itu, Sultan Deli adalah pemilik tanah di situ. Oostkust van Sumatra (Pantai Timur Sumatra), termasuk Deli, pada paruh kedua pertengahan abad ke-19 berkembang maju. Di wilayah itu bermukim pengusaha-pengusaha (tembakau) Eropa: salah seorang di antaranya adalah J. Nienhuys, pendiri Deli Maatschappij (1869). Para pengusaha mengambil tenaga kerja dari Cina dan bagian lain dari Kepulauan Nusantara. Seorang pengusaha kelahiran Cina, Tjong A Fie, berhasil mengumpulkan harta jutaan dan menjadi Regeringsadviseur voor Chinese Zaken (Penasihat Pemerintah Urusan Cina) yang penting. Pemerintah kolonial mengikuti jejak dunia usaha. Pada tahun 1873 Kesultanan Deli masuk dalam wilayah baru dari Oostkust van Sumatra / SOK (Pantai Timur Sumatra), dengan Medan sebagai ibukota (1887).

Diperkenalkan *westers recht en westerse regelgeving* (hukum dan peraturan barat), pada awalnya terutama untuk 'orang asing': Orang Eropa, Orang Timur Asing, dan setelah tahun 1909 juga 'pribumi' yang bukan rakyat dari sultan. Di wilayah itu mereka menduduki posisi eksteritorial. Dalam berjalannya waktu, kesultanan semakin disesuaikan dalam pemerintah kolonial. Dalam proses itu peraturan yang berkaitan dengan tanah memainkan peran yang menentukan. Awalnya 'orang asing' yang membutuhkan tanah untuk mendirikan perusahaan atau untuk membangun rumah, harus membuat perjanjian sendiri dengan sultan. Dengan adanya Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) pada tahun 1870, memungkinkan pemberlakuan sistem sewa dalam bentuk erfpach. Dalam pelaksanaan hukum ini, pegawai pemerintah mempunyai peran mengontrol dan mengkoordinasi, untuk melindungi penduduk pribumi. Untuk Deli, hal itu berarti bahwa *grondovereenkomsten* (perjanjian tanah) yang sudah dibuat antara 'orang asing' dengan sultan, mulai tahun 1887 harus disetujui oleh kepala pemerintahan daerah dan harus dicatat oleh pengawas dalam register umum yang khusus. Konsesi tanah itu disebut *controleursgrants* (hibah pengawas). Pajak tanah selanjutnya harus dibayarkan kepada pengawas: uang itu akan digunakan untuk kepentingan umum. Mulai tahun 1909 Sultan Deli hanya boleh memberikan konsesi tanah kepada rakyatnya sendiri; konsesi tanah itu disebut *sultansgrants* (hibah sultan).

Atas dasar Decentralisatiewet (Undang-Undang Desentralisasi) tahun 1903, Medan pada tahun 1909 menerima status sebagai *gemeente* (kotapraja), dengan *gemeenteraad* (dewan kotapraja) (1912) dan seorang *burgemeester* (walikota) sendiri (1918). Namun, tanah di tempat itu masih menjadi milik sultan. Perundingan antara pemerintah Hindia dengan *zelfbestuurder* (pemimpin wilayah yang otonom) itu membawa dampak bahwa sultan

menghibahkan tanahnya kepada pemerintah (1918): pada gilirannya pemerintah memberikan tanah itu kepada kotapraja Medan.

Selama enam belas tahun (sampai akhir tahun 1935) Jansen sebagai kepala Bureau Grondzaken (Biro Urusan Tanah) mempunyai peran kunci dalam *grondpolitiek* (politik pertanahan) di Medan. Yang menjadi tugasnya adalah memetakan hak-hak atas tanah yang lama (*controleursgrants* ‘hibah pengawas’, *sultansgrants* ‘hibah sultan’). Dia dan stafnya harus mencari tahu apa arti hak itu, sampai di mana luas wilayah itu, dan siapa saja pemegang hak-hak tersebut. Tugas itu, mengingat seringnya administrasi tidak dicatat dengan baik, bukanlah tugas yang gampang. Jika diinginkan, hak-hak lama bisa diubah menjadi hak-hak bisnis yang modern, seperti *recht van opstal* (hak guna bangunan), *erfpacht* (hak erfpah) dan – dalam ukuran tertentu – *eigendom* (hak milik). Sebidang tanah yang diperoleh Deli Maatschappij / Delimij menjadi milik kotapraja setelah adanya pertukaran: dalam hal ini hak lama (Delimij mengeluarkan dokumen-dokumen untuk pembangunan rumah) juga harus dipetakan dan dicatat. Arsip Jansen berisi antara lain publikasinya *Grantrechten in Deli* (Hak-hak hibah di Deli), yang diterbitkan pada tahun 1925 oleh Oostkust van Sumatra Instituut di Amsterdam. Registrasi yang cermat bukan hanya dibuat dari sudut pandang perlindungan hak, tetapi juga untuk kepentingan pemungutan pajak yang efektif. Dalam hal itu Jansen juga memberi perhatian mendalam, sebagaimana dapat dibaca dalam arsipnya.

Arsip

1. Arsip pribadi G. Jansen, 1908-1960, kode akses 2.21.228

Untuk berkas ini, lihat *inleiding* (pengantar) dan nomor inventaris 1, 3, 7, 10, 14, 15, 17-18, 20.

2. Arsip Deli-Maatschappij, 1869-1967, kode akses 2.20.46

Nomor inventaris 4-5 berisi kontrak-kontrak yang dibuat dengan Sultan Deli. Untuk peta-peta yang menyangkut *gronduitgiften* (pengeluaran tanah) di Medan, lihat nomor inventaris 511-512, 700, 744-745.

Lihat juga Bab 37 ‘N.V. Deli-Maatschappij’ dalam buku panduan ini.

3. Arsip Deli Spoorwegmaatschappij (Jawatan Kereta Api Deli), 1883-1970, kode akses 2.20.11

Nomor kotak kardus 132-133 berisi kontrak-kontrak dengan Sultan Deli dan kotapraja Medan. Nomor kotak kardus 135 berisi surat-surat korespondensi antara D.S.M. dengan kotapraja Medan, antara lain tentang konsesi tanah.

4. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1900

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Berkas-berkas tentang *grondschenking* (penghibahan tanah) oleh Sultan Deli ke pemerintah dapat dicari dengan menggunakan akses-akses (*indices* ‘indeks’) di *openbaar archief* (arsip umum) (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03), dalam rubrik ‘Agrarische aangelegenheden’ (Perihal Agraria).

Lihat misalnya arsip verbal tanggal 20 Oktober 1916 no. 20 dan 27 Oktober 1916 no. 74.

Lihat juga dalam rubrik ‘Oostkust van Sumatra (binnenlands bestuur)’ (Pantai Timur Sumatra: pemerintahan dalam negeri) dan ‘Sumatra’s Oostkust’ (Pantai Timur Sumatra).

Openbaar verbaalarchief (arsip verbal umum) tahun 1850-1921 bisa diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang topik ini setelah tahun 1921, akses *4de afdeling* (bagian ke-4) sangat penting: lihat kode akses 2.10.36.011.

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia) dan *serie geheime mailrapporten* (Seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 juga penting untuk penelitian: kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

Daftar Pustaka

Bongenaar, Karel E.M. (2005), *De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië 1855-1942* (Zutphen:

Gemeente Medan, 1909-1934 (1934; Medan: Deli Courant).

[L.J. Winckel (1934), *Gemeente Medan, 1909-1934* (Medan: Deli Courant).]

Catatan: Buku peringatan, dengan sumbangan dari G. Jansen tentang urusan tanah.

Jansen, G. (1925), *Grantrechten in Deli* (Mededeeling / Oostkust van Sumatra Instituut 12; Amsterdam: Oostkust van Sumatra Instituut).

Jansen, G. (1930), ‘De decentralisatie en de grond’, dalam: F.W.M. Kerchman (ed.), *25 jaren decentralisatie in Nederlandsch-Indië 1905-1930; Gedenkboek uitgegeven door de Vereeniging van Locale Belangen* (Weltevreden), hlm. 145-158.

Loderichs, M.A. dkk. (1997), *Medan; Beeld van een stad* (Purmerend: Asia Maior).

19 G.W. Caudri (1905-1966)

Gerrit Willem Caudri (1905-1966) memulai karir pekerjaannya di Corps Binnenlands Bestuur / BB (Korps Pemerintahan Dalam Negeri) sebagai *aspirant-controleur* (pengawas muda) di Karesidenan Bengkulu (subbagian Rejang dan Lebong, 1933). Tiga tahun sesudahnya ia menjadi *controleur* (pengawas) di gubernemen *Celebes en Onderhorigheden* (Sulawesi dan bagian-bagiannya) (subbagian Boeton / Buton dan Kepulauan Tukang besi, 1936-1939).

Bengkulu merupakan daerah yang subur di Sumatra Selatan tetapi berpenduduk jarang. Pada tahun 1908 beberapa kepala pribumi mulai menarik pendatang Jawa untuk membuka lahan daerah itu agar dengan cara demikian mendorong kemakmuran. Upaya itu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang terarah mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dengan mendorong orang-orang Jawa untuk pindah ke Buitengewesten (Wilayah Luar Jawa dan Madura). Banyak orang Jawa pindah ke Bengkulu selama depresi ekonomi di tahun 30-an. Pemerintah membiayai lebih dahulu ongkos perjalanannya. Para pendatang Jawa itu membayar kembali biaya itu dari hasil penjualan produk-produk yang dibangunnya sendiri. Caudri sangat terlibat dengan kolonisasi dari Jawa itu. Dalam buku harian konsepnya (Maret 1935-Oktober 1936) ia membahas situasi di subbagiannya. Ia membuat laporan tentang cara orang-orang Jawa yang baru datang diterima dan ditampung; tentang pekerjaan yang mereka harus laksanakan dan pengawasannya; tentang penanganan keluhan-keluhan mereka dan perawatan orang sakit. Termasuk tugas-tugas lainnya adalah melakukan inspeksi pertanian, infrastruktur dan pendidikan, dan pengadilan. Caudri adalah *magistraatsrechter* (hakim magistrat) dan ketua dari yang disebut ‘rapat besar’: pengadilan untuk masyarakat pribumi di mana *civiele zaken* (urusan sipil / perdata) diadili berdasarkan *adatrecht* (hukum adat) dan *strafzaken* (urusan pidana) berdasarkan Nederlands Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda) yang disesuaikan.

Arsip

1. Arsip pribadi G.W. Caudri, 1925-1955, kode akses 2.21.205.14

Untuk berkas ini digunakan *inleiding* (pengantar) dan nomor inventaris 7-9.

2. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1900

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Caudri sebagai pengawas di Wilayah Luar Jawa dan Madura adalah kepala pemerintah setempat.

Laporan dan advisnya dapat dicari dengan bantuan akses (*indices* ‘indeks’) di *openbaar archief* (arsip umum) mulai tahun 1900 (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03), dalam rubrik-rubrik berikut:

‘Bestuur (binnenlands)’ (Pemerintahan dalam negeri); ‘Buitengewesten’ (Wilayah Luar Jawa dan Madura); ‘Celebes’ (Sulawesi); ‘Kolonisatie’ (Kolonisasi); ‘Sumatra’.

Bandingkan dengan paparan rubrik di Bab 2 dalam buku panduan ini.

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas setelah tahun 1921, akses *4de afdeling* (bagian ke-4) adalah penting: lihat kode akses 2.10.36.011.

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia) mulai tahun 1900 dan *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) untuk penelitian juga diperlukan: kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

Serie Memories van Overgave (Seri Memori Serah-Terima), 1852-1962, kode akses 2.10.39 berisi memori serah-terima tambahan dari Caudri sebagai pengawas pada subbagian Buton (1939, nomor inventaris 1171).

3. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini, lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.bb.nl).

Jaarverslag van den Kolonisatieraad, 1938-1941 (Batavia).

Kolonisatiebulletin, 1938-1941 (Batavia).

Terbitan dari Centrale Commissie voor Emigratie en Kolonisatie van Inheemschen (Komisi Pusat untuk Emigrasi dan Kolonisasi Pribumi).

Daftar Pustaka

Hazairin (1936), *De Redjang; De volksordening, het verwantschaps-, huwelijks- en erfrecht* (Bandung: Nix).

Jaquet, L.G.M. (1978), *Aflossing van de wacht; Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indië* (Rotterdam: Ad Donker).

Catatan: pada tahun 1938 Jaquet menjadi pengawas di Bengkulu.

Wellan, J.W.J. (1932), *Zuid-Sumatra; Economisch overzicht van de gewesten Djambi, Palembang, de Lampoengsche districten en Benkoelen* (Wageningen: Veenman).

20 J. van Baal (1909-1992)

Jan van Baal (1909-1992) adalah seorang pegawai pemerintah dan antropolog budaya. Minat utamanya adalah Nieuw-Guinea (Guinea-Baru). Ia menulis disertasi (Amsterdam 1934) berjudul *Godsdienst en samenleving in Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea* (Agama dan masyarakat di wilayah Belanda Guinea-Baru Selatan). Ia kemudian bekerja selama dua tahun sebagai *controleur* (pengawas) di Afdeling Zuid Nieuw-Guinea (Bagian / Kantor Wilayah Guinea-Baru Selatan) pada tahun 1936-1938. Pada tahun 1950 ia menjadi kepala Kantoor voor Bevolkingszaken (Kantor Urusan Penduduk) sampai tahun 1952, yang pendiriannya sangat ia perjuangkan. Jan van Baal menjadi gubernur Nieuw-Guinea selama lima tahun (1953-1958).

Sebagai pengawas muda, ia dihadapkan dengan beberapa dampak yang drastis dari pemerintahan kolonial dan para misionaris terhadap rakyat yang tinggal di wilayahnya, yaitu suku Marind Anim. Larangan memenggal kepala musuh diberlakukan, sehingga dengan begitu upacara ritual dan pesta-pesta yang berkaitan dengan kegiatan itu menjadi hilang. Tindakan-tindakan yang diambil untuk memerangi penyakit *venerisch granuloom*³⁸ yang banyak ditemukan pada masyarakat, menyebabkan ditutupnya *mannen- en jongenshuizen* (rumah laki-laki dan anak laki-laki). Dengan diperkenalkannya alat besi seperti kapak baja, maka pembagian kerja tradisional antara laki-laki dan perempuan berubah secara drastis. Ada beberapa penyakit baru merebak yang banyak memakan korban, misalnya epidemi influenza tahun 1918. Perubahan budaya ini yang terutama terjadi di kalangan laki-laki Marind Anim menimbulkan gejala depresi dan tumbuhnya kesadaran mengenai kesia-siaan hidup. Sikap hidup yang negatif itu terwujud dalam *voortsplantingspatroon* (pola berkembang biak) mereka. Van Baal percaya bahwa pemerintah dan misionaris harus mencoba membantu memulihkan masalah menurunnya perkembangbiakan itu melalui pendidikan dan berbagai kegiatan sosial yang baru.

Pada jilid pertama dari buku memoarnya *Ontglijpt verleden* (Masa lalu yang lepas) berjudul *Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog* (Pegawai pemerintah Hindia dalam kedamaian dan peperangan) (1986), Van Baal memberikan banyak perhatian terhadap tema tersebut. Dalam hal itu ia mendasarkan diri pada tulisannya yang diterbitkan pada tahun 1939 'De bevolking van Zuid-Nieuw-Guinea onder Nederlands bestuur: 36 jaren' (Populasi Guinea-Baru Selatan di bawah pemerintahan Belanda: 36 tahun). Untuk tulisan itu ia menggunakan arsip dari kantor pemerintahan di Merauke. Arsipnya sendiri hanya berisi beberapa landasan tentang permasalahan itu dalam bentuk data statistik dan catatan demografi yang berkaitan dengan beberapa kampung di wilayah jabatannya .

Arsip Van Baal berisi dua laporan dari Nederlandsche Commissie voor Internationale Natuurbescherming (Komisi Belanda untuk Perlindungan Alam Internasional), yang pada

³⁸ Sejenis penyakit kelamin yang sangat menular.

akhir tahun 30-an menekuni pertanyaan tentang bagaimana cara melindungi suku-suku Papua Gunung dari berbagai dampak buruk akibat terlalu cepatnya pelaksanaan peradaban Barat. Menurut komisi sebagian dari Nieuw Guinea pusat untuk sementara sebisa mungkin harus ditutup dari dunia luar. Daerah-daerah lainnya bisa dibuka secara bertahap sampai tercapainya keadaan pemerintahan kolonial yang ‘normal’, seperti yang terjadi di bagian-bagian lain Hindia-Belanda.

Dengan didirikannya Kantor Urusan Penduduk, maka keinginan Van Baal terwujudkan untuk melalui penelitian dapat mengumpulkan pengetahuan tentang pola budaya kuno, dan berdasarkan pengetahuan itu dapat memberikan kontribusi pada pengalihan yang lancar dari bentuk lama ke bentuk baru. Dalam nota bulan November 1945 (dalam arsipnya) ia menganjurkan pendekatan seperti itu untuk seluruh Hindia-Belanda.

Van Baal berpendapat bahwa dengan meningkatnya penggunaan bahasa Melayu sudah sejak sebelum perang, beberapa bahasa ‘kecil’ di Ambon dan Minahasa menghilang. Arsip Kantor Urusan Penduduk itu (1950-1962) disimpan di Nationaal Archief Den Haag (Arsip Nasional Den Haag).

Arsip

1. Arsip pribadi J. van Baal, 1934-1988, kode akses 2.21.205.02

Untuk berkas ini digunakan nomor inventaris 1, 4-7, 12, 22, 30, 89, 155.

Catatan: Berkas-berkas arsip Van Baal juga disimpan di KIT Amsterdam dan di KITLV Leiden. Arsip di KITLV Leiden mulai 1 Juli 2014 dipindahkan ke Universiteitsbibliotheek / UB di Leiden.

2. Arsip ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1900

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Sebagai *controleur* (pengawas) di salah satu Buitengewesten (Wilayah Luar Jawa dan Madura) Van Baal adalah kepala pemerintahan daerah. Laporan dan advisnya dapat ditemukan dengan menggunakan akses-akses (*indices* ‘indeks’) di *openbaar archief* (arsip umum) (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03), dalam rubrik-rubrik berikut: ‘Binnenlands bestuur’ (Pemerintahan dalam negeri); ‘Bestuur’ (Pemerintah); ‘Buitengewesten’ (Wilayah Luar Jawa dan Madura); ‘Nieuw-Guinea’ (Guinea-Baru). Bandingkan juga paparan rubrik dalam Bab 2 di buku panduan ini.

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850 -1921 bisa diakses dengan menggunakan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk berkas-berkas sesudah tahun 1921, akses *4e afdeling* (bagian ke-4) adalah penting; lihat kode akses 2.10.36.011.

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia) mulai tahun 1900 dan *serie geheime mailrapporten* (Seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 juga penting untuk penelitian: kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

Serie Memories van Overgave (Seri Memori Serah-Terima), 1852-1962, kode akses 2.10.39, berisi sebuah memori serah-terima (yang umum) dari pengawas Van Baal yang berkaitan dengan Onderafdeling Zuid-Nieuw-Guinea / Subbagian Guinea-Baru Selatan (1938, nomor inventaris 419 dan 1415).

Arsip dari Kantoor voor Bevolkingszaken Nederlands Nieuw-Guinea (Kantor Urusan Penduduk Guinea-Baru Wilayah Belanda) (1912) 1950-1962, kode akses 2.10.25.

Daftar Pustaka

Baal, J. van (1939), 'De bevolking van Zuid-Nieuw-Guinea onder Nederlands bestuur, 36 jaren', *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* No. 79, hlm. 309-414.

Baal, J. van (1977), 'Voltooid verleden', dalam: S.L. van der Wal (ed.), *Besturen overzee; Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië*, (Franeker: Wever), hlm. 110-129.

Baal, J. van, K.W. Galis, dan Koentjaraningrat (1984), *West Irian, a bibliography* (Dordrecht: Foris).

Baal, J. van (1986-89), *Ontglipt verleden; Verhaal van mijn jaren in een wereld die voorbijging* (2 jilid: I: *Tot 1947; Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog*, II: *Leven in verandering, 1947-1958*; Franeker: Wever).

Miedema, J. dan W.A.L. Stokhof (1990), 'Introduction', *Irian Jaya source materials* No. 1, (Leiden: DSALCUL, Jakarta: IRIS).



Soewardi Soerjaningrat dengan murid-murid sekolahannya: Taman Siswoschool, 1922 (Van Miert 1995: 121). Lihat Bab 28 dalam buku panduan ini.

II Onderwijs en Eredienst (Pendidikan dan Ibadah)

21 Het Departement van Onderwijs, Eredienst (en Nijverheid) (Departemen Pendidikan, Ibadah (dan Industri Kerajinan))

Berdasarkan Koninklijk Besluit (Keputusan Kerajaan) tanggal 21 September 1866 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1866 no. 127) didirikan empat departemen pemerintahan umum. Salah satunya adalah Departement van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid / OEN (Departemen Pendidikan, Ibadah, dan Industri Kerajinan). Minister van Koloniën (Menteri Urusan Tanah Jajahan) I.D. Fransen van de Putte (1863-1866, 1872-1874) ingin memajukan pendidikan di Hindia secara sistematis. Dia meramalkan adanya peningkatan kebutuhan tenaga terlatih, baik dalam dunia usaha maupun dalam pemerintahan kolonial. Jika ada lebih banyak sekolahan didirikan di Hindia-Belanda, maka tanah jajahan ini akan kurang tergantung pada tenaga kerja terdidik dari Belanda yang mahal. Lagipula, perkembangan pendidikan akan memiliki dampak positif pada kesejahteraan. Hindia dan Belanda akan dapat menikmati keuntungan dari kesejahteraan itu.

Pembentukan departemen itu mengakhiri situasi yang tidak jelas yang terjadi dalam bidang pendidikan pada dekade-dekade sebelumnya. Campur tangan dalam hal pendidikan di Jawa dan Madura pada awalnya menjadi urusan dari para kepala pemerintahan daerah (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1859 no. 102), yang tentang hal ini bisa langsung menghubungi gubernur-jenderal.³⁹ Di tingkat pusat seorang Hoofdcommissie van Onderwijs (Kepala Komisi Pendidikan) menjalankan tugasnya di bawah pimpinan seorang anggota Raad van Indië (Dewan Hindia), sementara pada tahun 1864 diangkat seorang inspektur pendidikan pribumi.

Gagasan bahwa ada hubungan langsung antara perkembangan dalam bidang intelektual / ilmiah-budaya dan sosial-ekonomi tersebar luas di abad ke-19. Kaitan hubungan itu mendapatkan wujudnya di Departemen Pendidikan yang baru dan menyebabkan timbulnya beragam deskripsi tugas.

Terjadi perkembangan sistem pendidikan yang bilingual dan dualistis. Pendidikan yang berbahasa Belanda pada dasarnya diperuntukkan bagi orang Eropa dan kalangan atas masyarakat pribumi: pendidikan ini diberikan di Europese Lagere Scholen (Sekolah Dasar Eropa), Hollands-Inlandse Scholen (Sekolah Belanda-Pribumi), dan Hollands-Chinese Scholen (Sekolah Belanda-Cina). Di samping itu ada pendidikan berbahasa pribumi untuk kaum menengah dan sejumlah besar masyarakat lainnya: untuk kategori pertama ada yang disebut *standaardscholen* (sekolah standar) dan untuk kategori kedua ada *desascholen* (sekolah desa). Perkembangan ekonomi yang menguntungkan setelah tahun 1900 menyebabkan adanya peningkatan permintaan pendidikan berbahasa Belanda dari kalangan menengah. Diskrepansi antara penawaran dan permintaan menjadi unsur penting kritik Indonesia terhadap hubungan kolonial. Selain pendidikan umum, pendidikan kejuruan dan

³⁹ Lihat Bab 1 dalam buku panduan ini.

pertukangan juga berkembang. Dengan begitu, didirikanlah *kweekscholen* (sekolah guru) untuk para guru dan *dokter-djawascholen* (cikal-bakal dari *scholen voor inlandse artsen*, sekolah dokter pribumi). Mulai tahun 1869 *landsdrukkerij* (percetakan negara) berada di bawah Departement van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid (Departemen Pendidikan, Ibadah, dan Industri Kerajinan): di percetakan itu bahan pelajaran (dalam bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan bahasa Indonesia lainnya) dicetak. *Depot van leermiddelen* (Depot bahan-bahan pelajaran) (1878) mengelola pendistribusiannya.

Bagian tugas cabang seni dan ilmu pengetahuan mencakup perawatan bangunan yang mempunyai nilai arkeologis dan historis (pada tahun 1913 sebuah lembaga khusus dibebani urusan itu) dan juga perawatan Plantentuin (Kebun Raya) Bogor. Ada subsidi yang diberikan kepada Bataviaasch Genootschap. Museum Bataviaasch Genootschap ini mengumpulkan dan mengelola benda-benda, yang antara lain diserahkan oleh para pejabat pemerintah.

Baik jemaah gereja Kristen maupun lembaga / urusan Islam termasuk lapangan pekerjaan Afdeling Eredienst (Bagian Ibadah). Sekolah khusus, rumah sakit, lembaga untuk kesejahteraan orang miskin juga mendapat subsidi; sesekali juga diberikan bantuan keuangan untuk pembangunan mesjid. Uang itu berasal dari hasil lotere: 'loterijwezen' (urusan lotere), dengan 'armwezen en de liefdadigheid' (urusan orang miskin dan amal), berada di bawah OEN. Bagian itu terlibat dalam pembuatan peraturan untuk pendidikan khusus. Salah satu contoh dari pendidikan itu adalah Goeroe-ordonnantie (Ordonansi Guru) dari tahun 1905 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1905 no. 550), di mana 'Mohammedaans godsdienstonderwijs' (pendidikan agama Islam) di Jawa dan Madura ada di bawah pengawasan pemerintahan itu. Pada tahun 20-an sekolahan yang disebut *wilde scholen* (sekolah liar yang didirikan oleh organisasi nasionalis / komunis) juga ditetapkan di bawah pengawasan.

Bagi jemaah haji ke Mekah (melalui pemerintahan daerah) diberikan Mekkapassen (kartu Mekah) yang dapat mereka gunakan untuk minta tolong ke Konsulat Belanda di Jeddah (1872) apabila mereka berada dalam kesulitan. Penasihat untuk Inlandse en Arabische Zaken (Urusan Pribumi dan Arab) pada tahun 1898 secara administratif berkantor di bawah Departemen OEN.

Afdeling Burgerlijke Geneeskundige Dienst / BGD (Bagian Dinas Kesehatan Sipil) harus mengelola rumah sakit, sanitarium, rumah sakit jiwa, pemberantasan penyakit menular, perizinan dokter, bidan pribumi, dan dokter-djawa. Bagian Dinas itu juga terlibat dalam pendidikan bagi orang Indonesia untuk perawatan kesehatan.

Paket tugas Afdeling Nijverheid (Bagian Industri Kerajinan) pada akhirnya mencakup antara lain 'Kamers van Koophandel' (Kamar Dagang), 'octrooi- en ijkwezen' (perihal paten dan tera), 'oprichting van fabrieken' (pendirian pabrik), 'visserij' (perikanan), 'mijnwezen (concessieverleningen)' (pertambangan: pemberian konsesi), dan 'zoutregie' (jawatan pengaturan garam).

Krisis ekonomi pada akhir abad ke-19 menyebabkan pemerintah Hindia memutuskan untuk memainkan peran aktif dalam memajukan kemakmuran. Pada tahun 1904 didirikan sebuah departemen baru, yaitu Departement van Landbouw (Departemen Pertanian) (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1904 no. 380). Departemen itu mengambil alih dari OEN:

‘landbouwonderwijs- en onderricht’ (pendidikan dan pengajaran pertanian); ‘visserij’ (perikanan); ‘Plantentuin’ (Kebun Raya); ‘wetenschappelijk onderzoek’ (penelitian ilmiah); dan ‘uitgeven van publicaties met betrekking tot de zojuist genoemde taakonderdelen’ (penerbitan publikasi yang berkaitan dengan komponen tugas yang disebutkan tadi).

Pembongkaran lebih lanjut dari Departement van Onderwijs (Departemen Pendidikan) terjadi pada tahun 1907, dengan berdirinya Departement van Gouvernementsbedrijven (Departemen Perusahaan Pemerintah) (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1907 no. 406). Departemen itu memperoleh ‘zoutregie’ (jawatan pengaturan garam), ‘mijnwezen’ (pertambangan), dan ‘landsdrukkerij’ (percetakan negara). Setelah peluasan yang besar dari aparat pemerintahan pusat itu, atas anjuran Minister van Koloniën (Menteri Urusan Tanah Jajahan) dicari jalan untuk mengimbangi tingginya pengeluaran pemerintah itu. Maka timbullah usulan untuk menghilangkan sama sekali OEN yang pada saat itu sudah sangat mengecil. Pendidikan akan bisa dialihkan ke Departement van Binnenlands Bestuur / BB (Departemen Pemerintahan Dalam Negeri): departemen itu sudah memiliki ‘volksonderwijs’ (pendidikan rakyat). Departement van Justitie (Departemen Kehakiman) akan bisa mendapat tambahan ‘Eredienst’ (Ibadah) dan Departement van Financiën (Departemen Keuangan) mendapat Afdeling Nijverheid (Bagian Industri Kerajinan). Para penentang, termasuk direktur BB, memberi unjuk akan adanya beban yang terlalu berat dari Departemen BB: departemen itu juga baru saja diperluas dengan ‘Volkskredietwezen’ (Kredit Rakyat) dan ‘Inspectie voor Agrarische Zaken’ (Inspeksi untuk Urusan Agraria). Dengan lebih banyaknya tugas akan menjadikan pendidikan semakin terdesak, pendidikan merupakan suatu bagian mendasar dari politik Etis. Dalam advis kepada gubernur-jenderal (28 Agustus 1906), Raad van Departementsdirecteuren (Dewan Direksi Departemen) juga menolak usulan itu :

De tijden..., dat met het Onderwijs als met een punt van ondergeschikt belang, een onderwerp van bijkomende aard kan worden gehandeld, zijn ook hier voorbij. Evenzeer als in Europa vereischt dat onderwerp – vooral met de behoeften der Europeesche maatschappij hier te lande, echter meer en meer ook ten opzichte van het Inlandsch onderricht – de onverdeelde belangstelling van hen, aan wie de centrale leiding is toevertrouwd.⁴⁰

(Masa-masa ..., bahwa Pendidikan dianggap sebagai hal yang tidak penting, suatu topik yang cuma bersifat tambahan saja, sekarang juga sudah berlalu. Sama seperti di Eropa topik itu menuntut – terutama dengan kebutuhan masyarakat Eropa di negeri ini, namun lebih-lebih lagi dalam kaitannya dengan pendidikan orang pribumi – perhatian penuh dari mereka yang diberi kepercayaan penuh memegang pimpinan pusat.)

Dengan begitu, Departement van Onderwijs en Eredienst / O&E (Departemen Pendidikan dan Ibadah) tetap ada, meskipun dalam bentuk yang (lebih) ramping lagi: Departement van

⁴⁰ Archief Ministerie van Koloniën (Arsip Kementerian Urusan Tanah Jajahan) setelah tahun 1900, kode akses 2.10.36.04, nomor inventaris 421, arsip verbal 13 Desember 1906-45.

Landbouw (Departemen Pertanian) pada tahun 1911 mengambil alih ‘Afdeling Nijverheid’ (Bagian Industri Kerajinan) dan pada tahun 1914 mendapat tambahan ‘nijverheidsonderwijs’ (pendidikan industri kerajinan).

Dalam tahun-tahun berikutnya, bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat meluas. Direktur O&E, K.F. Creutzberg (1916-1923), berpendapat bahwa pendidikan harus dilihat sebagai satu kesatuan organisatoris. Pemecahan bagian itu menyebar ke berbagai departemen menghambat integrasi pendidikan dalam sistem pendidikan rakyat. Organisasi pendidikan merupakan suatu bidang keahlian tersendiri. Creutzberg mengajukan agar ‘inlands volksonderwijs’ (pendidikan rakyat pribumi) dan ‘ambachts- en nijverheidsonderwijs’ (pendidikan pertukangan dan industri kerajinan) ditempatkan (lagi) di bawah departemennya. Hal itu terjadi masing-masing pada tahun 1918 dan 1921.

Pada Burgerlijke Geneeskundige Dienst (Dinas Kesehatan Sipil) pencegahan penyakit semakin mendapat perhatian. Hal itu berarti bahwa kantor dinas itu ikut campur dengan urusan ‘riolering’ (saluran pembuangan air), ‘drinkwatervoorziening’ (pengadaan air minum), ‘bodemsanering’ (pembersihan tanah), ‘volkshuisvesting’ (perumahan rakyat), dan ‘bevolkingsstatistiek’ (statistik penduduk). Ketika pada tahun 1924 ‘lingkungan kerja’ dari departemen pemerintahan ditetapkan kembali (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1924 no. 576), maka kantor dinas itu berubah menjadi Dienst der Volksgezondheid (Dinas Kesehatan Rakyat). Dalam paket deskripsi tugas yang disesuaikan juga dimasukkan paket tugas yang disebut tadi.

Juga pada tahun 1924 ‘arm- en loterijwezen’ (jawatan lotere dan orang miskin) dipindahkan ke Departement van Justitie (Departemen Kehakiman).

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Untuk bab ini dilakukan penelitian arsip. Berkas-berkas yang disebut sesesudahnya tentang organisasi OEN tercantum dalam akses-akses (*indices* ‘indeks’) dalam *openbaar archief* (arsip umum) (kode akses disebut di bawah ini), dalam rubrik: ‘Departementen van algemeen bestuur’ (Departemen-departemen pemerintahan umum); ‘Bestuur (binnenlands)’ (Pemerintahan dalam negeri); ‘Onderwijs’ (Pendidikan).

Untuk bagian ini lihat *verbalen / exhibita* (arsip verbal / ekshibitum): 26 Februari 1866 no.56; 19 Juni 1869 no. 19; 15 Oktober 1884 no. 46; 7 Agustus 1902 no 74; 6 Februari 1903 no. 8; 2 April 1903 no. 12; 20 Juni 1904 no. 64; 29 Januari 1906 no. 28; 1 Juni 1906 no. 73; 25 Juni

1906 no. 50; 13 Desember 1906 no. 45; 20 Desember 1906 no. 61; 12 Januari 1907 no 59; 18 Januari 1907 no. 37; 18 April 1907 no. 32; 24 Mei 1907 no. 47; 29 Juni 1909 no. 20; 5 November 1910 no. 19; 8 November 1913 no. 35; 13 Maret 1915 no. 53; 13 Juni 1916 no 1; 11 September 1918 no. 26; 24 September 1918 no. 43; 29 Oktober 1918 no. 24; 2 Februari 1921 no. 34; 6 September 1924 no. 59.

Berkas-berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas OEN (secara garis besar), laporan dan advis dari direktur OEN bisa ditemukan dengan menggunakan akses-akses (*indices* 'indeks') dalam *openbaar archief* (arsip umum), dalam rubrik-rubrik berikut:

- a. **Periode tahun 1850-1900** (kode akses 2.10.02; 2.10.10): 'Schoolwezen in O. Indië / Onderwijs' (Perihal sekolah di Hindia-Timur / Pendidikan); 'Eredienst-niet-Mohammedaans / ook Mohammedaans' (Ibadah: bukan muslim / juga muslim); 'Kunsten en Wetenschappen' (Kesenian dan Ilmu Pengetahuan); 'Natuurkundig onderzoek in O. Indië' (Penelitian fisika di Hindia-Timur); 'Boeken en geschriften' (Buku dan tulisan); 'Landbouw (en Veeteelt)' (Pertanian dan Peternakan); '(Burgerlijke) Geneeskundige Dienst (in de koloniën)' (Dinas Kesehatan Sipil di tanah jajahan); 'Maatschappij van weldadigheid' (Organisasi pemberantasan kemiskinan); 'Fabrieken en trafieken' (Pabrik dan perusahaan industri bahan dasar); 'Visserijen' (Perikanan); 'Mijnwezen (in O. Indië)' (Pertambangan di Hindia-Timur); 'Zoutadministratie (in O. Indië)' (Administrasi pergaraman di Hindia-Timur)..
- b. **Periode setelah tahun 1900** (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03): 'Onderwijs (ook uitgesplitst in Onderwijs, lager, middelbaar, hoger, gesubsidieerd, Europees, inlands; Onderwijs en eredienst)' (Pendidikan, juga terpilah dalam Pendidikan rendah, menengah, tinggi, bersubsidi, Eropa, pribumi; Pendidikan dan Ibadah); 'Eredienst (uitgesplitst in Eredienst Mohammedaanse / niet- Mohammedaanse / bedevaart / hedjaz)' (Ibadah, juga terpilah dalam Ibadah muslim / bukan muslim / ziarah / hedjaz); 'Kunsten (en wetenschappen) / Oudheidkundige dienst' (Seni dan Ilmu Pengetahuan / Dinas Ilmu Purbakala); 'Boeken en geschriften / Boekwerken / Drukwerken' (Buku dan tulisan/ buku cetakan / barang cetakan); 'Landsdrukkerij' (Percetakan negara); 'Landbouw, cultures in het algemeen' (Pertanian, budidaya tanaman pada umumnya); 'Burgerlijke Geneeskundige Dienst / Volksgezondheid / Ziekten / Hygiëne / Quarantaine' (Dinas Kesehatan Sipil / Kesehatan masyarakat / Penyakit / Higiene / Karantina); 'Armenzorg / armwezen' (Perawatan orang miskin / perihal kemiskinan); 'Nijverheid' (Industri kerajinan); 'Visserij' (Perikanan); 'Mijnwezen' (Pertambangan); 'Zout' (Garam); 'Ijkwezen' (Jawatan tera).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas OEN sesudah tahun 1921, akses *4de afdeling* adalah penting: lihat kode akses 2.10.36.011.

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia) mulai tahun 1850 dan *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914, untuk penelitian juga diperlukan: kode akses 2.10.02; 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

Advis dan laporan dari direktur OE(N) dimuat dalam publikasi sumber berikut:

- P. Creutzberg ed. (1972-1975), *Het economisch beleid in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Wolters-Noordhoff).
- S. L. van der Wal ed. (1963), *Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940* (Groningen: Wolters).
- S. L. van der Wal ed. (1967), *De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indië* (Groningen: Wolters).

Serie Jaarboeken van het mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië 1875-1938 (Seri buku tahunan pertambangan di Hindia-Timur Belanda 1875-1938), kode akses 2.10.55. Buku-buku tahunan ini berisi laporan pertambangan / laporan tahunan dari Dinas Pertambangan.

2. Perihal pendidikan

Untuk ‘onderwijsaangelegenheden’ (perihal pendidikan), lihat juga arsip-arsip dari Vereniging Max Havelaarfonds 1911-1949 (Perhimpunan Yayasan Max Havelaar 1911-1949), Vereniging Tjandistichting 1913-1979 (Perhimpunan Yayasan Tjandi 1913-1979), Vereniging Kartinfonds 1912-1979 (Perhimpunan Yayasan Kartini 1912-1979), masing-masing kode aksesnya sebagai berikut: 2.20.38.01, 2.20.38.02, 2.20.38.03; arsip pribadi dari A.M. Joeques, 1901-1956, kode akses 2.21.094 (lihat Bab 27 dalam buku panduan ini); arsip pribadi dari J.C.A. Lichtenbelt, 1927-1939, kode akses 2.21.205.34 (lihat Bab 26).

3. Arsip Indisch Comité voor Wetenschappelijke Onderzoekingen (Komite Hindia untuk Penelitian Ilmiah), 1888-1941, kode akses 2.20.34

Arsip ini berisi korespondensi dengan Departement van Onderwijs en Eredienst (Departemen Pendidikan dan Ibadah)

4. Arsip-arsip pribadi dari para penasihat untuk Inlandse Zaken (Urusan Pribumi)

Nationaal Archief (Arsip Nasional Den Haag) mengelola film-film dan inventaris arsip-arsip pribadi dari para penasihat untuk Urusan Pribumi: G.A.J. Hazeu, 1890-1930 (kode akses 2.21.193) dan R.A. Kern, 1897-1955 (kode akses 2.21.194). Berkas-berkas aslinya disimpan di KITLV Leiden, yang mulai 1 Juli 2014 dipindahkan ke Universiteitsbibliotheek (Perpustakaan Universitas) di Leiden. Lihat Bab 22 dalam buku panduan ini.

5. Arsip pribadi W.F. Theunissen, 1895-1960, kode akses 2.21.160

Theunissen adalah kepala dari Dienst der Volksgezondheid (Dinas Kesehatan Masyarakat). Lihat Bab 25 dalam buku panduan ini.

6. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Algemeen verslag van het onderwijs in Nederlandsch-(Oost) Indië (Laporan umum tentang pendidikan di Hindia(-Timur)-Belanda), 1915-1938 (Batavia: Verwachting)

Laporan ini memuat informasi yang rinci tentang pendidikan umum (sekolah rendah / dasar; sekolah lanjutan, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan pendidikan tinggi, baik pribumi maupun berbahasa Belanda) dan pendidikan kejuruan.

Handelingen en bijlagen van de Volksraad (Notula dan lampiran dari Dewan Rakyat)

Di dalamnya dimuat antara lain teks-teks pidato dari direktur OE(N).

Mededeelingen van den Dienst der Volksgezondheid in Nederlandsch-Indië (Pemberitahuan dari Dinas Kesehatan Masyarakat di Hindia-Belanda), 1925-1939 (Batavia: Dienst der Volksgezondheid)

Catatan: Dinas ini juga menerbitkan publikasi antara lain tentang *Quarantaine- en epidemievoorchriften in Nederlandsch-Indië* (1939).

Staatsblad van Nederlandsch-Indië (Lembaran Negara Hindia-Belanda)

Untuk berkas ini digunakan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1866 no. 127; 1869 no. 105; 1885 no. 7; 1904 no. 380; 1907 no. 406; 1911 no. 467; 1914 no. 194; 1919 no. 2; 1921 no. 327; 1924 no. 576.

Daftar Pustaka

Brugmans, I.J. (1938), *Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië* (Groningen-Batavia: Wolters).

Catalogus van de bibliotheek van het departement van Onderwijs en Eeredienst (1909, 1917; Batavia: Landsdrukkerij).

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *Departementen van algemeen bestuur* (I, hlm. 585-588).

Hartgerink, H.J.H. (1942), *De Staten-Generaal en het volksonderwijs in Nederlandsch-Indië 1848-1918* (Groningen-Batavia: Wolters).

W.H. van Helsdingen dan H. Hogenberk ed. (1941), *Daar wèrd wat groots verricht ...: Nederlands-Indië in de XXste eeuw* (Amsterdam: Elsevier).

Heteren, G. van et. al (1989), *Nederlandse geneeskunde in de indische archipel 1816-1942: verslag van een symposium gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Prof.Dr. D. de Moulin als hoogleraar in de geschiedenis der geneeskunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, 30 september 1989* (Amsterdam: Rodopi).

Catatan: juga dalam bahasa Inggris.

Kleintjes, Ph. (1932-33), *Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië* (Cetakan ke-6; Amsterdam: De Bussy), Bab XXIX.

Pierson, N.G. (1902-1903), 'Levensbericht van I.D. Fransen van de Putte', *Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden*, hlm. 17-79.

Waal, E. de (1867), *Aanteekeningen over koloniale onderwerpen, XI, De departementen van algemeen bestuur in Nederlandsch-Indië* ('s-Gravenhage: Nijhoff).

22 De Adviseur voor Inlandse (en Arabische) Zaken (Penasihat untuk Urusan Pribumi (dan Arab))

Setelah pembukaan Terusan Suez (1869), jumlah peziarah ke Mekah meningkat dan jumlah orang Arab di kepulauan Indonesia juga meningkat. Pada tahun 1878 pemerintah Hindia mengangkat seorang ahli orientalis L.W.C. van den Berg menjadi Adviseur voor Oosterse Talen en Mohammedaans Recht (Penasihat untuk Bahasa Oriental dan Hukum Islam). Dia ditugaskan untuk melakukan penelitian tentang imigrasi orang Arab dan dampak agama terhadap masyarakat Indonesia. Studinya *Le Hadhramout et les colonies arabes dans l'archipel indien* (1886, Batavia) masih dianggap sebagai karya standar.

Perang Aceh, yang dimulai pada tahun 1873, dan sampai pada saat itu berjalan kurang memuaskan bagi pemerintah tanah jajahan, membuat penyelidikan mengenai Islam mendapat dorongan baru. Setelah Van den Berg kembali ke Belanda, pada tahun 1891 Christiaan Snouck Hurgronje ditunjuk sebagai penggantinya. Snouck, seorang mahasiswa teologi Leiden sangat tertarik kepada bahasa dan ajaran wajib dari Al Quran. Dia pernah hampir satu tahun tinggal di Jeddah dan Mekah (1884-1885) dan memiliki hubungan baik dengan dunia Arab. Gubernur-Jenderal C.H.A. van der Wyck (1893-1899) dalam waktu singkat melibatkannya dengan urusan Aceh. Gubernur Aceh mendapatkan perintah agar sebanyak mungkin bekerja sama dengan Snouck dalam segala urusan sipil. Dalam Gouvernementsbesluit (Peraturan Pemerintah) 8 April 1898, fungsi Adviseur voor Oosterse Talen en Mohammedaans Recht dialihkan menjadi Adviseur voor Inlandse en Arabische Zaken (Penasihat untuk Urusan Pribumi dan Arab) yang tugasnya terdiri dari mempelajari *instellingen van de islam* (lembaga Islam), khususnya di Hindia-Belanda (*Bijblad* / Lembar tambahan no. 5393). Dengan memberinya kebebasan yang luas, pemerintah mencoba untuk mengikat Snouck.

Karena perbedaan pendapat yang sangat mendalam tentang kebijakan Aceh dengan Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz (1904-1909), pada tahun 1906 Snouck memutuskan untuk kembali ke Belanda. Dia menjadi gurubesar di Leiden dan sampai saat ia meninggal pada tahun 1936 memberikan advis kepada Minister van Koloniën (Menteri Urusan Tanah Jajahan) tentang semua hal yang berkaitan dengan kepentingan kelompok masyarakat Indonesia dan Arab. Posisi penasihat tetap dipertahankan di Hindia-Belanda, meskipun sesuai dengan instruksi baru (*Bijblad* 1907 no. 6639) hanya dilibatkan dengan Inlandse Zaken (Urusan Pribumi). Dalam kaitan itu, pada tahun 1909 ia mendapat tugas tertentu, yaitu memberikan advis dan melakukan pengawasan atas pendidikan *inlandsche jongelieden van voorname afkomst* (para pemuda pribumi dari kalangan atas): yang terakhir itu atas permintaan pemerintah atau orang tua masing-masing (*Bijblad* no. 7123). Snouck sudah berupaya keras membimbing para pemuda Indonesia ini dengan keyakinan bahwa pemuda Indonesia yang mendapat bimbingan modern nantinya akan dapat memimpin negara mereka sendiri.

Fungsi pengawas sejalan dengan arah Politik Etis, yang bertujuan untuk mengembangkan Hindia menuju pemerintahan sendiri. Dalam proses itu, seorang penasihat memenuhi peran

tengah antara sebagai ombudsman dan sebagai *opheffer* (perusuh). Dia adalah sumber informasi bagi penduduk, juga dalam perihal keagamaan. Dia mendengarkan kekesalan dan keluhan mereka dan membantu mereka, jika mungkin, dalam mencari jalan keluarnya. Melalui kenalan di semua jajaran masyarakat, ia membangun sebuah jaringan yang memungkinkannya untuk memahami suasana, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Dari pengetahuan yang didapat, ia mencoba untuk mempengaruhi kebijakan. Oleh karena munculnya dan berkembangnya berbagai perhimpunan pribumi, maka tugas-tugasnya makin bertambah. Yang menjadi pegawainya adalah para pakar Indonesia dan Arab. Seorang ahli hukum dari Arab, Sayyid ‘Uthmân, sudah bekerja untuk kantornya lebih dari 20 tahun (1891-1914) sebagai *adviseur-honorair* (penasihat honorer) untuk Urusan Arab. Pada tahun 1917 keterlibatan penasihat di bidang bacaan rakyat berakhir ketika tugas itu dipindahkan ke lembaga yang terpisah. Penasihat itu secara administratif berada di bawah direktur dari Departement van Onderwijs, Eredienst (en Nijverheid) / OE(N) (Departemen Pendidikan, Ibadah, dan Industri Kerajinan). Ia mengajukan laporan tahunannya kepada direktur OE(N) ini.

Setelah tahun 1920 pengaruh politiknya secara bertahap berkurang. Perhimpunan-perhimpunan pribumi memegang peran dari biro penasihat dan penampung keluhan. Badan-badan perwakilan seperti Volksraad (Dewan Rakyat) sudah memiliki anggota orang Indonesia. Jumlah orang Indonesia yang bekerja pada dinas pemerintahan atau dalam bidang usaha swasta meningkat. Krisis ekonomi tahun 20-an dan 30-an memaksa pemerintah untuk melakukan penghematan yang drastis dalam pengeluaran pemerintah. Dalam bidang politik ditekankan kebutuhan akan ketenangan dan ketertiban sebagai kondisi yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemakmuran. Pada tahun 20-an pemogokan dan pemberontakan ditindak keras (1926-1927).

Gubernur-Jenderal A.C.D. de Graeff (1926-1933) mencoba memecahkan masalah jurang pemisah yang semakin tumbuh antara masyarakat Eropa dan Indonesia, antara lain dengan memperkuat posisi penasihat untuk Inlandse Zaken (Urusan Pribumi). Dengan Gouvernementsbesluit (Keputusan Pemerintah) tanggal 14 Agustus 1931 (*Bijblad* no. 12630), jabatan itu ditempatkan langsung di bawah penguasa negeri. Pejabat itu boleh berkorespondensi langsung dengan otoritas sipil dan militer. Ia harus selalu tahu tentang tindak-tanduk masyarakat Arab di Hindia-Belanda, dan ia harus mempelajari perkembangan intern Islam dalam konteks internasional. Namun, instruksi baru itu hampir tidak memberikan efek politik.

Frustrasi atas keadaan ini diungkapkan oleh R.A. Kern yang menjabat fungsi itu pada masa Gubernur-Jenderal D. Fock (1921-1926). Pada waktu itu ia menyimpulkan bahwa nasihat dari Procureur-Generaal (Jaksa Agung) lebih dihargai daripada nasihatnya. Dalam obituari tentang penggantinya E. Gobée (Penasihat 1926-1937), ia menulis:

Men kan zich voorstellen, dat een GG, die met begrip en sympathie tegenover het nationalisme staat, er prijs op zal stellen het advies van de adviseur te vernemen, maar dat omgekeerd een ander, die het de juiste weg vindt het land als een politiestaat te regeren, geen

behoefte zal gevoelen de adviseur te raadplegen. Er blijven dan alleen de zuiver-moslimse zaken over.

(Orang bisa membayangkan bahwa seorang gubernur-jenderal, yang menyikapi nasionalisme dengan pengertian dan simpati, akan menghargai saran yang didapat dari penasihat, tapi sebaliknya orang lain, yang menganggap jalan yang tepat adalah dengan memerintah negara sebagai negara kepolisian, tidak akan merasa perlu berkonsultasi dengan penasihat. Dengan demikian, hanya ada urusan Islam murni yang tersisa.)

Dengan begitu, biro penasihat pada masyarakat Indonesia dikenal sebagai Kantor Agama.

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Untuk bab ini dilakukan penelitian arsip. Berkas-berkas yang disebut sesesudahnya tentang fungsi dan tanggung jawab penasihat tercantum di akses-akses (*indices* ‘indeks’) dalam *openbaar archief* (arsip umum) (kode akses lihat di bawah), dalam rubrik: ‘(Koloniale) Ambtenaren, algemeen’ (Pegawai kolonial secara umum); ‘Eredienst, Mohammedaanse’ (Ibadah Islam); ‘Onderwijs’ (pendidikan).

Untuk bagian ini lihat *verbalen / ekshibita* (arsip-arsip verbal / ekshibitum): 18 Juni 1888 no. 26; 11 Juli 1888 no. 22; 26 September 1888 no. 3; 13 Desember 1889 no. 31; 15 Maret 1890 nr. 49; 25 Agustus 1890 no. 25; 6 Januari 1891 no. 16; 12 Januari 1891 no. 48; 29 Mei 1909 no. 64; 3 Februari 1910 no. 21.

Lihat juga *kabinetsarchief* (arsip kabinet) tahun 1850-1900 (kode akses lihat di bawah): Untuk bagian ini lihat *verbalen* (arsip-arsip verbal): 22 Desember 1888 huruf D17; 7 Juni 1898 huruf D10.

Advis dan laporan dari penasihat dapat ditemukan dengan menggunakan akses-akses (*indices* ‘indeks’) dalam *openbaar archief* (arsip umum) (kode akses lihat di atas), dalam rubrik:

- a. **Periode 1850-1900** (kode akses 2.10.02; 2.10.10): ‘Binnenlands bestuur’ (Pemerintahan Dalam Negeri); ‘Eredienst, ook Mohammedaans / bedevaart’ (Ibadah, juga Islam / ziarah); ‘Naamloze vennootschappen’ (Perseroan terbatas); ‘Oost-Indische archipel (ook gespecificeerd op regio, o.a. Atjeh en Onderhorigheden)’ (Kepulauan Hindia-Timur, yang juga dispesifikasikan berdasarkan regio antara lain Atjeh en Wilayahnya); ‘Rechtswezen’ (Sistem hukum); ‘Vreemde Oosterlingen’ (Orang Timur Asing).

- b. Periode setelah tahun 1900** (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03): ‘Arabische zaken’ (Urusan Arab); ‘Binnenlands bestuur’ (Pemerintahan Dalam Negeri); ‘Eredienst (bedevaart; Mohammedaanse; Hedjaz) (Ibadah: ziarah; Islam / muslim; Hedjaz; masing-masing juga muncul sebagai rubrik sendiri-sendiri); ‘Inlandse aangelegenheden’ (Urusan pribumi); ‘Inlandse ambtenaren / bestuur (pegawai / pemerintahan pribumi); ‘Naamloze vennootschappen (en verenigingen)’ (Perseroan terbatas dan perhimpunan); ‘Onderwijs’ (pendidikan); ‘Oost-Aziatische zaken’ (Urusan Asia Timur); ‘Politieke stromingen’ (Aliran politik); ‘Rechtswezen (Oost-Indië)’ (Sistem hukum Hindia-Timur); ‘Regering en hoge colleges’ (Pemerintah dan dewan tinggi); ‘Verenigingen’ (Perhimpunan); ‘Vreemde Oosterlingen’ (Orang Timur Asing).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks-indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang penasihat sesudah tahun 1921, akses *4de afdeling* (bagian ke-4) sangat penting; lihat kode akses 2.10.36.011.

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia) serta *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 banyak memuat laporan dan advis: untuk periode 1850-1900 lihat kode akses 2.10.02; untuk periode mulai tahun 1900 lihat kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

Laporan tahunan dari penasihat tidak ditemukan di arsip Koloniën (Urusan Tanah Jajahan). Mungkin laporan itu tidak dikirim ke Belanda.

Laporan dan advis dari para penasihat dimuat dalam publikasi sumber berikut:

- E. Gobée en C. Adriaanse ed. (1957-1965), *Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936* (3 jilid; Rijks Geschiedkundige Publicatiën kl. serie 33-35; 's-Gravenhage: Nijhoff).
- R. C. Kwantes ed. (1975-1982), *De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Tjeenk Willink).
- S. L. van der Wal ed. (1963), *Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940* (Groningen: Wolters).
- S. L. van der Wal ed. (1964-1965), *De volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië* (2 jilid; Groningen: Wolters).
- S. L. van der Wal ed. (1967), *De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indië* (Groningen: Wolters).

2. Arsip Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kementerian Luar Negeri)

Laporan dan arsip penasihat itu disimpan misalnya dalam *serie A-dossiers* (seri dosir A), 1871-1940, kode akses 2.05.03 dan 2.05.21; arsip ‘consulaat in Djeddah (Turkije / Saoedi-Arabië), 1872-1930’ (konsulat Jeddah (Turki / Saudi-Arabia), 1872-1930), yang kemudian

menjadi ‘Nederlands gezantschap in Saoedi-Arabië (Djeddah), 1930-1950’ (kedutaan Belanda di Saudi-Arabia di Jeddah, 1930-1950), kode akses 2.05.53.

3. Koleksi Documentatiebureau voor Overzees recht (Biro Dokumentasi untuk Hukum Seberang Lautan), 1894-1958, kode akses 2.20.61

Biro yang didirikan pada tahun 1949 itu bertugas mendokumentasikan data mengenai perkembangan yuridis di wilayah seberang lautan Asia dan Hindia Barat.

Nomor inventaris 138 berisi advis-advis penasihat yang tercetak mengenai perhimpunan Sarekat Islam, 1913.

4. Berkas-berkas mengenai para penasihat

- Berkas-berkas dari dan mengenai penasihat Snouck Hurgronje dalam koleksi C. Adriaanse, 1917-1985, kode akses 2.21.205.01 (lihat Bab 29 dalam buku panduan ini); Van Asbeck, 1901-1993, kode akses 2.21.183.03 (lihat Bab 28), J.B. van Heutsz, 1882-1935, kode akses 2.21.008.79; A.M. Joeke, 1858-1962, kode akses 2.21.094 (lihat Bab 27); H.P. Marchant, 1869-1955, kode akses 2.21.117, dan C. Pijnacker Hordijk, 1867-1908, kode akses 2.21.091.08.
- Berkas-berkas penasihat Hazeu dalam koleksi J.P. van Limburg Stirum, 1911-1934, kode akses 2.21.108.
- Berkas-berkas dari para penasihat E. Gobée, R.A. Kern, dan G.F. Pijper dalam koleksi J.W. Meijer Ranneft, 1907-1967, kode akses 2.21.121.
- Arsip pribadi G.A.J. Hazeu, R.A. Kern, dan E. Gobée disimpan di KITLV Leiden, yang mulai 1 Juli 2014 dipindahkan ke Universiteitsbibliotheek (Perpustakaan Universitas) di Leiden. Nationaal Archief (Arsip Nasional Den Haag) mengelola film-film dan akses arsip Hazeu dan Kern (masing-masing kode aksesnya 2.21.193 en 2.21.194).
- Universiteitsbibliotheek (Perpustakaan universitas) Leiden, *afdeling Oosterse handschriften* (bagian naskah Timur) mengelola arsip pribadi C. Snouck Hurgronje dan G.F. Pijper.

Untuk pemerian arsip Snouck, lihat P.Sj. van Koningsveld (1987), *Snouck Hurgronje en de Islam; Acht artikelen over leven en werk van een oriëntalist uit het koloniale tijdperk* (Leiden: Documentatiebureau Islam-Christendom, Rijksuniversiteit Leiden), hlm. 279-280. Untuk arsip Pijper, lihat J.J. Witkam (2004), ‘De collectie Pijper voor Leiden verworven’, *Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut* jilid 1, hlm. 5-8.

5. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek/KB (www.kb.nl).

Staatsblad van Nederlandsch-Indië, met Bijbladen (Lembaran Negara Hindia-Belanda, dengan Lembar Tambahan).

Untuk berkas ini digunakan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1914 no. 151; 1915 no. 153; 1918 no. 380. Lembaran tambahan no. 5393; 6639; 7123; 12630.

Daftar Pustaka

Berg, L.W.C. van den (1886), *Le Hadhramout et les colonies arabes dans l'archipel indien* (Batavia: Imprimerie du Gouvernement).

Biografisch Woordenboek van Nederland, versi digital.

(<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn5/gobee>): lema *E. Gobeé*;

(<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/hazeu>): lema *G.A.J. Hazeu*,

(<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/kern>): lema *R.A. Kern*,

(<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/snouck>): lema *Chr. Snouck Hurgronje*.

Bousquet, G.H. (1938), *La politique musulmane et coloniale des Pays-Bas* (Paris: Hartmann).
Catatan: dengan resensi tentang E. Gobeé dalam *Koloniale Tijdschrift* (1939), hlm. 325-335.

Drewes, G.W.J. (1957), *Snouck Hurgronje en de Islamwetenschap; Herdenking van de 100e geboortedag van prof.dr. C. Snouck Hurgronje, 10 februari 1957* (Leiden: Universitaire Pers).

Drewes, G.W.J. (1961), 'D.A. Rinkes. A note on his life and work', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 117, hlm. 417-435.

Catatan: Rinkes pada periode 1913-1916 menjadi penasihat untuk Urusan Pribumi.

Jedamski, D. (1995), 'The subjective factor in cultural change, between political strategies en ethical idea(l)s: D.A. Rinkes, a "Marginal Man" in the colonial context', *Kabar Seberang; Sulating Maphilindo* no. 24-25, hlm. 190-210.

Kern, R.A. (1955), 'Levensbericht van Emile Gobeé', *Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1953-1955* (Leiden: Brill), hlm. 59-64.

Kernkamp, W.J.A. (1941), 'Regeering en Islam', dalam: W.H. van Helsdingen dan H. Hogenberk ed., *Daar wèrd wat groots verricht ...: Nederlands-Indië in de XXste eeuw* (Amsterdam: Elsevier), hlm. 191-208.

Pijper, G.F. (1961), 'De Islampolitiek der Nederlandse regering', dalam: H. Baudet dan I.J. Brugmans, *Balans van beleid; Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië* (Assen: Van Gorcum), hlm. 209-222.

Suminto, Husnul Aqib (1985), *Politik Islam pemerintah Hindia Belanda: het Kantoor voor Inlandsche Zaken 1899-1942* (Jakarta: Fakultas Ushuluddin, IAIN Syarif Hidayatullah).

Catatan: resensi dari Ann Kumar dalam *Journal of southeast Asian Studies* (1990) no. 1, hlm. 178-180.

23 De Oudheidkundige Dienst (Dinas Purbakala)

Dinas ini dibentuk dengan Gouvernementsbesluit (Keputusan Pemerintah) 14 Juni 1913 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1913 no. 62) dan berada di bawah Departement van Onderwijs en Eredienst / O&E (Departemen Pendidikan dan Ibadah). Lapangan pekerjaannya ada di seluruh Hindia-Belanda: harus menginventarisasi dan – bila perlu – merestorasi benda-benda purbakala yang berasal dari Hindu, Islam, dan Eropa; bersama-sama dengan pemerintah setempat harus memperhatikan bahwa tidak ada benda purbakala yang dirusak, dihancurkan, dicuri atau diekspor secara ilegal. Kantor pusat itu berada di Batavia, yang juga menjadi tempat Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Ikatan Kesenian dan Ilmu Pengetahuan Batavia) (1778). Museum Bataviaasch Genootschap itu pada abad 18, 19, dan 20 berhasil mengumpulkan koleksi arkeologi penting yang setelah penyerahan kedaulatan (1949) diambil alih oleh Museum Pusat.

Kepala Dinas Purbakala memberikan advis kepada direktur O&E, para kepala departemen lain, kepala pemerintah daerah, dan otoritas sipil dan militer lainnya. Dia membuat laporan triwulanan dan tahunan. Jika ada perbedaan pendapat antara dirinya dengan direktur O&E mengenai suatu masalah, maka pendapat dari kepala dan direktur O&E itu harus ditambahkan secara tertulis dalam laporan itu. Kepala dinas itu dibantu oleh Commissie van Bijstand (Komisi Pendukung) di Belanda. Sejak tahun 1927, komisi itu berkedudukan di Hindia. Dan sejak itu komisi tersebut menggantikan direktur O&E sebagai tempat bertanya kepala dinas Purbakala.

Pada abad ke-19 perawatan benda purbakala terutama merupakan tugas kepala pemerintahan daerah. Kadang-kadang mereka menerima instruksi dari gubernur-jenderal. Contohnya pada tahun 1840 (*Bijblad* / Lembar Tambahan 1840 no. 248) mereka ditugasi untuk dalam jangka waktu yang pendek mengirimkan daftar benda purbakala di daerah pemerintahan mereka dan melaporkan temuan baru benda itu. Satu salinan daftar tersebut ditaruh di Statistisch Bureau van de Algemene Secretarie (Kantor Biro Statistik Sekretariat Umum) dan salinan yang kedua di Bataviaasch Genootschap. Benda purbakala di Jawa tidak boleh diekspor kecuali dengan izin dari ‘tangan’ gubernur-jenderal sendiri. Pada tahun 1862 (*Bijblad* 1862 no. 1191) ditekankan anjuran untuk membangun koleksi etnografi dan memberikan koleksi itu kepada Bataviaasch Genootschap. Bataviaasch Genootschap itu kemudian boleh menentukan sendiri apakah benda-benda itu akan diperuntukkan museumnya sendiri, atau akan dikirim ke Belanda untuk ditempatkan di Leidse Museum van Oudheden (Museum Purbakala Leiden). Sekitar tahun 1900, *monumentenzorg* (pemeliharaan monumen) di Hindia mendapat dorongan baru. Hal itu terutama berkat kerja insinyur J.W. IJzerman, seorang penggerak utama Archeologische Vereniging (Ikatan Arkeologi) di Yogyakarta (1878) dan di Koninklijk Instituut voor Taal-, Landen Volkenkunde (Institut Kerajaan Ilmu Bahasa, Negara, dan Antropologi) di Leiden (1851). Dia berulang kali mendesak Minister van Koloniën (Menteri Urusan Tanah Jajahan) agar bersedia memberikan lebih banyak uang dan pengetahuan untuk

pelestarian warisan budaya: Brits-Indië (Hindia-Britania) adalah yang menjadi teladannya. Bahwa Hindia-Belanda terwakili di Koloniale Wereldtentoonstelling (Pameran Kolonial Dunia) di Paris pada tahun 1900 dianggapnya sebagai langkah menuju arah yang baik. Di pameran itu antara lain diperlihatkan sebuah model candi Buddha dengan cetakan gips dari candi Borobudur.

Atas pertanyaan Menteri Urusan Tanah Jajahan J.Th. Cremer (1897-1901) pada bulan November 1899, Gubernur-Jenderal W. Rooseboom (1899-1904) beberapa bulan kemudian mengakui bahwa ada yang 'heel wat meer' (lebih banyak lagi) yang bisa dilakukan untuk benda purbakala Hindu di Jawa 'zonder in overdaad te vervallen' (tanpa menjadi berlebihan). Gagasan mantan Direktur O&E W.P. Groeneveldt mendapatkan tempat, yang menyatakan bahwa Belanda harus menganggap dan memperlakukan benda purbakala Hindu sebagai benda purbakala 'nasional' karena kepulauan Hindia 'een zoo belangrijk deel van ons rijk uitmaakt' (merupakan bagian yang sangat penting dari kerajaan kita). Pada saat yang sama orang ingin bekerja secara hemat. Setelah mengalami masa krisis yang dalam, ekonomi Hindia mulai pulih kembali. Pertama-tama, dengan Keputusan tanggal 18 Mei 1901 no. 4, gubernur-jenderal membentuk suatu Komisi untuk penelitian arkeologi di Jawa dan Madura. Dr. J.L.A. Brandes, pegawai bahasa, pustakawan dari Bataviaasch Genootschap dan ahli di bidang seni bangunan kuno dan dekoratif, diangkat menjadi ketua Komisi. Kedua anggota lainnya adalah mantan pegawai pemerintah dan seorang pengawas di Departement van Burgerlijke Openbare Werken / BOW (Departemen Pekerjaan Umum Sipil). Personil BOW dikerahkan dalam penggalian dan restorasi monumen-monumen. Komisi itu mendapatkan tugas untuk membuat pemerian arkeologis dan arsitektoris dari monumen-monumen itu, dan juga membuat gambar-gambar, foto, dan cetakan gips monumen tersebut. Mereka juga harus menunjukkan dengan cara apa kerusakan lebih lanjut bisa dicegah.

Setelah Brandes wafat (1905), penelitian arkeologi menjadi menurun. Di kalangan pemerintah orang mulai menyadari bahwa pendekatan yang lebih profesional dan sistematis diperlukan untuk dapat membawa pemeliharaan monumen pada tingkat yang baik. Pegawai arkeologi yang juga merupakan ketua komisi, Dr N.J. Krom, pada tahun 1910 ditugaskan untuk melakukan perjalanan studi ke Hindia-Britania dan Indocina Perancis. Dalam laporannya, Krom jelas memilih untuk model Hindia-Britania. Dahulu, dinas purbakala di tanah jajahan terorganisir dengan baik dan menjalankan tugasnya secara mandiri. Benda-benda purbakala didokumentasikan dengan baik dan banyak dilakukan konservasi. Dinas itu mempunyai pegawai berkualitas dalam jumlah yang cukup. Direktornya memiliki fungsi koordinasi dalam administrasi dan sesekali melakukan kerja lapangan. Di Indocina penggantian pemimpin diatur lebih baik. Di sana ada banyak penelitian, tetapi konservasi terlalu sedikit dilakukan. Dinas Purbakala di situ dikendalikan dari Paris: semua hasil penelitian ilmiah dari daerah itu dikirim ke ibukota Perancis, sementara Dinas Purbakala di Hindia-Britania mengeluarkan publikasi sendiri. Krom menyatakan bahwa dalam bidang kepurbakalaan Hindia-Belanda lebih baik daripada Indocina, tetapi masih berada di belakang Hindia-Britania. Laporannya menjadi dasar untuk mendirikan Dinas Purbakala. Pada saat yang bersamaan, Commissie voor Oudheidkundig Onderzoek (Komisi untuk Penelitian Arkeologi) dibubarkan.

Laporan dinas itu, seperti juga laporan dari Komisi, diterbitkan oleh Bataviaasch Genootschap. Laporan itu juga mengandung sumbangan tulisan dari para pegawai pemerintah. Kerja sama dari korps Binnenlands Bestuur (Pemerintahan Dalam Negeri) diminta dengan tegas ketika pada tahun 20-an ternyata bahwa pengaruh Hindu ‘zich over een veel grooter deel van den Archipel heeft uitgestrekt, dan wel werd vermoed’ (membentang jauh lebih luas di wilayah Nusantara daripada yang dikira sebelumnya). Berkat jerih payah pengawas arkeologi P.V. van Stein Callenfel, pada saat yang sama dimulai penelitian prasejarah yang memperlihatkan hasil yang menarik.

Menurut instruksi, dinas tersebut juga harus mempedulikan benda purbakala Islam. Benda purbakala dalam kategori itu dapat dilaporkan kepada Adviseur voor Inlandse en Arabische Zaken (Penasihat untuk Urusan Pribumi dan Arab) sebelum tahun 1913. Pemeliharaan monumen Islam didasarkan pada aturan dalam masyarakat agama itu. Dinas Purbakala memberi advis, membuat anggaran untuk pekerjaan perbaikan monumen, dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan itu. Pendekatan serupa diterapkan pada monumen di wilayah pemerintahan otonom.

Gubernur-Jenderal A.C.D. de Graeff yang sangat tertarik pada benda-benda purbakala, pada tahun 1931 mengumumkan suatu Monumentenordonnantie (Ordonansi Monumen) (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1931 no. 238). Dalam Ordonansi itu monumen didefinisikan sebagai: barang bergerak atau tidak bergerak, terutama yang berusia lebih dari 50 tahun atau yang termasuk ‘tenminste 50 jaar oude stijlperiode’ (sekurangnya gaya benda yang sudah 50 tahun); benda yang dari pandangan paleontologi dianggap berharga dan daerah yang menurut petunjuk-petunjuk bisa mengandung benda seperti yang baru saja digambarkan. Dalam Ordonansi itu antara lain ditentukan bahwa monumen umum harus didaftarkan dalam suatu register khusus yang dibuat dan dikelola secara teratur oleh kepala Dinas Purbakala. Monumen milik partikular juga dapat dimasukkan di dalam register itu. Pendaftaran bisa sementara atau definitif. Pendaftaran sementara dilakukan apabila benda itu berisiko cepat rusak. Pendaftaran definitif dilakukan atas perintah gubernur-jenderal: untuk hal itu diumumkan di *Javasche Courant*. Monumen yang sudah terdaftar tidak dapat diekspor. Hal yang sama juga berlaku untuk monumen yang terdaftar atau tidak terdaftar dari periode pra-Islam.

Ekspor monumen-monumen lainnya hanya bisa terjadi atas izin dari kepala Dinas Purbakala. Dia harus menginspeksi monumen terdaftar itu dan memberikan izin untuk pekerjaan restorasi monumen itu. Monumen milik partikular yang kurang terawat, atas usulannya bisa diambil alih oleh negara. Gubernur-jenderal mengeluarkan izin untuk pengelolaan lahan pertanian dan hutan di wilayah yang ditetapkan sebagai monumen. Ordonansi Monumen tidak berlaku untuk daerah pemerintahan otonom, yang hubungannya dengan pemerintah Hindia sudah ditetapkan dalam yang disebut dengan Kontrak Panjang: dari para pemerintah otonom itu diharapkan bahwa mereka akan menerapkan juga pengaturan serupa.

Arsip dan sumber tercetak

1. Archief van het Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1814

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Untuk bab ini dilakukan penelitian arsip. Berkas-berkas yang disebut berikut ini tercantum dalam akses-akses (*indices* 'indeks') di *openbaar archief* (arsip umum) dengan kode akses di bawah ini, dalam rubrik 'Kunsten en wetenschappen' (Kesenian dan Ilmu Pengetahuan).

Untuk berkas ini lihat *verbalen* (arsip verbal) / *exhibita* (ekshibitum): 28 November 1899 no. 6; 20 Juli 1900 no. 4; 29 November 1900 no. 30; 2 Februari 1901 no. 30; 9 Maret 1901 no. 45; 27 Agustus 1906 no. 53; 26 Oktober 1910 no. 10; 3 Mei 1912 no. 71.

Dari *serie openbare mailrapporten* (seri laporan surat umum) lihat no. 2445 / 1929; 2517 / 1929; 2762 / 1929; 3012 / 1929; 3306 / 1929; 939 / 1930.

Arsip Koloniën (Tanah Jajahan) terutama memuat data tentang organisasi penelitian purbakala di Hindia-Belanda, pengeluaran uang anggaran, dan keikutsertaan dalam kongres internasional.

Informasi yang berkaitan dengan masalah purbakala pertama-tama harus dicari dahulu di arsip dinas purbakala itu sendiri, Departement van Onderwijs en Eredienst (Departemen Pendidikan dan Ibadah), dan Algemene Secretarie (Sekretariat Umum): arsip-arsip tersebut, selama masih tetap tersimpan, dikelola oleh Arsip Nasional di Jakarta.

Dalam akses-akses di arsip umum ada rubrik-rubrik yang relevan:

- a. **Periode 1814-1849** (kode akses 2.10.01): 'Boeken en geschriften' (Buku dan tulisan); '(Genootschap van) Kunsten en Wetenschappen (te Batavia)' (Ikatan Kesenian dan Ilmu Pengetahuan di Batavia); 'Ontdekkingsreizen' (Perjalanan ekspedisi).
Yang juga penting untuk periode ini adalah 'Aantekeningenregisters van het Bureau Algemene Zaken' (Register Pencatatan pada Biro Urusan Umum), yang kemudian menjadi 'Bureau A en afdeling 1 over de periode circa 1830-1859' (Biro A dan bagian 1 meliputi periode sekitar 1830-1859) (kode akses 2.10.02, no. inventaris 9199-9201), lihat rubrik 'Kunsten en Wetenschappen' (Kesenian dan Ilmu Pengetahuan).
- b. **Periode 1850-1900** (kode 2.10.02; 2.10.10): 'Boeken en geschriften' (Buku dan tulisan); 'Kunsten en Wetenschappen' (Kesenian dan Ilmu Pengetahuan).
- c. **Periode setelah 1900** (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03): 'Boeken en geschriften / Boekwerken / Drukwerken' (Buku dan tulisan / Buku cetakan / Barang cetakan); 'Conferentie' (konferensi); 'Congressen' (Kongres); 'Kunsten en

Wetenschappen (en geschenken)’ (Kesenian dan Ilmu Pengetahuan, dan hadiah); ‘Oudheidkunde’ (Ilmu Purbakala); ‘Prae- en protohistorie (congressen -)’ (Kongres Pre- dan protohistori); ‘Wetenschappen’ (Ilmu Pengetahuan).

Openbaar archief (arsip umum) tahun 1850-1921 bisa diakses dengan menggunakan *centrale indices* (indeks-indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas mengenai ‘oudheden’ (kepurbakalaan) dan ‘Oudheidkundige Dienst’ (Dinas Purbakala) sesudah tahun 1921, akses-akses *4de afdeling* (bagian ke-4) sangat penting: lihat kode akses 2.10.36.011.

Dalam *geheim- en kabinetsarchief* (arsip kabinet dan rahasia) serta di dalam *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 mungkin tidak memuat banyak berkas tentang kepurbakalaan dan kegiatan komisi dan dinas purbakala. Apabila dari arsip umum ada pengacuan ke data dokumen tersebut, maka data itu bisa diteliti lebih lanjut.

Serie Memories van Overgave (Seri Memori Serah-Terima), 1852-1962, kode akses 2.10.39, memuat beberapa memori dengan sebuah paragraf ‘Mededelingen van historische en oudheidkundige aard’ (Berita-berita yang bersifat sejarah dan arkeologis) yang kadang-kadang disertai foto-foto.

Serie openbare Oost-Indische besluiten: besluiten van de gouverneurgeneraal (Seri keputusan Hindia-Timur: keputusan dari gubernur-jenderal), 1816-1849, kode akses 2.10.01; 1850 – Januari 1932, kode akses 2.10.02 (indeks-indeks dalam seri ini mencakup periode 1850-1924). Keputusan yang berkaitan dengan kepurbakalaan tercantum dalam rubrik ‘Natuurlijke Historie: Kunsten en Wetenschappen’ (Sejarah Alam: Kesenian dan Ilmu Pengetahuan).

Untuk berkas ini bisa digunakan Keputusan tanggal 18 Mei 1901 no. 4.

Catatan: lampiran-lampiran pada pelbagai keputusan gubernur-jenderal tersimpan dalam arsip Algemene Secretarie (Sekretariat Umum), Arsip Nasional Jakarta.

Peta dan gambar, termasuk dalam arsip kementerian, kode akses 4.Miko.

2. Berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian kepurbakalaan

disimpan dalam koleksi Bik, 1789-1946, kode akses 2.21.024; N. Engelhard, 1689-1832, kode akses 2.21.004.19 dan 2.21.004.21; J.M. Jordaan, 1866-1927, kode akses 2.21.413; G.J.Chr. Schneither, 1788-1829, kode akses 2.21.007.57; L.C. Westenenk, 1893-1928, kode akses 2.21.205.71.

3. Instituut Kern (telah dipindahkan ke Universiteitsbibliotheek / UB di Leiden)

Institusi ini mengelola arsip Commissie van Bijstand in Nederland (Komisi Pendukung di Belanda) untuk penelitian purbakala di Jawa dan Madura, 1901-1922.

Catatan: Inventaris dari F.G.P. Jaquet (KITLV Leiden 1979).

4. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Javasche Courant: untuk pengumuman mengenai pendaftaran definitif dalam ‘openbaar centraal Monumentenregister’ (Register monumen pusat umum).

Rapporten van de Commissie in Nederlandsch-Indië voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera (Laporan Komisi di Hindia-Belanda tentang penelitian purbakala di Jawa dan Madura) (Batavia 1901-1913, diterbitkan atas biaya Bataviaasch Genootschap) / yang kemudian berlanjut menjadi *Oudheidkundige verslagen* (Laporan-laporan purbakala), yang dibuat oleh Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indië (Dinas Purbakala di Hindia-Belanda) (1913-1941, diterbitkan oleh Bataviaasch Genootschap).

Catatan: (ringkasan-ringkasan) laporan tahunan Dinas Purbakala diterbitkan dalam *The journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland* dan *Bulletin de l' École française d'Extrême Orient*.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië, met Bijbladen (Lembaran Negara Hindia-Belanda, dengan Lembaran Tambahan) 1913 no. 407; 1931 no. 238. Lembaran Tambahan: no. 248; 1191; 1561; 2915; 5597; 5867; 7932; 10932; 11455.

Daftar Pustaka

Bernet Kempers, A.J. (1978), *Herstel in eigen waarde; Monumentenzorg in Indonesië* (Zutphen: Walburg Press).

Biografisch Woordenboek van Nederland, versi digital.

(<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/krom>): lema *N.J. Krom*.

Bloembergen, M. (2002), *De koloniale vertoning; Nederland en Indië op de wereldtentoonstellingen (1880-1931)* (Amsterdam: Wereldbibliotheek).

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *Oudheidkundige Dienst* (I, hlm. 215-216); lema *Oudheden* (I, hlm. 189-215; VII, hlm. 1146-1158); lema *Boroboedoer* (I, hlm. 381-383); lema *Diëngplateau* (I, hlm. 598-600).

Kern, H. (1906), ‘J.L.A. Brandes’, *Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden* (Leiden), hlm. 30-51.

Kommers, J.H.M. (1979), *Besturen in een onbekende wereld; Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië: 1800-1830. Een antropologische studie* (Meppel: Krips Repro).

Kuitenbrouwer, M. (2001), *Tussen orientalisme en wetenschap; Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in historisch verband 1851-2001* (Leiden: KITLV Uitgeverij).

Stutterheim, W.F. (1936), *Een oudheidkundig jubileum 1913-1938* (Batavia: Oudheidkundige Dienst Nederlandsch-Indië).

Swanenburg, B.D. (1963), *Iwan de Verschrikkelijke; Leven en werken van Dr. P.V. van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden herschiep* (Cetakan ke-3; Maastricht: Leiter-Nijpels).

24 P. Scholten (1875-1946)

Pada bulan November 1923 Prof. mr. Paul Scholten (1875-1946) menerima tugas dari Minister van Koloniën (Menteri Urusan Tanah Jajahan) untuk membangun Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Hindia-Belanda. Dengan demikian, pemerintah kolonial berharap mengakhiri kekurangan yang sangat akut akan kader tenaga yuridis yang terlatih dalam kepegawaian dan kekuasaan kehakiman. Sekolah Tinggi itu secara kualitatif harus setingkat dengan universitas Belanda, tetapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan Hindia. Pilihan pemerintah jatuh pada Scholten karena dia pakar hukum terpandang dan dalam hal kolonial dia orang bersih: sebagai gurubesar di Amsterdam, ia berada di luar pertentangan arah antara Leiden yang 'etis' dan Utrecht yang 'konservatif'.

Pada tahun 1924 Scholten melakukan perjalanan ke India dua kali: pertama untuk mengorientasikan diri dan melaksanakan persiapan organisatoris, dan yang kedua untuk membuka Rechtshogeschool dan selama beberapa bulan pertama menjabat sebagai pemimpin sekolah tinggi tersebut. 'Reiscopieerboeken' (buku dokumentasi perjalanan) dalam arsipnya, yang sebagian besarnya terdiri dari surat kepada istrinya, memberikan gambaran mengenai cara kerjanya. Ia melakukan berbagai pembicaraan dengan direktur-direktur departemen, para anggota Raad van Indië (Dewan Hindia) dan Volksraad (Dewan Rakyat), pegawai pemerintah, pengusaha, dan misionaris, baik orang-orang Belanda, Indonesia maupun Cina. Ia mengunjungi pabrik-pabrik, rumah sakit, dan sekolah. Atas dasar itu ia menunjukkan bagaimana menurutnya nantinya Indische Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum Hindia) akan terlihat, mata pelajaran apa saja yang harus diajarkan di sekolah tinggi itu. Usulannya dibahas pada tanggal 19 Maret 1924 dalam pertemuan khusus Dewan Hindia yang dipimpin oleh Gubernur-Jenderal D. Fock (1921-1926).

Pada tanggal 28 Oktober 1924 Rechtshogeschool secara resmi dibuka di Batavia. Dalam pidatonya Scholten mengacu pada nilai dari hukum adat. Menurut pendapatnya, hukum itu berkembang terlalu lambat untuk dapat diterapkan pada berbagai sektor masyarakat, seperti ekonomi, yang bisa cepat terkena perubahan. Dalam kasus seperti itu, hukum barat lebih cocok: hanya dapat bermanfaat jika digunakan 'met Indische toestanden en Indische opvattingen' (dengan situasi Hindia dan pandangan-pandangan Hindia). Ia menganggap perkembangan hukum baru sangat penting: dalam hal itu ia melihat tugas yang sangat penting bagi generasi baru ahli hukum Indonesia.

Mata kuliah hukum itu mencakup hukum barat, adat, dan Islam. Selain itu diberikan juga perhatian terhadap ilmu bahasa, negara, dan antropologi. Latar belakang dari gurubesar yang diangkat berbeda-beda. Jadi, misalnya F.M. van Asbeck dulunya bekerja pada Algemene Secretarie (Sekretariat Umum), kabinet gubernur-jenderal; B. ter Haar pada *rechterlijke macht* (kekuasaan kehakiman); J.H.A. Logeman (yang kemudian menjadi Menteri Urusan Tanah Jajahan) pada korps pegawai pemerintahan. Satu-satunya gurubesar Indonesia adalah Hoessein Djajadiningrat: ia dulunya adalah pegawai bahasa dan Adjunct-Adviseur voor Inlandse Zaken

(Wakil Penasihat untuk Urusan Pribumi), dan juga menjabat beberapa fungsi tinggi dalam pemerintahan kolonial.

Rechtshogeschool itu merupakan institusi pendidikan tinggi yang kedua setelah Technische Hogeschool (Sekolah Tinggi Teknik) pada tahun 1920. Beberapa lulusan sekolah itu, antara lain Amir Sjarifoeddin, kabarnya kemudian menduduki posisi menteri dalam masa Republik.

Arsip dan Sumber Tercetak

1. Arsip pribadi P. Scholten, 1876-1998, kode akses 2.21.319

Untuk berkas ini bisa digunakan nomor inventaris 62-79, 95-96.

2. Arsip pribadi para guru besar di Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum)

F.M. baron van Asbeck, 1901-1993, kode akses 2.21.183.03 (lihat bab 28 dalam buku panduan ini); R.D. Kollewijn, 1917-1972, kode akses 2.21.258; J.H.A. Logemann, 1909-1962, kode akses 2.21.111.

3. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1900

Informasi umum tentang tatanan, akses, seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Untuk bab ini dilakukan penelitian arsip. Berkas-berkas itu tercantum dalam rubrik yang disebut berikut ini dengan akses-akses (*indices* 'indeks') di *openbaar archief* (arsip umum). Untuk berkas ini bisa digunakan arsip verbal tanggal 21 Juni 1920 no. 10; 21 September 1923 no. 72; 5 November 1923 no. 29; 1 Desember 1923 no. 55.

Berkas-berkas mengenai 'Rechtshogeschool' bisa ditemukan di *openbaar archief* (arsip umum) mulai tahun 1900: kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03. *Openbaar verbaalarchief* (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks-indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang 'Rechtshogeschool', akses-akses berikut adalah sangat penting: *4de afdeling* (bagian ke-4) dalam rubrik 'Onderwijs, hoger' (Pendidikan tinggi) dan *Aantekeningenregisters van de 1e afdeling* (Register Pencatatan pada bagian ke-1) dalam rubrik 'Onderwijs' (Pendidikan): lihat kode akses 2.10.36.011.

Dalam *geheim- en kabinetssarchief* (arsip kabinet dan rahasia) mulai tahun 1900 serta di dalam *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 kemungkinan besar tidak memuat banyak berkas tentang Rechtshogeschool. Apabila dari arsip umum ada pengacuan ke data dokumen tersebut, maka data itu bisa diteliti lebih lanjut.

S. L. van der Wal ed. (1963), *Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940* (Groningen: Wolters).

Dalam sejumlah berkas yang dimuat dan dalam anotasi terdapat acuan ke Rechtshogeschool.

4. Sumber asli yang tercetak pada waktu itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Algemeen verslag van het onderwijs in Nederlandsch-(Oost) Indië (Laporan umum tentang pendidikan di Hindia(-Timur)-Belanda), 1915-1938, (Batavia: Verwachting). Di dalam laporan itu ada banyak data tentang Rechtshogeschool.

Jaarboekje der Rechtshoogeschool te Batavia (Buku tahunan Sekolah Tinggi Hukum di Batavia), 1925-1940 (Batavia: Kolff).

Staatsblad van Nederlandsch-Indië

Untuk notisi ini digunakan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* (Lembaran Negara Hindia-Belanda) 1924 no. 456 dan 457.

Daftar Pustaka

F.M. van Asbeck (1949): 'Paul Scholten en de Rechtshogeschool', *Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan van het rechtswetenschappelijk hoger onderwijs in Indonesië op 28 oktober 1949* (Groningen: Wolters), hlm. 1-7.

Biografisch Woordenboek van Nederland, versi digital.

(<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/scholten>): lema *P. Scholten*.

Fasseur, C. (2001), *Rechtsschool en raciale vooroordelen* (Amsterdam : Balans).

Locher-Scholten, E.B. (1989), 'Years in the Dutch East Indies 1919-1933', dalam: P.J.G. Kapteyn ed., *F.M. baron van Asbeck 1889-1968* (Den Haag: T.M.C. Asserinstituut), hlm. 4-25.

Opening der Rechtshoogeschool te Batavia op 28 October 1924 (1925; brosur; Batavia: Volkslectuur).

Pijper, G.F. (1961), 'Professor dr. Pangeran Ario Hoesein Djajadiningrat, 8 december 1886 – 12 november 1960', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 117 (Leiden : KITLV Press), hlm. 401-409.

Resink, G.J. (1974), 'Rechtshoogeschool, jongereneed, "Stuw" en gestuwden', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 130 (Leiden: KITLV Press), hlm. 428-449.

Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, diterbitkan oleh Koninklijke Notariële Broederschap, edisi tahun 106, no. 5314, nomor peringatan dalam rangka hari kelahiran Paul Scholten yang ke-100.

Catatan: juga ada dalam arsip pribadi P. Scholten, no. inventaris 96.

25 W.F. Theunissen (1882-1961)

Dua album tempel dengan guntingan koran, antara lain dari *De Javabode*, *Soerabajaasch Handelsblad* (Suratkabar Surabaya) dan *Bataviaasch Nieuwsblad* (Suratkabar Batavia) memberikan gambaran kehidupan dan pekerjaan dari dokter ahli syaraf Willem Frederik Theunissen (1882-1961). Setibanya di Hindia (1915) selama dua dasawarsa ia bekerja sebagai dokter syaraf dan direktur dari beberapa rumah sakit jiwa. Selama sepuluh tahun (1925-1935) ia menjadi kepala Soember Porong (1902) di Lawang (Jawa Timur), yang di tahun 30-an menjadi tempat perawatan sekitar 2.500 pasien sakit jiwa Eropa dan Indonesia. Rumah sakit itu dianggap sebagai salah satu pusat perawatan terbesar di Asia Tenggara dan terpenting di dunia. Berdasarkan pertimbangan terapi dan keuangan, Theunissen menekankan pentingnya kemandirian kerja dan pemenuhan kebutuhan sendiri. Oleh karena itu, Soember Porong memiliki sendiri selain *boerderij* (rumah pertanian dan peternakan), *smederij* (bengkel tukang besi), *batikkerij* (tempat pembatikan), dan *rijstpellerij* (tempat pengupasan padi); juga *veestapel* (hewan-hewan ternak) dan *moestuinen* (kebun sayur). Sepanjang jalan-jalan utama berjejer pohon-pohon kapuk. Dibangun pengolahan gula dan dilakukan budidaya nila dan nanas. Para pasien harus sedapat mungkin ikut membantu pelaksanaan pekerjaan itu.

Pada tahun 1934 Theunissen diangkat menjadi penjabat pengganti Dienst der Volksgezondheid (Dinas Kesehatan Masyarakat). Empat tahun kemudian ia menjadi kepala. Mulai tahun 1935 ia juga menjabat inspektur rumah sakit. Ia memperjuangkan desentralisasi dari perawatan kesehatan. Orang-orang yang tidak dapat berfungsi normal dalam masyarakat, haruslah dirawat dalam lingkungan mereka sendiri: patokan ini harus dipertahankan tanpa diubah. Rumah-rumah sakit jiwa itu dapat menutup sebagian besar ongkosnya dengan yang mereka hasilkan sendiri. Wilayah-wilayah lokal (provinsi, kabupaten, dan kotapraja) harus memberikan dukungan finansial. Di Buitengewesten (Wilayah Luar Jawa dan Madura), sarana medis dibiayai dari *rubbergelden* (uang hasil budidaya karet).

Theunissen juga sangat memperhatikan prevensi. Masyarakat desa harus diyakinkan akan pentingnya tindakan higienis yang sederhana seperti mencuci tangan, memasak air, dan membangun kakus. Para guru, pusat-pusat kesehatan / biro konsultasi harus memberikan penerangan, dengan film dan sejenis gambar slide, dan melakukan kunjungan ke rumah-rumah. Theunissen sendiri selama beberapa tahun mengajar di School tot de Opleiding voor Inlands Arts / STOVIA (Sekolah Pendidikan untuk Dokter Pribumi).

Di kepulauan Hindia pada tahun 1935 di 16 tempat terdapat saluran-saluran pipa air dengan instalasi penjernihannya. Ketika pada tahun 1938 terjadi wabah malaria di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk, Theunissen berhasil mengeluarkan dana dari anggaran untuk membangun tanggul pada rawa-rawa dan memasang sistem saluran pembuangan air.

Ia menghadiri sejumlah kongres dan konferensi (internasional) di bidang higiene tropis dan pada tahun 1937 mempersiapkan sendiri suatu konferensi liga bangsa-bangsa di Bandung.

Theunissen adalah *vrijmetselaar* (mason): selama beberapa tahun ia adalah ketua perhimpunan mason di Malang. Ia menjadi anggota Vaderlandse Club (Perhimpunan / Klub Nasional) karena ia berpendapat bahwa kepentingan umum hanya dapat dikerjakan dalam suasana ketertiban dan keteraturan, didasarkan pada otoritas. Menurutnya, krisis ekonomi berdampak serius terhadap keadaan kejiwaan di tahun 30-an. Ia kelihatan tidak tenang dan memiliki desilusi tentang *vage heroëncultus* (kultus kepahlawanan yang samar) dan nafsu akan keuntungan material.

Arsip dan sumber yang tercetak

1. Arsip pribadi W.F. Theunissen, 1882-1960, kode akses 2.21.160

Untuk berkas ini digunakan ‘inleiding’ (pengantar) dan nomor inventaris 3-4; 9-10.

2. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1900

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Laporan dan advis dari Theunissen dapat ditemukan dengan bantuan akses (*indices* ‘indeks’) di *openbaar archief* (arsip umum) mulai tahun 1900 (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03), dalam rubrik-rubrik berikut: ‘Hygiëne (conferenties; tentoonstellingen; volkenbondszaken)’ (Higiene: konferensi; pameran; urusan liga bangsa-bangsa); ‘Quarantaine’ (Karantina); ‘(Volks)gezondheid’ (Kesehatan masyarakat); ‘Ziekten’ (Penyakit).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang Theunissen dan perawatan kesehatan setelah tahun 1921, akses *4de afdeling* (bagian ke-4) penting: lihat kode akses 2.10.36.011.

Geheim- en kabinetsarchief (arsip kabinet dan rahasia) mulai tahun 1900 dan *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) kemungkinan tidak memuat banyak bahan tentang topik-topik ini. Apabila dari *openbaar archief* (arsip umum) ada acuan ke data ini, maka di dalam situ dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

3. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: Untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Handelingen en bijlagen van de Volksraad (Notula dan lampiran dari Dewan Rakyat)
Di dalam ini dimuat antara lain teks-teks pidato dari kepala dinas.

Mededeelingen van den Dienst der Volksgezondheid in Nederlandsch-Indië (Laporan Dinas Kesehatan Masyarakat di Hindia-Belanda), 1925-1939, (Batavia).

Catatan: Dinas ini juga menerbitkan beberapa publikasi, misalnya tentang *Quarantaine- en epidemievoorschriften in Nederlandsch-Indië* (1939).

Daftar Pustaka

Drooglever, P.J. (1980), *De Vaderlandse Club, 1929-1942; Totoks en de Indische politiek* (Franeker: Wever).

Heteren, G. van dkk. (1989), *Nederlandse geneeskunde in de Indische archipel, 1816-1942; Verslag van symposium gehouden ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. D. de Moulin als hoogleraar in de geschiedenis der geneeskunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, 30 september 1989* (Amsterdam: Rodopi).

Loghem, J.J. van dkk (1948), *Indië voor de oorlog*, [Enam artikel tentang ilmu kesehatan; cetak lepas dari *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde*] (Haarlem).

Theunissen, W.F. (1940), 'The Public Health Service: a brief survey', *Bulletin of the Colonial Institute* III, 3-4, hlm. 160-161.

Theunissen, W.F. (1941), *Gezondheidszorg in Nederlandsch-Indië; 12 radio-voordrachten betreffende den dienst der volksgezondheid* (Surabaya).

26 J.C.A. Lichtenbelt (1884-1979)

Johanna Catharina Adriana Lichtenbelt (1884-1979) pada periode 1915-1935 adalah guru di Jawa. Di sana ia mendidik para gadis Indonesia yang ingin menjadi guru. Ia mengajar di Kweekschool (Sekolah Pendidikan Guru) di Salatiga (1920-1921) dan selama lima tahun menjabat sebagai direktoris dua Normaalscholen (Sekolah Normal) untuk para guru bantu pribumi (pendidikan untuk *hoofdakte* / ijazah utama) di Yogyakarta dan Blitar.

Setelah pensiun (1935) ia meneruskan pekerjaannya dengan mendirikan sekolah di Bali yang murid-muridnya dididik dengan menghormati kebudayaannya sendiri. Bali adalah kerajaan Hindu. Nyonya Lichtenbelt menganjurkan modernisasi yang berangsur-angsur di pulau itu agar dengan cara itu ‘een bandjir van vreemde invloeden te voorkomen, welke het oude cultuurbezit zou kunnen verwoesten’ (dapat mencegah banjir pengaruh asing, yang bisa merusak kebudayaan tua yang dimiliki) (surat kepada Nyonya E.M.L. van Deventer-Maas, 6 Februari 1939). Gagasan ini bukanlah baru. Arsipnya mengandung berkas-berkas tentang perhimpunan sekolah Siladarma di Klungkung (Bali Selatan) yang pada tahun 1927 berkeinginan mendirikan Hollands-Inlandse School / HIS (Sekolah Belanda untuk Pribumi) dengan dasar Bali.

Ia berkorespondensi tentang rencana sekolah Hindu-Bali dengan orang-orang yang menjabat kedudukan terkemuka di bidang politik dan kebudayaan. Termasuk kelompok ini antara lain R. Bonnet, pelukis seni yang tinggal di Bali; P.J.A. Idenburg, direktur Indische Departement van Onderwijs en Eredienst / O&E (Departemen Pendidikan dan Ibadah di Hindia), dan pendahulunya B.J.O. Schrieke; A.M. Joekes, anggota Majelis Rendah dan juga anggota pengurus Kartinfonds (Yayasan Kartini) dan Van Deventerstichting (Yayasan Van Deventer); dan Nyonya Van Deventer yang tersebut, janda dari ahli Hindia C.Th. van Deventer.

Pada awalnya berupaya mendirikan Sekolah Normal, selanjutnya mendirikan sekolah untuk para gadis dari *gegoede milieus* (kalangan tinggi). Setelah direktur Departemen Pendidikan dan Ibadah pada Desember 1938 memberitahunya bahwa sudah cukup banyak Sekolah Normal dan bahwa pemerintah sudah cukup lama sibuk dengan ‘Balinisering’ (Balinisasi) dari pendidikan umum di Pulau Bali, maka dicarilah kemungkinan pendidikan perempuan dalam bentuk umum dan melengkapi. Mengingat keadaan ekonomi keuangan yang tidak menguntungkan di tahun-tahun itu, baik pada pemerintah Hindia maupun pihak swasta tidak ada animo untuk mendanai rencana-rencana itu.

Arsip

1. Arsip pribadi J.C.A. Lichtenbelt, 1927-1939, kode akses 2.21.205.34

Untuk berkas ini digunakan *inleiding* (pendahuluan) dan nomor inventaris 1; 3; 7; 12-13; 15-18.

Catatan: Di dalam arsip pribadi A.M. Joekes, 1901-1956, kode akses 2.21.094, dan arsip pribadi C.Th. van Deventer / E.M.L. van Deventer-Maas, 1879-1944, kode akses 2.20.38.05, tidak ditemukan surat dari dan kepada J.C.A. Lichtenbelt.

2. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1900

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Berkas-berkas tentang rencana Sekolah Hindu-Bali tidak ditemukan.

Untuk informasi umum tentang Bali, lihat berikut:

- *Serie Memories van Overgave* (Seri Memori Serah-Terima), 1852-1962, kode akses 2.10.39.
- *Serie politieke verslagen en berichten uit de Buitengewesten* (Seri laporan dan berita politik dari Wilayah Luar Jawa dan Madura), 1898-1940, kode akses 2.10.52.01 (microfiche, nomor fiche 67-69).
- *Serie stamboeken Oost-Indische ambtenaren* (Seri buku induk dari para pegawai di Hindia-Timur), 1836-1836, kode akses 2.10.36.22, nomor inventaris 943 (bagian Z1, folio 341) berisi status dinas dari Nyonya Lichtenbelt dengan data biografinya yang tidak tercantum dalam bagian pendahuluan arsipnya.

3. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: Untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini, gunakan Picarta melalui halaman ikhtisar Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Algemeen verslag van het onderwijs in Nederlandsch-(Oost) Indië (Laporan umum pendidikan di Hindia (Timur)-Belanda), 1915-1938 (Batavia).

Handelingen en bijlagen van de Volksraad (Notula dan lampiran dari Dewan Rakyat)
Lihat berkas-berkas tentang pendidikan dan pidato direktur O&E.

Daftar Pustaka

Gouda, Frances (1995), 'Teaching Indonesian girls in Java en Bali, 1900-1942; Dutch progressives, the infatuation with "Oriental" refinement and "Western" ideas about proper womanhood', *Women's History Review* 4, no. 1, hlm. 25-62.

27 A.M. Joeques (1885-1962)

Adolf Marcus Joeques (1885-1962) memulai karirnya di tanah kelahirannya Hindia-Belanda. Ayahnya, ke siapa dia dinamai, dan dua saudara laki-laki ibunya (F.A. dan J.H. Lieftrinck) berkarir di Binnenlands Bestuur / BB (Pemerintahan Dalam Negeri). Pada tahun 1911 Joeques jr. masuk dalam dunia usaha, sebagai *secretaris van de hoofdvertegenwoordiger* (sekretaris dari wakil utama) pada Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij / SJS (Perusahaan Tram Uap Semarang-Joana) dan Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij / SCS (Perusahaan Tram Uap Semarang-Cirebon). Dalam waktu bebasnya ia antara lain aktif sebagai *gemeenteraadslid* (anggota Dewan Kotapraja) di kota tempat tinggalnya Semarang dan sebagai *voorzitter* (ketua) dari Kartinivereniging (Perhimpunan Kartini), bagian dari yang sesudah ini disebut Kartinifonds (Yayasan Kartini). Pada tahun 1918 ia kembali ke Belanda untuk menjadi sekretaris pada Direktorat Utama SJS dan SCS yang bertempat di Den Haag (sampai tahun 1920). Ia menjadi anggota Vrijzinnig Democratische Bond (Persekutuan Demokrasi Liberal), yang pada tahun 1925 mengutusnyanya ke Tweede Kamer (Majelis Rendah). Terutama pada tahun 20-an Hindia merupakan tema penting dalam pidato-pidatonya, dalam pelbagai artikel yang diterbitkannya di *Nieuwe Rotterdamsche Courant* dan berbagai ceramahnya di Indisch Genootschap (Perserikatan Hindia).

Dalam kata dan tulisan ia menekankan pentingnya pendidikan dalam proses emansipasi Hindia. Edukasi adalah dasar hak ikut bicara politik. Ia sangat menghargai Gubernur-Jenderal J.P. van Limburg Stirum (1916-1921), *een staatsman van grote stijl* (negarawan dengan citra tinggi), yang telah menunjukkan kepemimpinan yang berhasil dalam suatu periode perkembangan yang pesat. Tentang penggantinya, D. Fock (1921-1926), ia kurang antusias. Dengan tindakan penghematannya, Fock telah merugikan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Juga dalam menindak pemogokan, ia kurang memberi perhatian yang cukup terhadap posisi ekonomi dari para pekerja Indonesia. Wet op Staatsinrichting (Undang-Undang Tata Negara) dan Wet op de Bestuurs Hervorming (Undang-Undang Reformasi Pemerintahan) yang diberlakukan pada masa Fock sebagai penguasa negeri, menurut Joeques lebih mendorong desentralisasi pegawai daripada hak ikut bicara. Dari sudut pandang kenegaraan menurutnya tidak bisa diterima, bahwa pendidikan ahli Indologi yang baru pada Universitas Utrecht (1925) dibiayai oleh Bataafse Petroleummaatschappij / BPM (Perusahaan Perminyakan Batavia), Koninklijke Paketvaart-maatschappij / KPM (Perusahaan Pelayaran Kerajaan), Stork, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Masyarakat bisa saja tidak memiliki kepercayaan atas para pegawai pemerintah lulusan dari 'Oliefaculteit' (Fakultas Perminyakan) itu, meskipun mereka telah memenuhi tugasnya senetral mungkin. Dengan latar belakang yang dimiliki, mereka memakai argumen berhaluan revolusioner menentang pemerintahan Belanda dan 'kapitalisme': dengan begitu wibawa pemerintah dirongrong.

Setelah kembali ke Hindia dari perjalanan studinya (1928), ia menyatakan dalam wawancara bahwa media Eropa membantu mempertajam pertentangan ras.

Sebagai anggota pengurus dari Kartinfonds (Yayasan Kartini), Tjandistichting (Yayasan Tjandi), Van Deventer- en Van Deventer-Maasstichting (Yayasan Van Deventer dan Van Deventer-Maas), Joeques secara nyata memperjuangkan pendidikan di Hindia-Belanda.

Yayasan pertama (1912), yang dinamai sesuai nama pejuang awal emansipasi perempuan Raden Adjeng Kartini (1879-1904), bertujuan untuk memberikan pendidikan berbahasa Belanda kepada para gadis ‘pribumi’. Tjandistichting (1913) memberikan uang muka kepada orang-orang Indonesia berbakat yang hendak melanjutkan *hoger onderwijs* (pendidikan tinggi) di Belanda. Tokoh penting di balik kedua institusi itu adalah mr. C.Th. van Deventer (1857-1915), terkenal akan artikelnya di *Gids* ‘Een eereschuld’ (Hutang budi) pada tahun 1899 dan juga sebagai anggota Vrijzinnig Democratische Bond (Partai Demokrasi Liberal). Van Deventer Stichting (1917) memberikan kesempatan kepada para gadis Indonesia untuk mengikuti *voortgezet onderwijs* (pendidikan lanjutan / sekolah menengah). Van Deventer-Maas Stichting (1947) pada akhirnya tidak hanya mendorong kepentingan kesusilaan, material, dan moral dari masyarakat ‘pribumi asli’, tetapi juga menjaga hubungan baik antara di satu pihak masyarakat Belanda dan di lain pihak kelompok masyarakat pribumi dan lainnya, yang menetap di Hindia. Sesaat sebelum meninggal, Nyonya E.M.L. van Deventer-Maas (1857-1942) dalam testamennya menetapkan bahwa Van Deventer-Maas Stichting juga harus didirikan jika Indonesia tidak lagi atau sebagiannya akan berada di bawah kekuasaan Belanda: haruslah mungkin ‘het betreffende vermogen in het belang der inheemsche bevolking aan te wenden’ (menggunakan kekayaan tersebut demi kepentingan masyarakat pribumi). Menurut arsip Joeques keempat yayasan tersebut setelah kemerdekaan Indonesia juga sempat tetap aktif.

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip pribadi A.M. Joeques, 1858-1962, kode akses 2.21.094

Untuk berkas ini digunakan *inleiding* (pengantar) dan nomor inventaris 198; 200; 206; 208; 421; 428; 431-435; 444; 449; 472-474; 477; 488; 491; 620-621.

Catatan: arsip juga berisi berkas-berkas tentang ayahnya A.M. Joeques, J.H. Liefreijck, dan F.A. Liefreijck, semua pegawai pemerintah.

2. Berkas-berkas tentang Joeques

Berkas-berkas ini dapat ditemukan dalam arsip-arsip ‘Semarang-Cheribon Stoomtrammaschappij, 1893-1946’ (Jawatan Tram Uap Semarang-Cirebon, 1893-1946), kode akses 2.20.17; ‘Semarang-Joana Stoomtrammaschappij, 1881-1952’ (Jawatan Tram Uap Semarang-Joana), kode akses 2.20.18; ‘Vier Zustermaatschappijen (Empat Jawatan sejenis, di samping kedua jawatan yang sebelumnya disebut, dua lainnya adalah Oost-Java Stoomtrammaschappij / Jawatan Tram Uap Jawa Timur dan Serajoedal Stoomtrammaschappij / Jawatan Tram Uap Serajoedal), 1886-1971’, kode akses 2.20.14.01; juga dalam ‘Serie personeelsdossiers van de vier Zustermaatschappijen, 1882-1966’ (Seri

dosir / berkas kepegawaian keempat jawatan sejenis), kode akses (register kata kunci) 2.20.15 (dosir Joekes no. 496 dalam nomor inventaris 30).

3. Berkas-berkas Fakultas Indologi pada Universitas Utrecht

Berkas-berkas berada dalam arsip-arsip pribadi H.H.A. van Gybland Oosterhoff (sekretaris fakultas ini) dkk., 1890-1969, kode akses 2.21.079; B.C. de Savornin Lohman (gurubesar di Utrecht) dkk., 1832-1961, kode akses 2.21.149; F.C. Gerretson (gurubesar di Utrecht pada Fakultas Indologi), 1891-1958, kode akses 2.21.246. Arsip-arsip ini juga berisi surat-surat dari dan kepada Joekes.

4. Kartinfonds, Tjandistichting, dan Van Deventer-Maasstichting

Arsip-arsip ‘Kartinfonds 1913-1979’, kode akses 2.20.38.03; ‘Tjandistichting 1913-1979’, kode akses 2.20.38.02; ‘Van Deventer-Maasstichting 1947-1981’, kode akses 2.20.38.04. Berkas-berkas tentang ketiga organisasi ini juga ada dalam berkas-berkas pribadi C.Th. van deventer dan E.M.L. van Deventer-Maas, 1878-1944, kode akses 2.20.38.05.

5. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan)

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Berkas-berkas tentang ‘Semarang-Cheribon Stoomtrammaatschappij’ dan ‘Semarang-Joana Stoomtrammaatschappij’ dapat ditemukan dengan bantuan akses (*indices* ‘indeks’) di *openbaar archief* (arsip umum) mulai tahun 1900 (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03), dalam rubrik berikut: ‘Spor- en tramwegen’ (Jawatan kereta api dan tram). Terdapat indeks tersendiri mengenai ‘spoor- en tramwegen, 1908-1949’, dari *5de afdeling* (bagian ke-5): lihat kode akses 2.10.36.011, nomor inventaris 630-631.

5. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: Untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini, lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Handelingen en bijlagen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Notula dan lampiran Majelis Rendah dari Dewan Perwakilan Rakyat)

Dalam periode September 1925-Februari 1946 Joekes adalah anggota dewan ini dan dalam periode Juni 1933-Mei 1937, November 1938-februari 1946 juga menjadi ketua fraksi dari *Vrijzinnig Democratische Bond* (Partai Demokrasi Liberal).

Daftar Pustaka

Biografisch Woordenboek van Nederland, versi digital, (<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/joekes>): lema A.M. Joekes, (<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/deventer>): lema C.Th. van Deventer.

Embden, D. van ed. dkk (1926), *Gedenkboek van de vrijzinnig Democratische Bond 17 maart 1901-1926* (Den Haag).

Joekes, A.M. (1926), 'De Vrijzinnig-Democraten en Indië', dalam D. van Embden dkk (ed.), *Gedenkboek van de vrijzinnig Democratische Bond 17 maart 1901-1926*, hlm. 149-157.

Joekes, Th. (1996), *Man en paard; Herinneringen* (Meppel: De Feniks Pers).
Catatan: kedua orangtua Theo Joekes menjadi model untuk Willem dan Lucia van der Steen, tokoh utama dalam romannya *Het vertrek* (1989, Amsterdam: Loeb), *De thuisvaart* (1991, Amsterdam: De Boekerij), dan *De ontzetting* (1993, Amsterdam: De Boekerij).

Parlement en politiek, versi digital, (http://www.parlement.com/id/vg0911204eze/a_m_dolf_joekes): lema A.M. Joekes.

28 F.M. Baron van Asbeck (1889-1968)

Dalam tulisannya yang tidak diterbitkan *Indische herinneringen*, Frederik Mari Baron van Asbeck (1889-1968) menganggap pendidikan di Universitas Leiden sebagai progresif. Selama masa studinya di bidang hukum dan ilmu-ilmu politik dengan antara lain mengikuti perkuliahan dari pakar hukum adat yang terkemuka Cornelis van Vollenhoven, ia belajar menghargai diri sendiri dan juga sifat dasar masyarakat Hindia-Belanda. Masyarakat itu harus berkembang melalui badan-badan perwakilan dalam ‘westerse en oosterse vormen’ (bentuk barat dan timur), menjadi masyarakat adat yang mandiri, bebas dari tindakan merendahkan oleh negara asal: suatu masyarakat yang hukum adat dan hukum dari kelompok-kelompok masyarakat lainnya seharusnya membentuk satu keseluruhan dan tidak memberi ruang untuk ‘rassenhoogmoed’ (kesombongan ras). Berdasarkan kepercayaan agama kristennya, dalam tahun-tahunnya di Hindia (1919-1933) ia telah membantu memperjuangkan tujuan ini.

Ia memulai karirnya sebagai pegawai pemerintah pada Algemene Secretarie (Sekretariat Umum), kabinet dari gubernur-jenderal, di mana ia naik pangkat menjadi kepala Afdeling Politieke Zaken (Bagian Urusan Politik). Pada tahun 1924 ia juga menjadi gurubesar di bidang *internationaal publiek* (publik internasional) dan *vergelijkend koloniaal recht* (hukum kolonial perbandingan) pada Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum), yang dibuka pada tahun itu juga.

Melalui pekerjaannya ia menjalin hubungan dengan orang-orang Indonesia. Arsipnya berisi surat-surat dari dan kepada ‘Indonesische studenten en jonge vrienden’ (para mahasiswa dan teman-teman muda Indonesianya) pada periode 1922-1940. Termasuk kelompok ini antara lain Mohammad Yamin, yang kemudian di masa Soekarno menjadi Menteri Pendidikan. Penjabat sementara untuk Inlandse Zaken (Urusan Pribumi) E. Gobée memperkenalkan Van Asbeck ke kalangan kenalan Indonesianya. Hal yang sama dilakukan juga oleh temannya H. Kraemer, *taal-afgevaardigde* (utusan bahasa) dari Bijbelgenootschap. Bersama dengan Dokter A. Nortier, Kraemer bekerja untuk pusat misionaris di Mojowarno. Van Asbeck sangat antusias dengan pusat misionaris itu. Menurutnya, di pusat itu kehadiran Belanda di Hindia mendapatkan bentuk dan makna praktisnya; di situ melalui kerja sama dapat membantu orang-orang Indonesia agar mandiri ‘naar eigen kunnen en met eigen verantwoordelijkheden’ (sesuai dengan kebisaannya dan tanggung jawabnya sendiri) (*Indische herinneringen*). Pada tahun 1922 ia ikut ambil bagian dalam kamp untuk para murid Jawa dari sekolah-sekolah menengah dan yang sejenis.

Korespondensi surat yang disebut di atas mengilustrasikan polarisasi antara Timur dan Barat, yang manisfestasinya setelah pemberontakan komunis pada tahun 1926/1927 semakin tampak jelas. Kemudian konsulen pertanian Boenawan Roesmipoetro (Oktober 1928 dan Januari 1933) menulis tentang egoisme yang kasar dan diskriminasi di kalangan pegawai Eropa di pedesaan; tentang pemfitnahan yang sebagian menyimpannya dan sebagai dampak dari semua keterikatannya dengan masyarakat desa yang semakin tumbuh. Di Van Asbeck ia merasakan

‘waardeering jegens den mensch “Inlander”’ (respek terhadap orang ‘Pribumi’). Dalam salah satu suratnya Boenawan juga melaporkan secara rinci tentang Taman Siswoscholen / Sekolah-sekolah Taman Siswo (*kindertuinen* ‘taman kanak-kanak’), yang pertama kali didirikan pada tahun 1922 oleh nasionalis Soewardi Soerjaningrat, yang kemudian dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantoro. Dengan pendidikan Taman Siswo itu, berdasarkan budaya nasional Soewardi berupaya menghubungkan murid-murid Indonesia dengan banyaknya pengetahuan barat. Ia berpendapat bahwa hanya dengan cara itu pengetahuan barat itu bisa diserap. Ini dihargai oleh Van Asbeck. Ia juga melihat tabrakan antara dua dunia itu, yang satu ‘vol van geloof en vrees, van onberedeneerde en onberedeneerbare voorstellingen’ (penuh kepercayaan dan kekhawatiran akan bayangan-bayangan yang tak bernalar dan yang tak bisa dipikirkan dengan nalar), yang lainnya ‘rationeel denken en bewijsbare waarheden’ (berpikir rasional dan kebenaran yang dapat dibuktikan). Dalam kenangan dan catatan hariannya, yang dibuat selama tinggal di Jawa di tahun 20-an, ia memberikan banyak perhatian pada sekolah-sekolah itu dan pendirinya.

Arsipnya berisi juga beberapa advis dari Adviseur voor Inlandse Zaken (Penasihat untuk Urusan Pribumi), ahli Islam, dan Guru Besar di Leiden Chr. Snouck Hurgronje, antara lain tentang pemberontakan di Jambi (Sumatra Tengah) pada tahun 1916. Menurut Snouck Hurgronje timbulnya pemberontakan itu terutama karena tindakan pemerintahan. Pajak yang tinggi, pekerjaan pengabdian yang berat, dan tidak adanya kemungkinan untuk mengungkapkan perasaan dan keinginan, menyebabkan pecahnya pemberontakan itu. Ia menganjurkan lebih banyak pendidikan, sedikit peraturan dan lebih banyak perhatian terhadap yang hidup dalam masyarakat.⁴¹

Arsip dan sumber yang tercetak

1. Arsip pribadi F.M. van Asbeck dkk, 1901-1993, kode akses 2.21.183.03

Untuk berkas ini digunakan *inleiding* (pengantar) dan nomor inventaris 3-4; 27; 38; 66; 68-69; 142.

Catatan: arsip juga berisi berkas-berkas dari istrinya, E.D.W. van Asbeck-Jonckheer, dan beberapa kerabatnya.

2. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1900

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Arsip itu berisi pelbagai nota dari Algemene Secretarie (Sekretariat Umum) tentang hal-hal politik. Nota-nota itu dapat dicari dengan bantuan akses (*indices* ‘indeks’) di openbaar

⁴¹ Lihat Bab 12 dalam buku panduan ini.

archief (arsip umum); kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03, dalam rubrik-rubrik berikut: ‘Bestuur, binnenlands’ (Pemerintahan dalam negeri); ‘Betrekkingen met vreemde mogendheden’ (Hubungan-hubungan dengan negara asing); ‘Contracten (met inlandse vorsten; politieke -)’ (Kontrak: dengan raja-raja pribumi; politik); ‘Decentralisatie’ (Desentralisasi); ‘Grensregeling’ (Peraturan perbatasan); ‘Grondgebied / grondrechten’ (Lahan tanah / hak atas tanah); ‘Politieke contracten’ (Kontrak politik); ‘Politieke stromingen’ (Aliran politik); ‘Politieke en economische toestand’ (Keadaan politik dan ekonomi); ‘Toepassing (regeringsreglement; Indische staatsregeling)’ (Penerapan: peraturan pemerintah, peraturan pemerintah Hindia).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks-indeks pusat). Untuk mencari nota-nota setelah tahun 1921, akses *1ste afdeling* (bagian ke-1) dan *4de afdeling* (bagian ke-4) adalah penting: kode akses 2.0.36.011.

Berkas-berkas tentang Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) pada prinsipnya harus dicari di *openbaar archief* (arsip umum) mulai tahun 1900 (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03).

Rechtshogeschool itu dibuka pada tahun 1924: untuk mencari berkas-berkasnya, akses-akses berikut sangat penting: *4de afdeling* (bagian ke-4) dalam rubrik ‘Onderwijs, hoger’ (Pendidikan tinggi) dan *Aantekeningenregisters van de 1ste afdeling* (Register Pencatatan pada bagian ke-1) dalam rubrik ‘Onderwijs’ (Pendidikan): lihat kode akses 2.10.36.011.

Banyak berkas tentang Taman Siswoscholen (Sekolah-sekolah Taman Siswo) tersimpan dalam *geheim- en kabinetsarchief* (arsip kabinet dan rahasia) mulai tahun 1900 dan dalam *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914. Dokumen-dokumen ini juga penting untuk mencari berkas-berkas Algemene Secretarie (Sekretariat Umum) tentang urusan politik: kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

S. L. van der Wal ed. (1963), *Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940* (Groningen: Wolters).

Untuk data tentang Rechtshogeschool dan Taman Siswoscholen.

Daftar Pustaka

Asbeck, F.M. van et al. (1949), *Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan van het rechtswetenschappelijk hoger onderwijs in Indonesië op 28 oktober 1949* (Groningen-Jakarta: Wolters).

Dewantoro, Ki Hadjar [Soewardi Soerjaningrat] (1935), *Een en ander over ‘Nationaal Onderwijs’ en het Instituut ‘Taman Siswo’ te Jogjakarta* (Seri Brosur Wasita no. 2; Yogyakarta).

Kapteyn, P.G.J. ed. (1989), *F.M. van baron van Asbeck 1889-1968* (T.M.C. Asserinstituut; Den Haag: Asserinstituut).

Di dalamnya terdapat kontribusi dari E.B. Locher-Scholten: 'Years in the Dutch East Indies 1919-1933', hlm. 4-25.

Ketel, A.P. (1934), *1894 tot 1934; Veertig jaren medische zending; Zendingsziekenhuis te Modjowarno; Tevens beknopt verslag over het jaar 1933* (Surabaya: Van Dorp).

Snouck Hurgronje, C. (1918), *Beschouwingen over bestuursbeleid; Naar aanleiding van den Djambi-opstand in 1916* (Batavia: Landsdrukkerij).

29 C. Adriaanse (1896-1964)

Cornelis Adriaanse (1896-1964) memulai karirnya sebagai pegawai pemerintah pada tahun 1918. Dia adalah seorang pegawai administrasi dan pengawas di daerah Menado, Amboina (Ambon) dan Sumatra's Oostkust (Pantai Timur Sumatera). Pengetahuan bahasa Arabnya mempengaruhi pengangkatannya sebagai konsul di Jeddah (1931-1939). Konsulat menawarkan perlindungan, bantuan, dan dukungan kepada ribuan Muslim Indonesia, yang pergi berziarah ke Mekah setiap tahunnya (*hadj* 'naik haji'). Kegiatan politik dan agama dari para peziarah diawasi secara ketat terhadap adanya kemungkinan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat Indonesia. Adriaanse sangat tahu banyak tentang dunia Arab.

Arsipnya berisi surat-surat dari gurunya Christiaan Snouck Hurgronje, seorang pakar Islam besar dan penasihat pemerintah selama bertahun-tahun. Di beberapa epistelnya (31 Desember 1926, 4 Januari 1928), Snouck menulis tentang pemberontakan tahun 1926-1927, yang dicirikannya sebagai 'chronische openbaringen van verzet' (letusan pemberontakan yang kronis) terhadap para penguasa tanah jajahan. Ia menyimpulkan bahwa orang-orang Belanda menurutnya tidaklah akan berhasil untuk '– trots de goede bedoelingen van enkelen – door te dringen in en rekening te houden met de roerselen van het leven der technisch vooralsnog onmachtigen ... Eene historische tragedie, die op 't oogenblik in meer dan een werelddeel gespeeld wordt' (– meski ada maksud baik dari beberapa orang – bisa mendalami dan memperhitungkan kesulitan hidup dari orang-orang yang sementara ini secara teknis masih belum mampu ... Suatu tragedi sejarah yang pada saat ini terjadi bukan hanya di satu bagian dunia saja)'.

Setelah pensiun, Adriaanse bersama dengan teman sekelasnya E. Gobée yang seperti Snouck juga seorang penasihat untuk Inlandse Zaken (Urusan Pribumi), menerbitkan advis-advis pemerintahan guru mereka itu.

Salinan surat dari direktur Binnenlands Bestuur / BB (Pemerintahan Dalam Negeri) P.C.A. van Lith kepada Gubernur-Jenderal B.C. de Jonge (19 Januari 1936) memberikan wawasan tentang kebijakan pemerintah mengenai pemerintahan wilayah otonom, terutama di Buitengewesten (Wilayah Luar Jawa dan Madura). Pada waktu itu dibuat kontrak yang dikenal sebagai Lang Contract (Kontrak Panjang) dengan sejumlah penguasa wilayah otonom, yang menjamin keotonomian mereka. Pada waktu Perang Aceh, di tahun 1898 Korte Verklaring (Perjanjian Pendek) dirancang. Dengan Korte Verklaring itu dinyatakan bahwa para penguasa wilayah otonom menjadi berada di bawah kekuasaan Belanda. Sampai tahun 1915 pemerintah secara sistematis menggunakan Korte Verklaring tersebut. Kerusuhan dan pergantian jabatan pemerintahan di wilayah otonom di mana Lange Verklaring (Perjanjian Panjang) berlaku, digunakan sebagai dalih untuk menerapkan Korte Verklaring. Van Lith mensinyalir ketidakpuasan yang makin meningkat terhadap cara penanganan itu dan

menyarankan agar para pemerintah wilayah yang mempunyai hubungan sejarah dengan Belanda dan secara ekonomis penting bagi Belanda diberi Lange Verklaring (lagi). Arsip tersebut juga memuat sebuah edisi majalah berbahasa Melayu *Pandji Poestaka* (Boekenbanier, April 1939) yang diterbitkan oleh Bureau voor de Volkslectuur (Biro Pustaka Rakyat) dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada orang Indonesia terpelajar tentang perkembangan di dalam dan di luar negeri. Selain majalah, biro itu juga menerbitkan buku, termasuk terjemahan buku-buku laris seperti *Alleen op de wereld* en *De kleine lord*.

Arsip dan Sumber Tercetak

1. Arsip pribadi C. Adriaanse dkk., 1917-1985, kode akses 2.21.205.01

Untuk berkas ini digunakan nomor inventaris 3; 6-7; 23; 38; 61.

Catatan: arsip ini juga memuat berkas-berkas dari P.M. Adriaanse dan beberapa kerabatnya.

2. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1900

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Berkas-berkas tentang ‘Adriaanse’ dan tentang ‘Mohammedaanse zaken’ (perihal Islam) dapat dicari dengan menggunakan akses-akses (*indices* ‘indeks’) di *openbaar archief* (arsip umum) mulai tahun 1900 (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03), dalam rubrik: ‘Bedevaart’ (Ziarah); ‘Eredienst: bedevaart; hedjaz; mohammedaanse’ (Ibadah: ziarah; hedjaz; muslim); ‘Hedjaz’.

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks-indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang topik-topik ini sesudah tahun 1921, akses-akses *4de afdeling* (bagian ke-4) sangat penting: lihat kode akses 2.10.36.011.

Berkas-berkas penting juga dapat ditemukan dalam *geheim- en kabinetsarchief* (arsip kabinet dan rahasia) mulai tahun 1900 dan *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 juga bisa dipakai. Lihat kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

3. Arsip-arsip dari Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kementerian Luar Negeri)

Untuk periode Adriaanse selama menjadi konsulat, lihat arsip ‘Consulaat in Djeddah (Turkije / Saoedi-Arabië), 1872-1930’ (konsulat di Jeddah (Turki / Saudi-Arabia, 1872-1930),

belakangan menjadi ‘Nederlands gezantschap in Saoedi-Arabië (Djeddah), 1930-1950’ (Kedutaan Belanda di Saudi-Arabia (Jeddah), 1930-1950), kode akses 2.05.53; arsip ‘Vice-consulaat te Mekka (Saoedi-Arabië), 1939-1950’ (Kantor wakil konsulat di Mekah, Saudi-Arabia), 1939-1950), dan ‘Legatiearts te Mekka, 1937-1950’ (Dokter kedutaan di Mekah, 1937-1950), kode akses 2.05.106.

Yang juga penting adalah *serie A-dossiers* (seri dosir A), 1871-1940, kode akses 2.05.03 dan 2.05.21, dan *serie B-dossiers* (seri dosir B), (1858) 1871-1940 (1955), kode akses 2.05.38.

Publikasi sumber:

E. Gobée dan C. Adriaanse (1957-1965), *Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936* (3 jilid; Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Kleine serie 33-35; 's-Gravenhage: Nijhoff).

R.C. Kwantes (1975-1982), *De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Tjeenk Willink).

Berisi berkas-berkas mengenai kerusuhan tahun 1926-1927 dengan penjelasan.

S.L. van der Wal (1963), *Het onderwijsbeleid in Nederlandsch-Indië 1900-1940* (Groningen: Wolters).

Antara lain tentang *volkslectuur* (bacaan rakyat).

Daftar Pustaka

Bongenaar, Karel E.M. (2005), *De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië 1855-1942* (Zutphen : Walburg Pers)

Jedamski, D. (1997), ‘De taalpolitiek van de Balai Poestaka’, dalam: K. Groeneboer ed., *Koloniale taalpolitiek in Oost en West; Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba* (Amsterdam: Amsterdam University Press), hlm. 159-185.

30 De Technische Hogeschool / TH Bandoeng (Sekolah Tinggi Teknik Bandung)

Pada bulan Mei 1917 beberapa orang terkemuka dalam bidang perusahaan swasta mendirikan Koninklijk Instituut voor Hoger Technisch Onderwijs (Institut Kerajaan untuk Pendidikan Teknik Tinggi). Yayasan itu didirikan di Amsterdam dengan maksud untuk dapat menyumbangkan perkembangan ekonomi Hindia-Belanda dengan cara menghadiahkan suatu sekolah politeknik. Ketua pertama sekolah itu adalah presiden direktur Nederlandsche Handel-Maatschappij / NHM (Maskapai Dagang Belanda), C.J.K. van Aalst; penggantinya adalah seorang pengusaha, pakar politik, dan cendekiawan ir. J.W. IJzerman.

Dengan rencana pendirian sebuah sekolah baru, yayasan itu berharap dapat memberikan semangat kepada (Indische) Comité Indië Weerbaar (Komite Hindia Mampu Bertahan). Pada tahun 1917 seorang utusan dari Komite itu pergi ke Belanda untuk meminta perhatian terhadap pertahanan kepulauan Indonesia: suatu masalah yang aktual dalam masa perang. Para pendukungnya berharap bahwa partisipasi orang Indonesia dalam membela negara mereka akan dapat mencapai konsesi politik dari penguasa kolonial. Namun, utusan itu tidak mampu mencapai sesuatu yang konkret. Harapan untuk dapat membuka sekolah baru melunakkan kekecewaan itu.

Lalu, ketika dua tahun kemudian ada lebih dari 3 juta gulden bisa terkumpulkan, IJzerman bersama dengan calon *rector-magnificus* pertama pergi ke Hindia untuk berbicara lebih lanjut dengan Pemerintah. Pada tanggal 3 Juli 1920 Technische Hogeschool (Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung diresmikan. Tonggak penting dalam sejarah kolonial itu – sebab sekolah tinggi itu merupakan lembaga pendidikan tinggi yang pertama – oleh salah seorang pembicara dibandingkan dengan pembukaan Universitas Leiden pada tahun 1575. Pertama-tama pemerintah akan membiayai separuh dari biaya operasinya dan setelah empat tahun sekolah tinggi itu akan mendanai sendiri sepenuhnya. Persetujuan mengenai peraturan, program studi, dan anggaran tahunan merupakan masalah gubernur-jenderal. Dia juga yang mengangkat ketua dan setengah dari anggota dewan kurator, dan mengesahkan pengangkatan dosen yang tinggal di Hindia. Minister van Koloniën (Menteri Urusan Tanah Jajahan) mengesahkan pengangkatan dosen yang dikirim dari Belanda.

Technische Hogeschool / TH Bandoeng mendidik mahasiswa dari ‘alle landaarden zonder onderscheid’ (semua kelompok tanpa membedakan asal-usul mereka) untuk menjadi insinyur sipil. Sekolah tinggi yang direncanakan untuk mengeluarkan insinyur kimia tidak terealisasi karena alasan keuangan. Sekolah tinggi itu dibagi ke dalam *onder- en bovenbouw* (mahasiswa tahun-tahun pertama dan mahasiswa tahun atas). Setelah tiga tahun seorang mahasiswa bisa mendapatkan ijazah pertengahan dan setelah empat tahun mereka bisa memperoleh ijazah insinyur. Indische Ingenieursopleiding (Pendidikan / Sekolah Teknik Hindia itu), meskipun satu tahun lebih pendek, setara dengan Sekolah Tinggi Teknik Delft.

Sebuah laboratorium dari Departement van Burgerlijke Openbare Werken (Departemen Pekerjaan Umum Sipil) ditempatkan di kampus sekolah tinggi itu. Selama bertahun-tahun kemudian beberapa kongres (internasional) diselenggarakan di sekolah tinggi itu. Pada tanggal 18 Oktober 1924, TH Bandoeng menjadi pemilik tanah. Beberapa bulan sebelum itu Vereniging Koninklijk Instituut (Perhimpunan Institut Kerajaan) dibubarkan. Dalam rangka mempertahankan hubungan antara TH dan pendirinya, maka pada tahun 1925 Stichting Bandoengsche Technische Hogeschool Fonds (Yayasan Dana Sekolah Tinggi Teknik Bandung) didirikan di Den Haag. Yayasan ini berkeinginan memberikan sumbangan pada perkembangan TH dan meningkatkan studi di sekolah tinggi itu. Dari Algemeen Bestuur (Pengurus Umum) disusun sebuah Raad van Beheer (Dewan Pengurus): satu anggota dewan itu ditunjuk oleh Menteri Urusan Tanah Jajahan, satu oleh Koninklijk Instituut van Ingenieurs (Institut Kerajaan untuk Insinyur), dan tiga oleh pengurus itu sendiri. Seperti juga badan hukum pendahulunya, yayasan itu memiliki perwakilan di Bandung. Setelah Perang Dunia Kedua, yayasan itu menghentikan keterlibatannya dengan TH dan hanya mengonsentrasikan diri pada pengelolaan modal. Ketika pada tahun 60-an hubungan antara Belanda dan Indonesia mulai membaik, yayasan itu mencoba lagi untuk memainkan peran aktif.

Arsip-arsip dan sumber tercetak

1. Arsip-arsip Koninklijk Instituut voor Hooger Technisch Onderwijs (Institut Kerajaan untuk Pendidikan Tinggi Teknik)

di Hindia-Belanda dan dari Stichting Bandoengsche Technische Hoogeschool Fonds (Yayasan Dana Sekolah Tinggi Teknik Bandung), 1917-1981, kode akses 2.20.37.01. Lihat untuk berkas ini nomor inventaris 1-2, 14, 15, 24.

2. Arsip pribadi C.J.K. van Aalst dkk., 1855-1962, kode akses 2.21.261

Nomor inventaris 91 berisi salinan ‘Verslag van de commissie van advies inzake de overdracht op het land van de zorg voor de door het Koninklijk Instituut gestichte Technische Hoogeschool Bandoeng’ (Laporan komisi advis mengenai serah-terima pengelolaan TH Bandoeng yang didirikan oleh Koninklijk Instituut (Institut Kerajaan) kepada negara), dengan lampiran, Oktober 1923 (juga dalam arsip Koninklijk Instituut, nomor inventaris 2).

3. Arsip Koninklijk Instituut van Ingenieurs / KIVI (Institut Kerajaan untuk Insinyur), 1847-1980, kode akses 2.19.47.01

Nomor inventaris 28 (nomor dosir 66) berisi berkas-berkas tentang Koninklijk Instituut dan pendirian TH Bandoeng. Nomor inventaris 376-477 dan 510-513 berisi beberapa edisi majalah *De Ingenieur* dan *De Ingenieur in Nederlandsch-Indië*, dengan artikel-artikel tentang TH Bandoeng.

4. Arsip pribadi W. Cool, 1901-1948, kode akses 2.21.038

Cool adalah kurator TH Bandoeng. Nomor inventaris 103 berisi teks ceramahnya di depan para mahasiswa.

5. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1900

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Berkas-berkas tentang TH Bandoeng bisa ditemukan dengan menggunakan akses (*indices* 'indeks') dalam openbaar archief (arsip umum) mulai tahun 1900 (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03), dalam rubrik 'Onderwijs (hoger)' (Pendidikan tinggi). Berkas-berkas tentang pengambilalihan TH oleh pemerintah ada di arsip verbal 25 September 1924 no. 43.

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang sekolahan sesudah tahun 1921, akses *4de afdeling* (bagian ke-4) sangat penting: lihat kode akses 2.10.36.011.

Geheim- en kabinetsarchief (arsip kabinet dan rahasia) mulai tahun 1900 beserta *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 kemungkinan besar tidak memuat bahan mengenai sekolah tinggi itu. Apabila dari arsip umum diacu ke data dokumen itu, maka data itu bisa diteliti lebih lanjut.

S.L. van der Wal (1963), *Het onderwijsbeleid in Nederlandsch-Indië 1900-1940* (Groningen: Wolters).

Dalam sejumlah berkas dan anotasi ada acuan ke TH Bandoeng.

6. Arsip Ministerie van Justitie (Kementerian Kehakiman)

Centraal archief verenigingen (Perhimpunan arsip pusat) 1874-1976, kode akses 2.09.12.01. Dosir 27573 berisi berkas-berkas tentang 'Koninklijk Instituut voor Hooger Technisch Onderwijs' (Institut Kerajaan untuk Perguruan Tinggi Teknik).

Centraal archief stichtingen (Yayasan arsip pusat), 1957-1976, kode akses 2.09.12.02. Nomor inventaris 126 berisi dosir Stichting Bandoengsche Technische Hogeschool Fonds (Yayasan Dana Sekolah Tinggi Teknik Bandung) (nomor dosir 3273).

7. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber itu lihat Picarta, melalui halaman ikhtisar Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Algemeen verslag van het Onderwijs in Nederlandsch-(Oost) Indië (Laporan umum Pendidikan di Hindia (Timur)-Belanda), 1915-1938 (Batavia).
Di dalam laporan ini terdapat informasi terperinci tentang Technische Hogeschool.

Jaarboek van de Technische Hogeschool te Bandoeng / Jaarverslag Stichting Bandoengsche Technische Hogeschool-fonds (Buku tahunan Technische Hogeschool Bandung / Laporan tahunan Yayasan Dana Sekolah Tinggi Teknik Bandung), 1926-1931 (Bandoeng).
Lihat 'lustrumuitgave over 1935' (terbitan lustrum meliputi tahun 1935); juga lihat di arsip Koninklijk Instituut, nomor inventaris 15.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië

Untuk berkas ini digunakan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1921 no. 218; 1924 no. 476; 1925 no. 271.

Daftar Pustaka

Biografisch Woordenboek van Nederland, versi digital.

(<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/aalst>): lema C.J.K. van Aalst,

(<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/ijzerman>), lema J.W. IJzerman.

De Technische Hogeschool te Bandoeng, stichting van het Koninklijk Instituut voor Hooger Technisch Onderwijs in Nederlandsch-Indië, geopend 3 juli 1920 door zijne excellentie den gouverneur-generaal (1920, brosur, Weltevreden: Landsdrukkerij).

Catatan: juga dalam arsip KIVI, nomor inventaris 15.

Dijk, Kees van (2007), *The Netherlands Indies and the Great War 1914-1918*, (Leiden: KITLV Press).

Kompagnie, J.H. (1991), *Verenigingen- en Stichtingenregistratie* (Jilid 2 Serie Gidjes van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief; cetakan ke-3; 's-Gravenhage: Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling)

Makkink, H, (2002), 'Het ontstaan van de Technische Hogeschool Bandoeng', *Zicht op Delft* (terbitan perhimpunan alumni Technische Universiteit Delft, 4 September 2002), hlm. 11-13.

Poeze, H.A., dengan sumbangan tulisan dari C. van Dijk dan I. van der Meulen (1986), *In het land van de overheerser. I. Indonesiërs in Nederland 1600-1950* (Dordrecht-Holland / Cinnaminson-U.S.A.: Foris).

‘Ter nagedachtenis aan dr. J.W. IJzerman’ (1932), *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië* 89, hlm. I-XXIX.



Hoesein Djajadiningrat, *taalamtenaar* (pegawai bidang bahasa), sejak tahun 1924 gurubesar pada Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) (Koleksi foto KITLV no. 6353.). Lihat Bab 24 dalam buku panduan ini.

III Justitie (Kehakiman)

31 De Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof (Jaksa Agung pada Mahkamah Agung)

Tugas dan tanggung jawab dari Procureur-Generaal (Jaksa Agung) dijelaskan dalam Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Nederlandsch-Indië (Peraturan tentang Susunan Kehakiman dan Kebijakan Yustisi di Hindia-Belanda), yang pada tanggal 1 Mei 1848 diberlakukan. Jaksa Agung bertanggung jawab atas pemertahanan ketentuan dan keputusan hukum dari pemegang kekuasaan umum; untuk melakukan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran; dan untuk menjalankan putusan hukumannya. Ia adalah kepala kepolisian hukum dan ia boleh memberi instruksi kepada para pegawai pemerintahan dengan tugas kepolisian (terutama kepada para kepala pemerintahan daerah) ‘in het belang der justitie’ (demi kepentingan yustisi) untuk melakukan pelacakan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, dan untuk menjaga ketertiban dan ketenangan umum. Kritik atas kewenangan Jaksa Agung dan / atau keberatan terhadap pelaksanaannya dapat diajukan secara tertulis kepada Hooggerechtshof (Mahkamah Agung). Berkas-berkas itu yang dilengkapi dengan advis untuk penentuan keputusannya dikirimkan lebih lanjut kepada gubernur-jenderal. Jaksa Agung tidak diperbolehkan secara langsung turut campur dengan para pegawai pemerintahan pribumi dan dengan ‘huishoudelijke inrichting’ (penataan rumah tangga) dari desa. Yang bisa dilakukannya dalam hal ini adalah mengajukan usulan kepada *landvoogd* (penguasa negeri), yang menjadi atasannya langsung.

Hubungan antara Jaksa Agung dan para kepala pemerintahan daerah sudah begitu lama tidak berjalan dengan lancar. Para pegawai pemerintahan memiliki kemandirian yang cukup besar dan terbiasa langsung berhubungan dengan gubernur-jenderal jika ada masalah. Surat-surat edaran dari Jaksa Agung dengan permintaan agar melapor kepadanya tentang terjadinya kerusuhan, perlawanan gerombolan bersenjata, perompakan, kehilangan uang, dan seterusnya (satu dan lain hal demi kelancaran koordinasi dan keseragaman kebijakan) hampir tidak memberikan hasil apa-apa. Juga pada tataran pusat ia hanya sedikit mendapatkan kerja sama: demikianlah berbagai laporan dari Adviseur voor Inlandse Zaken (Penasihat untuk Urusan Pribumi) dan dari Ambtenaren voor Chinese Zaken (Pegawai Urusan Cina) tidak langsung dikirimkan kepadanya. Sekitar tahun 1914 keadaan ini mengalami perubahan. Perang Dunia Pertama dan perkembangan di Rusia mendorong gerakan-gerakan nasionalis dan komunis. Pilihan Turki Islam untuk negara-negara inti Jerman dan Austria tampak menjadi ancaman bagi kenetralan Belanda. Republik Cina yang muda menjadi daya tarik yang besar bagi banyak orang Cina di kepulauan Hindia. Dalam situasi itu pemerintah Hindia memutuskan untuk memperkuat posisi Jaksa Agung. Pada Mei 1916 Jaksa Agung diberikan kekuasaan atas Politieke Inlichtingendienst / PID (Dinas Intelijen Politik) hingga April 1919. Dinas itu harus memberikan laporan tentang orang-orang asing yang dicurigai dan aliran-aliran revolusioner di Hindia-Belanda. PID digantikan oleh Dienst der Algemene Recherche (Dinas Reserse Umum), yang pada tahun 20-an juga melakukan pemberantasan perdagangan gelap obat bius dan pemalsuan uang. Pada tahun 1941 dibentuk Vreemdelingenpolitie (Kepolisian untuk Orang Asing), yang juga di bawah pimpinan Jaksa Agung.

Di bawah pengaruh krisis ekonomi pada tahun 1920, pemerintah Hindia memberikan prioritas tertinggi pada penjagaan ketertiban dan ketenangan. Jaksa Agung ikut menghadiri rapat-rapat luar biasa dari Raad van Indië (Dewan Hindia). Pada rapat-rapat ini dengan gubernur-jenderal sebagai ketua rapat, dibicarakan tindakan-tindakan pemberantasan kerusuhan dan ekstrimisme. Atas dorongan Jaksa Agung, antara lain pembatasan *vergaderrecht* (hak rapat) dipertajam (1925) dan Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-undang Hukum Pidana / KUHP) ditambah dengan pasal-pasal yang menyebutkan bahwa ‘haatzaaien’ (penyemaian kebencian) terhadap penguasa hukum adalah ‘strafbaar’ (dapat dihukum) (1925). Gubernur-Jenderal A.C.D. de Graeff (1926-1931) berupaya memulihkan kepercayaan masyarakat Indonesia akan ‘koloniale rechtsstaat’ (negara hukum kolonial) dengan membatasi ruang kebijakan Jaksa Agung: dengan demikian, tidak boleh lagi diberlakukan penuntutan hukuman terhadap ‘zgn. extremisten’ (sejenis ekstremis) sebelum penguasa negeri diberikan laporan dan mengetahui permasalahan itu untuk bisa memutuskannya (1926). Sehubungan dengan keluhan-keluhan dari para pegawai pemerintahan, gubernur-jenderal memberitahu Jaksa Agung agar Dinas Reserse dalam melaksanakan pekerjaannya haruslah lebih hati-hati dan menjaga perasaan orang (1931). Selama depresi, yang mengikuti krisis ekonomi pada tahun 1929, para pengganti De Graeff memulihkan kebijakan hukum dan tata tertib yang menegang.

Arsip dan sumber yang tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Advis dan laporan dari Procureur-Generaal (Jaksa Agung) dapat ditemukan dengan bantuan akses (*indices* ‘indeks’) pada *openbaar verbaal* (arsip verbal umum), dalam rubrik-rubrik berikut:

- a. **Periode 1850-1900** (kode akses 2.10.02; 2.10.10): ‘(Benoeming van) ambtenaren (in O.-Indië)’ (Pengangkatan pegawai di Hindia-Timur); ‘Gevangenissen’ (Penjara); ‘Justitiwezen in O.-Indië’ (Sistem Yustisi di Hindia-Timur); ‘Onlusten in O.-Indië’ (Kerusuhan di Hindia-Timur); ‘Rechswezen’ (Sistem hukum).
- b. **Periode setelah tahun 1900** (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03): ‘Ambtenaren (bij bureaudienst en rechterlijke macht)’ (Para pegawai pada kantor biro dan kekuasaan kehakiman); ‘Bannelingen’ (Orang-orang buangan); ‘Chinezen / Chinese aangelegenheden, zaken’ (Orang-orang Cina / Perihal, urusan Cina); ‘Cocaïne, opium en –’ (Kokain, opium, dan kokain); ‘Gevangeniswezen’ (Perihal / sistem penjara); ‘(Bestrijding van) handel in vrouwen en kinderen en (van de) handel in ontuchtige uitgaven’ (Pemberantasan perdagangan perempuan dan anak, dan perdagangan asusila); ‘In- en externeringsprocedures’ (Prosedur internering dan eksternering); ‘Japanse zaken’

(Urusan Jepang); ‘Muntwezen’ (Sistem mata uang); ‘Naamloze vennootschappen en verenigingen’ (Perseroan terbatas dan perhimpunan-perhimpunan); ‘Oost-Aziatische zaken’ (Urusan Asia-Timur); Opium (Opium); ‘Persbreidel(ing)’ (Pembredelen pers); ‘Politie (rechtswezen en -)’ (Kepolisian: sistem hukum dan kepolisian); ‘Politieke stromingen (en maatregelen)’ (Aliran politik dan tindakan); ‘Rechtswezen (en politie; - in O.-Indië)’ (Sistem hukum dan kepolisian; Sistem hukum di Hindia-Timur); ‘Reisregeling’ (Peraturan perjalanan); ‘Revolutionaire woelingen’ (Gerakan-gerakan revolusioner); ‘Toelating’ (Perizinan); ‘Vennootschappen’ (Perseroan); ‘Verenigingen’ (Perhimpunan); ‘Vreemde Oosterlingen’ (Orang-orang Timur Asing); ‘Zeeroof’ (Perompakan).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang Procureur-Generaal (Jaksa Agung) setelah tahun 1921, akses *1ste afdeling* (bagian ke-1) dan *4de afdeling* (bagian ke-4) adalah penting; lihat kode akses 2.10.36.011.

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia) setelah tahun 1900 dan *serie mailrapporten* (seri laporan surat) mulai tahun 1914 banyak berisi berkas-berkas dari Jaksa Agung, demikian juga dengan yang disebut *politiek-politionele overzichten* (paparan polisionil-politik): kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

Advis dan laporan dari jaksa agung dimuat dalam publikasi sumber berikut:

- R. C. Kwantes ed. (1975-1982), *De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Tjeenk Willink).
Catatan: publikasi sumber ini juga digunakan untuk bab ini.
- S. L. van der Wal ed. (1963), *Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940* (Groningen: Wolters).
- S. L. van der Wal ed. (1967), *De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indië* (Groningen: Wolters).
- H.A. Poeze ed. 1982-1994), *Politiek-politioneele overzichten van Nederlandsch-Indië 1927-1941* (4 jilid; 's-Gravenhage-Dordrecht-Leiden: KITLV Uitgeverij).
Catatan: paparan ini disusun oleh Dienst der Algemene Recherche (Dinas Reserse Umum).

2. Arsip pribadi A.J. Immink, 1892-1901, kode akses 2.21.091.01

Imminck berkarir di *Indische rechterlijke macht* (kekuasaan kehakiman Hindia). Nomor inventaris 22 berisi manuskrip studi Immink (1882), *De rechterlijke organisatie van Nederlandsch-Indië* (Den Haag: Stemberg), yang juga membahas fungsi Jaksa Agung di Mahkamah Agung.

3. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Staatsblad van Nederlandsch-Indië (Lembaran Negara Hindia-Belanda)

Untuk berkas ini digunakan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1847 no. 23 dan 57.

Daftar Pustaka

Biografisch Woordenboek van Nederland, versi digital.

(<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/andre>): lema *G. André de la Porte* (*procureur-generaal / jaksa agung 1914-1916*),

(<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/wolterbeek>): lema *D.G. Wolterbeek Muller* (*procureur-generaal / jaksa agung 1922-1926*).

Bloembergen, Marieke (2009), *De geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië; Uit zorg en angst* (Amsterdam: Boom, Leiden: KITLV Uitgeverij).

Dekker, Albert dan Hanneke van Katwijk (1993), *Recht en rechtspraak in Nederlands-Indië* (KITLV, serie werkdOCUMENTEN no. 12, Leiden: KITLV Uitgeverij).

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *Polisi* (III, hlm. 441-447; VI, hlm. 809-810).

Fromberg, P.H. (1926), 'Nota betreffende de leiding der politie in Nederlandsch-Indië, MR. P.H. Fromberg's verspreide geschriften, verzameld door Chung Hwa Hui Chineesche Vereeniging in Nederland (Leiden: Leidsche Uitgeversmaatschappij), hlm. 795-810.

Graaff, M.G.H.A. (1995), 'Inleiding', dalam: M.G.H.A. Graaff, *Inventaris van het archief van de procureur-generaal bij het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië 1945-1949* (Den Haag: Algemeen Rijksarchief Den Haag).

Kleintjes, Ph. (1932-33), *Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië* (Cetakan ke-6; Amsterdam: De Bussy), Bab II, XXII.

Vrijheid, H.M. (pengolah, 1941), *De Nederlandsch-Indische wetboeken zooals zij zijn gewijzigd en aangevuld tot op 1 juli 1941 benevens de belangrijkste der tot hunne verklaring dienstige algemeene verordeningen, met verwijzing naar de betrekkelijke Nederlandsche, Fransche en Nederlandsch-Indische wetsbepalingen* (Jilid 1, Surabaya: Fuhri).

32 Het Departement van Justitie (Departemen Kehakiman)

Departemen Kehakiman didirikan berdasarkan Koninklijk Besluit (Keputusan Raja) tertanggal 30 Januari 1870 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1870 no. 42). Dengan begitu berakhirlah praktek penanganan urusan perundang-undangan oleh Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) di Hindia-Belanda. Procureur-Generaal (Jaksa Agung) pada Mahkamah Agung ini, mr. T.H. der Kinderen, menjadi direktur pertama Departemen Kehakiman itu.

Hindia-Belanda adalah masyarakat multikultural. Resminya ada tiga kelompok masyarakat: masyarakat Eropa; masyarakat pribumi; dan masyarakat Timur-Asing (terutama orang Cina). Masyarakat pribumi mengikuti ‘regionale adatrecht’ (hukum adat daerah): suatu mosaik yang beraneka warna dengan unsur Islam, Hindu, dan Polynesia. Dalam hukum adat ini kelompok lebih penting daripada individu. Dalam hukum barat di abad ke-19 dan 20, perlindungan kebebasan individu dan hak milik menduduki posisi utama. Pada tahun 1848, hukum Belanda diberlakukan dengan Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUHP) dan Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang / KUHD) bagi masyarakat Eropa di Jawa dan Madura. Kedua kelompok masyarakat yang lain (pribumi dan Timur-Asing) dapat secara sukarela mengikuti hukum tersebut atau bisa saja diwajibkan oleh gubernur-jenderal. Dengan begitu, pada tahun 1855 penguasa negeri menyatakan bahwa Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel diterapkan bagi masyarakat Timur-Asing yang tinggal di Jawa dan Madura. Pengaruh hukum Belanda yang terbatas timbul karena kewenangan Belanda tergantung pada kerja sama dari para *zelfbestuurder* (pemimpin wilayah yang otonom) dan kepala pribumi.

Departemen Kehakiman membawahi ‘rechterlijke macht’ (kekuasaan hukum; dengan pengecualian Presiden dari Mahkamah Agung), ‘rechterlijke ambtenaren’ (pegawai kehakiman), ‘procureur’ (jaksa), ‘notarissen’ (notaris), ‘advocaten’ (advokat / pengacara), ‘deurwaarder’ (juru sita), dan ‘beëdigde vertalers’ (penerjemah tersumpah). Bidang pekerjaan departemen tersebut meliputi juga ‘burgerlijk-, handels- en strafrecht’ (hukum sipil, dagang, dan pidana); ‘toelating van Nederlanders, westerse en oosterse vreemdelingen’ (perizinan masuk bagi masyarakat Belanda, masyarakat asing barat, dan masyarakat asing timur); ‘uitlevering van misdadigers’ (ekstradisi dari para penjahat); ‘verzoeken om naturalisatie, naamsverandering, wettiging en legalisatie’ (permohonan naturalisasi, perubahan nama, pengesahan, dan legalisasi). Directeur van Justitie (Direktur Kehakiman) memberikan advis kepada gubernur-jenderal tentang ‘amnestie, abolitie en dispensatie in rechtszaken’ (amnesti, abolisi / penghapusan penuntutan pidana, dan dispensasi dalam perkara hukum). Ia terlibat erat dengan penerapan dari sejenis ‘exorbitante rechten’ (hak-hak luar biasa): dengan hak-hak ini penguasa negeri dapat mengusir orang-orang, yang menurut pendapatnya dapat membahayakan ketenangan dan ketertiban umum, ke luar negara; melarang tinggal di daerah-daerah tertentu, atau memutuskan suatu tempat tertentu untuk tinggal. ‘Bestrijding van slavernij / pandelingschap (schuldslavernij)’ (Pemberantasan perbudakan, perbudakan sebagai

pelunasan hutang) termasuk juga dalam keseluruhan deskripsi pekerjaan dari departemen (secara resmi sampai tahun 1924). ‘Pandelingschap’ dengan ‘strandvonderij’ (perihal barang temuan pantai) diambil alih dari Departement Binnenlands Bestuur (Departemen Pemerintahan Dalam Negeri). Kemudian masih ada ‘(preventief) toezicht op de drukpers’ (pengawasan preventif atas media cetak) dan ‘toezicht op het recht van vereniging en vergadering’ (pengawasan atas hak mengadakan perhimpunan dan rapat). Hingga awal abad ke-20 perhimpunan dan rapat yang bersifat kenegaraan dilarang. Hal yang sama berlaku juga bagi perhimpunan dan rapat yang membahayakan ketertiban umum. Tugas-tugas lainnya menyangkut ‘gevangeniswezen’ (urusan penjara); ‘gevangenis- en gerechtelijke statistiek’ (statistik kepenjaraan dan pengadilan); ‘toezicht op de wees (voor Europeanen)- en boedelkamers (voornamelijk voor Vreemde Oosterlingen)’ (pengawasan atas balai harta peninggalan untuk masyarakat Eropa dan balai harta peninggalan terutama untuk masyarakat Timur-Asing), dan ‘onderzoek naar reglementen en keuren inzake politie’ (penelitian terhadap peraturan dan pemeriksaan mengenai kepolisian), yang disusun oleh para kepala pemerintahan daerah.

Setelah tahun 1900 campur tangan pemerintah diperluas dan diintensifkan. Ini terwujud dalam kerangka Ethische Politik (Politik Etis), yang bertujuan mengembangkan Hindia-Belanda ke arah *zelfbestuur* (kepemerintahan wilayah yang otonom) menurut model barat. Di bawah kepemimpinan Belanda, dualisme yang ada dalam pelaksanaan pemerintahan lambat-laun harus memberi tempat bagi asosiasi: suatu sintesa dari norma dan nilai barat dan timur. Unifikasi adalah bagian proses emansipasi: mengganti perundang-undangan dan peraturan yang berlaku bagi setiap kelompok secara sendiri-sendiri dengan perundangan-undangan dan peraturan yang seragam bagi kesemuanya.

Pengaruh yang lebih besar dari hukum Belanda terlihat antara lain dari penggantian pengawasan preventif atas media cetak dengan pengawasan respresif pada tahun 1906. Perlindungan atas pegawai Indonesia terhadap penyalahgunaan oleh pemberi kerja (barat) terwujud dalam Arbeidsinspectie (Inspeksi Buruh), yang pada tahun 1908 diberlakukan di seluruh Hindia-Belanda. Alasan pemberlakuan inspeksi tersebut adalah penyelidikan (yang dilaksanakan atas perintah pemerintah) terhadap ketidakadilan dalam penerapan Koelieordonnantie (Ordonansi Buruh Kuli) di Sumatra.⁴² Inspeksi berada di bawah Directeur van Justitie (Direktur Kehakiman). Dia juga dibebani tugas mengawasi perekrutan buruh kuli: agen perekrutan itu selanjutnya harus memiliki izin. Suatu undang-undang untuk mengatur hak perhimpunan dan penyelenggaraan rapat diumumkan pada tahun 1915, setahun sebelum didirikannya Volksraad (Dewan Rakyat). Juga pada tahun 1915 itu muncul Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP) yang baru bagi semua kelompok masyarakat di Hindia-Belanda.

Perang Dunia Pertama dan revolusi Rusia memberikan dampak yang mengagetkan. ‘Politiek élan’ (Politik pembangkit semangat perjuangan) harus menyingkir untuk kepentingan ekonomi. Belanda memperkuat cengkeramannya atas tanah jajahannya. Krisis ekonomi pada

⁴² Lihat Bab 36 dan Bab 37 dalam buku panduan ini.

tahun 20-an dan 30-an mempercepat proses ini. Pada tahun 1919 diumumkan suatu tindakan yang menjadikan hak perhimpunan dan penyelenggaraan rapat dapat dibatasi; batasan-batasan selanjutnya menyusul pada tahun 1925. Kerusuhan-kerusuhan di tahun 1925/1926 memberikan dampak didirikannya kamp konsentrasi di Boven-Digul, Nieuw-Guinea, bagi orang-orang yang menurut pemerintah menjadi bahaya untuk ketenangan dan ketertiban umum.

Pada pembaruan kembali pembatasan bidang kerja untuk pelbagai departemen dari pemerintahan umum pada tahun 1924, Departement van Justitie mengambil alih ‘armenzorg’ (perawatan orang miskin) dan ‘loterijwezen’ (perihal lotere) dari Departement van Onderwijs en Eredienst (Departemen Pendidikan dan Ibadah), ‘kadaster’ (kadaster) dari Departement van Binnenlands Bestuur (Departemen Pemerintahan Dalam Negeri), ‘bemoeienis met het industriële eigendom’ (campur tangan dengan kepemilikan industrial) dari Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan). Paket tugas itu selanjutnya diperluas dengan ‘zorg voor minderjarigen die ter beschikking van de regering waren gesteld’ (perawatan bagi anak-anak di bawah umur yang diserahkan kepada pemerintah); ‘reclassering’ (reklasering / pembinaan pemsyarakatan); ‘toepassing van de onteigeningsordonnantie en bestrijding van de zgn. handel in vrouwen en meisjes’ (penerapan ordonansi pencabutan hak milik dan pemberantasan sejenis perdagangan perempuan dan gadis).

Arsip dan sumber yang tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Berkas-berkas tentang organisasi dan pelaksanaan tugas dari Departemen Kehakiman (berdasarkan garis besarnya), advis dan laporan dari Direktur Kehakiman dapat ditemukan dengan bantuan akses (*indices* ‘indeks’) di *openbaar archief* (arsip umum), dalam rubrik-rubrik berikut:

- a. Periode 1850-1900** (kode akses 2.10.02; 2.10.10): ‘(Benoeming van) ambtenaren (in O.-Indië)’ (Pengangkatan para pegawai di Hindia-Timur); ‘Boedels en nalatenschappen in O.-Indië’ (Harta benda dan warisan / peninggalan di Hindia-Timur); ‘Boeken en geschriften’ (Buku dan tulisan); ‘Burgerlijke stand’ (Kantor catatan sipil); ‘Drukkerijen en dagbladen’ (Percetakan dan surat kabar harian); ‘Druipers’ (Media cetak); ‘Gevangenissen’ (Penjara); ‘Huwelijken’ (Pernikahan); ‘Justitiwezen in O. -Indië’ (Sistem yustisi di Hindia-Timur); Naamloze maatschappijen / vennootschappen (Perseroan terbatas); ‘Nalatenschappen’ (Warisan / peninggalan); ‘Onlusten in O. -Indië’ (Kerusuhan di Hindia-Timur); ‘Paspoorten’ (Paspor); ‘Rechtswezen’ (Sistem hukum);

‘Slavenstand’ (Kaum budak); ‘Slavenhandel’ (Perdagangan budak); ‘Slavernij en zeeroof’ (Perbudakan dan perompakan); ‘Statistiek’ (Statistik).

Nomor inventaris 9195-9198 (kode akses 2.10.02) berisi pelbagai agenda dan register kata kunci pada berkas-berkas tentang ‘wees- en boedelkamers in Nederlandsch-Indië 1897-1898’ (balai harta benda dan warisan / peninggalan di Hindia-Belanda 1897-1898), dan sebuah register kata kunci pada ‘erflaters 1825-1886’ (yang mewariskan 1825-1886). Dalam akses-akses ini diacu ke arsip-arsip verbal dan Javasche Couranten.

b. Periode setelah tahun 1900 (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03): ‘Ambtenaren’ (Para pegawai pemerintah); ‘Arbeidsaangelegenheden’ (Perihal perburuhan); ‘Arbeidsinspectie, kolonisatie, landverhuizing, koelies’ (Inspeksi buruh, kolonisasi, emigrasi, kuli); ‘Armenzorg (- en opvoedingswezen, loterijen)’ (Perawatan orang miskin dan sistem pendidikan, lotere); ‘Bannelingen’ (Orang-orang buangan); ‘(Bestrijding) handel in vrouwen en kinderen en van de handel in ontuchtige uitgaven’ (Pemberantasan perdagangan perempuan dan anak dan perdagangan tindakan asusila); ‘Boeken en geschriften’ (Buku dan tulisan); ‘Burgerlijke stand’ (Kantor catatan sipil); ‘Dactyloscopie’ (Pemeriksaan sidik jari); ‘Departementen van algemeen bestuur’ (Departemen-departemen pemerintahan umum); ‘Drukpers’ (Media cetak); ‘Gevangeniswezen’ (Urusan penjara); ‘Gratieverzoeken’ (Permohonan grasi); ‘Industriële eigendom, octrooien’ (Kepemilikan industrial, hak-hak paten); ‘In- en externeringsprocedures’ (Prosedur internering / pengiriman ke pengasingan dan eksternering / pengiriman ke pengasingan bagi orang yang bukan kelahiran Hindia); ‘Ingezetenen / ingezetenschap’ (Penduduk / kependudukan); ‘Kinderwetgeving’ (Perundang-undangan anak-anak); ‘Koelies’ (Kuli); ‘Loterijen’ (Lotere); ‘Naamloze vennootschappen (en verenigingen)’ (Perseroan terbatas dan perhimpunan); ‘Nalatenschappen’ (Warisan / peninggalan); ‘Naturalisatie’ (Naturalisasi); Notarisambt, wet op het -’ (Peraturan Jabatan Notaris); Octrooien (Hak-hak paten); ‘Onderdaanschap’ (Kewarganegaraan); ‘Onteigening’ (Pencabutan hak milik); ‘Opvoedingswezen (tucht-en)’ (Kesusilaan dan sistem pendidikan); ‘Pandelingschap, slavernij en -’ (Perihal perbudakan); ‘Paspoorten’ (Paspur); ‘Penitentiair congres’ (Kongres tentang penghukuman); ‘Persbreidel(ing)’ (Pengekangan / pembungkaman pers); ‘Politieke stromingen (en maatregelen)’ (Aliran politik dan tindakan); ‘Rechtswezen (in Oost-Indië)’ (Sistem hukum di Hindia-Timur); ‘Regering in de koloniën’ (Pemerintah di tanah jajahan); ‘Reisregeling’ (Peraturan perjalanan); ‘Revolutionaire woelingen’ (Gejolak revolusi); ‘Slavernij’ (Perbudakan); ‘Statistiek(en)’ (Statistik); ‘Toelating (/ verwijdering)’ (Yang diizinkan masuk / yang diusir keluar); ‘Uitleveringen’ (Penyerahan ekstradisi); ‘Vennootschappen’ (Perseroan); ‘Verenigingen’ (Perhimpunan); ‘Vreemde Oosterlingen’ (Orang-orang Timur-Asing); ‘Weeskamers’ (Balai harta peninggalan); ‘Werving, koelies’ (Perekrutan, kuli); ‘Zeeroof (slavernij en -)’ (Perbudakan dan perompakan).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang yustisi setelah tahun

1921, akses-akses *1ste afdeling* (bagian ke-1) dan *4de afdeling* (bagian ke-4) adalah penting: lihat kode akses 2.10.36.011.

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia) terutama setelah tahun 1900 dan serie *geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 berisi banyak berkas dari Direktur Kehakiman. Untuk periode 1850-1900, lihat kode akses 2.10.02. Untuk periode setelah tahun 1900, lihat kode akses 2.10.30.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

Advis dan laporan dari Direktur Kehakiman dimuat dalam publikasi-publikasi sumber berikut:

- R. C. Kwantes ed. (1975-1982), *De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Tjeenk Willink).
- S. L. van der Wal ed. (1967), *De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indië* (Groningen: Wolters).
- S. L. van der Wal ed. (1963), *Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940* (Groningen: Wolters).

2. Arsip mengenai ‘wetgeving van Nederlands-Indië (perundang-undangan Hindia-Belanda) 1830-1923’, kode akses 2.10.47

Menyangkut arsip-arsip dari ‘C.J. Scholten van Oud-Haarlem (antara lain Presiden dari Mahkamah Agung) 1839-1849’; ‘H.L. Wichers (antara lain Pengadilan Tinggi Sipil dan Militer) 1846-1849’; ‘Komisi undang-undang hukum pidana di Hindia-Belanda 1861 (cuplikan) dan Komisi khusus peninjauan hukum sipil dan pidana 1907-1923 (cuplikan)’.

3. Arsip ‘Staatscommissie voor slavenemancipatie (Komisi Pemerintah untuk emansipasi budak) 1853-1856’, kode akses 2.10.32

Nomor inventaris 19 s/d 21 menyangkut Hindia-Belanda.

4. Koleksi dari ‘Documentatiebureau voor Overzees Recht (Biro dokumentasi untuk Hukum Seberang Lautan) 1894-1958’, kode akses 2.20.61

Berisi berkas-berkas tentang ‘rechtspleging (pelaksanaan peradilan), rechtspraak (pengadilan), dan adatrecht (hukum adat)’.

5. Arsip pribadi C. van Vollenhoven 1886-1934, kode akses 2.21.169

Van Vollenhoven adalah gurubesar di bidang hukum adat di Leiden dan penulis dari karya acuan *Het adatrecht in Nederlandsch-Indië* (3 jilid, Leiden 1918-1933).

6. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Verslag van den Dienst der Arbeidsinspectie en Koeliewerving in Nederlandsch-Indië, 1912-1914 (Laporan Dinas Inspeksi Buruh dan Perekrutan kuli di Hindia-Belanda, 1912-1914), berlanjut sebagai *Verslag van den Dienst der Arbeidsinspectie in Nederlandsch-Indië, 1917-1922* (Laporan Dinas Inspeksi Buruh di Hindia-Belanda, 1917-1922), (Batavia), berlanjut sebagai *Verslag van den Dienst van de Arbeidsinspectie voor de Buitenwesten, 1923-1939* (Laporan Dinas Inspeksi Buruh untuk Wilayah Luar Jawa dan Madura, 1923-1939), (Batavia).

Verslag omtrent het beheer en den toestand van de landopvoedingsgestichten te Semarang, Malang, Ngawi en Tangerang gedurende de dienstjaren 1918-1928 (Laporan mengenai pengelolaan dan keadaan institusi-institusi pendidikan negeri di Semarang, Malang, Ngawi, dan Tangerang, 1918-1928), Pekalongan: Departement van Justitie.

Handelingen en bijlagen van de Volksraad (Notula dan lampiran dari Dewan Rakyat). Di dalamnya dimuat antara lain teks-teks pidato Direktur Kehakiman.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië (Lembaran Negara Hindia-Belanda)

Untuk berkas ini lihat: *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1870 no. 42; 1874 no. 302; 1903 no. 82; 1908 no. 399; 1912 no. 234; 1919 no. 2; 1924 no. 576.

Daftar Pustaka

Berg, L.W.C. van den (1898-1899), 'Levensbericht van mr. T.H. der Kinderen', *Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden* (Leiden), hlm. 158-210.

Biografisch Woordenboek van Nederland, versi digital, (<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/schriekejj>): lema *J.J. Schrieke* (Direktur Departemen Kehakiman 1929-1934).

Bruinink-Darlang, A.M.C. (1986), *Het penitentiair stelsel in Nederlands-Indië van 1905 tot 1940* (Alblasserdam: Kanters).

Catalogus der bibliotheek van het departement van Justitie (1909, 1913; Batavia: Landsdrukkerij).

Dekker, Albert dan Hanneke van Katwijk (1993), *Recht en rechtspraak in Nederlands-Indië* (KITLV serie werkdocumenten 12, Leiden: KITLV Uitgeverij).

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *Departementen van Algemeen* (I, hlm. 585-588); *Koelie / koeliecontract / koelieordonnanties* (II, hlm. 360-366); *Rechtswezen* (Sistem hukum) (III, hlm. 558-575; V, hlm. 52-55); *Slavernij* (III, hlm. 800-808); *Wees- en boedelkamers* (IV, hlm. 735-738).

Keuning, J. (1961), 'Het adatrecht en de rechtsbedeling over de inheemse bevolking', dalam: H. Baudet dan I.J. Brugmans, *Balans en beleid; Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië* (Assen: Van Gorcum), hlm. 223-237.

Kleintjes, Ph. (1932-33), *Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië* (Cetakan ke-6; Amsterdam: De Bussy), Bab III dan XXIII.

Vrijheid, H.M. (Pengolah, 1941), *De Nederlandsch-Indische wetboeken zooals zij zijn gewijzigd en aangevuld op 1 juli 1941 benevens de belangrijkste der tot hunne verklaring dienstige algemeene verordeningen, met verwijzing naar de betrekkelijke Nederlandsche, Fransche en Nederlandsch-Indische wetbepalingen* (Jilid 1, Soerabaya: Fuhri).

Waal, E. de (1867), *Aanteekeningen over koloniale onderwerpen, XI, De departementen van algemeen bestuur in Nederlandsch-Indië* (('s-Gravenhage: Nijhoff).



Dorpsbank (Bank desa), tempat meminjam uang dengan bunga (Robert van Niel 1984: di bagian belakang buku). Lihat Bab 5 dalam buku panduan ini.

IV Financiën (Keuangan)

33 Het Departement van Financiën (Departemen Keuangan)

Pembentukan departemen ini didasarkan pada Koninklijk Besluit (Keputusan Raja) tanggal 21 September 1866 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara 1866 no. 127), beberapa bulan sebelum Indische Comptabiliteitswet (Undang-Undang Perbendaharaan Hindia) mulai diberlakukan (1867). Undang-undang itu berisi ketentuan-ketentuan untuk penataan anggaran Hindia, yang menjadikan adanya penitikberatan atas posisi Hindia-Belanda sebagai unit pemerintahan yang tersendiri dalam kerajaan.

Departemen Keuangan bertanggung jawab atas dana dan pengeluaran. Dana terdiri dari hasil pajak langsung (antara lain pajak tanah) dan pajak tidak langsung (terutama bea masuk dan keluar, dan cukai); penjualan produk pemerintah seperti kopi dan Bankatin; hal-hal yang disewakan (opium);⁴³ dan hasil dari penjualan umum. Yang juga termasuk paket tugas departemen itu adalah melakukan pengawasan terhadap Landschapskassen (Kantor perbendaharaan negeri) dan Vendukantoren (Kantor Lelang); menyusun laporan perdagangan dan pelayaran (mulai tahun 1910 hanya perdagangan saja); menyusun rekening (umum) pendapatan dan pengeluaran, dan anggaran umum Hindia-Belanda. Anggaran itu ditentukan oleh *wetgevende macht* (kekuasaan legislatif) di Belanda.

Yang juga penting adalah keterlibatan departemen itu dalam ‘munt- en bankwezen’ (sistem mata uang dan perbankan). Antara Belanda dan Hindia ada ‘muntunie’ (kesatuan mata uang). Sesuai musyawarah dengan Javasche Bank (Bank Jawa), direktur Departemen Keuangan harus menjaga paritas dan stabilitas dari nilai tukar uang.

Awal Ethische Politiek (Politik Etis) bertepatan dengan periode kemajuan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang berkembang mempunyai dampak menguntungkan pada penerimaan pajak. Pada tahun 1900 kerja pengabdian di Jawa dan Madura digantikan dengan upeti perorangan. Geldhuishouding (pengaturan keuangan) meluas di kepulauan Hindia. Untuk mendorong perindustrian Indonesia didirikan pegadaian-pegadaian pemerintah di beberapa tempat. Di tempat itu barang bisa digadaikan untuk uang kontan. Rumah-rumah gadai tersebut berada di bawah Departemen Keuangan. Pemerintah Hindia berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara mendukung pelaksanaan pekerjaan yang rendabel. Untuk hal seperti itu uang bisa dipinjamkan. Dengan memperhitungkan masalah itu, anggaran tahun 1907 dibagi menjadi ‘pengeluaran biasa’ dan ‘pengeluaran luar biasa’. Ketika Hindia berstatus badan hukum pada tahun 1912, tanah jajahan bisa melakukan peminjaman secara mandiri. Pengelolaan *vaste schulden* (hutang jangka panjang) en *vlottende schulden* (hutang jangka pendek) ada di bawah Departemen Keuangan.

Krisis ekonomi tahun 1920 menunjukkan betapa rentannya Hindia terhadap gelombang konjungtur. Pengeluaran yang meningkat tajam setelah Perang Dunia Pertama, antara lain

⁴³ Lihat juga Bab 42 dalam buku panduan ini.

sehubungan dengan pembelian makanan yang diperlukan, tidak dapat dikaitkan langsung dengan menurunnya pendapatan. Dalam menghilangkan kekurangan anggaran belanja yang besar, Departemen Keuangan memainkan peran penting. Selama operasi penghematan itu, pemerintah menyadari perlunya untuk mempunyai suatu pengelolaan anggaran yang lebih baik dan lebih akurat. Hal tersebut menyebabkan dibentuknya Generale Thesaurie (Thesauri Umum) pada tahun 1924, yang bersama-sama dengan Gouvernementsaccountantsdienst (Dinas Akuntansi Pemerintahan) (1925) ditempatkan di bawah Departemen Keuangan.

Setelah krisis tahun 1929 dan depresi yang terjadi berikutnya, beban hutang meningkat sangat tinggi. Kesatuan mata uang menjadi tertekan. Ketegangan antara Batavia dan Den Haag makin memuncak. Dari Belanda ada desakan kuat untuk melakukan penghematan drastis dan pengembalian pinjaman. Hindia kewalahan dengan gulden yang mahal, sehingga ekspor sangat dikurangi. Suatu operasi konversi besar-besaran (1934-1938), yang sangat melibatkan direktur Departemen Keuangan, dan devaluasi gulden (1936) meringankan masalah itu.

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Berkas-berkas yang berhubungan dengan organisasi dan pelaksanaan tugas departemen (secara garis besar), advis-advis, dan laporan-laporan dari direktur Departemen Keuangan bisa ditemukan dengan menggunakan akses (*indices* 'indeks') dalam *openbaar archief* (arsip umum) di dalam rubrik:

- a. Periode 1850-1900** (kode akses 2.10.02; 2.10.10): 'Algemene Rekenkamer en comptabiliteit' (Badan pemeriksa keuangan dan keuangan negara); 'Ambtenaren' (Pegawai Pemerintah); 'Belasting in Oost-Indië / belastingen in het algemeen' (Pajak di Hindia-Timur / pajak pada umumnya); 'Benoeming van ambtenaren voor Oost-Indië' (Pengangkatan para pegawai pemerintahan untuk Hindia-Timur); 'Financiën en begroting van Oost-Indië' (Keuangan dan anggaran Hindia-Timur); 'Inkomende en uitgaande rechten in Oost-Indië / in- en uitgaande rechten en accijnzen' (Bea masuk dan keluar di Hindia-Belanda / bea dan cukai untuk masuk dan keluar); 'Invordering en uitbetaling van gelden' (Penagihan dan pembayaran uang); 'Javasche Bank' (Bank Jawa); 'Kasbeheer en wisseltrekking' (Pengelolaan kas dan penarikan / penguangan wesel); 'Kortingen' (Pemotongan); 'Kwijtscheldingen' (Penghapusan hutang); 'Landrente' (Pajak tanah); 'Leningen' (Peminjaman); 'Muntwezen in Oost-Indië' (Sistem keuangan di Hindia-Timur); 'Oost-Indische begroting' (Anggaran Hindia-Timur); 'Opium(pacht in Oost-Indië)' (Pengaturan perdagangan opium di Hindia-Timur); 'Pensioenen van ambtenaren voor Oost-Indië' (Pensiun pegawai pemerintah untuk Hindia-Timur); 'Staatsbegroting'

(Anggaran negara); ‘Successierechten’ (Pajak warisan); ‘Verkoop van producten’ (Penjualan produk); ‘Verpachtingen in Oost-Indië / verpachte middelen’ (Penyewaan di Hindia-Timur / hal-hal yang disewakan); ‘Wissels van Oost-Indië’ (Sistem perweselan di Hindia-Timur); ‘Zeebrieven en uitklaringen’ (Surat laut dan surat perizinan ekspor); ‘Zegel en leges’ (Cap / materai dan biaya administrasi).

- b. Periode setelah tahun 1900** (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03): ‘Accijnzen (in- en uitgaande rechten en -; in en uitvoerrechten en -)’ (Cukai: bea masuk dan keluar; bea impor dan ekspor); ‘Accountants’ (Akuntan); ‘Algemene Rekenkamer en Comptabiliteit’ (Badan Pemeriksa Keuangan dan Perbendaharaan Negara); ‘Ambtenaren (belastingen / in- en uitvoerrechten accijnzen / pandhuisdienst) (Pegawai pemerintahan: pajak / bea cukai masuk dan keluar / dinas rumah pegadaian); ‘Bank, Javasche’ (Bank Jawa); ‘Bankwezen (Nederlandsch-Indisch)’ (Perbankan Hindia-Belanda); ‘Begroting (comptabiliteit en -; Oost-Indische-)’ (Anggaran: perbendaharaan negara dan anggaran; anggaran Hindia-Timur); ‘Begrotingsaangelegenheden / kwesties’ (Perihal / permasalahan penganggaran); ‘Belasting(en) / belastingwezen’ (Pajak-pajak / sistem perpajakan); ‘Bestuur (binnenlands)’ (Pemerintahan dalam negeri); ‘Bezoldigingen’ (Penggajian); ‘Bezuiniging’ (Penghematan / perampingan); ‘Financiële aangelegenheden / financieel beheer’ (Perihal keuangan / pengelolaan keuangan); ‘Inkomsten (onverpachte middelen en -)’ (Hal-hal yang tidak disewakan dan pendapatan); ‘Invoerrechten’ (Bea masuk); ‘Invorderingen en belastingschuld’ (Penagihan dan hutang pajak); ‘Kasbeheer (en wisseltrekking)’ (Pengelolaan kas dan penarikan wesel); ‘Koersen (wissel-)’ (Kurs wesel); ‘Kwijtscheldingen en dispensatiën’ (Penghapusan hutang dan dispensasi); ‘Landrente’ (Sewa tanah); ‘Landschapskassen’ (Kantor perbendaharaan negeri); ‘Muntwezen’ (Sistem mata uang); ‘Opium(fabriek)’ (Pabrik opium); ‘Pandhuizen’ (Rumah pegadaian); ‘Pensioenen / pensioenfondsen’ (Pensiun / Dana pensiun); ‘Salarissen’ (Gaji); ‘Schuld (Indische-; vlottende-)’ (Hutang Hindia; Hutang jangka pendek); ‘Successierechten’ (Pajak warisan); ‘Tolrechten’ (Bea pemungutan tol); ‘Venduhuizen’ (Rumah lelang); ‘Verkoop van producten’ (Penjualan produk); ‘Verpachte middelen’ (Hal-hal yang disewakan); ‘Verponding’ (Pajak atas tanah dan bangunan); ‘Zegels en leges / zegel-recht’ (Cap / materai dan biaya administrasi); ‘Zoutregie’ (Jawatan pengaturan garam).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks-indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang perihal keuangan sesudah tahun 1921, akses-akses *2de en 3de afdeling* (bagian ke-2 dan ke-3) sangat penting, yaitu ‘geldwezen en belastingen’ (sistem keuangan dan pajak); ‘begrotingen en comptabiliteit’ (anggaran dan perbendaharaan); lihat kode akses 2.10.36.011.

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia) mulai tahun 1850 serta *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 memuat berkas-berkas dari direktur Departemen Keuangan. Lihat kode akses 2.10.02; 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.26.07.

Laporan dan advis direktur Departemen Keuangan tercantum dalam publikasi sumber:

- P. Creutzberg (1972-1975), *Het ekonomisch beleid in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Wolters-Noordhoff)

2. Arsip pribadi B.C. de Jonge, 1885-1958, kode akses 2.21.095

Di dalam arsip ini antara lain dapat ditemukan notula rapat-rapat luar biasa Raad van Indië (Dewan Hindia) yang membicarakan anggaran untuk tahun 1933 sampai 1937 dan situasi ekonomi pada waktu itu (nomor inventaris 82-83). Direktur Departemen Keuangan hadir dalam rapat-rapat tersebut.

3. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

De circulaires en beschikkingen van het departement van Financiën (Surat edaran dan keputusan-keputusan departemen Keuangan), 1875-1933 (Batavia).

Statistiek van den handel, de scheepvaart en de in- en uitvoerrechten in Nederlandsch-Indië (Statistik perdagangan, pelayaran, dan bea impor dan ekspor), 1877-1925 (Batavia), yang kemudian diteruskan menjadi *Jaaroverzichten van den in- en uitvoer van Nederlandsch-Indië gedurende de jaren 1925 tot 1942* (Laporan tahunan impor dan ekspor Hindia Belanda pada periode 1925 sampai 1942), samengesteld door het Centraal Kantoor voor de Statistiek, Weltevreden (disusun oleh Kantor Pusat Statistik, Bogor).

Verslag betreffende den (van den) Gouvernements-pandhuisdienst over het (dienst)jaar ... (Laporan mengenai dinas rumah pegadaian Pemerintah), 1902-1940 (Batavia).

Handelingen en bijlagen van de Volksraad (Notula dan lampiran dari Dewan Rakyat)
Di dalamnya antara lain ada teks pidato direktur Keuangan. Dalam lampiran ada berkas-berkas anggaran.

Handelingen en bijlagen van de Staten-Generaal (Notula dan lampiran dari Dewan Perwakilan)

Untuk penanganan dan penetapan ‘Indische begroting’ (anggaran Hindia).

Staatsblad van Nederlandsch-Indië, met Bijbladen (Lembaran Negara Hindia-Belanda, dengan Lembaran Tambahan)

Untuk berkas ini dipakai: *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1866 no.127; 1878 no. 11; 1907 no. 406; 1910 no. 193; 1919 no. 2; 1924 no. 576; 1925 no. 345; 1933 no. 509.

Daftar Pustaka

Anrooij, Francien van (1979), 'Crisis en financieel beleid in Nederlandsch-Indië (1920-1925)', dalam: Francien van Anrooij dkk. ed., *Between people and statistics. Essays on modern Indonesian history presented to P. Creutzberg* (Den Haag: Nijhoff), hlm. 119-132.

Biografisch Woordenboek van Nederland, versi digital, (<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/wellenstein>): lema *E.P. Wellenstein* (penjabat direktur Departemen Keuangan 1919-1920) dan (<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn4/goetzen>: lema *L. Götzen* (penjabat direktur Departemen Keuangan 1938-1942).

Bree, L. de, (1928-1930), *Gedenkboek van de Javasche Bank 1828 – 24 januari – 1928*. (2 jilid, Weltevreden: Kolff)

Creutzberg, P. (1972-1975), *Het ekonomisch beleid in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Wolters-Noordhoff)
Pengantar pada bab-bab: 'Leningbevoegdheid', 'Muntwezen', 'Financiële en monetaire vraagstukken in het kielzog van de expansie na 1900'.

Creutzberg, P. dkk. (1976), *Public finance 1816-1939* (Den Haag: Nijhoff).
Catatan: jilid 2 seri *Changing economy in Indonesia*.

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *Departementen van algemeen bestuur* (I, hlm. 585-588); lema *Accountantsdienst (gouvernements)* (I, hlm. 5-6; VI, hlm. 822-824); *Javasche Bank* (I, hlm. 145-158); *Kasbeheer* (II, hlm. 280-283); *Pandhuisdienst* (III, hlm. 284-285); *Verkopingen (openbare), verhuringen, venduties, vendukantoren* (IV, hlm. 557-561; VII, hlm. 1344-1346); *Zeebrieven dan jaarpassen* (IV, hlm. 815).

Keller, G. (1898-1899), 'Levensbericht van H.J. Bool', *Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden*, hlm. 31-56.
Catatan: Bool adalah direktur Departemen Keuangan pada tahun 1872-1874.

Kleintjes, Ph. (1932-33), *Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië* (Cetakan ke-6; Amsterdam: De Bussy), Bab XXIV dan XXV.

Waal, E. de (1867), *Aanteekeningen over koloniale onderwerpen, XI, De departementen van algemeen bestuur in Nederlandsch-Indië* ('s-Gravenhage: Nijhoff).



Tjong A Fie, *majoer der Chinezen* (Mayor Cina) di Medan dan *Adviseur-honorair voor Chinese Zaken* (Penasihat honorer untuk Urusan Cina) (Koleksi foto KITLV no. 3595). Lihat Bab 18 dalam buku panduan ini.

**V Landbouw, Nijverheid, Handel en Economische
Zaken (Pertanian, Industri Kerajinan, Perdagangan,
dan Urusan Ekonomi)**

34 **Het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan)**

Dalam dua dekade terakhir abad ke-19, Hindia dilanda krisis ekonomi. Jumlah penduduk Indonesia meningkat pesat. Tingkat kemakmuran menurun. Di Troonrede (Pidato tahunan kerajaan) pada tahun 1901, diberitakan tentang penyelidikan terhadap penyebab ‘mindere welvaart’ (kemakmuran yang kurang).

Mendahului hasil penelitian itu, pemerintah berusaha sungguh-sungguh memperbaiki kehidupan ekonomi. Dengan Koninklijk Besluit (Keputusan Raja) tanggal 28 Juli 1904, Departement van Landbouw (Departemen Pertanian) didirikan (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1904 no. 380). Prof.dr. Melchior Treub, direktur Plantentuin (Kebun Raya) di Buitenzorg (Bogor), mengepalai departemen itu (1904-1909). Departemen baru itu mengambil alih tugas-tugas dari Departement van Binnenlands Bestuur / BB (Departemen Pemerintahan Dalam Negeri) dan Departement van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid / OEN (Departemen Pendidikan, Ibadah, dan Industri Kerajinan). Departemen BB selain melepaskan ‘landbouw’ (pertanian) juga ‘veeteelt’ (peternakan) dan ‘paardenfokkerij’ (penangkaran kuda), ‘gouvernementskoffiecultuur’ (budidaya kopi pemerintah), ‘boswezen’ (perhutanan), ‘uitroeijing van schadelijk gedierte’ (pemusnahan hama), dan beberapa tahun kemudian (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1910 no. 253) pengelolaan ‘vogelnestklippen’ (sarang burung walet), ‘vleermuizengrotten’ (gua kelelawar), dan ‘schildpadeieren’ (telur penyu). Departemen OEN menyerahkan ‘landbouwonderwijs’ (pendidikan pertanian), ‘visserij’ (perikanan), ‘Plantentuin’ (Kebun Raya), ‘natuurwetenschappelijk onderzoek’ (penelitian ilmu alam), hubungan-hubungan dengan lembaga-lembaga ilmiah, dan penerbitan publikasi bidang-bidang penelitian ilmiah yang tersebut itu.⁴⁴

Peluasan keahlian dan penerapan metode dan teknik baru di bidang pertanian memiliki prioritas. Anak laki-laki dari keluarga bupati dan dari kelas menengah yang pada saat itu bermunculan, dilatih menjadi guru pertanian. Sesuai permusyawaratan dengan Departemen OEN, bidang ‘landbouwhuishoudkunde’ (ilmu tata kelola pertanian) dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran *volksschool* (sekolah dasar rakyat) dan *Opleidingsscholen voor Inlandse Ambtenaren* (Sekolah Pendidikan untuk Pegawai Pemerintahan Pribumi). Di sana-sini dibangun lahan demonstrasi, tempat para petani di bawah bimbingan pengawas Indonesia mendapatkan pengarahan secara langsung. Landbouwvoorlichtingsdienst (Dinas Penyuluhan Pertanian) bekerja sama dengan Irrigatiedienst van het Departement van Burgerlijke Openbare Werken (Jawatan Irigasi dari Departemen Pekerjaan Umum Sipil). Para pejabat pemerintahan dengan pengetahuan mereka yang luas tentang negeri dan rakyat memberikan advis dan menjadi perantara.

⁴⁴ Lihat Bab 1, 3, dan 21.

Setelah tahun 1900, perbaikan ekonomi menunjukkan peningkatan. Hal itu membawa dampak yang menguntungkan dalam perdagangan. Pada saat yang sama, pemerintah berusaha merangsang industri pribumi. Dalam rangka ini, Afdeling Nijverheid en Handel (Bagian Industri Kerajinan dan Perdagangan) pada tahun 1911 dipindahkan dari Departemen OEN ke Departement van Landbouw (Departemen Pertanian) (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1911 no. 467, 480, 482). Departemen BB bertanggung jawab atas pendirian pabrik. Sebagian dari urusan perdagangan tetap berada di bawah Departement van Financiën (Departemen Keuangan).

Pada akhir Perang Dunia Pertama (1914-1918), Departemen Pertanian memainkan peranan penting dalam penyediaan pangan. Karena kegagalan panen di Asia Tenggara dan hambatan-hambatan pada lalu-lintas pelayaran, maka bahaya kelaparan mengancam. Melalui sistem pembelian beras borongan dan sistem distribusi beras, perdagangan partikular disisihkan dan kenaikan harga dapat dicegah. Penanaman tanaman pangan pribumi, juga tanaman pengganti seperti singkong dan jagung, diperluas sebanyak mungkin. Dengan itu, pentingnya statistik yang baik diakui. Bagian statistik dari departemen-departemen lain digabungkan bersama-sama dengan Afdeling Handels- en Landbouwstatistiek van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel / LNH (Bagian Statistik Perdagangan dan Pertanian dari Departemen Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan) menjadi Centraal Kantoor voor de Statistiek (Kantor Pusat Statistik) pada tahun 1925. Kantor itu antara lain juga menyelenggarakan sensus penduduk pada tahun 1930.

Krisis ekonomi tahun 1929 dan depresi yang terjadi berikutnya membawa kesadaran bahwa ‘de oude beginselen van open deur en vrije handel plaats moesten maken voor een geleide economie’ (prinsip-prinsip kuno yang didasarkan pada kebijakan membuka pintu dan perdagangan bebas harus membuat jalan bagi ekonomi terpimpin), sebagaimana diungkapkan oleh Gubernur-Jenderal B.C. de Jonge (1931-1936) dalam *Herinneringen* (Kenang-kenangan) yang ditulisnya.⁴⁵

Perubahan arah ini dilaksanakan dalam bentuk reorganisasi departemen, sehingga pada tahun 1933 Departemen LNH berubah menjadi Departement van Economische Zaken (Departemen Urusan Ekonomi).

⁴⁵ S.L. van der Wal ed. (1968), *Herinneringen van jhr. mr. B.C. de Jonge, met brieven uit zijn nalatenschap* (Groningen: Wolters-Noordhoff), hlm. 187.

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1900

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Berkas-berkas tentang organisasi dan pelaksanaan tugas departemen (secara garis besar), advis dan laporan dari direktur LNH dapat ditemukan dengan menggunakan akses (*indices* 'indeks') di *openbaar archief* (arsip umum), dalam rubrik-rubrik berikut:

a. Periode setelah 1900 (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03): 'Agrarische aangelegenheden / zaken' (Perihal agraria); 'Ambtenaren (bij het boswezen; landbouw)' (Pegawai Pemerintahan: perhutanan; pertanian); 'Bedrijvenwetten' (Undang-Undang perusahaan); 'Boeken en geschriften' (Buku dan tulisan); 'Bosbouw / Boswezen (congressen)' (Perhutanan: kongres-kongres); 'Botanische congressen' (Kongres-kongres Botani); '(Internationale) Conferenties, congressen' (Konferensi, kongres internasional); 'Consulaire zaken' (Urusan konsuler); 'Cultures' (Budidaya tanaman); '(Politieke en Economische toestand / zaken / rapporten en statistieken' (Situasi / hal / laporan politik dan ekonomi); 'Handel (binnenlandse; - en scheepvaart; - en nijverheid)' (Perdagangan: dalam negeri; perdagangan dan pelayaran; perdagangan dan industri kerajinan); 'Begroting dep. LNH' (Anggaran Departemen LNH); 'Handelspolitiek (-voorlichting; -wetgeving)' (Politik perdagangan: penerangan; perundang-undangan); 'Indische Centrale Aanschaffingsdienst' (Dinas Pengadaan Pusat Hindia); 'Industriële eigendom' (Milik industrial)⁴⁶; 'In- en uitvoer' (impor dan ekspor); 'Kamers van Koophandel' (Kamar Dagang); 'Kina'; 'Koffie' (Kopi); 'Landbouw (- en tuinbouw; -instellingen; -verdragen)' (Pertanian dan perkebunan; Lembaga-lembaga pertanian; Perjanjian pertanian); 'Nijverheid' (Industri); 'Rubber' (Karet); 'Rijst (politiek)' (Politik beras); 'Statistiek' (Statistik); 'Suiker' (Gula); 'Thee' (Teh); 'Veeteelt (en veeartsenijkunde)' (Pternakan dan ilmu kehewan); 'Veterinaire dienst' (Dinas Veteriner); 'Visserij' (Perikanan); 'Voedselvoorziening' (Sarana Pangan); 'Welvaartsdiensten' (Dinas Kemakmuran); 'Ijkwezen' (Jawatan Tera).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks-indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang *landbouw, nijverheid en handel* (pertanian, industri kerajinan, dan perdagangan) sesudah tahun 1921, akses *4de afdeling* (bagian ke-4) sangat penting: lihat kode akses 2.10.36.011.

Berkas-berkas dari direktur Departemen LNH juga dapat ditemukan dalam *geheim- en kabinetsarchief* (arsip kabinet dan rahasia) serta di dalam *serie geheime mailrapporten* (seri

⁴⁶ Bagian kebijakan ini pada tahun 1924 beralih ke Departement van Justitie (Departemen Kehakiman).

laporan surat rahasia) mulai tahun 1914. Lihat kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

Laporan dan advis dari direktur LNH dimuat dalam publikasi-publikasi sumber:

- P. Creutzberg ed. (1972-1975), *Het ekonomisch beleid in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Wolters-Noordhoff).
- S. L. van der Wal ed. (1963), *Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940* (Groningen: Wolters).

2. Arsip pribadi H.M. Gutteling, 1906-1960, kode akses 2.21.205.21

Gutteling bekerja di Departemen LNH dan di suatu balai penelitian padi. Dia adalah seorang konsultan pertanian dan juga seorang guru pertanian pada *Nederlandsch-Indische Veeartsenschool* (Sekolah Pendidikan Kedokteran Hewan) di Buitenzorg (Bogor).

3. Arsip pribadi C.G.G.J. van Steenis, 1917-1986, kode akses 2.21.205.61

Van Steenis adalah seorang pakar botani yang bekerja antara lain di Kebun Raya Bogor.

4. Arsip pribadi Th. Wurth, 1893-1918, Kumpulan Perolehan para pegawai pemerintahan Hindia, kode akses 2.22.09, lampiran 13

Wurth adalah seorang direktur dari balai penelitian partikulier di Malang (Jawa Timur) yang terutama mengadakan penelitian terhadap budidaya tanaman kopi. Balai-balai penelitian partikulier bekerja sama dengan Departemen LNH.

5. Arsip pribadi J.W. Meijer Ranneft, 1907-1967, kode akses 2.21.121

Memuat berkas-berkas tentang keanggotaannya pada *Economische Commissie* (Komisi Ekonomi), yang didirikan oleh gubernur-jenderal melalui keputusan tanggal 16 oktober 1931 nomor 12. Komisi tersebut, di mana direktur Departemen LNH juga menjadi salah seorang anggotanya, bertugas memberikan keterangan kepada pemerintah Hindia mengenai masalah-masalah sosial-ekonomi (nomor inventaris 91-92).

6. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Economisch Weekblad voor Nederlandsch-Indië, orgaan van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel / Departement van Economische Zaken (Majalah Mingguan Ekonomi untuk Hindia-Belanda, majalah dari Departemen Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan), 1932-1946 (Batavia).

Memuat antara lain ‘landbouweconomische verslagen’ (laporan-laporan ekonomi pertanian); ‘persberichten met betrekking tot Oost-Azië, verzameld door de Dienst voor Oost-Aziatische Zaken en diens rechtsvoorgangers’ (berita-berita pers yang berkaitan dengan Asia Timur, yang dikumpulkan oleh Dinas Urusan Asia-Timur dan lembaga hukum pendahulunya); ‘marktberichten’ (berita pasar); ‘statistieke gegevens zoals wisselkoersen en opbrengsten van landsmiddelen’ (data statistik seperti nilai tukar uang dan hasil dari barang milik negara).

Handelingen en bijlagen van de Volksraad (Notula dan lampiran dari Dewan Rakyat)
Termasuk di dalamnya teks-teks pidato direktur Departemen LNH.

Jaarboeken van het Departement van Landbouw / Landbouw, Nijverheid en Handel in Nederlandsch-Indië (Buku Tahunan Departemen Pertanian / Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan), 1907-1930 (Weltevreden).

Memuat data dari bagian-bagian di departemen, juga dinas-dinas yang ada di bawah departemen itu, laboratorium, balai penelitian, dan perusahaan-perusahaan.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië (Lembaran Negara Hindia-Belanda)

Untuk berkas ini dipakai *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1904 no. 380; 1910 no. 253; 1911 no. 467; 1911 no. 480; 1911 nr. 482; 1914 no. 194; 1918 no. 583; 1919 no. 2; 1924 no. 576; 1925 no. 345.

Daftar Pustaka

Bernard, Ch.J. (1930), *Gedenkschrift ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel 1905-1930* (Weltevreden: Kolff).

Biografisch Woordenboek van Nederland, versi digital.

Tentang para direktur Landbouw, Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan): (<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/treub>): lema *M. Treub*; (<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/lovink>): lema *H.J. Lovink*; (<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/rutgersaal>): lema *A.A.L. Rutgers*; (<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/wellenstein>): lema *E.P. Wellenstein*.

Tentang direktur pertama Centraal Kantoor voor de Statistiek (Kantor Pusat Statistik): (<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/gelderen>): lema *J. van Gelderen*.

Boomgaard, P. (1986), ‘The Welfare Services in Indonesia 1900-1942’, *Itinerario* X no. 1, hlm. 57-81.

Creutzberg, P. (1972-1975), *Het economisch beleid in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Wolters-Noordhoff)

Pengantar pada Bab ‘Welvaartsplannen’ (Rencana Kemakmuran) dan Bab ‘Rijst’ (Beras).

Dijk, Kees Van (2007), *The Netherlands Indies and the Great War, 1914-1918* (Leiden: KITLV Press).

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *Departementen van algemeen bestuur* (I, hlm. 585-588) dan lema *Statistiek* (IV, hlm. 103-108).

Mansvelt, W.M.F., P. Creutzberg, dkk. (1975-1996), *Changing economy in Indonesia; A selection of statistical source material from the early 19th century up to 1940* (16 jilid; Den Haag: Nijhoff).

Catatan: antara lain berkaitan dengan perihal ‘boswezen’ (perhutanan), ‘handel’ (perdagangan), ‘nijverheid’ (perindustrian), ‘rijstprijzen’ (harga beras), ‘bevolkingsgroei’ (pertumbuhan penduduk).

Oorschot, H.J. van (1956), *De ontwikkeling van de nijverheid in Indonesië* (Den Haag-Bandoeng: Van Hoeve).

Perk, A. (1957), *Historische ontwikkeling van de landbouwvoorlichting in Indonesië* (5 jilid; Wageningen).

Prince, Gé (1989), ‘Dutch economic policy in Indonesia, 1870-1942’, dalam: Angus Maddison dan Gé Prince, *Economic growth in Indonesia 1820-1940* (Dordrecht-Holland / Providence-U.S.A.: Foris), hlm. 203-226.

Vries, E. de (1961), ‘De welvaartsdiensten’, dalam: H. Baudet dan I.J. Brugmans, *Balans van beleid; Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië* (Assen: Van Gorcum), hlm. 267-289.

Wal, S.L. van der ed. (1968), *Herinneringen van jhr. mr. B.C. de Jonge, met brieven uit zijn nalatenschap* (Groningen: Wolters-Noordhoff).

35 **Het Departement van Economische Zaken (Departemen Urusan Ekonomi)**

Dengan Gouvernementsbesluit (Keputusan Pemerintah) tanggal 22 Desember 1933 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1933 no. 509), Departement van Economische Zaken / EZ (Departemen Urusan Ekonomi) didirikan. Departemen itu mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1934. Krisis ekonomi tahun 1929 dan depresi yang terjadi berikutnya sangat memukul Hindia-Belanda. Ekspor produk pertanian dan bahan baku merosot tajam. Nilai gulden yang mahal pada saat itu adalah bencana bagi Hindia. Persediaan menumpuk. Pendapatan baik dari perusahaan besar barat maupun dari pertanian rakyat Indonesia menurun. Karyawan dipecat dalam skala besar. Industri Indonesia, terutama masih merupakan industri rumah, terancam oleh impor besar tekstil Jepang yang murah. Desa-desa tidak bisa lagi menyerap pengangguran. Pemerintah mendapat penghasilan yang kurang dari pajak dan penjualan produk pemerintah. Departemen baru tersebut merupakan alat penting dalam usaha membelokkan arah spiral yang menurun.

Paket tugas Departemen EZ sebagian besar diambil alih dari Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel / LNH (Departemen Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan). Lapangan kerjanya meliputi ‘land- en tuinbouw’ (pertanian dan perkebunan), ‘veeteelt en visserij’ (peternakan dan perikanan). Dengan mengadakan penyuluhan, pendidikan (terutama pendidikan pertanian), dan penelitian diharapkan ada peningkatan kualitas dan peningkatan produksi. Departemen itu juga mengeluarkan perizinan untuk memancing antara lain kerang mutiara dan bunga karang, dan juga memberikan ‘huur- of pachtcontracten’ (kontrak sewa) untuk pengumpulan sarang burung yang dapat dimakan (walet), kelelawar, dan sarang telur penyu. Pengamatan perdagangan dalam dan luar negeri dimasukkan dalam statistik perdagangan. Materi statistik lainnya juga dikumpulkan. Sebagai ilustrasi untuk perubahan dari kebijakan *laissez-faire* menuju kebijakan ekonomi terpimpin adalah kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap perdagangan, budidaya tanaman, dan industri ‘di dalam keadaan luar biasa’. Industri besar dan eceran dalam negeri juga harus dimajukan. Dari Departement van Gouvernementsbedrijven (Departemen Perusahaan Pemerintah) diambil alih: ‘het beheer van landsonderneming van land- en mijn bouw’ (pengelolaan perusahaan negara pertanian dan pertambangan); ‘de verkoop van de betreffende producten’ (penjualan produk dari perusahaan itu); dan ‘de landsdrukkerij’ (percetakan negara). Yang terakhir: ‘boswezen’ (perhutanan) dan ‘ijkwezen’ (jawatan tera) ditempatkan bersama ‘centrale aanschaffingsdienst’ (dinas pengadaan pusat) pada Departemen EZ.

Di dalam Departemen EZ, kepala kepegawaian memegang peran terpenting. Bersama dengan staf kecil, dia membantu direktur dan mengatur agar tugas terpenuhi secara efisien. H.J. Mook adalah orang pertama yang menempati pos ini, yang baginya adalah merupakan batu loncatan menuju Direktorat EZ (1937).

Bersama dengan para pegawai dari kementerian Belanda (Kementerian Urusan Tanah Jajahan, Kementerian Urusan Ekonomi), Direktur Departemen EZ ikut ambil bagian dalam pertemuan-pertemuan internasional yang membuat perjanjian-perjanjian mengenai pemasokan kuota karet, gula, teh, dan timah. Melalui *contingentering* (sistem kuota) diharapkan proses produksi sebagian aman dan dengan demikian bisa menjamin persentase tertentu bagi kesempatan kerja dan pendapatan. Di dalam negeri, penerapan pembatasan itu dimusyawarahkan dengan berbagai organisasi payung dalam dunia usaha: Indische Ondernemersbond (Perhimpunan Pengusaha Hindia), Nederlandsch-Indische Vereeniging voor de Afzet van Suiker (Persatuan Hindia-Belanda untuk Pemasaran Gula), Algemeen Landbouwsyndicaat (Sindikatan Pertanian Umum), dan Algemeene Vereeniging voor Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (Perhimpunan Umum Pengusaha Perkebunan Karet di Pantai Timur Sumatera). Pemimpin dari kedua organisasi yang terakhir itu ikut bekerja sama dalam pembuatan peraturan baru. Dengan pemberian lisensi individual yang didasarkan pada penelitian terperinci, diusahakan agar budidaya karet rakyat dapat dipertahankan tingkatnya. Dalam perdagangan sistem kuota juga diterapkan. Dengan musyawarah bersama para mitra dagang, EZ berusaha untuk menghubungkan *afzetquota* (kuota pemasaran) produk-produk Indonesia pada kuota impor. Dengan Jepang dilakukan perundingan yang berjalan tersendat-sendat mengenai pembatasan impor tekstil murah demi melindungi industri tenun Indonesia yang bermunculan: perundingan itu menyebabkan adanya perjanjian tahun 1936 dan 1937. Dengan Belanda juga diadakan perundingan, antara lain tentang impor terbatas tekstil Twente. Den Haag menunjukkan sedikit pengertian. Sikap itu, dikombinasikan dengan terlalu lama dipertahankannya sistem *gouden standaard* (standar emas), mengakibatkan meningkatnya ketegangan. Pada tahun 1936 delegasi resmi pemerintah di bawah pimpinan Direktur Departemen EZ G.H.C. Hart, mantan ketua Indische Ondernemersbond (Perhimpunan Pengusaha Hindia), pergi ke Belanda untuk membahas kerja sama ekonomi yang lebih baik. Pada kesempatan itu Den Haag memutuskan untuk mengambil alih hutang pemerintah Hindia sebesar 25 juta gulden. Jumlah itu harus digunakan untuk menjalankan langkah-langkah yang akan bisa meningkatkan kemakmuran. Banyak perhatian diberikan pada penjaan agar harga beras tetap rendah. Hal itu dimungkinkan dengan manipulasi persediaan yang ada, pembelian lokal yang terarah dan pembatasan impor. Pengalaman distribusi pangan yang diperoleh menjelang akhir dan sesaat setelah Perang Dunia Pertama, sangat berguna pada tahun 30-an.

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1900

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Berkas-berkas tentang organisasi dan pelaksanaan tugas departemen (secara garis besar), tentang advis dan laporan direktur EZ dapat ditemukan dengan menggunakan akses (*indices* 'indeks') di *openbaar archief* (arsip umum), dalam rubrik-rubrik berikut:

a. Periode setelah 1900 (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03):

'Agrarische aangelegenheden / zaken' (Perihal agraria); 'Ambtenaren' (Pegawai pemerintahan); 'Bedrijfsreglementeringen' (Pengaturan usaha); 'Bedrijvenwetten' (Undang-Undang perusahaan); 'Bodemkunde' (Ilmu tanah); 'Bosbouw / Boswezen (congressen)' (Perhutanan: kongres-kongres); 'Botanische congressen' (Kongres-kongres Botani); '(Internationale) Conferenties, congressen' (Konferensi, kongres internasional); 'Consulaire zaken' (Urusan konsuler); 'Cultures' (Budidaya tanaman); '(Politieke en Economische toestand / zaken / rapporten en statistieken' (Situasi / hal / laporan politik dan ekonomi); 'Handel (binnenlandse; - en scheepvaart)' (Perdagangan: dalam negeri; perdagangan dan pelayaran); 'Indische Centrale Aanschaffingsdienst' (Dinas Pengadaan Pusat Hindia); 'In- en uitvoer' (impor dan ekspor); 'Kamers van Koophandel' (Kamar Dagang); Kina; 'Koffie' (Kopi); 'Landbouw (- en tuinbouw; -internationale instellingen; - verdragen)' (Pertanian dan perkebunan; Lembaga-lembaga pertanian internasional; Perjanjian pertanian); 'Landsproducten' (Produk negeri); 'Mijnwezen' (Pertambangan); 'Nijverheid' (Industri); 'Rubber' (Karet); 'Rijst (politiek)' (Politik beras); 'Statistiek' (Statistik); 'Suiker' (Gula); 'Thee' (Teh); 'Tin' (Timah); 'Veeteelt (en veeartsenijkunde)' (Pternakan dan ilmu kehewananan); 'Veterinaire dienst' (Dinas Veteriner); 'Visserij' (Perikanan); 'Voedselvoorziening' (Sarana pangan); 'Welvaartsdiensten' (Dinas Kemakmuran); 'Ijkwezen' (Jawatan Tera).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks-indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang 'economische zaken' (urusan ekonomi) sesudah tahun 1921 akses-akses *4de afdeling* (bagian ke-4) sangat penting. Di dalam bagian itu, didirikan Bureau Economische Zaken (Biro Urusan Ekonomi) pada tahun 1933. Biro itu mengurus sendiri agendanya disertai register kata kunci. Pada tahun 1938, di *4de afdeling* ditambahkan satu biro lagi: Bureau Welvaartszaken (Biro Urusan Kemakmuran). Penanganan semua perihal yang termasuk dalam Departemen EZ dan perdagangan luar negeri, pada tahun 1938 ditempatkan di bagian baru, *8ste afdeling* (bagian ke-8). Lihat kode akses 2.10.36.011, halaman 25-29. Untuk berkas-berkas tentang pertambangan dan timah (bahkan sebelum tahun 1921) lihat akses dari *5de afdeling* (bagian ke-5) : kode akses 2.10.36.011, no. inventaris 620 dan 624-625.

Berkas-berkas dari direktur EZ juga dapat ditemukan dalam *geheim- en kabinetsarchief* (arsip kabinet dan rahasia) serta di dalam *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914. Lihat kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07.

Laporan dan advis dari direktur EZ dimuat dalam publikasi sumber:

- P. Creutzberg ed. (1972-1975), *Het economisch beleid in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Wolters-Noordhoff).

Arsip dari Commissariaat voor Indische Zaken (agentschap van de Nederlandsch-Indische regering in Nederland) / Komisariat Urusan Hindia (kantor perwakilan dari pemerintah Hindia-Belanda di negeri Belanda), (1880) 1927-1949 (1950), kode akses 2.10.49.

Arsip ini memuat berkas-berkas tentang perihal masa krisis, antara lain termasuk tentang pembatasan-pembatasan (nomor inventaris 3458-3479).

2. Arsip dari Directie Handel en Nijverheid van het Ministerie van Economische Zaken (Direktorat Perdagangan dan Industri Kerajinan dari Kementerian Urusan Ekonomi), 1905-1943, kode akses 2.06.001

Arsip ini berisi berkas-berkas tentang perihal ekonomi Hindia-Belanda dan hubungan ekonomi dengan Belanda (lihat hlm. 200-201 dalam inventaris).

Untuk perihal pembatasan, lihat juga arsip 'Ministerie van Buitenlandse Zaken, directie Economische Zaken' (Kementerian Luar Negeri, direktorat Urusan Ekonomi), 1919-1940, kode akses 2:05:37.

Publikasi sumber dari:

B.G.J. de Graaff, W.J.M. Klaassen, dan J. Woltring (1985-1996), *Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945, periode B 1931-1940* (4 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff; Rijks Geschiedkundige Publicatiën gr. serie 191, 199, 212, 234).

Publikasi ini berisi berkas-berkas (antara lain dari arsip yang disebutkan di sini) tentang keikutsertaan Belanda / Hindia di perundingan internasional dalam hal pembatasan.

3. Arsip pribadi A. Groothoff, 1895-1969, kode akses 2.21.076

Pada tahun 30-an Groothoff adalah ketua delegasi Hindia-Belanda pada Internationale Tin Commissie (Komisi Timah Internasional) di London; anggota dari Komisi perihal *contingentering* (sistem kuota) dan anggota dari International Rubber Regulation Committee.

4. Arsip pribadi J. W. Meijer Ranneft, 1907-1967, kode akses 2.21.121

Berisi arsip tentang perundingan perdagangan dengan Jepang. Meijer Ranneft memimpin delegasi Belanda, dan direktur Departemen EZ ikut serta dalam perundingan itu (nomor inventaris 93-98).

5. Arsip pribadi B.C. de Jonge, 1885-1958, kode akses 2.21.095

Di dalam arsip ini antara lain ada notula rapat-rapat istimewa Raad van Indië (Dewan Hindia) mengenai 'rubberrestrictie' (pembatasan karet) (nomor inventaris 84). Direktur Departemen EZ juga ikut serta.

6. Arsip kantor pusat Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V., kode akses 2.20.01

dan juga arsip-arsip yang ditempatkan di situ (1784) 1824-1964 (1994), (2 jilid). Lihat pada Tweede Afdeling (Bagian ke-2) (mulai tahun 1915 pada *afdeling voor cultuurzaken in de Oost* (bagian urusan budidaya tanaman di Timur)): berkas-berkas yang berkaitan dengan ‘thee-, kina-, en rubberrestricties in de jaren ‘30’ (pembatasan teh, kina, dan karet pada tahun 30-an) (nomor inventaris 8955-8962; 9007; 9147; 9163). Berkas-berkas tersebut juga memperlihatkan kebijakan Departemen EZ.

7. Arsip Nederlandsch-Indische Vereeniging voor de Afzet van Suiker / NIVAS (Perhimpunan Hindia-Belanda untuk Pemasaran Gula), 1932-1958, kode akses 2.20.09.03

Berisi berkas-berkas mengenai ‘pertemuan International Sugar Council’; ‘pengangkatan seorang komisar pemerintah NIVAS’; ‘pengaturan perihal pembatasan produksi gula dan penerapan aturan tersebut’. Lihat Bab 38 dalam buku panduan ini.

8. Arsip Federatie van Verenigingen van de Bergcultuurondernemingen / Federabo (Federasi Perhimpunan Perusahaan Perkebunan Tanaman Gunung), 1935-1969, kode akses 2.20.50

Yang menjadi anggota organisasi induk yang berlokasi di Den Haag ini adalah: Internationale Vereeniging voor de Rubbercultuur in Nederlandsch-Indië (Perhimpunan Internasional Perkebunan Karet di Hindia-Belanda); Vereeniging voor de Theecultuur in Nederlandsch-Indië (Perhimpunan Perkebunan Teh di Hindia-Belanda); Koffie- en Cacao-producenten Vereeniging (Perhimpunan Produsen Kopi dan Kakao); Vereeniging voor de Kinacultuur (Perhimpunan Perkebunan Kina); dan Vereeniging voor de Kapok- en cacaocultuur (Perhimpunan Perkebunan Kapuk dan Kakao). Federasi tersebut antara lain menjaga kepentingan para anggota di pemerintahan dan badan-badannya. Arsip tersebut memuat berkas-berkas tentang pembatasan karet, teh, kina, dan kapuk. Lihat Bab 39 dalam buku panduan ini.

9. Arsip Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië / Indonesië te 's-Gravenhage (Dewan Pengusaha Hindia-Belanda / Indonesia di Den Haag), 1921-1968, kode akses 2.20.02.01

Berisi berkas-berkas yang berkaitan dengan Indische Ondernemersbond (Perhimpunan Pengusaha Hindia) yang ada di Hindia-Belanda. Lihat Bab 40 dalam buku panduan ini.

10. Arsip pribadi G.W.J. Bruins, 1895-1948, kode akses 2.21.191.01

Bruins, seorang pakar dalam bidang ekonomi-finansial dan moneter, pernah menjabat antara lain sebagai ketua ‘adviescommissie nopens de bevordering van economische samenwerking

tussen Nederland en Nederlandsch-Indië' (komisi penasihat sehubungan dengan peningkatan kerja sama ekonomi antara Belanda dan Hindia-Belanda) (1932-1934): lihat nomor inventaris 410-427 dan 1016-1019.

11. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Economisch Weekblad voor Nederlandsch-Indië, orgaan van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel / departement van Economische Zaken, 1932-1946 (Majalah mingguan Ekonomi untuk Hindia-Belanda, majalah dari Departemen Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan / Departemen Urusan Ekonomi, 1932-1946) (Batavia: Kolff).

Memuat antara lain 'Landbouweconomische verslagen' (Laporan ekonomi pertanian); 'persberichten met betrekking tot Oost-Azië, verzameld door de Dienst voor Oost-Aziatische Zaken en diens rechtsvoorgangers' (berita pers berkaitan dengan Asia-Timur, yang disusun oleh Dinas Urusan Asia-Timur dan pendahulunya); 'marktberichten' (berita-berita pasar); 'statistische gegevens zoals wisselkoersen en opbrengsten van landsmiddelen' (data statistik seperti kurs mata uang dan penghasilan dari barang milik negara).

Handelingen en bijlagen van de Volksraad (Notula dan lampiran dari Dewan Rakyat)
Di dalamnya antara lain ada teks pidato direktur Departemen EZ.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië, met Bijbladen (Lembaran Negara Hindia-Belanda, dengan Lembaran Tambahan)

Untuk bagian ini dipakai: *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1933 no. 509.

Daftar Pustaka

Berge, Tom van den (2014), *H.J. van Mook 1894-1965; Een vrij en gelukkig Indonesië* (Bussum: Thot), Bab 4, hlm. 121-163.

Biografisch Woordenboek van Nederland, versi digital.

Tentang para direktur Urusan Ekonomi: (<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/wellenstein>): lema *E.P. Wellenstein*;

(<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/hart>): lema *G.H.C. Hart*,

(<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/mook>): lema *H.J. van Mook*.

Creutzberg, P. (1972-1975), *Het economisch beleid in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Wolters-Noordhoff)

Pengantar pada bab-bab capita selecta 'Rijst' (Beras), 'De restricties' (Pembatasan), 'Nijverheid' (Industri), dan 'Handelspolitiek' (Politik dagang).

Kersten, Albert ed. (1976), 'Inleiding', *Het dagboek van dr. G.H.C. Hart, Londen mei 1940-mei 1941* (Den Haag: Nijhoff).

Mansvelt, W.M.F., P. Creutzberg dkk (1975-1996), *Changing economy in Indonesia; A selection of statistical source material from the early 19th century up to 1940* (16 jild; Den Haag: Nijhoff).

Catatan: antara lain berkaitan dengan perihal 'boswezen' (perhutanan), 'handel' (perdagangan), 'nijverheid' (perindustrian), 'rijstprijzen' (harga beras), 'bevolkingsgroei' (pertumbuhan penduduk).

Oorschot, H.J. van (1956), *De ontwikkeling van de nijverheid in Indonesië* (Den Haag-Bandoeng: Van Hoeve).

Prince, Gé (1989), 'Dutch economic policy in Indonesia, 1870-1942', dalam: Angus Maddison dan Gé Prince, *Economic growth in Indonesia 1820-1940* (Dordrecht-Holland / Providence-U.S.A.: Foris), hlm. 203-226

Taselaar, Arjen (1998), *De Nederlandse koloniale lobby; Ondernemers en de Indische politiek 1914-1940* (Leiden: Research School CNWS, School of Asian, African, and Amerindian Studies).

36 J.Th. Cremer (1847-1923)

Jacob Theodoor Cremer (1847-1923) adalah ‘laki-laki Deli’ asli. Ia mengenal daerah itu dari masa ketika ia menjadi agen dari Nederlandsche Handel-Maatschappij / NHM (Maskapai Dagang Belanda) di Singapura (1870-1871). Pada tahun 1871 ia mulai bekerja pada Deli-Maatschappij sebagai administrator dan kemudian kepala administrasi. Ia membawa perusahaan itu berkembang besar. Pegawai-pegawai yang dibutuhkan direkrut di Cina. Atas inisiatifnya, Deli Plantersvereniging (Perhimpunan Penanam Deli) terbentuk pada tahun 1879. Cremer adalah juga orang yang di belakang permohonan tahun 1876, di mana para penanam mengajukan permohonan kepada gubernur-jenderal untuk mempertahankan *poenale sanctie* (sanksi pidana). Ini adalah tanggapan atas mosi yang diajukan ke Tweede Kamer (Majelis Rendah) pada tahun 1875 untuk penghapusan ketentuan hukuman terhadap kuli yang memutuskan kontrak. Dengan brosurnya *Een woord uit Deli tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal* (Sebuah kata dari Deli kepada Majelis Rendah – Dewan Perwakilan Rakyat) pada tahun 1876, Cremer menegaskan permohonan itu: di dalam brosur itu ia menyatakan bahwa sanksi pidana bagi pengusaha merupakan instrumen penting untuk menjaga ketenangan dan ketertiban, demi mendorong kemakmuran. Aksi itu mencapai sukses: ketentuan hukuman dimuat dalam Koelieordonnantie (Ordonansi Buruh Kuli) yang baru (1880), yang dirancang oleh Cremer.

Sekembalinya di Belanda ia tetap mengerahkan kemampuannya untuk Hindia. Pada tahun 1883 ia mendirikan Deli-Spoorwegmaatschappij (Jawatan Kereta Api Deli) dan dirinya menjadi direktur pertama. Setahun kemudian menyusul berdirinya Nederlandsch-Indische Landbouwmaatschappij (Perusahaan Pertanian Hindia-Belanda). Perusahaan ini harus memberikan kredit kepada berbagai perusahaan budidaya dan bank, yang mengalami kesulitan karena krisis gula. Dalam ‘Deli(sche) schetsen’ (Sketsa Deli), yang dipublikasikan dalam majalah mingguan *Eigen Haard* (1888-1890, 1908-1909), dan dalam brosur ‘Ons land van onbeperkte mogelijkheden, reisschetsen’ (Negeri kita dengan kemungkinan yang tak terbatas, sketsa perjalanan) Cremer menekankan arti dari perusahaan-perusahaan barat untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Ia memberikan gambaran kehidupan sehari-hari dari para kuli, kegiatan pada hari libur, dan perumahan mereka; ia menunjukkan perawatan kesehatan yang menjadi jauh lebih baik, dan menyatakan kerinduan akan pengetahuan yang semakin tumbuh pada rakyat Indonesia. Tahun terbitan 1885 dari *Tijdschrift van Nederlandsch-Indië* berisi pleidoinya untuk mengizinkan masuk secara terbuka bagi Klingalezen (orang-orang Keling) dari India di Pantai Timur Sumatra: menurutnya orang-orang Keling itu betul-betul cocok untuk pekerjaan budidaya gula dan kopi, sementara orang-orang Cina lebih baik untuk budidaya tembakau. Ia memberikan kesan sebagai pendukung imigrasi dari berbagai ras di daerah: menurutnya kolonisasi mendorong stabilitas.

Cremer adalah anggota dari Liberale Unie (Uni Liberal). Selama periode 1884-1897 dan 1901-1905 ia mewakili organisasi ini di Tweede Kamer (Majelis Rendah). Ia harus berhenti dari keanggotaannya di Eerste Kamer (Majelis Tinggi) ketika menerima tugas negara sebagai

duta besar di Amerika Serikat (1918-1920). Di kabinet Goeman-Borgesius (1897-1901) ia berwenang mengelola Koloniën (Urusan Tanah Jajahan). Sebagai menteri ia mengurus antara lain peluasan dan perbaikan infrastruktur dan terbentuknya Indische Mijnwet (Undang-Undang Pertambangan Hindia) pada tahun 1899. Setelah berakhirnya keanggotaannya di Majelis Rendah, ia kembali ke Nederlandsche Handel-Maatschappij, pertama-tama sebagai presiden (1907-1912), kemudian sebagai komisaris raja (1914-1918). Pada tahun 1910 ia mengambil inisiatif mendirikan Koloniaal Instituut (Institut Kolonial) di Amsterdam (yang kemudian disebut Tropeninstituut), yang bertugas mengumpulkan bahan dan pengetahuan tentang bagian-bagian wilayah Belanda di seberang lautan, terutama untuk mendorong perkembangan ekonomi. Pada tahun 1916 Koloniaal Instituut mengadakan kongres pendidikan bertema ‘assimilatie-adaptatie’ (asimilasi adaptasi). Salah satu pembicara adalah nasionalis Soewardi Soerjaningrat, yang karena berbagai kegiatan politiknya pada tahun 1913 dibuang dari Hindia dan di Belanda mengikuti antara lain pendidikan guru. Ia menganjurkan pemakaian bahasa-bahasa daerah di *lagere scholen* (sekolah-sekolah dasar) dan bahasa Belanda di *voortgezet en hoger onderwijs* (sekolah menengah dan pendidikan tinggi).⁴⁷ Laporan kongres ini tersimpan dalam arsip Cremer.

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip pribadi keluarga Cremer dan kerabat keluarga, 1618-1941, kode akses 2.21.043

Nomor inventaris 184-331 berisi berkas-berkas J.Th. Cremer. Untuk berkas ini digunakan *inleiding* (pengantar) dan nomor-nomor berikut: 244; 268; 322; 324-325; 331.

2. Arsip Deli-Maatschappij, 1869-1967, kode akses 2.20.46

Lihat Bab 37 dalam buku panduan ini.

3. Arsip Deli Spoorwegmaatschappij (Jawatan Kereta Api Deli), 1883-1970, kode akses 2.20.11

4. Arsip pribadi C.H.A. van der Wijck, 1892-1898, kode akses 2.21.183.98

Van der Wijck adalah gubernur-jenderal Hindia-Belanda pada periode 1893-1899. Nomor inventaris 3 berisi surat-surat, korespondensi antara Van der Wijck dan Menteri Urusan Tanah Jajahan J.Th. Cremer.

⁴⁷ Lihat juga Bab 28 dalam buku panduan ini.

5. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Berkas-berkas asli dari surat-surat Menteri Cremer dalam *openbaar archief* (arsip umum) dan *geheim en kabinetsarchief* (arsip kabinet dan rahasia), kode akses 2.10.02; 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.051; 2.10.36.013.

Dalam surat-surat itu dibahas topik-topik yang beragam. Untuk paparan rubrik, lihat *indices* (indeks) pada *openbaar verbaalarchief* (arsip verbal umum) dalam Bab 44 buku panduan ini.

Surat-surat dari Menteri Cremer dimuat dalam publikasi sumber berikut:

- P. Creutzberg ed. (1972-1975), *Het economisch beleid in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Wolters-Noordhoff).
- S. L. van der Wal ed. (1963), *Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940* (Groningen: Wolters).

6. Arsip kantor pusat Nederlandsche Handel-Maatschappij, kode akses 2.20.01 dan arsip-arsip yang ditaruh di situ, 1784-1994, (2 jilid).

Nomor inventaris 5874-5875 berisi berkas-berkas asli dari surat-surat yang konfidensial dan rahasia dari Presiden J.Th. Cremer.

7. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: Untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini, gunakan Picarta melalui halaman ikhtisar Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Handelingen en Bijlagen van de Staten-Generaal (Notula dan Lampiran dari Dewan Perwakilan Rakyat), 1884-1905; 1912-1922.

Di dalamnya berisi teks-teks pidato dari anggota Dewan dan Menteri J.Th. Cremer.

Daftar Pustaka

Aalst, C.J.K. van (1924), 'J.Th. Cremer', *Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1923-1924* (Leiden), hlm. 48-64.

Balbian Verster, J.F.L. de (1919), *Deli-Maatschappij 1869-1919; Gedenkschrift bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan* (Amsterdam: Roeloffzen-Hübner).

Balbian Verster, J.F.L. de ed. (1924), *Jeugd en jongengelingssjaren van Jacob Theodoor Cremer (30 juni 1847 – 14 augustus 1923)* (Otobiografi; Den Haag: Leopold).

Biografisch Woordenboek van Nederland, versi digital,
(<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/cremer>): lema *J.Th. Cremer*.

Breman, J. (1992), *Koelies, planters en koloniale politiek; Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust in het begin van de twintigste eeuw* (Cetakan ke-3; Leiden: KITLV Uitgeverij).

Broersma, R. (1919-1922), *Oostkust van Sumatra* (2 jilid; Batavia: Javasche Boekhandel en Drukkerij, Deventer: Dixon), Jilid 1: *De ontluiking van Deli*.

Cremer, J.Th. (1876), *Een woord uit Deli tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal; Art. 2 no. 27 van het politiereglement voor inlanders, met het oog op werkovereenkomsten met vreemde Oosterlingen* (Amsterdam: Van Tyen).

Catatan: cetakan lepasnya dalam arsipnya, nomor inventaris 325.

Cremer, J.Th., 'Deli(sche) schetsen', *Eigen Haard* (1888, edisi. 3 dan 17 November; 1889, edisi 2 Februari dan 1 Juni; 1890, edisi no. 37 dan 43; 1908, edisi 14 November; 1909, edisi 30 Januari).

Catatan: Juga dalam arsipnya, nomor inventaris 324.

Cremer, J.Th. (1885), 'Emigratie van Hindu's naar Sumatra's Oostkust', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* edisi terbitan ke-14, hlm. 301-311.

Catatan: cetakan lepasnya dalam arsipnya, nomor inventaris 325.

Cremer, J.Th. (1914), *Ons land van onbeperkte mogelijkheden: reisschetsen* (Lampiran dari 'Nieuws van den dag', 1 Juli; Amsterdam).

Catatan: Lihat arsipnya, nomor inventaris 325.

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *J.Th. Cremer* (V, hlm. 290-291), *Koloniaal Instituut* (II, hlm. 155-157; VI, hlm. 957).

Modderman, P.W., T. Volker, dan G. van der Veen (1929), *Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Deli Planters Vereeniging* (Weltevreden: Kolff).

Weisfelt, J. (1972), *De Deli Spoorweg Maatschappij als factor in de economische ontwikkeling van de Oostkust van Sumatra* (Rotterdam: Bronder-Offset).

37 N.V. Deli-Maatschappij

N.V. Deli-Maatschappij (1869) merupakan perusahaan umum pertama di Hindia Belanda. Salah satu pemegang sahamnya adalah Nederlandsche Handel-Maatschappij / NHM (Maskapai Dagang Belanda). Seperti tertera dalam statuta perusahaan itu, tujuannya adalah untuk: membuka dan membangun lahan di wilayah tersebut; mengolah, mengangkut, dan menjual produk (dalam perdagangan komisi); mengadakan penelitian pertambangan dan geologi, dan membuka lahan tambang dan sumber daya; membiayai dan ikut andil dalam usaha-usaha, perusahaan dan konsorsium lainnya. Di bawah kepemimpinan administrator (yang kemudian menjadi Kepala Administrator) J.Th. Cremer (1871-1881), perusahaan itu berkembang besar. Cremer adalah wakil tertinggi di Hindia dari direksi perusahaan yang berbasis di Belanda. Tembakau adalah produk utamanya. Pada awal abad ke-20 budidaya tanaman karet dikembangkan. Deli-Maatschappij memiliki pengaruh besar dalam Deli Planters Vereeniging / DPV (Perhimpunan Pengusaha Perkebunan Deli) (1879) dan kemudian juga dalam Algemeene Vereeniging voor Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra / AVROS (Perhimpunan Umum Pengusaha Perkebunan Karet di Pantai Timur Sumatra) (1910): kedua organisasi itu mewakili kepentingan pertanian dan industri barat.

Awalnya, perusahaan itu hanya berurusan sedikit dengan pemerintahan kolonial. Konsesi pertanian diperoleh melalui musyawarah langsung dengan para penguasa wilayah otonom pribumi. Situasi ini berubah ketika Pantai Timur Sumatra pada tahun 1873 menjadi karesidenan sendiri. Gouvernementsbesluit (Keputusan Pemerintah) tanggal 28 Januari 1877 menentukan bahwa untuk *gronduitgifte* (pengeluaran tanah) harus digunakan akta model yang sudah disusun dan disahkan oleh kepala pemerintahan daerah. Keputusan itu, yang muncul karena adanya Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) (1870), bertujuan untuk meningkatkan keseragaman dan melindungi penduduk pribumi terhadap praktek-praktek yang tidak adil dari pengusaha swasta. Setelah Perang Dunia Pertama (1914-1918) dikeluarkan Erfpachtordonnantie (Ordonansi Tanah Erfpah) bagi wilayah-wilayah yang otonom di luar Jawa dan Madura (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1919 no. 61): dengan ordonansi itu konsesi tanah bisa diubah menjadi tanah erfpah. Untuk pengusaha, hal itu menarik: tanah erfpah lebih bisa diperdagangkan. Sebaliknya, para penguasa wilayah otonom menganggap ordonansi menggerogoti kewenangan pemerintahan mereka, seperti tercantum dalam perjanjian politik dengan gubernemen. Hal itu berlangsung sampai akhir tahun 30-an sebelum pihak yang terlibat berhasil mendapatkan penyelesaian masalah itu. Dari arsip perusahaan ternyata bahwa di samping pegawai pemerintah juga Inspectie voor Agrarische Zaken (Inspeksi untuk Urusan Agraria)⁴⁸ dan DPV terlibat dalam masalah ini.

Karena permintaan untuk tenaga kerja pribumi melebihi ketersediaan tenaga kerja di wilayah ini, maka pekerja baru direkrut dari Cina dan Jawa. Pada tahun 80-an dan 90-an abad ke-19 banyak orang Cina yang ke Deli. Kemudian aliran masuk orang Cina itu mengalami stagnasi.

⁴⁸ Lihat Bab 4 dalam buku panduan ini.

Hal itu di satu pihak disebabkan karena keberatan pemerintah Cina terhadap keberangkatan massal tenaga kerja mereka yang dibayar di bawah upah normal, dan di pihak lainnya disebabkan karena pemerintah Hindia-Belanda takut akan timbul ketegangan politik dan ekonomi, terutama di Jawa, daerah yang berpenduduk padat. Pada tahun 1931, perekrutan orang-orang Cina akhirnya diberhentikan sama sekali. Migrasi dari Jawa diperbolehkan dengan persetujuan pemerintah, yang dengan cara ini juga berusaha untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk di pulau itu.

Status hukum para kuli diatur dalam *Koelieordonnanties* (Ordonansi Buruh Kuli), yang juga memuat *poenale sanctie* (sanksi hukuman). Pekerja pribumi atau asing yang melanggar kontrak kerja bisa dihukum. Penerapan sanksi itu dan, yang lebih umum, perlakuan majikan terhadap kuli mereka diperdebatkan secara keras dalam pers dan parlemen setelah terbitnya *De millioenen uit Deli* (Jutaan dari Deli), brosur yang terkenal keji dari J. van den Brand (1902). Sebagai tanggapan, pemerintah menugaskan Bataviase Officier van Justitie (Jaksa Batavia) J.C.T. Rhemrev pada tahun 1903 untuk mengadakan penyelidikan resmi terhadap kondisi kerja buruh. Untuk tujuan itu, Rhemrev juga mengunjungi perusahaan-perusahaan dari Deli Maatschappij, lihat arsip.

Hasil laporannya mengakibatkan didirikannya sebuah *Arbeidsinspectie* (Inspeksi Buruh), pertama-tama sebagai tindakan penanganan sementara untuk Pantai Timur Sumatra, dan akhirnya pada tahun 1908 untuk seluruh Hindia-Belanda (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1908 no. 400). Inspeksi yang berada di bawah Departement van Justitie (Departemen Kehakiman) itu mengawasi perekrutan tenaga kerja dan pelaksanaan ordonansi kuli pada umumnya. Dalam publikasi mereka, Deli Planters Vereeniging dan Algemeene Vereeniging voor Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra lebih banyak memberikan perhatian pada permasalahan ini.

Kepedulian terhadap pekerja mencakup antara lain masalah perumahan, pendidikan (dalam bahasa Melayu / Jawa), bantuan medis, menyelenggarakan selamatan (makan-makan dalam acara ritual), dan pertunjukan wayang. Sejak tahun 1926, anak-anak pekerja Eropa bisa bersekolah ke *Plantersschool* (Sekolah untuk kalangan perkebunan) lengkap dengan fasilitas asrama di Brastagi. Sekolah ini dibangun atas biaya DPV. Setelah terjadinya kerusuhan di Jawa dan Sumatra (akhir 1926 - awal 1927), DPV mendirikan *inlichtingendienst* (dinas intelijen), 'to trace the circumstances that may disturb peace and order on the estates of the Eastcoast of Sumatra and in Atjeh'. Dinas itu melaporkan kegiatan berbagai organisasi Indonesia seperti Partai Nasional Indonesia, Muhammadiyah, Partai Komunis.

Penelitian tentang budidaya tembakau dilakukan di Proefstation voor de Deli-tabak (Balai Penelitian Tembakau Deli) yang didirikan pada tahun 1895. Awalnya, lembaga itu berada di Kebun Raya Bogor, kemudian pada tahun 1906 lembaga itu dipindahkan ke Medan, ibukota Pantai Timur Sumatra. Seri *Mededelingen van het proefstation* (Berita balai penelitian) berisi artikel tentang 'tabakszaden' (bibit tembakau), 'bemestingsproeven' (uji coba pupuk), 'barometer- en regenwaarnemingen' (barometer dan prakiraan hujan), dan lain-lain. AVROS juga mengoperasikan suatu balai penelitian.

Arsip Deli-Maatschappij juga mencakup arsip anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang telah berfusi dengannya. NV Waterleidingmaatschappij Ajer Beresih adalah anak perusahaan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1905, setelah mendapatkan konsesi dari gubernur-jenderal. Yang diutamakan, Perusahaan Ajer Beresih harus menyediakan air minum melalui pipa ledeng di ibukota Medan, dan kemudian di seluruh wilayah.

Foto-foto dan peta-peta memperlihatkan gambaran tentang bagaimana Deli-Maatschappij telah berfungsi dan memberikan kontribusi dalam membuka dan membangun Pantai Timur Sumatra.

Setelah Perang Dunia II (1940-1945), perusahaan itu menggeser sebagian besar kegiatannya ke Amerika Serikat. Pada tahun 1959, perusahaan-perusahaan dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia.

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip Deli-Maatschappij dan perusahaan-perusahaan yang berfusi dengannya, 1869-1967, kode akses 2.20.46

Dalam kumpulan data ini terkandung arsip-arsip berikut: ‘Deli Cultuur Maatschappij’; ‘Deli-Batavia Maatschappij dan Deli-Batavia Rubber Maatschappij’; ‘Tabak Maatschappij Arendsburg’; ‘Cultuur Maatschappij De Oostkust’; ‘Cultuur Maatschappij Batang Sangir’; ‘Amsterdam-Langkat Compagnie’; ‘Holland-Deli Compagnie’; ‘Rimboen Tabak Maatschappij’; ‘Cultuur Maatschappij Kota Pinang’; ‘N.V. Purperhoedenveem’; ‘N.V. Pakhuizen Exploitatie maatschappij’; ‘J. Goldschmidt & Zonen N.V.’; ‘N.V. Beleggings- en Beheersmaatschappij de Amstel’; ‘N.V. Assurantie Bemiddeling Maatschappij A.B.M.’; ‘Handelmaatschappij, dahulunya firma P. Jennen’; ‘Jennen Automaten N.V.’; ‘N.V. Gazan, Van der Linden & Co., Tabakhandel Maatschappij’; ‘HTL Tabak-Maatschappij N.V.’; ‘Waterleiding Maatschappij Ajer Beresih N.V.’.

Untuk berkas ini digunakan *inleiding* (pengantar) dan nomor-nomor 4; 7; 16; 29; 38-39; 60-61; 159; 165; 171; 228; 283-284; 293; 305; 307; 314; 324-326; 330-331; 378; 416; 424.

2. Arsip Pribadi J.Th. Cremer, kode akses 2.21.043

merupakan bagian dari arsip keturunan keluarga Cremer dan yang bertalian dengan keluarga Cremer, 1618-1941.

Lihat Bab 36 dalam buku panduan ini.

3. Arsip pribadi G. Jansen, 1908-1960, kode akses 2.21.228

Lihat Bab 18 dalam buku panduan ini. Arsip itu memuat data tentang tanah yang dikeluarkan untuk Deli-Maatschappij.

4. Arsip kantor pusat Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V., kode akses 2.20.01

dan arsip-arsip (1784) 1824-1964 (1994), (2 jilid) yang ditaruh di tempat sama. Lihat misalnya *Series algemene correspondentie* (Seri korespondensi umum). Seri dari periode 1824-1902 bisa diakses dengan bantuan *algemene indicateurs* (indikator umum). Indikator tersebut juga merupakan akses ke notula harian dari periode 1832-1879 dan ke notula konfiden rapat-rapat direksi periode 1824-1902: rubrik Deli;

Eerste afdeling (Bagian ke-1) membicarakan tentang ‘cultuurzaken’ (urusan budidaya tanaman) di Timur pada periode 1828-1919. Untuk hal ini, lihat misalnya nomor inventaris 7956 dari *dossierserie* (seri dosir) ‘cultuurzaken’;

Tweede afdeling (Bagian ke-2) ini pada tahun 1919 mengambil alih ‘cultuurzaken’ dari *Eerste afdeling*. Lihat misalnya dari seri dosir ‘cultuurondernemingen’ (perusahaan budidaya tanaman) dan ‘cultuurproducten’ (produk-produk budidaya tanaman) nomor inventaris 9075, 9098-9100; dari seri dosir ‘bergcultures’ (budidaya tanaman gunung) nomor inventaris 9277; dan ‘consignatiecontracten’ (kontrak konsinyasi) nomor inventaris 9188.

5. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Berkas-berkas tentang ‘landbouw’ (pertanian), ‘concessieverleningen’ (pemberian konsesi), ‘arbeidsaangelegenheden’ (perihal perburuhan), dan ‘Deli Maatschappij dan hal yang berkaitan dengan itu’, dapat dicari dengan menggunakan akses-akses (*indices* ‘indeks’) di *openbaar archief* (arsip umum) dalam rubrik :

a. Periode 1850-1900 (kode akses 2.10.02; 2.10.10): ‘Afstand en verhuringen van land’ (Pelepasan dan penyewaan tanah); ‘Agrarische aangelegenheden’ (Urusan Agraria); ‘Kolonisatiën / kolonisatie, landverhuizingen, koelies’ (Kolonisasi, emigrasi, kuli); ‘Kunsten en Wetenschappen’ (Kesenian dan Ilmu Pengetahuan); ‘Ministerie’ (Kementerian); ‘Naamloze maatschappijen’ (Perseroan Terbatas).

b. Periode setelah 1900 (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03): ‘Agrarische aangelegenheden / zaken’ (Urusan Agraria); ‘Arbeidsaangelegenheden’ (Perihal perburuhan); ‘Erfpacht’ (erfpah); ‘Geneeskunde / volksgezondheid’ (Ilmu kesehatan / kesehatan rakyat); ‘Grondbezit, grondrechten’ (Hak kepemilikan tanah); ‘Kolonisatie (hieronder ook, emigratie, transmigratie, arbeidsinspectie, poenale sanctie, werving, koelies, koelieaanslagen’ (Kolonisasi: termasuk ini juga emigrasi, transmigrasi, inspeksi buruh, sanksi hukuman, perekrutan, kuli, kerusakan kuli); ‘Landbouw: cultuur in het algemeen’ (Pertanian: budidaya tanaman pada umumnya); ‘Naamloze vennootschappen en verenigingen’ (Perseroan terbatas dan perhimpunan); ‘Onderwijs’

(Pendidikan); ‘Poenale sanctie’ (Sanksi hukum); ‘Politieke stromingen (en maatregelen)’ (Aliran politik dan tindakan); ‘Politieke en economische toestand’ (Keadaan politik dan ekonomi).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks-indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang Deli-Maatschappij sesudah tahun 1921, akses *4de afdeling* (bagian ke-4) sangat penting: lihat kode akses 2.10.36.011.

Berkas-berkas penting juga dapat ditemukan dalam *geheim- en kabinetsarchief* (arsip kabinet dan rahasia) mulai tahun 1850 serta di dalam *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914. Lihat kode akses 2.10.02 (periode 1850-1900); 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07 (periode setelah tahun 1900).

6. Arsip Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kementerian Luar Negeri)

Untuk berkas-berkas mengenai ‘werving’ (perekrutan tenaga kerja), lihat misalnya *serie A-dossiers* (seri dosir A), 1871-1918, kode akses 2.05.03, antara lain dosir A119; arsip-arsip ‘Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in China (Peking, Chungking, Nanking), (1862) 1872-1954)’ (Perwakilan diplomatik Belanda di Cina (Peking, Chungking, Nanking), (1862) 1872-1954), kode akses 2.05.90, antara lain nomor inventaris 514; arsip ‘Nederlandse consulaat-generaal te Shanghai, (1852) 1877-1951’ (Konsulat-jenderal Belanda di Shanghai, (1852) 1877-1951), kode akses 2.05.91.

7. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Handelingen en Bijlagen van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Notula dan lampiran dari Dewan Perwakilan Rakyat).

Antara lain untuk pembahasan ordonansi kuli, brosur Van den Brand dan laporan Rhemrev.

Handelingen en bijlagen van de Volksraad (Notula dan lampiran dari Dewan Rakyat).

Laporan tahunan Deli Planters Vereeniging 1918-1939 merupakan akses yang baik ke sumber ini, lihat paragraf ‘Deli in de Volksraad’ (Deli dalam Dewan Rakyat)(arsip Delimij, nomor inventaris 304-305).

Staatsblad van Nederlandsch-Indië (Lembaran Negara Hindia-Belanda).

Untuk catatan ini dipakai *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1908 no. 400; 1919 no. 61.

Daftar Pustaka

- Balbian Verster, J.F.L. de (1919), *Deli-maatschappij 1869-1919; Gedenkschrift bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan*, (Amsterdam: Roeloffzen-Hübner).
- Bool, H.J. (1903), *De landbouwconcessies in de residentie Oostkust van Sumatra* (Utrecht).
- Breman, Jan (1992): *Koelies, planters en koloniale politiek; Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's oostkust in het begin van de twintigste eeuw* (Cetakan ke-3; Leiden : KITLV press)
- Catatan : di dalam buku ini tercantum secara utuh brosur J. van den Brand dan juga laporan J.C.T. Rhemrev.
- Broersma, R. (1919-1922), *Oostkust van Sumatra. I: De ontluiking van Deli, II: De ontwikkeling van het gewest* (2 jilid; 1919, Batavia: Javasche Boekhandel en Drukkerij; 1922, Deventer: Dixon).
- Bruinink-Darlang, A.M.C. (1986), *Het penitentiair stelsel in Nederlands-Indië van 1905 tot 1940* (Alblasserdam)
- Clemens, A.H.P. dan J.Th. Lindblad (1989), *Het belang van de Buitengewesten.Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942* (Amsterdam : NEHA)
- Catatan: di dalam buku ini ada sumbangan artikel dari A. van Kommer, 'De Deli-maatschappij aan de Oostkust van Sumatra'.
- Cremer, H., P.H. Ledeboer dkk. (1941), *Gedenkschrift aangeboden aan den heer Herbert Cremer directeur NV Deli-Maatschappij; Gedenkschrift Deli-Maatschappij 1916-1941* (Amsterdam: De Bussy).
- Enthoven, E. (1929), *NV Deli-Maatschappij. Gedenkschrift bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan aansluitende bij het gedenkboek van 1 november 1919* (Amsterdam: Deli-Maatschappij).
- Pelzer, K.J. (1978), *Planter and peasant; Colonial policy and the agrarian struggle in East Sumatra 1863-1947* (Den Haag: Nijhoff).
- Stoler, A.L.(1985), *Capitalism and confrontation in Sumatra's plantation belt, 1870-1979* (New Haven - London: Yale University Press).

38 Suikerpolitiek (Politik Gula)

Berdasarkan Gouvernementsbesluit (Keputusan Pemerintah) tanggal 24 Desember 1906 (*Bijblad* / Lembaran Tambahan no. 6584) diangkat suatu komisi yang harus memberi advis kepada pemerintah, para kepala departemen, dan para kepala pemerintah daerah tentang hal-hal menyangkut industri gula di Jawa. Para pejabat kepala harus melampirkan advis-advis dari komisi itu pada usulan mereka. Politik Etis, yang secara resmi dimulai dengan Pidato Raja pada tahun 1901, terarah ke penstimulasian kemakmuran pada masyarakat Indonesia. Dalam kaitan ini, industri gula adalah penting: maka Presiden dari Javasche Bank, N.P. van den Berg, menyatakan bahwa gula adalah sakaguru dari Jawa. Cabang perusahaan itu terorganisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan Algemeen Syndicaat (A.S.) van Suikerfabrikanten (Sindikat Umum Pengusaha Pabrik Gula) dibebani dengan pekerjaan komisi. Sindikat itu, yang didirikan pada tahun 1894, mengurus segala kepentingan dari para anggotanya dalam arti yang sangat luas. Dengan begitu, organisasi itu ikut memegang peran penting dalam berdirinya Inspectie voor Agrarische Zaken (Inspeksi untuk Urusan Agraria) pada tahun 1903.⁴⁹ Inspeksi itu harus menjaga agar penerapan Grondhuur- en Fabriekenordonnanties (Ordonansi-ordonansi Penyewaan Tanah dan Pabrik) dijalankan dengan tegas dan tak berpihak. Masyarakat Indonesia masih bersifat feodal: hubungan-hubungan hukum adat mendominasi. Para pegawai pemerintah cenderung membela kepentingan masyarakat daripada kepentingan para pengusaha. Secara intern, A.S. berupaya meluaskan pengetahuan dan memperbaiki mutu. Untuk itu diadakan pertemuan-pertemuan dan sayembara. A.S. membina hubungan dekat dengan Proefstation voor de Java Suikerindustrie (Balai Penelitian untuk Industri Gula Jawa), yang didirikan dan dibiayai oleh para pengusaha pabrik gula. Balai itu meneliti antara lain pelbagai jenis tebu, melakukan percobaan pemupukan dan pengukuran hujan, dan memberikan data gilingan. Hasil penelitian dan pembuatan peraturan yang relevan diterbitkan dalam *Archief voor de Suikerindustrie* (Arsip untuk Industri Gula), majalah sindikat yang resmi. Di Belanda sindikat itu diwakili oleh suatu komisi.

Pada akhir Perang Dunia Pertama (1914-1918), produk ekspor menumpuk. Peperangan dan dampaknya terhadap kurangnya ruang di kapal menghambat pengangkutan. Juga impor beras yang sangat diperlukan hampir saja berhenti. Terjadi ancaman lumpuhnya kehidupan ekonomi dan bahaya kelaparan. Pada tahun 1917, 60% dari pengusaha pabrik bersatu dalam Java Suiker Vereeniging (Perhimpunan Gula Jawa), yang dibebani dengan tugas penjualan persediaan yang tak terjual. Pemerintah menganggap jalan keluar ini tidak cukup. Lagipula pemerintah Hindia memiliki pemikiran untuk meningkatkan produksi beras melalui pengecilan paksa dari areal gula. Pada saat pertemuan yang diadakan oleh Gubernur-Jenderal J.P. van Limburg Stirum (1916-1921) bagi sejumlah produsen gula, para bankir, dan pedagang, diambil keputusan mendirikan perserikatan dari semua pengusaha pabrik gula, yang bersama para pengeksport akan menjalankan perdagangan. Suatu komisi yang harus mematangkan satu dan yang lainnya. Penanganan ini gagal. Di tahun-tahun sebelumnya

⁴⁹ Lihat Bab 4 dalam buku panduan ini.

pengurusan industri gula berpindah dari Hindia ke Belanda. Para pemilik perusahaan gula yang tinggal di Belanda menganggap bahwa mereka kurang cukup terwakili oleh Commissie van het Algemeen Syndicaat (Komisi Sindikat Umum). Pada tahun 1917 mereka mendirikan Bond van Eigenaren van Nederlandsch-Indische Suikerondernemingen / Beniso (Persatuan Pemilik Perusahaan Gula Hindia-Belanda). Atas dorongan Beniso, pada tahun 1918 terbentuk Vereniging Vereenigde Java Suiker Producenten / VJSP (Perhimpunan Serikat Produsen Gula Jawa), di bawah pimpinan Nederlandsche Handel-Maatschappij (Maskapai Dagang Belanda). VJSP, yang bertempat di Amsterdam dan mencakup hampir seluruh kelompok sasaran (90%), harus mengurus kepentingan dari para anggotanya, sejauh kepentingan itu berkaitan dengan penjualan dan perdagangan gula yang diproduksi di Jawa dan dengan penyelesaian transaksi dari hal itu. Di Hindia muncul suatu perwakilan. Van Limburg Stirum sebenarnya ingin mendapatkan kursi kepala dari organisasi itu di Hindia yang, jika perlu, memaksa bisa masuk. Dengan sekarang para pengusaha memilih jalan keluar ini, maka pemerintah menarik diri. Rencana pengecilan paksa dari areal gula juga tidak dilaksanakan.

Permasalahan ekonomi menstimulasi kerusuhan sosial. Pelbagai perhimpunan bidang dan nasionalis Indonesia semakin banyak mengeluhkan keadaan kerja di industri gula dan cabang-cabang perusahaan lainnya. Pemerintah Hindia membentuk Suikerenquêtecommissie (Komisi Angket Gula) pada tahun 1918 dan Arbeidscommissie (Komisi Buruh) pada tahun 1919 dengan tugas melakukan penyelidikan. Pada tahun 1921 tindakan-tindakan ad-hoc ini diubah ke penanganan yang lebih sesuai kebijakan dengan mendirikan Kantoort van Arbeid (Kantor Buruh) (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1921 no. 813), dengan Arbeidsinspectie (Inspeksi Buruh) masuk di dalamnya. Dalam membuat peraturan, jika dianggap perlu, kantor itu berunding dengan Java Suiker Werkgevers Bond (Persatuan Pemberi Kerja Gula Jawa). Organisasi itu didirikan pada tahun 1920 dengan tujuan menyeragamkan kebijakan dalam cabang perusahaan di bidang hubungan kerja dan peraturan kerja, dan mencari jalan keluar untuk konflik-konflik yang terjadi.

Krisis ekonomi pada tahun 1929 dan depresi sebagai akibatnya berdampak balik terhadap ekspor gula. Sebagai dampak dari suatu kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh Belanda (Kesepakatan Chadbourne), pemerintah Hindia melakukan pembatasan gula: melalui *uitvoervergunningen* (izin ekspor) perusahaan-perusahaan gula menerima saham sebanding dalam kuota ekspor. Ketika di dalam VJSP terjadi konflik tentang pemasaran persediaan gula yang tak terjual, maka di bawah pengawasan pemerintah pada tahun 1932 didirikan Nederlandsch-Indische Vereeniging voor den Afzet van Suiker / NIVAS (Perhimpunan Hindia-Belanda untuk Pemasaran Gula), yang mendapat monopoli penjualan. Komisaris pemerintah harus memberi laporan kepada gubernur-jenderal tentang cara NIVAS melaksanakan tugasnya. Pada persiapan atas kesepakatan pembatasan internasional yang baru (London 1937), 'systeem van uitvoervergunningen' (sistem izin ekspor) diganti dengan 'uitgifte van productieaandelen' (pengeluaran saham produksi): saham-saham itu dapat diperjual-belikan oleh produsen satu dengan yang lainnya. Dengan cara ini pemerintah Hindia berharap dapat memulihkan cabang perusahaan itu sehingga hanya perusahaan-perusahaan yang di segi ekonomi paling sehat akan memegang saham dalam ekspor gula.

Arsip dan sumber yang tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1850.

Informasi umum tentang tatanan, akses, seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Berkas-berkas tentang politik gula dapat ditemukan dengan bantuan akses (*indices* 'indeks') pada *openbaar archief* (arsip umum), dalam rubrik-rubrik berikut:

- a. **Periode 1850-1900** (Kode akses 2.10.02; 2.10.10): 'Afstand en verhuringen van land' (Pelepasan dan penyewaan tanah); 'Agrarische aangelegenheden' (Urusan agraria); 'Belastingen' (Perpajakan); 'Cultures' (Budidaya tanaman); 'Fabrieken en trafieken' (Pabrik dan perusahaan industri bahan dasar); 'Handel' (Perdagangan); 'In- en uitgaande rechten en accijnzen' (Bea dan cukai untuk masuk dan keluar); 'Landbouw' (Pertanian); 'Naamloze vennootschappen' (Perseroan terbatas); 'Spoor- en tramwegen en stoomwezen' (Jawatan kereta api dan tram dan tenaga uap); 'Suiker' (Gula); 'Verkoop van producten' (Penjualan produk).
- b. **Periode setelah tahun 1900** (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03): 'Accijnzen' (Cukai); 'Arbeid(saangelegenheden)' (Perihal perburuhan); 'Arbeidsinspectie' (Inspeksi Buruh); 'Agrarische aangelegenheden / zaken' (Urusan agraria); 'Belastingen' (Perpajakan); 'Binnenlands bestuur' (Pemerintahan dalam negeri); 'Cultures' (Budidaya tanaman); 'Erfpacht' (Erfpah); 'Grondbezit (-rechten) / gronden' (Hak pemilikan tanah / tanah lahan); 'Handel (en nijverheid; -swetgeving)' (Perdagangan dan Industri Kerajinan; Perundang-undangan perdagangan); 'Inkomsten' (Pendapatan); 'Irrigatie' (Irigasi); 'Landbouw' (Pertanian); 'Naamloze vennootschappen en verenigingen' (Perseroan terbatas dan perhimpunan); 'Octrooien' (Hak paten); 'Politieke stromingen' (Aliran politik); '(Politieke en) economische toestanden / zaken / rapporten en statistieken' (Situasi / hal / laporan politik dan ekonomi); 'Rechtswezen' (Sistem hukum); 'Spoor- en tramwegen (en stoomwezen)' (Jawatan kereta api dan tram dan tenaga uap); 'Statistiek' (Statistik); 'Suiker' (Gula); 'Uitvoer' (Ekspor); 'Verenigingen' (Perhimpunan); 'Verkoop van producten' (Penjualan produk).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang politik gula setelah tahun 1921, akses *4de afdeling* (bagian ke-4) adalah penting. Di dalam bagian itu pada tahun 1933 didirikan Bureau Economische Zaken (Biro Urusan Ekonomi) yang terpisah. Biro itu mengurus agendanya sendiri, dengan daftar-daftar kata kunci.

Penanganan dari semua urusan, yang termasuk dalam Departement van Economische Zaken (Departemen Urusan Ekonomi) dan perdagangan luar negeri, pada tahun 1938 ditempatkan di

bawah *8ste afdeling* (bagian ke-8) yang baru. Perpajakan berada di bawah *2de afdeling* (bagian ke-2). Lihat kode akses 2.10.36.011.

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia) dan *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) setelah tahun 1914 berisi berkas-berkas tentang politik gula. Lihat kode akses 2.10.02 (periode 1850-1900); 2.10.36.051; 2.10.36.13; 2.10.36.06; 2.10.36.07 (periode setelah tahun 1900).

Berkas-berkas tentang pengecilan areal budidaya tanaman gula dalam hubungan dengan permasalahan makanan; pembatasan gula di dalam:

- P. Creutzberg ed. (1972-1975), *Het economisch beleid in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Wolters-Noordhoff).

Berkas-berkas tentang keadaan perburuhan dalam industri gula, dan kegiatan-kegiatan dari Personeel Fabriek Bond / PFB (Ikatan Pegawai Pabrik: organisasi pribumi dalam industri gula) di dalam:

- R. C. Kwantes ed. (1975-1982), *De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Tjeenk Willink).

2. Arsip dari Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indië (Sindikot Umum Pengusaha Pabrik Gula di Hindia-Belanda), 1913-1961, kode akses 2.20.33.02.

Nomor inventaris 4 berisi ‘Mededeelingen van de Java Suiker Werkgevers Bond 1930-1939’ (Pengumuman dari Persatuan Pemberi Kerja Gula Jawa, 1930-1939).

3. Arsip dari Vereeniging ‘het proefstation voor de Java-Suikerindustrie’ (Perhimpunan ‘balai penelitian untuk Industri Gula Jawa), 1930-1974, kode akses 2.20.33.03

4. Arsip dari Bond van Eigenaren van Nederlandsch-Indische Suikerondernemingen (Persatuan Pemilik Perusahaan Gula Hindia-Belanda), 1917-1950, kode akses 2.20.33.01.

dan arsip dari Bond van Eigenaren van in Indonesië gelegen Suikerondernemingen (Persatuan Pemilik Perusahaan Gula yang berada di Indonesia), 1950-1981.

Nomor inventaris 17 berisi berkas-berkas tentang berdirinya Beniso, ulang tahunnya yang ke-10 dan ke-25..

5. Arsip dari Java Suiker Vereeniging (Perhimpunan Gula Jawa), 1916-1920, kode akses 2.20.09.01.

6. **Arsip dari Vereenigde Java Suiker-Producenten / VJSP (Serikat Produsen Gula Jawa), 1918-1938, kode akses 2.20.09.02.**
7. **Arsip dari Nederlandsch-Indische Vereeniging voor den Afzet van Suiker / NIVAS (Perhimpunan Hindia-Belanda untuk Pemasaran Gula), 1932-1958, kode akses 2.20.09.03.**
8. **Arsip dari Cultuur-, Handels- en Industriebank, Koloniale Bank / Cultuurbank N.V., 1881-1969, kode akses 2.20.04**

Nomor inventaris 1616 s/d 1620 berisi berkas-berkas yang masuk dari Beniso.

9. **Arsip dari kantor pusat Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V. / NHM (Maskapai Dagang Belanda), kode akses 2.20.01.**

dan arsip-arsip yang ditaruh di sini (1784) 1824-1964 (1994), (2 jilid).

Lihat pada *2de afdeling* (bagian ke-2) 'Cultuurzaken' (Urusan budidaya tanaman) untuk berkas-berkas yang masuk dari Beniso, Algemeen Syndicaat (Sindiket Umum), Proefstation (Balai Penelitian), dan Java Suiker Werkgevers Bond (Persatuan Pemberi Kerja Gula Jawa) (kode akses 2.20.01, hlm. 485 s/d 497).

10. Daftar arsip dari perusahaan-perusahaan gula

Di bawah ini rincian pembentuk arsip, tahun arsip, kode akses, daerah tempat perusahaan:

- Cultuurmaatschappij Kremboong en Toelangan (Perusahaan Perkebunan Krembong dan Tulangan), 1850-1967, tidak ada akses. Jawa.
- N.V. Cultuurmaatschappij Kanigoro (P.T. Perusahaan Perkebunan Kanigoro), 1882-1958, kode akses 2.20.04 dan 2.20.05. Jawa.
Yang ditaruh dalam Arsip Koloniale Bank.
- Klattensche Cultuurmaatschappij te 's-Gravenhage (Perusahaan Perkebunan Klaten di Den Haag), 1884-1966, kode akses 2.20.02.04. Jawa.
- N.V. Cultuurmaatschappij Gending (P.T. Perusahaan Perkebunan Gending), 1888-1972, kode akses 2.20.04 dan 2.20.05. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Koloniaal Bank.
- N.V. Cultuurmaatschappij Klampok (P.T. Perusahaan Perkebunan Klampok), 1889-1936, kode akses 2.20.01. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Nederlandsche Handel Maatschappij / NHM (Maskapai Dagang Belanda).
- N.V. Maatschappij tot exploitatie van de suikeronderneming Koning Willem II (P.T. Perusahaan pengeksploitasi usaha gula Raja Willem II), 1891-1939, kode akses 2.20.01. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip NHM.
- N.V. Maatschappij tot exploitatie van de suikerfabriek Wonoredjo (P.T. Perusahaan pengeksploitasi pabrik gula Wonorejo), 1892-1907, dan N.V. Landbouwmaatschappij en

suikerfabriek Wonoredjo (P.T. Perusahaan Pertanian dan pabrik gula Wonorejo), 1907-1939, kode akses 2.20.01. Jawa.

Yang ditaruh dalam arsip NHM.

- Cultuurmaatschappij Wonolangan te 's-Gravenhage (Perusahaan Perkebunan di Den Haag), 1895-1963, kode akses 2.20.02.03. Jawa.
- N.V. Cultuurmaatschappij Ploembon (P.T. Perusahaan Perkebunan Plumbon), 1896-1938, kode akses 2.20.01. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip NHM.
- N.V. Cultuurmaatschappij Doekoewringin (P.T. Perusahaan Perkebunan Dukuwringin), (1867) 1897-1956, kode akses 2.20.01. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip NHM.
- N.V. Maatschappij tot exploitatie van de suikeronderneming Tjomal (P.T. Perusahaan pengeksplotasi usaha gula Comal), 1898-1968, kode akses 2.20.39. Jawa.
- N.V. Cultuurmaatschappij Tersana (P.T. Perusahaan Perkebunan Tersana), 1898-1905, dan N.V. Landbouwmaatschappij Tersana (P.T. Perusahaan Pertanian Tersana), 1905-1964, kode akses 2.20.01. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip NHM.
- Cultuurmaatschappij Balapoelang (Perusahaan Perkebunan Balapulang), 1901-1951, kode akses 2.20.02.07. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip N.V. Dusseldorp en Co Cultuurmaatschappijen te Amsterdam (P.T. Perusahaan Perkebunan Dusseldorp dan Co di Amsterdam).
- N.V. Cultuurmaatschappij Ketanggoengan-West (P.T. Perusahaan Perkebunan Ketanggungan Barat), 1904-1963, kode akses 2.20.01. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip NHM.
- N.V. Landbouwmaatschappij Poerwodadi (P.T. Perusahaan Pertanian Purwodadi), 1904-1951, kode akses 2.20.01. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip NHM.
- Cultuurmaatschappij S.F. Kadhipaten N.V. (P.T. Perusahaan Perkebunan S.F. Kadhipaten), (1858) 1905-1957 (1959), kode akses 2.20.08. Jawa.
- N.V. Cultuurmaatschappij Peterongan (P.T. Perusahaan Perkebunan Peterongan), 1907-1940, kode akses 2.20.01. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip NHM.
- N.V. Cultuurmaatschappij Bandjaratma (P.T. Perusahaan Perkebunan Banjaratma), 1908-1958, kode akses 2.20.04 dan 2.20.05. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Koloniaal Bank.
- N.V. Cultuurmaatschappij Kebon Hardjo (P.T. Perusahaan Perkebunan Kebon Harjo), 1911-1922, kode akses 2.20.01. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip NHM.
- Maatschappij tot exploitatie der Baud-landen (Perusahaan pengeksplotasi daerah-daerah Baud), 1920-1944, kode akses 2.20.37.03. Jawa.
- Cultuurmaatschappij Seboroh (Perusahaan Perkebunan Seboroh), 1920-1922, kode akses 2.20.02.05. Jawa. Yang ditaruh dalam arsip Firma Waller dan Plate.

11. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Archief voor de suikerindustrie in Nederlandsch-Indië: orgaan van het Algemeen Syndicaat. van Suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indië (Arsip untuk industri gula di Hindia-Belanda; Majalah Sindikat Umum Pengusaha Pabrik Gula di Hindia-Belanda), 1909-1934 (Soerabaja).

Jaarboek voor suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indië (Buku tahunan untuk pengusaha pabrik gula di Hindia-Belanda), 1896-1925 (Amsterdam).

Di dalamnya antara lain daftar alfabetis dari pabrik-pabrik gula di Jawa; peraturan dan perundang-undangan mengenai industri gula; rincian-rincian tentang statistik gula; daftar anggota dari Algemeen Syndicaat.

Mededeelingen van het Proefstation voor de Java-Suikerindustrie (Pengumuman dari Balai Penelitian untuk Industri Gula Jawa), 1907-1950 (Pasoeroean).

Overzicht van mededeelingen, voorschriften en regelingen van den Java Suiker Werkgevers Bond te Soerabaja (Paparan pengumuman, ketentuan, dan peraturan dari Persatuan Pemberi Kerja Gula Jawa di Surabaya) (cetakan ke-4, diolah sampai 1 Desember 1939, Surabaya).

Verslag van de Suiker-Enquêtecommissie (Laporan Komisi Angket Gula), 1921 (Soerabaja / Surabaya).

Handelingen en Bijlagen van de Volksraad (Notula dan lampiran dari Dewan Rakyat). Lihat antara lain pidato-pidato dari para direktur Landbouw, Nijverheid en Handel (Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan); dari Economische Zaken (Urusan Ekonomi); dan dari Regeringsgemachtigde voor Algemene Zaken in de Volksraad (Yang Diberi Kuasa Pemerintah untuk Urusan Umum di Dewan Rakyat).

Staatsblad van Nederlandsch-Indië, met Bijbladen (Lembaran Negara Hindia-Belanda, dengan Lembaran Tambahan).

Untuk berkas ini digunakan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1921 no. 813 dan *Bijblad* no. 6584.

Daftar Pustaka

Bak, A.G. (1942), *Geschiedenis van het ontstaan van den Beniso geschetst ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan* ('s-Gravenhage: Beniso).

Catatan: Juga ada dalam arsip Beniso, nomor inventaris 17.

Creutzberg, P. ed. (1972-1975), 'Inleiding' dalam Bab 'De restricties', *Het economisch beleid in Nederlandsch-Indië* (4 jild; Groningen: Wolters-Noordhoff).

Dijk, Kees van (2007), *The Netherlands Indies and the Great War 1914-1918* (Leiden: KITLV Press).

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jild; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *Suiker* (IV, hlm. 174-184; VI, hlm. 882-885), lema *Fabriekeordonnantie* (I, hlm. 697-698), dan lema *Kantoor van Arbeid* (V, hlm. 390-399).

Graaff, Bob de dan Elsbeth Locher-Scholten (2007), *J.P. Graaf van Limburg Stirum, 1873-1948; Tegendraads landvoogd en diplomaat* (Zwolle: Waanders).

Handboek van cultuur- en handelondernemingen in Nederlandsch-Indië (1888-1940; 52 jild, Amsterdam: De Bussy).

Mandere, H.Ch.G.J. van der (1928), *De Javasuikerindustrie in heden en verleden, gezien in het bijzonder in hare sociaal-economische beteekenis* (Amsterdam: Bureau Industria).
Catatan: Van der Mandere adalah sekretaris Beniso.

Taselaar, Arjen (1998), *De Nederlandse koloniale lobby; Ondernemers en de Indische politiek 1914-1940* (Leiden: Research School CNWS).

Tichelaar, J.J. (1927), *De Java-Suikerindustrie en hare beteekenis voor land en volk* (Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indië).

Catatan: Tichelaar adalah chef van de Economisch-Statistische afdeling van de Java Suiker Werkgevers Bond (kepala bagian Ekonomi-Statistik dari Persatuan Pemberi Kerja Gula Jawa).

39 **Gouvernement en bergcultures (Pemerintah dan budidaya tanaman gunung)**

Dengan *Gouvernementsbesluit* (Keputusan Pemerintah) tanggal 23 Juni 1913 (*Bijblad /* Lembaran tambahan no. 7858) dibentuk sebuah komisi yang harus memberikan nasihat kepada pemerintah, para kepala departemen, dan para kepala pemerintah daerah mengenai industri pertanian di Jawa dengan pengecualian industri gula. Badan pengurus harian *Nederlandsch-Indisch Landbouwsyndicaat / NILS* (Sindikat Pertanian Hindia Belanda) (1908) dibebani dengan pelaksanaan pekerjaan itu. NILS adalah bentuk hubungan kerja sama dari perhimpunan dan partikulier dalam budidaya tanaman gunung di Jawa: kopi, teh, kina, dan karet. Tujuan NILS adalah untuk menjaga kepentingan anggotanya dalam arti yang paling luas. Seperti organisasi yang setara, *Algemeen Syndicaat van de Suikerfabrikanten* (Sindikat Umum Pengusaha Pabrik Gula), NILS juga secara teratur harus berunding dengan pemerintah Hindia, misalnya mengenai masalah pajak, upah minimum, dan tarif angkutan. Pada tahun 1925 NILS direorganisasi menjadi *Algemeen Landbouwsyndicaat / ALS* (Sindikat Pertanian Umum), sebuah federasi yang terdiri dari empat ikatan pemilik perusahaan, masing-masing perusahaan kopi, teh, kina, dan karet. ALS mempunyai perwakilan di Belanda. Pada tahun 1929, pemberian *advis* tentang masalah umum, seperti masalah perpajakan dan perundang-undangan tenaga kerja, dialihkan kepada *Indische Ondernemersbond* (Perhimpunan Pengusaha Hindia): selanjutnya, *Landbouwsyndicaat* (Sindikat Pertanian) hanya memusatkan perhatian mereka pada masalah-masalah yang terkait dengan budidaya tanaman gunung saja.

Krisis ekonomi tahun 1929 dan depresi yang terjadi berikutnya merupakan alasan pemerintah Hindia untuk melibatkan diri secara sungguh-sungguh dengan budidaya tanaman gunung. Perkembangan dalam pelibatan itu dilakukan secara bertahap. Budidaya tanaman kopi, yang pada dekade terakhir abad ke-19 didera penyakit daun, berkembang kembali setelah tahun 1900. Pada akhir Perang Dunia Pertama (1914-1918), budidaya tanaman teh menguat. Setelah tahun 1920, perkembangan budidaya tanaman karet sangat mencuat. Dalam bidang tanaman kina, Hindia-Belanda mempunyai posisi monopoli: pada abad ke-20 Hindia-Belanda bisa memenuhi 97% kebutuhan dunia.

Penurunan harga karet yang tajam menyebabkan adanya persetujuan internasional pada tahun 1934 antara Belanda, Inggris, Perancis, dan Thailand untuk membatasi jumlah produksi mereka. Pemerintah Hindia dengan sukses berhasil mencoba *bevolkingsrubbercultuur* (budidaya tanaman karet rakyat) dalam pemasokan berdasarkan kuota yang sudah ditentukan. Perjanjian, yang berlaku untuk 5 tahun, pada tahun 1939 diperpanjang lagi untuk periode yang sama. Setelah gagalnya perundingan internasional antarprodusen teh untuk mengurangi produksi, maka pemerintah Hindia-Belanda, Hindia-Britania, dan Srilanka pada tahun 1933 membuat suatu *restrictieovereenkomst* (perjanjian pembatasan) selama 5 tahun. Pelaksanaan perjanjian pembatasan itu dibebankan kepada *International Tea Committee* (Komite Teh Internasional). Negara-negara yang terlibat mempunyai wakil-wakil di organisasi tersebut. Perjanjian itu juga diperpanjang pada tahun 1938. Dalam rangka kerja sama ekonomi antara

Belanda dan Hindia-Belanda, pada tahun 1936 dibuat sebuah *koffiesteunregeling* (sistem pengaturan bantuan kopi) yang mewajibkan Belanda membeli sejumlah tertentu kopi dari Hindia-Belanda. Berbeda dengan pembatasan pada produk karet dan teh (dan juga pada gula!), pembatasan pada kina (1934, yang diperpanjang lagi pada tahun 1938) bukan lebih bertujuan untuk mempertahankan tingkat harga yang wajar tetapi lebih untuk menyelaraskan produksi dengan konsumsi: perbaikan teknis memungkinkan kenaikan produksi yang potensial.

Perjanjiannya diperinci dalam peraturan yang terbentuk dari hasil perundingan dan kerja sama dengan Algemeen Landbouwsyndicaat (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1933 no. 202 sampai 209; *Javasche Courant* 26 mei 1933 no. 42). *Crisiscentrales* (Pusat-pusat krisis) dibentuk untuk kopi, teh, kina, dan karet. Gubernur-Jenderal mengangkat anggota dewan pengurus, atas rekomendasi dari Direktur Landbouw, Nijverheid en Handel (Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan). Pusat-pusat itu hanya mengeluarkan izin ekspor produk-produk tersebut kepada para anggotanya saja (antara lain ALS). Pendapatan dari empat pusat itu, disetorkan pada Ondernemingsfondsen (Yayasan Dana Perusahaan). Dari yayasan itu antara lain berbagai balai penelitian didanai. Dengan cara itu, permintaan dari Ikatan-ikatan ALS itu dipenuhi. Mereka meminta bantuan dari pemerintah, karena pendapatan mereka menjadi berkurang akibat turunnya jumlah anggota Ikatan itu, sehingga mereka tidak mampu lagi membiayai balai-balai penelitian mereka.

Perkembangan ekonomi di Hindia mengakibatkan perwakilan ALS di Belanda pada tahun 1935 digantikan oleh Federatie van Vereenigingen van Bergcultuurondernemingen / Federabo (Federasi Perhimpunan Perusahaan Perkebunan Tanaman Gunung). Yang menjadi anggota Federasi ini adalah: Internationale Vereeniging voor de Rubbercultuur in Nederlandsch-Indië (Perhimpunan Internasional Perkebunan Karet di Hindia-Belanda) (1913), di mana produsen asing juga bisa bergabung di dalam organisasi ini; Vereeniging voor de Theecultuur in Nederlandsch-Indië (Perhimpunan Perkebunan Teh di Hindia-Belanda) (1918); Koffie- en Cacao Producenten Vereeniging (Perhimpunan Produsen Kopi dan Kakao) (1925); Vereeniging voor de Kinacultuur (Perhimpunan Perkebunan Kina) (1935); dan Vereeniging voor de Kapok- en Cacaocultuur (Perhimpunan Perkebunan Kapuk dan Kakao) (1936). Federabo mengelola urusan administrasi organisasi-organisasi tersebut; memberikan penerangan sosial-ekonomis, yuridis, dan pajak; memajukan kerja sama antarorganisasi, dan menjaga kepentingan antaranggotanya, khususnya berunding dengan pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintahan. Secara rutin diadakan perundingan dengan organisasi induk Hindia, seperti misalnya dengan ALS dan juga dengan Ondernemersbond (Perhimpunan Pengusaha).

Arsip dan sumber tercetak

1. Archief van het ministerie van koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Berkas-berkas tentang ‘bergcultures’ (budidaya tanaman gunung) dan ‘gouvernementsbeleid’ (kebijakan pemerintah) dapat ditemukan dengan menggunakan akses-akses *indices* (indeks) di *openbaar archief* (arsip umum) dalam rubrik:

- a. **Periode 1850-1900** (kode akses 2.10.02; 2.10.10): ‘Afstand en verhuringen van land’ (Pelepasan dan penyewaan tanah); ‘Agrarische aangelegenheden’ (Perihal agraria); ‘Belastingen’ (Pajak); ‘Cultures’ (Budidaya Tanaman); ‘Handel’ (Perdagangan); ‘In- en uitgaande rechten en accijnzen’ (Bea dan cukai untuk masuk dan keluar); ‘Kina’ (Kina); ‘Koffie’ (Kopi); ‘Landbouw’ (Pertanian); ‘Naamloze maatschappijen / vennootschappen’ (Perseroan Terbatas); ‘Spoor- en tramwegen en stoomwezen’ (Perihal kereta api, tram, dan tenaga uap); ‘Verkoop van producten’ (Penjualan produk).
- b. **Periode na 1900** (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03): ‘Accijnzen’ (Cukai); ‘Arbeidsaangelegenheden’ (Perihal perburuhan); ‘Arbeidsinspectie’ (Inspeksi Buruh); ‘Agrarische aangelegenheden / zaken’ (Perihal agraria); ‘Belastingen’ (pajak); ‘Binnenlands Bestuur’ (Pemerintahan Dalam Negeri); ‘Cultures’ (Budidaya tanaman); ‘Erfpacht’ (Erfpah); ‘Grondbezit (rechten) / gronden’ (Hak kepemilikan tanah / tanah lahan); ‘Handel (en nijverheid; -swetgeving)’ (Perdagangan dan industri kerajinan; perundang-undangan perdagangan); ‘Inkomsten’ (Pemasukan); ‘Kininebast’ (Kulit batang Kina); ‘Kina en coca’ (Kina dan coca); ‘Koffie’ (Kopi); ‘Landbouw’ (Pertanian); ‘Naamloze vennootschappen en verenigingen’ (Perseroan Terbatas dan perhimpunan); ‘Octrooien’ (Octrooi); ‘(Politieke en) economische toestanden / zaken / rapporten en statistieken’ (Situasi / hal / laporan dan statistik politik dan ekonomi); ‘Rechtswezen’ (Sistem hukum); ‘Rubber’ (Karet); ‘Spoor- en tramwegen en stoomwezen’ (Perihal kereta api, tram, dan tenaga uap); ‘Statistiek’ (Statistik); ‘Thee’ (Teh); ‘Uitvoer’ (Ekspor); ‘Verenigingen’ (Perhimpunan); ‘Verkoop van producten’ (Penjualan produk).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks-indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang permasalahan ini sesudah tahun 1921 akses-akses *4de afdeling* (bagian ke-4) sangat penting. Pada tahun 1933 di bagian itu didirikan sebuah Bureau Economische Zaken (Biro Urusan Ekonomi). Biro itu mengurus sendiri agendanya disertai register kata kunci. Pada tahun 1938 penanganan ‘semua urusan yang termasuk dalam Departement van Economische Zaken (Departemen Urusan Ekonomi)’ dan ‘buitenlandse handel’ (perdagangan luar negeri),

ditempatkan di bagian baru, *8ste afdeling* (bagian ke-8). ‘Belastingen’ (Perpajakan) berada di bawah *2de afdeling* (bagian ke-2). Lihat kode akses 2.10.36.011.

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia) serta *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 memuat berkas-berkas tentang kebijakan yang berkaitan dengan budidaya tanaman gunung: kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.13; 2.10.36.06; 2.10.36.07 (periode setelah tahun 1900).

Berkas-berkas mengenai ‘restricties’ (pembatasan) ada dalam:

- P. Creutzberg ed. (1972-1975), *Het economisch beleid in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Wolters-Noordhoff).

2. Arsip Federatie van Vereenigingen van de Bergcultuurondernemingen / Federabo (Federasi Perhimpunan Perkebunan Tanaman Gunung), 1935-1969, kode akses 2.20.50

Arsip ini juga memuat arsip ‘Rubberstichting’ (Yayasan Karet), yang dihasilkan oleh bagian propaganda, dan kemudian dari bagian teknik Internationale Vereeniging voor de Rubbercultuur in Nederlandsch-Indië (Perhimpunan Internasional Perkebunan Karet di Hindia-Belanda).

Untuk berkas ini digunakan nomor inventaris 97, 277 dan 498.

3. Arsip kantor pusat Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V. kode akses 2.20.01

dan arsip-arsip (1784) 1824-1964 (1994), (2 jilid), yang ditaruh di tempat sama.

Di bawah *2de afdeling* (Bagian ke-2) tentang ‘cultuurzaken’ (Urusan budidaya tanaman), lihat berkas-berkas mengenai ‘bergcultures’ (budidaya tanaman gunung), ‘bergcultuurondernemingen’ (perusahaan perkebunan tanaman gunung), ‘ALS’, ‘Federabo’ (Federasi Perhimpunan Perusahaan Perkebunan Tanaman Gunung), dan semua perhimpunan yang disebutkan di dalam teks (akses, hlm. 457 dan seterusnya).

4. Arsip pribadi A. Groothoff, 1895-1969, kode akses 2.21.076

Nomor inventaris 72 berisi dosir mengenai ‘Groothoffs lidmaatschap van het International Rubber Regulation Committee’.

5. Arsip pribadi B.C. de Jonge, 1885-1958, kode akses 2.21.095

Nomor inventaris 84 berisi notula rapat-rapat luar biasa Raad van Indië (Dewan Hindia) mengenai ‘rubberrestrictie’ (pembatasan karet).

6. Daftar arsip bergcultuurondernemingen (perusahaan perkebunan tanaman gunung)

Berikut ini adalah paparan *archiefvormers* (pembentuk arsip), *archieffaren* (tahun arsip),

code van de toegang (kode akses), *producten* (produk), dan *regio* (wilayah) tempat perusahaan beroperasi:

- N.V. Deli-Maatschappij dan perusahaan-perusahaan yang berfusi dengannya, 1869-1967, kode akses 2.20.46, antara lain karet, kopi, dan teh. Sumatra.
Lihat bab 37 dalam buku panduan ini.
- Cultuurmaatschappij Sitiardja (Perusahaan Perkebunan Sitiardja), 1877-1908, kode akses 2.20.37.08, antara lain kopi, kina. Jawa.
- N.V. Cultuurmaatschappij Boekit Gompong (P.T. Perusahaan Perkebunan Boekit Gompong), 1880-1915 dan N.V. Landbouwmaatschappij Boekit Gompong (P.T. Perusahaan Pertanian Boekit Gompong), 1915-1968, kode akses 2.20.01, antara lain kopi, kina, teh. Sumatra.
Yang ditaruh dalam arsip NHM.
- Maatschappij tot exploitatie van het land Widowaren (Perusahaan pengeksploitasi daerah Widowaren) (juga: Widodaren), 1885-1914, kode akses 2.20.02.13. Kopi. Jawa.
- Cultuurmaatschappij Soekawana (Perusahaan Perkebunan Sukawana), 1887-1965, kode akses 2.20.02.07, Kina, teh. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip N.V. Dusseldorp dan Co. Cultuurmaatschappijen di Amsterdam (disingkat dengan Dusseldorp).
- Kopi-onderneming Silosanen (Perusahaan Kopi Silosanen), 1891-1972, kode akses 2.20.04 dan 2.20.05. Kopi. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Koloniale Bank.
- Cultuurmaatschappij Pasir Malang (Perusahaan Perkebunan Pasir Malang), 1891-1966, kode akses 2.20.02.07. Kina. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Dusseldorp.
- N.V. Cultuurmaatschappij Belirie (P.T. Perusahaan Perkebunan Belirie), 1891-1958, kode akses 2.20.04. Kopi. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Koloniale Bank.
- Cultuurmaatschappij Broembong (Perusahaan Perkebunan Broembong), 1892-1914, kode akses 2.20.07. Kopi. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip N.V. Maatschappij tot exploitatie der Verenigde Majanglanden di Amsterdam (Majanglanden).
- N.V. Cultuuronderneming Way Lima (P.T. Perusahaan Perkebunan Way Lima), 1892-1910, kode akses 2.20.41. Kopi. Sumatra.
- Cultuurmaatschappij Goenoeng Majang (Perusahaan Perkebunan Gunung Mayang), 1893-1932, kode akses 2.20.07. Kopi. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Majanglanden.
- Cultuurmaatschappij Djolotigo (Perusahaan Perkebunan Jolotigo), 1893-1959, kode akses 2.20.37.12. Teh. Jawa.
- N.V. Lebak Roto Cultuurmaatschappij (P.T. Perusahaan Perkebunan Lebak Roto), (1887) 1893-1958, kode akses 2.20.01, antara lain kopi, karet. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip NHM.
- N.V. Cultuuronderneming Kedongdong (P.T. Perusahaan Perkebunan Kedongdong), 1894-1901, kode akses 2.20.41, antara lain kopi, kakao. Sumatra.

- Cultuurmaatschappij Kali Badjing (Perusahaan Perkebunan Kali Baging), 1895-1914, kode akses 2.20.07. Kopi. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Majanglanden.
- Preanger Landbouwmaatschappij (Perusahaan Perkebunan Priangan), 1895-1939, kode akses 2.20.02.07, antara lain kopi, teh, kakao. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Dusseldorp.
- Cultuurmaatschappij Redjo Agoeng (Perusahaan Perkebunan Rejo Agung), 1896-1926, kode akses 2.20.07. Kopi. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Majanglanden.
- Cultuurmaatschappij Goenoeng Malang (Perusahaan Perkebunan Gunung Malang), 1896-1966, kode akses 2.20.02.07. Teh, kina. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Dusseldorp.
- Cultuurmaatschappij Soember Bopong (Perusahaan Perkebunan Sumber Bopong), 1897-1923, kode akses 2.20.07. Kopi. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Majanglanden.
- Cultuurmaatschappij Wono Djati (Perusahaan Perkebunan Wono Jati), 1897-1914 (1917), kode akses 2.20.07. Kopi, karet. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Majanglanden.
- Cultuurmaatschappij Soekaboemi (Perusahaan Perkebunan Sukabumi), 1898-1919, kode akses 2.20.07. Kopi. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Majanglanden.
- Oost-Java Rubbermaatschappij N.V. (P.T. Perusahaan Perkebunan Karet Jawa Timur), 1898-1969, kode akses 2.20.02.12. Karet, kopi. Jawa.
Berisi laporan tahunan tentang perusahaan perkebunan (kopi) yang berfusi dengan Oost-Java Rubbermaatschappij (Perusahaan Perkebunan Karet Jawa Timur), yaitu: Pantjoer Sari; Soember Djeroe; Soember Bokor; Kali Klepoe; Soemer Kerto.
- Landbouwmaatschappij Kalassan (Perusahaan Pertanian Kalassan), 1900-1906, kode akses 2.20.07, antara lain kopi. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Majanglanden.
- N.V. Cultuurmaatschappij Alas Tledak (P.T. Perusahaan Perkebunan Alas Tledak), 1901-1925, kode akses 2.20.07, antara lain kopi. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Majanglanden.
- N.V. Cultuurmaatschappij Klein Getas (P.T. Perusahaan Perkebunan Klein Getas), 1901-1959, kode akses 2.20.04 en 2.20.05. Kopi, karet. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Koloniale Bank.
- N.V. Landbouwmaatschappij Pager Alam (P.T. Perusahaan Pertanian Pager Alam), 1902-1971, kode akses 2.20.04 en 2.20.05. Kopi. Sumatra.
Yang ditaruh dalam arsip Koloniale Bank.
- Landbouwmaatschappij Geboengan (Perusahaan Pertanian Gebungan), 1904-1942, kode akses 2.20.37.10, antara lain kopi, karet, kina. Jawa.
- Cultuurmaatschappij Penataram (Perusahaan Perkebunan Penataram), 1905, 1955-1970, kode akses 2.20.07, antara lain kopi. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Majanglanden.
- N.V. Java Caoutchouc Company, 1907-1970, kode akses 2.20.02.05. Karet. Jawa.

Yang ditaruh dalam arsip Firma Waller en Plate.

- Landbouwmaatschappij Ngroesrie (Perusahaan Pertanian Ngrusri) (juga: Ngoesrie), 1908-1932, kode akses 2.20.07, antara lain kopi, karet. Jawa.

Yang ditaruh dalam arsip Majanglanden.

- Preanger Rubbermaatschappij (Perusahaan Perkebunan Karet Priangan), 1909-1968, kode akses 2.20.07 en 2.20.37.07. Karet. Jawa.

Yang ditaruh dalam arsip Majanglanden.

- Cultuurmaatschappij Mangli (Perusahaan Perkebunan Mangli), 1909-1957, kode akses 2.20.07. Kopi, karet. Jawa.

Yang ditaruh dalam arsip Majanglanden.

- N.V. Landbouwmaatschappij Soekamadjoe (P.T. Perusahaan Perkebunan Soekamadjoe), 1909-1959, kode akses 2.20.04. Teh, karet. Jawa.

Yang ditaruh dalam arsip Koloniale Bank.

- Nederlandsche Rubbermaatschappij te Amsterdam (Perusahaan Perkebunan Karet Belanda di Amsterdam), 1909-1923, kode akses 2.20.02.11, antara lain karet. Sumatra.
- N.V. Nederlandsch-Indisch Landsyndicaat, 1910-1964, kode akses 2.20.01, antara lain kopi, karet, teh, kina; antara lain Sumatra.

Yang ditaruh dalam arsip NHM.

- N.V. Thee-onderneming Patoeahwattee (P.T. Perusahaan Perkebunan Patoeahwattee), 1910-1926, kode akses 2.20.06.01. Teh. Jawa.

Yang ditaruh dalam arsip N.V. Handelsvennootschap v/h Maintz en Co.

- Theecultuuronderneming Pangheotan (Perusahaan Perkebunan Teh Pangeotan), 1911-1974, kode akses 2.20.37.11. Teh. Jawa.
- N.V. Cultuurmaatschappij Ngredjo (P.T. Perusahaan Perkebunan Ngredjo), dan beberapa perusahaan cabangnya, 1911-1970, kode akses 2.20.02.05, antara lain kopi. Jawa.

Yang ditaruh dalam arsip Firma Waller en Plate.

- N.V. Serdang Cultuurmaatschappij (P.T. Perusahaan Perkebunan Serdang), 1917-1964, kode akses 2.20.01, antara lain karet, teh. Sumatra.
- Maatschappij tot exploitatie der Baud-landen (Perusahaan Pengeksplotasi Wilayah Baud), 1920-1944, kode akses 2.20.37.03, antara lain teh, karet. Jawa.
- N.V. Cultuurmaatschappij tot exploitatie der d'Abolanden (P.T. Perusahaan Pengeksplotasi Wilayah Dabo), 1924-1954, kode akses 2.20.04, antara lain teh, kopi, kina. Jawa.

Yang ditaruh dalam arsip Koloniale Bank.

- Rubber- en Handelsmaatschappij Djambi (Perusahaan Dagang dan Karet Jambi), 1925-1970, kode akses 2.20.07. Karet. Sumatra.

Yang ditaruh dalam arsip Majanglanden.

- N.V. Cultuurmaatschappij Meloewoeng (P.T. Perusahaan Perkebunan Meluweng), (1907) 1927-1957, kode akses 2.20.01. Karet. Jawa.

Yang ditaruh dalam arsip NHM.

- Cultuurmaatschappij Lodaja (Perusahaan Perkebunan Lodaja), 1927-1966, kode akses 2.20.02.07. Kina. Jawa.

Yang ditaruh dalam arsip Dusseldorp.

- N.V. Cultuurmaatschappij Leidong West (Leidwest) (P.T. Perusahaan Perkebunan Leidong Barat), 1927-1960, kode akses 2.20.04. Karet. Sumatra.
Yang ditaruh dalam arsip Koloniale Bank.
- Cultuurmaatschappij Pasir Nancha (Perusahaan Perkebunan Pasir Nancha), 1929-1965, kode akses 2.20.02.07. Teh. kina. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Dusseldorp.
- N.V. Sumatra Caoutchouc Maatschappij (Sumcana) (P.T. Perusahaan Perkebunan Karet Sumatra), 1930-1960, kode akses 2.20.04. Karet. Sumatra.
Yang ditaruh dalam arsip Koloniale Bank.
- N.V. Landbouwmaatschappij Mergokarahardjan (P.T. Perusahaan Pertanian Mergokaraharjan), 1930-1958. Karet. Jawa.
- Cultuurmaatschappij Lidjeng (Perusahaan Perkebunan Lijeng), 1935-1955, kode akses 2.20.07. Kopi, karet. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Majanglanden.
- N.V. Nederlandsch-Indische Rubber- en Koffie Cultuurmaatschappij (Nedinrub) (P.T. Perusahaan Perkebunan Karet dan Kopi Hindia-Belanda), 1938-1960, kode akses 2.20.04. Karet, kopi. Jawa, Sumatra.
Yang ditaruh dalam arsip Koloniale Bank.
- N.V. Cultuurmaatschappij Batoe Lempit (P.T. Perusahaan Perkebunan Batu Lempit), 1940-1960, kode akses 2.20.04. Kopi. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Koloniale Bank.
- N.V. Cultuurmaatschappij Goenoeng Boeleud (P.T. Perusahaan Perkebunan Gunung Buleud), 1941-1967, kode akses 2.20.02.05. Teh, karet. Jawa.
Yang ditaruh dalam arsip Firma Waller en Plate.

7. Arsip perorangan dan arsip keluarga yang berikut ini berisi berkas-berkas tentang ‘bergcultuurondernemingen’ (perusahaan budidaya tanaman gunung):

- Arsip teh Hindia keluarga Van der Hucht, kode akses 2.21.181.22. Arsip itu merupakan kumpulan arsip keluarga dan arsip perusahaan yang ditambahkan dengan dokumentasi tentang sebuah kompleks perusahaan teh dan kina di Jawa. Keluarga yang paling penting adalah: Van der Hucht, Kerkhoven, Holle, dan Van den Berg. Arsip Nasional mengelola hanya sebagian dari dokumen tersebut, yaitu arsip yang berkaitan dengan K.F. Holle, 1867-1992.
- Arsip-arsip yang berasal dari anggota keturunan Gevers dan yang masih ada hubungan keluarga dengannya, kode akses 2.21.070.
Di dalamnya ada berkas dari jhr. Abraham Gevers, pedagang dan pemilik tanah di Batavia. Materinya mengenai Koffielanden (Perkebunan kopi) Djati Rongo dan Soedomoekti 1847-1855, dan Theeonderneming (Perusahaan teh) Indramajoe, 1847-1894 (semuanya di Jawa).
- Arsip pribadi H.W.S. van Hooff sr., kode akses 2.21.183.31. Van Hooff adalah administrator pada beberapa perusahaan budidaya tanaman. Arsip itu memuat banyak

berkas mengenai perkebunan teh pada umumnya, dan mengenai Cultuurmaatschappij Tjiboengoer (Perusahaan Perkebunan Cibungur) (1904-1928; antara lain teh dan karet; Jawa); Cultuurmaatschappij Parakan-Salak (Perusahaan Perkebunan Parakan-Salak) (1916-1927; teh, karet; Jawa); Cultuurmaatschappij Tjibarenno (Perusahaan Perkebunan Cibarenno) (1917-1924; teh, karet; Jawa); Landbouwmaatschappij Melattie (Perusahaan Pertanian Melati) (1921-1927; teh, karet; Jawa), dan Rubberonderneming Mataram (Perusahaan Perkebunan Karet Mataram) (1923-1924; Jawa).

- Arsip pribadi A. Groothoff, 1895-1969, kode akses 2.21.076.
Groothoff ikut ambil bagian di beberapa perusahaan budidaya tanaman. Arsipnya memuat tentang Cultuuronderneming Baros (Perusahaan Perkebunan Baros) (1923-1934; teh, karet; Jawa); Cultuurondernemingen Tjirangkasbitong dan Bangsasinga (Perusahaan Perkebunan Cirangkasbitung dan Bangsasinga) (1924-1929; karet; Jawa).
- Arsip pribadi Nyonya W.J. Haisma-Rahder, 1922-1941, kode akses 2.21.183.27.
Nyonya Haisma adalah seorang wakil dari Algemeene Vereeniging voor Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (AVROS) pada Indische Ondernemersbond. Arsipnya berisi Mededelingen (Berita-berita) dari pengurus AVROS dan berkas-berkas mengenai 'internationale theerestrictie overeenkomst' (persetujuan pembatasan teh internasional) (1938).
- Akhirnya harus disebut juga arsip N.V. Nederlandse Rubber-Unie, 1925-1932, kode akses 2.20.44 (pemborong dan pengelola karet dari perkebunan rakyat) dan arsip Vereniging van Kinabastproducenten (Perhimpunan produsen kulit batang Kina), 1928-1966, kode akses 2.20.04.
Yang ditaruh dalam arsip Koloniale Bank.

8. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Archief voor de Koffiecultuur in Nederlandsch-Indië (Arsip Perkebunan Kopi di Hindia-Belanda), 1927-1949 (Batavia: Ruygrok).

Archief voor de Theecultuur in Nederlandsch-Indië (Arsip Perkebunan Teh di Hindia-Belanda), 1927-1953 (Batavia: Ruygrok).

Cinchona, archief voor de Kinacultuur (Cinchona, Arsip Perkebunan Kina), 1924-1951. (Tjinjioean).

Archief voor de Rubbercultuur in Nederlandsch-Indië (Arsip Perkebunan Karet di Hindia-Belanda), 1917-1953 (Buitenzorg: Archipel).

Verslag van het Nederlandsch-Indisch Landbouw Syndicaat (Laporan dari Sindikat Pertanian Hindia-Belanda) 1908-1927 (Soerabaja: Fuhri).

De Bergcultures: officieel orgaan van het Algemeen Landbouw Syndicaat (Bergcultures: majalah resmi ALS), 1926-1957 (Batavia: Algemeen Landbouw Syndicaat).

Di samping merupakan bagian resmi ALS, majalah ini juga merupakan bagian dari Zuid- en West Sumatrasyndicaat (Sindikat Sumatra Selatan dan Sumatra Barat), Centrale Vereniging tot beheer van Proefstations voor overjarige cultures in Indonesië (Balai Penelitian untuk tanaman tua di Indonesia) dan Algemeene Vereeniging voor Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (Perhimpunan Umum Pengusaha Perkebunan Karet di Pantai Timur Sumatra) (AVROS).

Agrarisch, fiscaal, juridisch, sociaal: vraagstukken Nederlandsch-Indië betreffende: Federatie van vereenigingen van Nederlandsch-Indische bergcultuurondernemingen (Agraris, fiskal, yuridis, sosial: permasalahan Hindia-Belanda mengenai: Federasi Perhimpunan Perusahaan Perkebunan Tanaman Gunung Hindia-Belanda), 1938-1940 (Amsterdam).

Handelingen en Bijlagen van de Volksraad (Notula dan lampiran dari Dewan Rakyat) Lihat antara lain pidato direktur Landbouw Nijverheid en Handel (Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan) dan Economische Zaken (Urusan Ekonomi) di Volksraad (Dewan Rakyat).

Staatsblad van Nederlandsch-Indië, met Bijbladen (Lembaran Negara Hindia-Belanda, dengan Lembaran Tambahan).

Untuk berkas ini digunakan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1933 no. 202 sampai 209 dan Lembaran Tambahan no. 7858.

Daftar Pustaka

Creutzberg, P. (1972-1975), 'Inleiding' dalam Bab 'De restricties', *Het ekonomisch beleid in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Wolters-Noordhoff).

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *Kantoor van Arbeid* (V, hlm. 390-399); lema *Koffie, gouvernements* (II, hlm. 385-399); lema *Vereenigingen* (IV, hlm. 540-554).

Feuilletau de Bruyn, W.K.H. (1941), *Tien moeilijke jaren voor landbouw en industrie in Nederlands-Indië 1930-1940* (Deventer: Van Hoeve).

Handboek van cultuur- en handelsoondernemingen in Nederlandsch-Indië (1888-1940, 52 jilid; Amsterdam: De Bussy).

Hoedt, Th.G.E. (1930), *Indische bergcultuurondernemingen voornamelijk in Zuid-Sumatra* (Wageningen: Veenman).

Van der Kamp, Jan Bartholomeus (1955), *De bedrijfsverenigingen in de overjarige ondernemingsculturen van Indonesië; In het bijzonder in het gebied van het Algemeen Landbouw Syndicaat en het Zuid- en West Sumatra Syndicaat* (Jakarta: Ruijgrok).

Taselaar, A.P. (1968), *De Nederlandse koloniale lobby; Ondernemers en de Indische politiek* (Leiden : Research School CNWS, School of Asian, African, and Amerindian Studies).

Wal, S.L. van der ed. (1968), *Herinneringen van jhr. mr. B.C. de Jonge, met brieven uit zijn nalatenschap* (Groningen: Wolters-Noordhoff).

Catatan: ada banyak perhatian pada *rubberrestrictie* (pembatasan karet).

40 **Gouvernement en ondernemers (Pemerintah dan pengusaha)**

Pada tanggal 24 Agustus 1921 atas prakarsa Presiden Nederlandsche Handel-Maatschappij / NHM (Maskapai Dagang Belanda), C.J.K. van Aalst, didirikan Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië / Onrani (Dewan Pengusaha untuk Hindia-Belanda). Ini terjadi akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan Gubernur-Jenderal J.P. van Limburg Stirum (1916-1921), yang menurut pandangan dunia usaha lebih memperhatikan kepentingan masyarakat Indonesia daripada kepentingan ekonomi. Hal itu antara lain terlihat dari niatnya untuk menjadikan bagian areal gula untuk budidaya paksa padi. Periode singkat dari konjungtur tinggi sesudah Perang Dunia Pertama (1914-1918) menyebabkan peluasan aparat pegawai dan peningkatan pengeluaran pemerintah: terutama pengeluaran luar biasa yang dapat dipinjamkan, meningkat kuat. Semua pegawai itu dengan ketentuan dan peraturan mereka tidak hanya memiliki nilai gangguan tetapi juga memakan banyak uang pajak. Hutang yang tinggi merusak *kredietwaardigheid* (kreditabilitas) dari Hindia. Bukan pemerintah tetapi para pengusaha barat yang terbaik dan paling siap memakmurkan tanah jajahan: mereka memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengeksploitasi kekayaan alam dan mereka menyediakan kesempatan kerja. Pemerintah harus memberikan jalan yang bebas bagi mereka.

Dewan Pengusaha (untuk Hindia-Belanda) mengurus kepentingan umum dari para pemilik dan direksi kepala perusahaan-perusahaan Hindia yang tinggal di Belanda, terutama di bidang pajak dan perundang-undangan perburuhan. Ini terjadi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan, menyebarkan peraturan dan perundang-undangan yang relevan, menyusun advis tentang rencana kebijakan ekonomi, dan menampilkan diri secara intern dan ekstern sebagai satu organisasi. Perusahaan-perusahaan suri teladan seperti NHM, Deli-Maatschappij, Billiton-Maatschappij, dan Koninklijke Paketvaart-Maatschappij / KPM (Perusahaan Pelayaran Kerajaan), dan juga sejumlah *cultuur- en handelsondernemingen* (perusahaan dagang dan budidaya tanaman), *vervoersmaatschappijen* (perusahaan angkutan), dan *nutsondernemingen* (perusahaan umum) adalah anggota Dewan Pengusaha. Bersama-sama mereka membentuk jaringan yang berpengaruh dengan relasi-relasi dalam politik. Kantor pusat Dewan di Kneuterdijk Den Haag tersebut terletak dalam jarak jalan kaki ke Kementerian Urusan Tanah Jajahan.

Kepengurusannya terdiri atas para wakil dari semua kelompok perusahaan anggota yang tercakup: ‘verkeerswezen te land’ (urusan lalu lintas di negeri); ‘transoceanische en Oost-Aziatische stoomvaart’ (pelayaran kapal uap lintas samudra dan Asia-Timur); ‘suiker-, rubber-, thee- en koffiecultuur; kinacultuur en kinafabricatie’ (budidaya gula, karet, teh, dan kopi; budidaya dan fabrikasi kina); ‘Sumatra- en Oost-Java tabakscultuur’ (budidaya tembakau Sumatra dan Jawa Timur); ‘Vorstenlandse cultures’ (budidaya tanaman di keempat wilayah kerajaan);⁵⁰ ‘nieuwere cultures (oliepalm; cassave en sisal)’ (budidaya tanaman yang lebih baru: minyak kelapa sawit; singkong dan sisal); ‘bankwezen (de Nederlandsche Handel-Maatschappij vormde een aparte groep)’ (perbankan, NHM membentuk kelompok yang

⁵⁰ Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kerajaan Mangkunegara, dan Kerajaan Paku Alam.

tersendiri); ‘industrie in het algemeen’ (industri pada umumnya); ‘petroleum- en mijnbouwindustrie’ (industri pertambangan dan minyak bumi); ‘export- en importhandel’ (perdagangan ekspor-impor); ‘gas- en electriciteitsbedrijven’ (perusahaan-perusahaan gas dan listrik). Pada tahun 1931 ditambah lagi dengan satu kelompok perusahaan anggota: ‘luchtvaart’ (angkutan udara). Pengangkatan seorang ketua banyak mendapat perhatian. Ketua yang pertama dan yang paling lama memegang jabatan (1921-1931) adalah M.W.F. Treub, gurubesar, publisist, dan politikus. Sebagai Minister van Financiën (Menteri Keuangan) dalam kabinet Cort van der Linden (1913-1918), ia berhasil melakukan peninjauan pajak yang penting dan menjadi *fiscaal expert* (ahli pajak): bukan tidak penting di periode saat pemerintah Hindia melakukan persiapan peninjauan sistem pajak. Topik itu kemudian dikemukakan oleh Treub sewaktu kunjungan pertamanya di Hindia yang laporannya dimuat dalam bukunya *Nederland in de Oost* (1923). Setelah tiba, ia diterima oleh Gubernur-Jenderal D. Fock (1921-1926) dan ia melakukan banyak sekali pembicaraan, antara lain dengan sekretaris Belastingherzieningscommissie (Komisi Peninjauan Pajak), E.P. Wellenstein. Ia juga hadir pada saat pendirian Ondernemersbond (Perhimpunan Pengusaha) pada tanggal 11 November 1922, bandingan dari Ondernemersraad (Dewan Pengusaha) untuk para pemilik dan direksi perusahaan yang tinggal di Hindia. Seperti halnya Dewan Pengusaha, Perhimpunan Pengusaha menjadi jaringan yang berarti. Kedua organisasi tersebut bekerja mandiri tetapi melalui musyawarah keduanya saling menyesuaikan strategi mereka. Kedua organisasi itu memiliki pengaruh besar atas terbentuknya ‘Ordonnantie inzake de vennootschapsbelasting’ (Ordonansi mengenai pajak perseroan) pada tahun 1925 dan berhasil mencapai bahwa sanksi hukuman tetap terus dipertahankan sampai tahun 1931. Pada tahun 1929 Gubernur-Jenderal A.C.D. de Graeff (1926-1931) memutuskan bahwa Ondernemersbond (Perhimpunan Pengusaha) selanjutnya harus memberikan advis tentang hal-hal umum (perpajakan dan perihal perburuhan) kepada pemerintah Hindia: sampai sejauh itu Algemeen Landbouw Syndicaat (Sindikatan Pertanian Umum) yang melakukannya. Perhimpunan itu dalam Volksraad (Dewan Rakyat) diwakili dalam Economische Groep (Kelompok Ekonomi). Ketua Perhimpunan, G.H.C. Hart pada tahun 1934 menjadi direktur dari Departement van Economische Zaken (Departemen Urusan Ekonomi).

Ondernemersraad (Dewan Pengusaha) dicirikan oleh sosial-demokrat W.H. Vliegen sebagai *opperregering* (pemerintah atas). Mantan Direktur Keuangan, C.W. Bodenhausen, berpendapat sama: pada tahun 1927 ia menyampaikan keluhannya kepada penguasa negeri tentang Menteri Urusan Tanah Jajahan, yang begitu menerima advis-advisnya langsung mengirimkannya ke Ondernemersraad untuk ditanggapi. Gubernur-Jenderal De Graeff berusaha mematikan Ondernemersraad dengan cara mengusulkan kepada Menteri agar memfungsikan Ondernemersbond sebagai badan penasihat resmi dari pemerintah Hindia. Dalam hubungan ini ia mengacu pada posisi otonom yang diperoleh oleh Hindia sebagai dampak pemberlakuan Wet op de Staatsinrichting (Undang-Undang Tata Negara) pada tahun 1925 dalam kerajaan Belanda. Ondernemersraad menanggapi hal ini dengan pernyataan bahwa Ondernemersbond tidak akan lagi memberikan advis jika penguasa negeri akan mendapatkan kehendaknya. Menteri Urusan Tanah Jajahan J.C. Koningsberger (1926-1929) menolak usulan De Graeff.

Krisis pada tahun 1929 dan depresi yang menyusul menjadikan adanya pendekatan antara pengusaha dan pemerintah Hindia. Gubernur / pemerintah turun membantu ketika para pengusaha tidak mampu lagi membiayai sendiri stasiun-stasiun percobaannya. Indische Ondernemersbond (Perhimpunan Pengusaha Hindia) dimintai bantuan membuat peraturan krisis. Akibatnya juga, para pengusaha itu terlibat dalam ketegangan yang memuncak antara Batavia dan Den Haag tentang kerja sama finansial-ekonomi.

Arsip dan sumber yang tercetak

1. Arsip Menteri van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1900

Informasi umum tentang tatanan, akses, seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Berkas-berkas mengenai Ondernemersraad / Ondernemersbond (Dewan Pengusaha / Perhimpunan Pengusaha), surat dan advis dari organisasi-organisasi yang berkepentingan ini dapat ditemukan dengan bantuan akses (*indices* 'indeks') pada *openbaar archief* (arsip umum), dalam rubrik-rubrik berikut:

- a. **Periode setelah tahun 1900** (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03): 'Agrarische zaken' (Urusan agraria); 'Arbeidsaangelegenheden / poenale sancties' (Perihal perburuhan / sanksi hukuman); 'Belastingen' (Perpajakan); 'Erfpacht' (Erfpach); 'Grondbezit / gronden' (Kepemilikan tanah / tanah lahan); 'Handel' (Perdagangan).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang Ondernemersraad dan Ondernemersbond sesudah tahun 1921, akses-akses berikut adalah penting: *1ste afdeling* (bagian ke-1), *2de afdeling* (bagian ke-2), dan *4de afdeling* (bagian ke-4). Pada tahun 1933 pada bagian ke-4 didirikan Bureau Economische Zaken (Biro Urusan Ekonomi) yang tersendiri. Biro itu mengatur agendanya sendiri, dengan register kata kunci. Penanganan dari semua urusan, yang termasuk pada Departemen Urusan Ekonomi dan perdagangan luar negeri, pada tahun 1938 ditempatkan pada *8ste afdeling* (bagian ke-8) yang baru. Lihat kode akses 2.10.36.011.

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia) dan *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 berisi juga bahan penting: kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.13; 2.10.36.06; 2.10.36.07 (periode setelah tahun 1900).

2. Arsip Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië / Indonesië (Dewan Pengusaha untuk Hindia-Belanda / Indonesia), 1921-1968, kode akses 2.20.02.01

Arsip ini berisi juga berkas-berkas dari Indische Ondernemersbond (Perhimpunan Pengusaha Hindia).

3. Arsip kantor pusat Nederlandsche Handel-Maatschappij / NHM (Maskapai Dagang Belanda), kode akses 2.20.01

dan arsip-arsip (1784) 1824-1964 (1994), (2 jilid), yang ditaruh bersama. Untuk berkas-berkas tentang ‘Ondernemersraad’, lihat hlm. 479-484 dari inventaris.

4. Arsip pribadi Ch.J.I.M. Welter, 1900-1973, kode akses 2.21.175

Welter adalah ketua Ondernemersraad pada tahun 30-an: lihat nomor inventaris 11 s/d 15.

5. Arsip pribadi G.A.Ph. Weijer (juga dieja sebagai Weyer), 1936-1966, kode akses 2.21.183.95

Weyer menggantikan G.H.C. Hart sebagai ketua Indische Ondernemersbond. Lihat nomor inventaris 31, 42, 45.

6. Daftar arsip dari ‘ondernemingen’ (perusahaan), ‘instellingen en bedrijven’ (lembaga dan perusahaan), menurut pembagian Ondernemersraad

Yang dimuat adalah arsip-arsip dari pelbagai organisasi yang berada di bawah kelompok dari Onrani. Beberapa kelompok digabung. Sedapat mungkin diacu ke bab-bab dalam buku panduan ini. Yang dicantumkan adalah *archiefvormers* (pembentuk arsip), *archieffjaren* (tahun arsip), dan *code van de toegang* (kode akses).

Verkeerswezen te land (groep 1) / Urusan lalu lintas di negeri (kelompok 1)

- Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij te 's-Gravenhage (Jawatan Kereta Api Hindia-Belanda di Den Haag), 1842-1979, kode akses 2.20.10 dan 2.20.52.
- Vier Zustermaatschappijen (Semarang-Cheribon; Semarang-Joana; Oost-Java; Serajoedal) in Nederlandsch-Indië (Empat perusahaan afiliasi: Semarang-Cirebon; Semarang-Yoana; Jawa Timur; Serayudal di Hindia-Belanda), 1880-1970, kode akses 2.20.14.01 dan 2.20.15 (register kata kunci berdasarkan dosir personil). Catatan: lihat juga berikut ini.
- Oost-Java Stoomtrammaatschappij (Jawatan Tram Uap Jawa-Timur), 1881-1944, kode akses 2.20.16.
- Semarang-Joana Stoomtrammaatschappij (Jawatan Tram Uap Semarang-Yoana), 1881-1952, kode akses 2.20.18.
- Deli-Spoorwegmaatschappij te Amsterdam (Jawatan Kereta Api Deli di Amsterdam), 1883-1970, kode akses 2.20.11.

- Bataviase Ooster-Spoorwegmaatschappij te Amsterdam (Jawatan Kereta Api Timur Batavia di Amsterdam), 1884-1914, kode akses 2.18.18.01.
- Java-Spoorwegmaatschappij te 's-Gravenhage (Jawatan Kereta Api Jawa di Den Haag), 1884-1922, kode akses 2.20.13.01.
- Probolinggo Stoomtrammaatschappij (Jawatan Tram Uap Probolinggo), 1885-1972, kode akses 2.20.13.02.
- Semarang-Cheribon Stoomtrammaatschappij (Jawatan Tram Uap Semarang-Cirebon), 1890-1953, kode akses 2.20.17.
- Kediri-Stoomtrammaatschappij en Malang-Stoomtrammaatschappij te Amsterdam (Jawatan Tram Uap Kediri dan Jawatan Tram Uap Malang di Amsterdam), 1894-1970, kode akses 2.20.12.
- Serajoedal-Stoomtrammaatschappij (Jawatan Tram Uap Serayudal), 1894-1948, kode akses 2.20.19.
- Modjokerto-Stoomtrammaatschappij (Jawatan Tram Uap Mojokerto), 1895-1970, kode akses 2.20.13.05.
- Pasoeroean-Stoomtrammaatschappij (Jawatan Tram Uap Pasuruan), 1895-1969, kode akses 2.20.13.03.
- Batavia Electriscbe Trammaatschappij (Jawatan Tram Listrik Batavia), 1896-1953, kode akses 2.20.37.09.
- N.V. Madoera-Stoomtrammaatschappij (P.T. Jawatan Tram Uap Madura), 1896-1973, kode akses 2.20.48.

Stoomvaart (transoceanisch en Oost-Aziatisch) (groepen 2 en 3) / Pelayaran Kapal Uap (lintas Samudra dan Asia-Timur) (kelompok 2 dan 3)

- Stoomvaartmaatschappij Nederland (Perusahaan Pelayaran Kapal Uap Belanda), 1853-1972, kode akses 2.20.23.
- Koninklijke Paketvaartmaatschappij te Amsterdam (Perusahaan Pelayaran (Pelayanan Pos) Kerajaan di Amsterdam), 1892-1970, kode akses 2.20.58.01; 2.20.59; 2.20.21; 2.20.35.
- Koninklijke Java China Paketvaart Lijnen te Amsterdam (Perusahaan Pelayaran (Pelayanan Pos) Kerajaan Lintas Jawa-Cina di Amsterdam), 1903-1970, kode akses 2.20.58.02; 2.20.59; 2.20.22; 2.20.35.

Suikercultuur (groep 4) / Budidaya gula (kelompok 4)

- Untuk rincian tentang perusahaan-perusahaannya, lihat Bab 38 'Suikerpolitiek / Politik gula' dalam buku panduan ini.

Bergcultures (rubber, thee, koffie, kina) (groepen 5 t/m 8) / Budidaya tanaman pegunungan (karet, teh, kopi, kina) (kelompok 5 s/d 8)

- Untuk rincian tentang perusahaan-perusahaannya, lihat Bab 39 'Gouvernement en bergcultures / Pemerintah dan budidaya tanaman pegunungan' dan 37 'N.V. Deli-Maatschappij' dalam buku panduan ini.

Tabakscultuur (groepen 9 en 10) / Budidaya tembakau (kelompok 9 dan 10)

- Tabakmaatschappij Sumatra te Rotterdam (Perusahaan Tembakau Sumatra di Rotterdam), 1888-1894, kode akses 2.20.02.10.
- Langkat Tabaksbouwmaatschappij te Amsterdam (Perusahaan Tembakau Langkat di Amsterdam), 1898-1904, kode akses 2.20.02.09.
- Borneo Tabakmaatschappij (Perusahaan Tembakau Borneo), 1901-1904, kode akses 2.20.02.08.
- Onderneming en Cultuurmaatschappij Medan (Perkebunan dan Perusahaan Budidaya Tanaman Medan), 1920-1923, kode akses 2.20.07.
Arsip yang ditaruh dalam N.V. Maatschappij tot exploitatie der Verenigde Majanglanden te Amsterdam (Majanglanden).
- Deli-Maatschappij (Juga lihat Bab 37 dalam buku panduan ini).

Vorstenlandse cultures (groep 11) / Budidaya tanaman di wilayah kerajaan⁵¹ (kelompok 11)

- Perusahaan-perusahaan di wilayah-wilayah kerajaan terbagi berdasarkan produknya.

Nieuwere cultures (groep 12) / Budidaya (tanaman) yang lebih baru (kelompok 12)

- N.V. Deli-Maatschappij, 1869-1967, kode akses 2.20.46 (antara lain minyak kelapa sawit).
- N.V. Cultuurmaatschappij Birnie I, 1899-1910, kode akses 2.20.07 (antara lain singkong).
Arsip yang ditaruh dalam Majanglanden (Wilayah-wilayah Mayang).
- N.V. Nederlandsch-Indisch Landsyndicaat, 1910-1964, kode akses 2.20.01 (antara lain minyak kelapa sawit).
Arsip yang ditaruh dalam Nederlandsche Handel-Maatschappij / NHM (Perusahaan Dagang Belanda).

Bankwezen (groep 13) / Perbankan (kelompok 13)

- Nederlandsch-Indische Escomptomaatschappij (Nedescobank N.V.), 1859-1975, kode akses 2.20.37.04.
- N.V. Nederlandsch-Indische Handelsbank, 1863-1950, kode akses 2.20.03.
- Cultuur-, Handel- en Industriebank Koloniale Bank / Cultuurbank N.V., 1881-1973, kode akses 2.20.04; 2.20.05.

Industrie (inclusief petroleum- en mijnbouwindustrie) (groepen 14 t/m 16 / Industri (termasuk industri pertambangan dan minyak bumi) (kelompok 14 s/d 16)

- Directiearchief van de N.V. Billiton-Maatschappij (Arsip Direksi N.V. Billiton-Maatschappij), 1852-1973, kode akses 2.20.51 (bagian 1: Nederlandsch-Indische en Indonesische activiteiten / Kegiatan Hindia-Belanda dan Indonesia).
- N.V. Droogdok-Maatschappij Tandjong Priok, 1891-1978, kode akses 2.20.37.13.
- Droogdok-Maatschappij Soerabaja, 1910-1970, kode akses 2.20.58.05.

⁵¹ Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kerajaan Mangkunegara, dan Kerajaan Paku Alam.

- Nederlandsch-Indische Portland Cementmaatschappij (Perusahaan Semen Portland Hindia-Belanda), 1910-1971, kode akses 2.20.37.02.
- N.V. Mijnbouwmaatschappij Salida (P.T. Perusahaan Pertambangan Salida), 1910-1933, kode akses 2.20.55
- Syndicaat voor Brandstofveredeling Brickcarbo (Sindikat untuk Peningkatan Mutu Bahan Bakar Brickcarbo), 1931-1967, kode akses 2.20.37.06.

Handel (import en export) (groepen 17, 18) / Perdagangan (impor dan ekspor) (kelompok 17, 18)

- Handelsvereniging Amsterdam (Persatuan Perdagangan Amsterdam), 1870-1974, kode akses 2.20.32.
- Handelsvennootschap v/h Maintz en Co te Amsterdam (Perusahaan Perdagangan Maintz en Co di Amsterdam), 1874-1970, kode akses 2.20.06.01.
- Michiels Arnold Cultuur- en Handelmaatschappij te Amsterdam (Perusahaan Perdagangan dan Budidaya Tanaman Michiels Arnold di Amsterdam), 1887-1957, kode akses 2.20.02.02.
Perusahaan itu juga mengeksploitasi lahan-lahan padi di Jawa.
- N.V. Handelmaatschappij v/h G. Hoppenstedt, 1892-1976, kode akses 2.20.56.

Nederlandsche Handel-Maatschappij (groep 19) / Maskapai Dagang Belanda (kelompok 19)

- Arsip kantor pusat Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V. dan arsip-arsip (1784) 1824-1964 (1994) yang ditaruh dalam tempat sama, kode akses 2.20.01 (2 jilid).

Gas- en elektriciteitsbedrijven (groep 20) / Perusahaan gas dan listrik (kelompok 20)

- Algemene Nederlandsch-Indische Electriciteitsmaatschappij / ANIEM (Perusahaan Listrik Umum Hindia-Belanda), 1909-1970, kode akses 2.20.06.01 dan 2.20.06.02.
Sebagiannya ditaruh dalam arsip Handelsvennootschap v/h Maintz en Co te Amsterdam (Maintz).
- Gemeenschappelijk Electriciteitsbedrijf Bandoeng en omstreken (Perusahaan Listrik Bersama Bandung dan sekitarnya), 1918-1927, kode akses 2.20.06.01 yang ditaruh dalam Arsip Maintz.
- Nederlandsch-Indische Waterkrachtexploitatie maatschappij (Perusahaan eksploitasi Tenaga Air Hindia-Belanda), 1926-1939, kode akses 2.20.06.01.
Yang ditaruh dalam Arsip Maintz.

7. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Notulen der jaarlijksche algemeene ledenvergadering van den Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië (Notula rapat umum tahunan dari Dewan Pengusaha untuk Hindia-Belanda), dengan laporan-laporan tahun dan berbagai daftar anggotanya, 1923-1939 ('s-Gravenhage: Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië).

Bericht aan de leden / Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië (Berita untuk para anggota / Dewan Pengusaha untuk Hindia-Belanda), 1922-1944 ('s-Gravenhage: Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië).

Juga dalam arsip Onrani, nomor inventaris 26-33, 213-215. Menyangkut berita-berita tentang hal-hal agraria, perburuhan, perusahaan, perpajakan, kepengurusan, perdagangan, lalu lintas, dan organisatoris.

Jaarverslagen van den Indischen Ondernemersbond (Laporan-laporan Perhimpunan Pengusaha Hindia), 1922-1947 (Batavia).

Handelingen en bijlagen van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Notula dan lampiran dari Majelis Tinggi dan Rendah Parlemen).

Handelingen en Bijlagen van de Volksraad (Notula dan lampiran dari Dewan Rakyat) Indische Ondernemersbond (Perhimpunan Pengusaha Hindia) diwakili di dalam kelompok Ekonomi dalam Volksraad (Dewan Rakyat).

Daftar Pustaka

Biografisch Woordenboek van Nederland, versi digital.

(<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/treub>), lema *M.W.F. Treub*.

Catalogus van boekwerken, enz. uitmakende de bibliotheek van den Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië (1925; 's-Gravenhage: Bibliotheek van den Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië).

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *Ondernemersraad* (V, hlm. 128) dan lema *Indische Ondernemersbond* (V, hlm. 249).

Esveld, N.E.H. van (1958), *Treub; Over de drempel der nieuwe samenleving* (Assen: Van Gorcum).

Jongejan, W.G.F. (tanpa tahun), *Rede ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië op 24 augustus 1946, uitgesproken door den Voorzitter van den Raad* (tanpa tempat terbit).

Taselaar, Arjen (1998), *De Nederlandse koloniale lobby; Ondernemers en de Indische politiek 1914-1940* (Leiden: Research School CNWS).

Treub, M.W.F. (1923), *Nederland in de Oost; Reisindrukken* (Haarlem: Tjeenk Willink).

Treub, M.W.F. (tanpa tahun), *Regeeringsbemoeienis met het bedrijfsleven in Nederland en Ned.-Indië; Rede uitgesproken op 9 december 1924 te Wageningen voor de 6e wetenschappelijke samenkomst voor Indische landbouwtechnici, met verlof hier te lande* (Roermond).



Sayyid 'Uthmân, *Adviser-honorair voor Arabische Zaken* (Penasihat honorer Urusan Arab) (Rosemarijn Hoefte, Peter Meel, dan Hans Renders ed. 2008: 196). Lihat Bab 22 dalam buku panduan ini.

VI Burgerlijke Openbare Werken, Gouvernementsbedrijven en Verkeer en Waterstaat (Pekerjaan Umum Sipil, Perusahaan Pemerintah, dan Lalu Lintas dan Pengairan)

41 Departement van Burgerlijke Openbare Werken (Departemen Pekerjaan Umum Sipil)

Departemen Burgerlijke Openbare Werken / BOW (Pekerjaan Umum Sipil) adalah salah satu dari empat departemen urusan umum, yang didirikan berdasarkan Koninklijk Besluit (Keputusan Raja) tertanggal 21 september 1866 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1866 no. 127). Departemen itu adalah badan hukum penerus dari Bureau van Openbare Werken (Biro Pekerjaan Umum) (1854) yang didirikan atas prakarsa Gubernur- Jenderal J.J. Rochussen (1845-1851). Ia berpendapat bahwa pelaksanaan Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) yang efektif dan efisien akan berhasil baik dengan menggunakan penanganan profesional infrastruktur di tingkat pusat. Sejauh ini, *waterstaat* (pengelolaan pengairan) 'basah' dan 'kering' adalah masalah pemerintahan kepala daerah. Hanya ada beberapa karesidenan yang memiliki seorang insinyur yang dipekerjakan. Rochussen berpendapat bahwa modernisasi tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk kepentingan sosial: dengan pembangunan *waterwerken* (pekerjaan prasarana pengairan) baru yang dilaksanakan oleh tenaga yang terlatih baik, maka kelaparan di antara penduduk Indonesia akan dapat dicegah.

Yang termasuk tugas Departemen BOW adalah 'waterstaat' (pengelolaan pengairan); 'wegen' (jalan); 's lands burgerlijke openbare werken' (pekerjaan umum sipil negara); 'stoomwezen, inclusief de inspectie van stoomwerktuigen en het toezicht op het gebruik ervan' (sistem tenaga uap, termasuk pemeriksaan mesin uap dan pemantauan penggunaannya); 'telegrafie' (telegrafi); 'spoorwegen' (jawatan kereta api); dan 'de zorg voor het personeel dat bij al deze dienstonderdelen werkte' (pengurusan pegawai yang bekerja di semua bagian jawatan itu). Pada tahun 1872 'brieven- en paardenposterij' (dinas pos persuratan berkuda) diambil alih dari Departement van Binnenlands Bestuur (Departemen Pemerintahan Dalam Negeri). Beberapa tahun kemudian 'staatspoorwegen' (jawatan kereta api negara) juga dimasukkan ke departemen itu. Pada tahun 1887, departemen itu menjadi pengurus semua bangunan dari Departement van Marine (Departemen Angkatan Laut), termasuk 'kustverlichting' (penerangan pantai). Pada tahun 1897 'postspaarbank' (bank tabungan pos) ada di bawah Departemen BOW. Semua tugas yang ditambahkan setelah tahun 1872 – kecuali tugas untuk Departemen Angkatan Laut – di kemudian hari akan dialihkan ke Departement van Gouvernementsbedrijven (Departemen Perusahaan Pemerintah) yang baru (1907).

Departemen BOW adalah *vakdepartement* (departemen bidang), yang pada awalnya memiliki sedikit kewenangan pemerintah. Pengurusan dan pemeliharaan pekerjaan umum dilaksanakan oleh para teknisi; pengelolaannya ada di tangan para kepala pemerintahan daerah. Di daerah, para insinyur dan pegawai teknis yang lebih rendah berada di bawah perintah residen. Perkembangan negara kolonial memperkuat posisi Departemen BOW. Berkat departemen itu, komunikasi di kepulauan Hindia membaik dengan adanya pembangunan '(water)wegen' (saluran air), 'spoorwegen' (jalur kereta api), dan 'pembangunan pelabuhan baru untuk

Batavia, Tandjoeng Priok' (1877-1883). Pada tahun 1885 'irrigatiebrigade' (brigade irigasi) dibentuk, yang terutama harus membangun irigasi di daerah padat penduduk; lima tahun kemudian 'algemeen irrigatieplan' (rencana irigasi umum) dipresentasikan. Di dalam rencana itu ada 19 proyek yang telah dilaksanakan. Pada tahun 1912 'algemeen wegenplan' (rencana jalan umum) mengikuti rencana itu.

Dengan memperkenalkan Ethische Politiek (Politik Etis) memberikan dampak munculnya lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan: perluasan 'koloniaal bestuursapparaat' (aparatus pemerintahan kolonial) dan 'overheidszorg' (kegiatan pengurusan oleh pemerintah) mengakibatkan harus ada lebih banyak bangunan dibuat untuk 'gouvernementdiensten' (dinas pemerintah) dan 'dienstwoningen' (perumahan dinas) bagi para pegawai. Dibangun lebih banyak sekolahan, rumah sakit, dan penjara; dibuat perumahan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia; dibangun juga pipa air, saluran pembuangan air, fasilitas umum untuk mandi dan cuci. Jaringan jalan diperluas. Jalan-jalan itu juga disesuaikan dengan alat transportasi baru seperti mobil dan sepeda. Pelabuhan-pelabuhan dibangun dan dikembangkan. Pada tahun 1912, Departemen BOW mendapatkan sebuah laboratorium tempat untuk menguji bahan bangunan sebelum digunakan. Dalam hal arsitektur, Departemen BOW menentukan secara signifikan 'wajah' Hindia-Belanda.

Setelah tahun 1920, Departemen BOW secara bertahap dibongkar. Dengan diberlakukannya Wet op de Bestuursvorming (Undang-Undang Reformasi Pemerintahan) pada tahun 1922, *provincie* (provinsi) dan *stadsgemeente* (kotapraja) yang baru bertanggung jawab atas pengelolaan air 'basah' dan air 'kering' (termasuk bangunan-bangunannya) di daerah mereka. Departemen BOW hanya boleh memberikan advis kepada organ-organ pemerintah itu dan selanjutnya departemen itu hanya memegang proyek-proyek yang bertaraf nasional saja. Kemudian, pada tahun 1924 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1924 No. 576) Burgerlijke Geneeskundige Dienst (Dinas Kesehatan Sipil) – yang merupakan bagian dari Departement van Onderwijs en Eredienst (Departemen Pendidikan dan Ibadah) – direorganisasi menjadi Dienst voor de Volksgezondheid (Dinas Kesehatan Masyarakat), yang memiliki kewenangan yang luas di bidang 'riolering' (sistem saluran pembuangan air), 'drinkwatervoorziening' (sarana air minum), 'bodemsanering' (sanitasi tanah), dan 'volkshuisvesting' (perumahan rakyat). Sampai saat itu, tugas-tugas tersebut merupakan tugas Departemen BOW. Dan akhirnya, krisis ekonomi tahun 1929 mengakibatkan adanya penghematan yang drastis, yang juga berlaku untuk Departemen BOW. Pada tahun 1933, tugas-tugas yang tersisa diintegrasikan ke Departement van Verkeer en Waterstaat (Departemen Lalu Lintas dan Pengairan) yang baru.

Arsip dan sumber yang tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Berkas-berkas tentang organisasi dan pelaksanaan tugas Departemen BOW (secara garis besarnya), advis dan laporan dari direktur departemen itu, dapat ditemukan dengan bantuan akses (*indices* 'indeks') pada *openbaar archief* (arsip umum), dalam rubrik-rubrik berikut:

a. Periode 1850-1900 (kode akses 2.10.02; 2.10.10):

'Constructiewinkel in Oost-Indië' (Toko material di Hindia-Timur); 'Gebouwen en werken in O.-Indië' (Gedung dan pekerjaan prasarana di Hindia-Timur); 'Openbare werken' (Pekerjaan umum); 'Postwezen in Oost-Indië / Posterijen, telegrafen en telefonen' (Perposan di Hindia-Timur / Pos, telegraf, dan telepon); 'Spoor-, tramweg- en stoomwezen' (Perihal kereta api, tram, dan tenaga uap); 'Stoomwezen in Oost-Indië' (Perihal mesin uap di Hindia-Timur); 'Transportmiddelen in Oost-Indië / Transportwezen' (Alat angkutan di Hindia-Timur / Sistem transportasi).

b. Periode na 1900 (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03):

'Ambtenaren (bij de waterstaat, burgerlijke openbare werken, de PTT-dienst, de Staatsspoorwegen)' (Pegawai pemerintahan: dinas pengairan, dinas pekerjaan umum sipil, dinas PTT, Jawatan Kereta Api); 'Automobielen' (otomobil); 'Bestuur (departementen van -)' (Departemen-departemen pemerintahan); 'Beveiliging (fabrieken en werkplaatsen)' (Keamanan: pabrik dan tempat kerja); 'Bruggen en wegen' (Jembatan dan jalan); '(Burgerlijke) openbare werken' (Pekerjaan umum sipil); 'Drinkwatervoorziening' (Sarana air minum); 'Elektriciteit (waterkracht en-)' (Tenaga air dan listrik); 'Havens (exploitatie van – en dokinrichtingen)' (Pelabuhan: eksploitasi dan penataan galangan kapal); 'Irrigatie' (Irigasi); 'Onteigening' (Pencabutan hak milik); 'PTT (Posterijen, telegrafen en telefonen)' (PTT: Pos, Telegraf, dan Telepon); 'Postspaarbank Nederlandsch-Indië' (Bank Tabungan Pos Hindia-Belanda); 'Spoor- en tramwegen (gouvernementstransporten) (- en stoomwezen / gouvernementstransporten)' (Jawatan kereta api dan tram: transportasi pemerintah; tenaga uap / transportasi pemerintah); 'Transporten' (Transpor / Angkutan); 'Veiligheidstoezicht' (Pengawasan keamanan); 'Verkeerscoördinatie' (Koordinasi lalu lintas); 'Volksgezondheid' (Kesehatan masyarakat); 'Wegverkeer' (Lalu lintas jalan).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang Departemen BOW setelah tahun 1921, akses *5de afdeling* (bagian ke-5) adalah penting. Ada indeks

terpisah untuk berkas-berkas (juga dari periode sebelum tahun 1921) tentang ‘waterkracht en elektriciteit’ (pembangkit listrik dan tenaga air); ‘burgerlijke openbare werken’ (pekerjaan umum sipil); ‘spoor- en tramwegen en PTT-aangelegenheden’ (jawatan kereta api dan tram dan perihal PTT); lihat kode akses 2.10.36.011, hlm. 29-31.

Geheim- en kabinetsarchief (arsip kabinet dan rahasia) beserta *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 kemungkinan besar tidak memuat bahan mengenai Departemen BOW. Apabila dari arsip umum diacu ke data dokumen itu, maka data itu bisa diteliti lebih lanjut.

Advis dan laporan para direktur Departemen BOW ada di publikasi sumber:

- P. Creutzberg ed. (1972-1975), *Het economisch beleid in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Wolters-Noordhoff).

2. Koleksi arsip Haringhuizen-Schoemaker, kode akses 2.22.07 dan 2.22.08

terdiri dari berkas-berkas mengenai pekerjaan umum di Hindia-Belanda dan Suriname, 1872-1970.

J. Haringhuizen dan H.J. Schoemaker adalah insinyur yang masing-masing bekerja di Departement van Burgerlijke Openbare Werken (Departemen Pekerjaan Umum Sipil) dan Departement van Verkeer en Waterstaat (Departemen Lalu lintas dan Pengairan). Berkas-berkas arsip itu ada di kode akses 2.22.07, koleksi *lantaarnplaatjes* (slide bergambar) di kode akses 2.22.08.

3. Arsip Koninklijk Instituut van Ingenieurs / KIVI (Institut Kerajaan untuk Insinyur), 1847-1980, kode akses 2.19.47.01

KIVI adalah organisasi profesi untuk para insinyur, yang pada waktu itu banyak bekerja di Hindia-Belanda, baik yang bekerja untuk pemerintah ataupun swasta.

Arsip itu memuat antara lain edisi majalah *De Ingenieur in Nederlandsch-Indië* (dengan ringkasan dari laporan-laporan Departemen BOW) dan *Indisch Bouwkundig Tijdschrift*, yang memuat mutasi dari personil teknis yang bekerja pada Departemen BOW, pada Staatsspoorwegen (Jawatan Kereta Api Negara), dan pada Genie (Zeni).

4. Arsip pribadi keluarga Stieltjes, 1757-1969, kode akses 2.21.205.62

Berisi berkas-berkas dari Ir. J.J. Stieltjes, yang pada masa dinasya bekerja di Departemen BOW untuk Jawatan Kereta Api di Jawa. Dia adalah juga *hoofdinspecteur / chef* (inspektur kepala) PTT.

5. Arsip pribadi W. Cool jr., 1901-1948, kode akses 2.21.038

Pada periode 1915-1920 Cool bekerja sebagai *algemeen adviseur voor havenwerken* (penasihat umum untuk pekerjaan prasarana pelabuhan) dan *chef van de afdeling havenwezen* (kepala bagian urusan pelabuhan) dari Departemen BOW. Arsipnya antara lain memuat ‘*minuten van adviezen*’ (konsep arsip yang telah disetujui) en ‘*verslagen van dienstreizen*’ (laporan perjalanan dinas).

6. Arsip pribadi F.A.W. Meijneken (juga dieja sebagai Meineken), 1921-1946, kode akses 2.21.205.41

Meijneken bekerja sebagai *waterstaatsingenieur* (insinyur pengairan) pada Departemen BOW dan Departemen Verkeer en Waterstaat (Departemen Lalu lintas dan Pengairan). Dia bekerja antara lain di Pelabuhan Belawan (Sumatra).

7. Arsip pribadi W. Swaan, 1922-1971, kode akses 2.21.205.83

Swaan bekerja sebagai insinyur pengairan pada Departemen BOW. Arsipnya berisi berkas-berkas tentang pembangunan pekerjaan prasarana pengairan di Jawa dan Bali.

8. Arsip NV Ingenieurs Maatschappij Eigen Beheer, 1916-1940, kode akses 2.20.43

Perusahaan ini melaksanakan pengerjaan proyek untuk Departemen BOW. Mantan direktur Departemen BOW, J. Homan van der Heide, adalah anggota direksi perusahaan.

9. Arsip Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij (1861-1973), kode akses 2.20.52 dan 2.20.10 dan arsip Pasoeroean Stoomtram Maatschappij (1895-1972), kode akses 2.20.13.03)

berisi daftar register keputusan direktur Departemen BOW.

10. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Verslagen over de Burgerlijke Openbare Werken in Nederlandsch-Indië (Laporan mengenai Pekerjaan Umum Sipil di Hindia-Belanda) (1892-1930; Weltevreden).

Dalam rubrik ‘*Mededelingen van algemene aard*’ (Berita-berita umum) berisi antara lain ‘*prijzen van djatihout*’ (harga kayu jati).

Selanjutnya ada ‘*gedetailleerde opgave van uitgevoerde projecten met project-omschrijvingen*’ (paparan yang rinci tentang proyek-proyek yang dilaksanakan dengan penjelasan proyeknya); ‘*opgave van gebruikte materialen*’ (paparan mengenai material yang

digunakan); ‘kosten’ (biaya); ‘relevante gouvernementsbesluiten en beschikkingen van de directeur BOW’ (keputusan pemerintah dan keputusan dari direktur Departemen BOW yang relevan).

Laporan dari periode 1892-1928 juga dalam koleksi arsip Haringhuizen-Schoemaker, nomor inventaris 87-96.

Mededeelingen en rapporten van het Departement Burgerlijke Openbare Werken (Berita dan laporan Departemen Pekerjaan Umum Sipil) (1914-1920; Batavia).

Berisi ‘verslagen van geologisch onderzoek ten behoeve van de waterstaat, gewestelijk- en gemeentewerken in Nederlandsch-Indië’ (laporan penelitian geologi yang digunakan untuk pengairan, pekerjaan prasarana pengairan daerah dan kotapraja di Hindia-Belanda); ‘beoordelingen van bouwmaterialen’ (penilaian material bangunan).

Edisi dari periode 1914-1915, 1918, 1919 juga dalam koleksi arsip Haringhuizen-Schoemaker, nomor inventaris 125.

Verslagen der werkzaamheden in het Laboratorium Burgerlijke Openbare Werken (Laporan pelaksanaan kerja di Laboratorium Departemen Pekerjaan Umum Sipil), 1917-1925 (1927; Weltevreden).

Voorlopige cijfers en gegevens over werkzaamheden van het Departement Burgerlijke Openbare Werken (Angka dan data sementara tentang pelaksanaan kerja di Departemen Pekerjaan Umum Sipil) (1924-1933; Weltevreden), dilanjutkan menjadi

Eenige gegevens en voorlopige cijfers betreffende de werkzaamheden van het Departement van Verkeer en Waterstaat (Beberapa data dan angka sementara tentang pelaksanaan kerja di Departemen Lalu Lintas dan Pengairan) (1935-1938; Batavia).

Berisi ‘gegevens van de afdelingen van het departement en van het laboratorium voor materiaalonderzoek’ (data dari bagian-bagian departemen dan data dari laboratorium untuk penelitian material). Juga ‘grafieken’ (grafik), antara lain grafik tentang pengeluaran dan penerimaan yang nyata dan grafik tentang pengeluaran luar biasa untuk urusan pelabuhan. Jilid-jilid publikasi tentang tahun 1924, 1926-1933, dan 1938 juga dalam koleksi arsip Haringhuizen-Schoemaker, nomor inventaris 97.

De Waterstaatsambtenaar in Nederlandsch-Oost-Indië. Handleiding bevattende alle bepalingen en circulaires betreffende den waterstaat in Nederlandsch Oost-Indië (Pegawai Pengairan di Hindia-Timur-Belanda) (1892, 1905, 1914; 2 jilid; Semarang).

Handelingen en bijlagen van de Volksraad (Notula dan lampiran dari Dewan Rakyat). Di dalamnya antara lain ada artikel-artikel pidato dari direktur Departemen BOW.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië (Lembaran Negara Hindia-Belanda)

Untuk berkas ini dipakai *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1866 no. 127; 1871 no. 92; 1887 no. 5; 1897 no. 296; 1907 no. 406; 1919 no. 2; 1924 no. 576.

Daftar Pustaka

Akihary, Huib (1990), *Architectuur en stedenbouw in Indonesië 1870/1970* (Cetakan ke-2; Zutphen: Walburg Pers).

Biografisch Woordenboek van Nederland, versi digital.
(<http://resources.huylgens.knaw.nl/bwn1889-2000/lemmata/bwn2/cool>): lema W. Cool jr.

Catalogus der bibliotheek van het Departement der Burgerlijke Openbare Werken (1911, 1930; Weltevreden).

Doorn, J.A.A. van (1994), *De laatste eeuw van Indië; Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project* (Amsterdam: Bakker).

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *Departementen van Algemeen bestuur* (I, hlm. 585-588); *Waterkracht en electriciteit* (V, hlm. 303-319).

Konijnenburg, Emile van (1897), *Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1847-1897* (Den Haag: Van Langenhuisen).

Catatan: Bab XVI mengenai Hindia-Belanda. Juga ada di arsip KIVI, nomor inventaris 482.

Gent, L.F. van, W.A. Penard, dan D.A. Rinkes ed. (1923), *Gedenkboek van Nederlandsch-Indië ter gelegenheid van het regeeringsjubileum van H.M. de Koningin 1898-1923* (Batavia-Leiden: Kolff).

Catatan: lihat hlm. 393-421 dan hlm. 468-501.

Ravesteijn, Willem (1997), *De zegenrijke heeren der wateren; Irrigatie en staat op Java 1832-1942; Een wetenschappelijke proeve op het gebied van Sociale Wetenschappen* (Delft: Delft University Press).

Ravesteijn, Willem dan Jan Kop ed. (2004): *Bouwen in de archipel; Burgerlijke Openbare Werken in Nederlands-Indië en Indonesië 1800-2000* (Zutphen: Walburg Pers).

42 Departement van Gouvernementsbedrijven (Departemen Perusahaan Pemerintah)

Departement van Gouvernementsbedrijven / GB ini didirikan berdasarkan Koninklijk Besluit (Keputusan Kerajaan) tanggal 27 Juli 1907 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1907 no. 406). Pemerintah ingin menempatkan perusahaan-perusahaan pemerintah di bawah satu atap. Selama ini perusahaan-perusahaan itu tersebar di bawah beberapa departemen pemerintahan umum, terutama Departement van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid (Departemen Pendidikan, Ibadah, dan Industri Kerajinan), Departement van Financiën (Departemen Keuangan), dan Departement van Burgerlijke Openbare Werken (Departemen Pekerjaan Umum Sipil). Metode pekerjaan yang menua dan pengetahuan yang kurang, menghambat pelaksanaan usaha yang efisien. Tersebarunya perusahaan itu menjadikan tidak adanya kejelasan: para pegawai pemerintah berurusan dengan berbagai loket dan panduan yang berbeda-beda. Di bawah pengaruh Politik Etis, tumbuh kebutuhan akan pemusatan, modernisasi, dan penyeragaman kebijakan. Sebagai hasil kelanjutan hal itu, (kualitas) produksi akan meningkat, posisi pasar menjadi kuat, pendapatan meningkat. Hal yang terakhir adalah penting mengingat peluasan dan intensitas campur tangan pemerintah.

Departemen yang baru, menerima dari Departement van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid (Departemen Pendidikan, Ibadah, dan Industri Kerajinan): ‘mijnwezen’ (pertambangan), ‘zoutregie’ (jawatan pengaturan garam), dan ‘landsdrukkerij’ (percetakan negara). Termasuk pertambangan adalah pelaksanaan penelitian tanah, penanganan permohonan konsesi swasta, pengawasan penggalian bahan tambang, dan pengelolaan serta eksploitasi beberapa tambang batubara (Ombilin dan Bukit Asem di Sumatra; Pulau Laut di selatan Borneo), tambang timah di Bangka, dan kemudian juga tambang emas dan perak di Bengkulu (Sumatra). Jawatan garam adalah monopoli pemerintah. Garam adalah bahan bumbu penting dalam rumah tangga Indonesia: untuk pembuatannya diperlukan izin. Garam yang dihasilkan sebagiannya diolah menjadi briket, yang dijual dengan harga tetap. Direktur pertama Departement van Gouvernementsbedrijven / GB (Departemen Perusahaan Pemerintah), H.J.E. Wenckebach, menyebut jawatan garam sebagai suatu perusahaan fiskal saja, hanya dimaksudkan untuk mengisi uang kas negara. Percetakan negara mengurus terbitan-terbitan dari berbagai publikasi pemerintah, di antaranya *Javasche Courant*, almanak pemerintah, lembaran-lembaran negara dan lembaran tambahan.

‘Brieven- en paardenposterij’ (Dinas pos persuratan berkuda), ‘telegrafie’ (telegrafi), ‘telefonie’ (teleponi), dan ‘postspaarbank’ (bank tabungan pos) diambil alih dari Departement van Burgerlijke Openbare Werken / BOW (Departemen Pekerjaan Umum Sipil). Pada tahun 1909 ‘afdeling spoorwegaangelegenheden’ (bagian urusan kereta api), dengan pengecualian Dienst voor het Stoomwezen (Dinas Tenaga Uap), dan ‘bedrijf der staatsspoorwegen’ (perusahaan jawatan kereta api) dialihkan. Departement van Financiën (Departemen Keuangan) melepas ‘opiumfabriek’ (pabrik opium). Pabrik itu adalah bagian dari

‘opiumregie’ (jawatan pengaturan opium) yang bertujuan meregulasikan pemakaian bahan kenikmatan itu dan menjamin kualitasnya. Pemerintah memiliki monopoli pemasukan dan penjualan opium: di pabrik bahan itu dipersiapkan dan dikemas menurut peraturan. Pada akhirnya, pada tahun 1910 Departement van Binnenlands Bestuur (Departemen Pemerintahan Dalam Negeri) melepas ‘aanbesteding en eigen beheer van transporten van gouvernementsreizigers- en goederen’ (pemborongan dan pengelolaan sendiri dari transportasi barang dan pegawai pemerintah yang bepergian).

Perusahaan-perusahaan pemerintah sangatlah berdiri sendiri. Mereka mempublikasikan laporan-laporan tahunannya. Para direktornya sebagai *hoofdamtenaar* (staf kepala) langsung berada di bawah direktur dari Departemen GB. Departemen ini berfungsi sebagai payung, pendukung, dan pengkoordinasi. Departemen ini menyusun kebijakan dan peraturan; menerapkan pembukuan komersial pada perusahaan-perusahaan. Biro-biro sosial dan teknis-ekonomis memberikan berbagai advis kepada pemerintah dan organisasi-organisasi swasta. Penjualan produk pertambangan pemerintah diatur oleh biro komersial. Juga demi mendorong pengembangan industrial, pada tahun 1913 didirikan Afdeling Electriciteitswezen (Bagian Perlistrikan). Hasil penggabungan dengan Waterkrachtbureau van de Staatsspoorwegen (Biro Tenaga Air dari Jawatan Kereta Api) pada tahun 1917 muncullah Dienst voor Waterkracht en Electriciteit / DWE (Dinas Pembangkit Listrik dan Tenaga Air). DWE merancang pekerjaan-pekerjaan tenaga air pemerintah dan fasilitas listrik; menangani permohonan konsesi swasta; memberikan penerangan dan advis kepada badan-badan pemerintah dan industri; dan melakukan pengawasan atas perusahaan-perusahaan listrik. Pada tahun 1928 Departemen GB mulai ikut campur tangan dengan urusan angkutan udara: untuk hal itu dibentuk suatu biro tersendiri.

Ketika Departement van Economische Zaken (Departemen Urusan Ekonomi) didirikan pada tahun 1933, Departemen GB harus mengalihkan pengelolaan tambang-tambang negara dan penjualan produknya, demikian juga percetakan negaranya. Bersamaan dengan itu, jawatan pengaturan garam pindah ke Departement van Financiën (Departemen Keuangan), yang telah sebelumnya mengambil alih pabrik opium pada waktu reorganisasi pemerintahan pada tahun 1924. Pada waktu terjadi reorganisasi yang sama, Afdeling Transportwezen (Bagian Transportasi) ditutup. Yang tersisa dari Departemen GB digabung bersama dengan bagian-bagian sisa dari Departemen BOW menjadi suatu departemen baru: Departement van Verkeer en Waterstaat (Departemen Lalu Lintas dan Pengairan) (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1933 no. 509).

Arsip dan sumber yang tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1900

Informasi umum tentang tatanan, akses, seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Untuk bab ini dilakukan penelitian arsip. Berkas-berkas yang disebut sesudah ini tentang pembentukan dan deskripsi tugas Departemen GB tercantum dalam akses (*indices* 'indeks') pada *openbaar archief* (arsip umum), dalam rubrik-rubrik berikut: 'Departementen van algemeen bestuur in Oost-Indië' (Departemen-departemen pemerintahan umum di Hindia-Timur); 'Bestuur, binnenlands' (Pemerintahan, dalam negeri).

Untuk berkas digunakan arsip-arsip verbal: 29 Januari 1906 no. 28 / 291; 1 Juni 1906 no. 73; 20 Desember 1906 no. 61; 12 Januari 1907 no. 59; 18 Januari 1907 no. 37; 6 September 1924 no. 59.

Berkas-berkas tentang organisasi dan pelaksanaan tugas Departemen GB (secara garis besar), advis-advis, dan laporan-laporan dari direktur Departemen GB dapat ditemukan dengan bantuan akses (*indices* 'indeks') pada *openbaar archief* (arsip umum), dalam rubrik-rubrik berikut:

- a. Periode setelah tahun 1900** (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03): 'Ambtenaren (bij gouvernementsbedrijven; het mijnwezen; de Staatsspoorwegen)' (Pegawai-pegawai pada perusahaan-perusahaan pemerintah; pertambangan; jawatan kereta api); 'Bestuur (departementen van -)' (Departemen-departemen pemerintahan); 'Bodemkunde' (Ilmu Tanah); 'Goud' (Emas); 'Gouvernementsbedrijven' (Perusahaan-perusahaan pemerintah); 'Luchtvaart(zaken; -congressen)' (Urusan angkutan udara dan kongres-kongresnya); 'Monopolies' (Monopoli); 'Mijnwezen' (Pertambangan); 'Opium'; 'PTT (Posterijen, telegraf en telefonen / post en telegrafie)' (PTT: Post, Telegraf, dan Telepon / Pos dan Telegrafi); 'Postspaarbank Nederlandsch-Indië' (Bank Tabungan Pos Hindia-Belanda); 'Spoor- en tramweg- en stoomwezen' (Jawatan kereta api, tram, dan sistem tenaga uap); 'Spoor- en tramwegen (gouvernementstransporten)' (Jawatan kereta api dan tram: transportasi pemerintah); 'Steenkolen' (Batubara); 'Tin' (Timah); 'Transporten' (Angkutan); 'Verkoop van producten' (Penjualan produk); 'Waterkracht en electriciteit' (Pembangkit listrik dan tenaga air); 'Zilver' (Perak); 'Zout' (Garam).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang 'gouvernementsbedrijven na 1921' (perusahaan-perusahaan pemerintah setelah tahun 1921),

akses *5de afdeling* (bagian ke-5) adalah penting. Terdapat indeks-indeks tersendiri untuk berkas-berkas (juga dari periode sebelum tahun 1921) tentang ‘gouvernementsbedrijven, opiumfabriek, landsdrukkerij, waterkracht en electriciteit’ (perusahaan pemerintah, pabrik opium, percetakan negara, pembangkit listrik dan tenaga air); ‘mijnwezen’ (pertambangan); ‘tin’ (timah); ‘steenkool’ (batubara); ‘spoor- en tramwegen, luchtvaart’ (jawatan kereta api dan tram, angkutan udara); dan ‘PTT-aangelegenheden’ (urusan PTT). Lihat kode akses 2.10.36.011, hlm. 29-31.

Geheim- en kabinetsarchief (Arsip kabinet dan rahasia) dan *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) setelah tahun 1914 berisi berkas-berkas dari direktur Departemen GB: kode akses 2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.36.07 (periode setelah tahun 1900).

Berbagai advis dan laporan dari direktur Departemen GB dimuat dalam publikasi sumber berikut:

- P. Creutzberg ed. (1972-1975), *Het economisch beleid in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Wolters-Noordhoff).

Serie Jaarboeken van het mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië (Seri buku tahunan pertambangan di Hindia-Timur Belanda), 1875-1938, kode akses 2.10.55.

Mulai tahun 1907 diterbitkan oleh Departemen GB. Berisi laporan-laporan pertambangan / laporan-laporan dari Dienst van de Mijnbouw (Dinas Pertambangan).

2. Arsip ir. J. van der Waerden, kode akses 2.10.42

anggota yang didelegasikan dan ketua Commissie tot Ontwikkeling van de Fabrieksnijsverheid in Nederlands-Indië (Komisi Pengembangan Industri Kerajinan Pabrik di Hindia-Belanda), (1904) 1919-1926 (1940). Nomor inventaris 27 s/d 29 berisi berkas-berkas tentang posisi dari perusahaan-perusahaan pemerintah.

3. Arsip N.V. Maatschappij tot Exploitatie van de Verenigde Majanglanden, 1890-1970, kode akses 2.20.07

Arsip ini berisi berkas-berkas tentang tambang batubara Poeloe Laoet (Pulau Laut) dan penjualan produknya kepada pemerintah Hindia pada tahun 1913 (nomor inventaris 574-576).

4. Arsip Koninklijk Instituut van Ingenieurs / KIVI, 1847-1980, kode akses 2.10.047.01

KIVI adalah organisasi profesi dari para insinyur, yang kebanyakan di antaranya bekerja Hindia-Belanda, baik yang bekerja dalam dinas pemerintah maupun tidak. Arsip ini berisi berkas-berkas tentang pertambangan, teknik elektro, dan telekomunikasi.

5. Arsip Direksi N.V. Billiton-Maatschappij, 1852-1970, kode akses 2.20.51

Jilid 1: aktivitas-aktivitas Hindia-Belanda dan Indonesia).

Perusahaan ini berkembang menjadi *holding* (perusahaan induk) dengan saham pemerintah di dalamnya. Arsip ini memberikan gambaran campur tangan direktur Departemen GB dengan perusahaan ini.

6. Arsip Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij (Perusahaan Kereta Api Hindia-Belanda), 1861-1973, kode akses 2.20.52 dan 2.20.10

Arsip ini berisi (register dari) keputusan-keputusan direktur Departemen GB.

7. Arsip Handelsvennootschap (Perseroan Dagang) yang sebelumnya Maintz en Co di Amsterdam, 1874-1970, kode akses 2.20.06.01

Arsip ini berisi berkas-berkas tentang ‘Algemene Nederlandsch-Indische Electriciteitsmaatschappij / ANIEM’ (Perusahaan Listrik Umum Hindia-Belanda); ‘Nederlandsch-Indische Waterkracht-Exploitatiemaatschappij’ (Perusahaan Eksploitasi Tenaga Air Hindia-Belanda); ‘Maatschappij tot Exploitatie van Waterleidingen in Nederlandsch-Indië’ (Perusahaan Eksploitasi Saluran Pipa Air di Hindia-Belanda); dan ‘Gemeenschappelijk Electriciteitsbedrijf Bandoeng en omstreken’ (Perusahaan Listrik Bersama Bandung dan sekitarnya). Juga untuk berkas-berkas konsesi dan kontak dengan Dienst voor Waterkracht en Electriciteit (Dinas Pembangkit Listrik dan Tenaga Air). Untuk ANIEM, lihat juga kode akses 2.20.06.02.

8. Arsip komisararis pemerintah pada Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij (Maskapai Angkutan Udara Kerajaan Hindia-Belanda), 1928-1947, kode akses 2.10.46.01

Nomor inventaris 130 berisi beberapa berkas yang masuk dari Departemen GB.

9. Arsip pribadi dari A. Groothoff, 1895-1969, kode akses 2.21.077

Pada tahun 1917 Groothoff menjadi kepala bagian Hidroteknis pada Dienst voor Waterkracht en Electriciteit (Dinas Pembangkit Listrik Tenaga Air) dan selanjutnya menjadi direktur dari Technisch-Economisch Adviesbureau (Biro Advise Teknis-Ekonomis) pada Departemen GB (1920-1922). Selama dua tahun (1922-1924) ia menjadi komisararis pemerintah pada Billiton Maatschappij.

10. Arsip pribadi dari keluarga Middelberg, 1820-1960, kode akses 2.21.232

Arsip ini berisi berkas-berkas kertas dari M. Middelberg, antara lain insinyur kepala yang membantu direktur GB, dan L. Middelberg yang bekerja pada Staatsspoorwegen (Jawatan kereta api negara).

11. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Jaarverslagen van den Dienst voor Waterkracht en Electriciteit in Nederlandsch-Indië (Laporan-laporan tahunan dari Dinas Pembangkit Listrik dan Tenaga Air) (1917-1933; Bandoeng)

Laporan-laporan meliputi tahun 1919-1920 juga berada dalam arsip pribadi dari A. Groothoff, nomor inventaris 71.

Statistiek van het vervoer op de spoorwegen en tramwegen met machinale beweegkracht in Nederlandsch-Indië (Statistik angkutan jawatan kereta api dan tram dengan tenaga gerak mesin di Hindia-Belanda) (1900-1914; Batavia), berlanjut sebagai *Verslag betreffende het spoor- en tramwegwezen in Nederlandsch-Indië* (Laporan tentang jawatan kereta api dan tram di Hindia-Belanda) (1915-1927; Batavia).

Catatan: publikasi dari Departemen GB.

Verzameling van concessievoorwaarden der particuliere spoorwegen en tramwegen met machinale beweegkracht (Kumpulan prasyarat konsesi jawatan swasta kereta api dan tram dengan tenaga gerak mesin) (1910-1914; 2 jilid; Weltevreden).

De Waterkrachtregelingen in Nederlandsch-Indië: overzicht der vroegere en nu nog bestaande bepalingen en regelingen, welke verband houden met het gebruik van water als beweegkracht in Nederlandsch-Indië (Peraturan-peraturan tenaga air di Hindia-Belanda: paparan ketentuan dan aturan lama dan yang sekarang masih ada, yang berhubungan dengan penggunaan air sebagai tenaga gerak di Hindia-Belanda) (1924; Weltevreden).

Jaarverslagen van gouvernementsbedrijven (Laporan tahunan dari perusahaan-perusahaan Pemerintah), antara lain ‘van de Goud- en zilvermijnen te Benkoelen (1925-1931)’ (dari Tambang emas dan perak di Bengkulu, 1925-1931); ‘Boekit Asem steenkolenmijnen (1919-1924)’ (Tambang Batubara Bukit Asem, 1919-1924); ‘Dienst van de zoutregie (1912-1934)’ (Dinas jawatan pengaturan garam, 1912-1934); ‘Poeloe Laoet steenkolenontginning (1914-1925)’ (Penambangan Batubara Pulau Laut, 1914-1925); ‘Bedrijf der Staatsspoor- en tramwegen op Java (1911-1914)’ (Perusahaan jawatan kereta api dan tram di Jawa, 1911-1914); ‘Opiumfabriek (1917-1939)’ (Pabrik opium, 1917-1939); ‘Landsdrukkerij (1924-1933)’ (Percetakan negara, 1924-1933); ‘Ombilinmijnen’ (Tambang-tambang Ombilin, 1918-1925).

Handelingen en bijlagen van de Volksraad (Notula dan lampiran dari Dewan Rakyat).
Di dalamnya berisi antara lain teks-teks pidato direktur Departemen GB.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië (Lembaran Negara Hindia-Belanda)

Untuk berkas ini digunakan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1907 no. 406; 1909 no. 279;

1910 no. 253; 1913 no. 512; 1915 no. 656; 1917 no. 468; 1919 no. 2; 1924 no. 576; 1933 no. 509.

Daftar Pustaka

Biografisch Woordenboek van Nederland, versi digital,
(<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/groothoff>), lema A.
Groothoff.

Dierikx, Marc (1986), *Bevlogen jaren; Nederlandse burgerluchtvaart tussen de wereldoorlogen* (Houten: Romen).

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill), lema *Departementen van algemeen bestuur* (I, hlm. 585-588); lema *Landsdrukkerij* (II, hlm. 528); lema *Luchtvaart* (II, hlm. 624-626; VI, hlm. 575-584); lema *Mijnwezen (Dienst van het)* (II, hlm. 852-854); lema *Opium* (III, hlm. 155-167; VII, 1249-1263); lema *Post- en telegraafdienst* (III, hlm. 437-451; VI, hlm. 845-862); lema *Postspaarbank* (III, hlm. 484-487; V, hlm. 32-34; VI, hlm. 798-799); lema *Spoor- en tramwegen* (IV, hlm. 68-85); lema *Transportwezen* (IV, hlm. 423-430); lema *Waterkracht en electriciteit* (V, hlm. 303-319); lema *Zout* (IV, hlm. 865-867).

Gent, L.F. van, W.A. Penard, dan D.A. Rinkes ed. (1923), *Gedenkboek van Nederlandsch-Indië ter gelegenheid van het regeeringsjubileum van H.M. de Koningin 1898-1923* (Batavia-Leiden: Kolff).

Catatan: lihat hlm. 393-421 dan 468-501.

Graaff, B.G.J. de (1997), *Kalm temidden van woedende golven; Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving, 1912-1940* (Zutphen: SDU).

Kleintjes, Ph. (1932-33), *Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië* (Cetakan ke-6; Amsterdam: De Bussy), Bab XXVI.

Lijst van periodieken (1927), *Lijst van periodieken (jaarboeken en jaarverslagen uitgezonderd) van de Centrale bibliotheek van het Departement van Gouvernementsbedrijven* (Bandung).

Stok, P.J.C. van der (1913), *Gouvernementsexploitation in Nederlandsch-Indië* (Leiden).

Wenckebach, H.J.E. (1915), 'Het departement van Gouvernementsbedrijven in Nederlandsch-Indië; Voordracht, gehouden in de vergadering van het Kon. Instituut van Ingenieurs van 27 maart 1915', *De Ingenieur* (22 Mei), hlm. 429-445.

Catatan: lihat juga arsip KIVI, nomor inventaris 405.

43 Departement van Verkeer en Waterstaat (Departemen Lalu Lintas dan Pengairan)

Departement van Verkeer en Waterstaat / V&W (Departemen Lalu Lintas dan Pengairan) yang didirikan berdasarkan Gouvernementsbesluit (Keputusan Pemerintah) tertanggal 22 Desember 1933 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1933 no. 509) memulai kegiatannya pada tanggal 1 Januari 1934. Departemen V&W. berasal dari fusi antara Departement van Burgerlijke Openbare Werken / BOW (Departemen Pekerjaan Umum Sipil) dengan Departement van Gouvernementsbedrijven / GB (Departemen Perusahaan Pemerintah). Reorganisasi pemerintahan dan penghematan mengakibatkan fusi tersebut. Dengan penggabungan itu, pemerintah berharap departemen tersebut akan dapat beroperasi lebih efisien.

Tugas-tugas yang berikut diambil alih dari Departemen GB: ‘Aanleg en exploitatie van de staatsspoor- en tramwegen’ (Pembangunan dan eksploitasi jalan kereta api dan tram); ‘PTT’ (PTT); ‘Postspaarbank’ (Bank tabungan pos); ‘Elektriciteitswezen’ (Sistem kelistrikan); ‘Bouw en exploitatie van waterkrachtwerken’ (Pembangunan dan eksploitasi pekerjaan pengairan); ‘Bemoeienis met en het toezicht op de burgerlijke luchtvaart en het mijnwezen (met uitzondering van de landsmijnbedrijven, want die vielen nu onder het nieuwe Departement van Economische Zaken)’ (Ikut campur dalam pengawasan pada angkutan udara umum dan pertambangan; dengan pengecualian perusahaan tambang negara karena perusahaan itu berada di bawah Departemen Urusan Ekonomi yang baru). Departemen BOW melepaskan ‘natte en droge waterstaat’ (pengairan basah dan kering) kepada Departemen V&W. Bidang kerja ini meliputi ‘aanleg, onderhoud en beheer van rijwegen’ (pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan jalan raya); ‘beheer van waterwegen (rivieren, meren, plassen)’ (pengelolaan saluran air: sungai, danau besar, danau kecil); ‘bouw en exploitatie van havenwerken’ (pembangunan dan eksploitasi pekerjaan prasarana pelabuhan); ‘aanleg en exploitatie van drinkwatervoorzieningen, riolerings- en andere werken in het belang van de volksgezondheid’ (pembangunan dan eksploitasi sarana air minum, fasilitas saluran pembuangan air dan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat); ‘bouw, onderhoud en beheer van landsgebouwen en het huren van gebouwen voor burgerlijke diensten’ (pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan bangunan pemerintah dan penyewaan bangunan untuk layanan sipil). Departemen V&W tidak bertanggung jawab atas urusan pengairan yang berada di bawah badan-badan pemerintahan lain seperti provinsi dan kotapraja.⁵² Akhirnya, Departemen V&W juga harus berkecimpung permasalahan umum di sektor transportasi dan permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan ‘scheepvaartverkeer’ (lalu lintas pelayaran).

⁵² Lihat halaman Bab 2 dalam buku panduan ini.

Arsip dan sumber yang tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Berkas-berkas tentang organisasi dan pelaksanaan tugas Departemen V. en W. (secara garis besarnya), advis dan laporan dari direktur departemen itu, dapat ditemukan dengan bantuan akses (*indices* 'indeks') pada *openbaar archief* (arsip umum), dalam rubrik-rubrik berikut:

- a. Periode na 1900** (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02; 2.10.36.03):
'Ambtenaren' (pegawai pemerintahan); 'Automobielen' (otomobil); 'Bodemkunde' (Ilmu tanah); 'Bruggen en wegen' (Jembatan dan jalan); '(Burgerlijke) openbare werken' (Pekerjaan umum sipil); 'Drinkwatervoorziening' (Sarana air minum); 'Havens (exploitatie van - en dokinrichtingen) (Pelabuhan: Eksploitasi pelabuhan dan pengaturan dok); Luchtvaart- (zaken; - congressen) (Urusan dan kongres angkutan udara); 'Mijnwezen' (Pertambangan); 'PTT' (PTT: Pos, Telegraf, dan Telepon); 'Postspaarbank Nederlandsch-Indië' (Bank tabungan pos Hindia-Belanda); 'Transporten' (Transpor / Angkutan); 'Verkeerscoördinatie' (Koordinasi lalu lintas); 'Volksgezondheid' (Kesehatan masyarakat); 'Waterkracht en elektriciteit' (Pembangkit listrik dan tenaga air); 'Wegverkeer' (Lalu lintas jalan).

Karena Departemen V&W baru didirikan setelah tahun 1921, maka *centrale indices* (indeks pusat) pada *openbaar verbaalarchief* (arsip verbal umum) tidak bisa digunakan lagi. Untuk mencari berkas-berkas tentang Departemen V&W, akses *5de afdeling* (bagian ke-5) adalah penting. Ada indeks terpisah untuk berkas-berkas tentang 'Waterkracht en elektriciteit' (Pembangkit listrik dan tenaga air); 'Mijnwezen' (Pertambangan); 'Spor- en tramwegen' (Perihal kereta api dan tram); 'Luchtvaart en PTT-aangelegenheden' (Angkutan udara dan perihal PTT): lihat kode akses 2.10.36.011, hlm. 29-31.

Geheim- en kabinetsarchief (arsip kabinet dan rahasia) beserta *serie geheime mailrapporten* (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 kemungkinan besar tidak memuat banyak bahan mengenai 'verkeer- en waterstaat' (lalu lintas dan pengairan). Apabila dari arsip umum diacu ke data dokumen itu, maka data itu bisa diteliti lebih lanjut.

Serie Jaarboeken van het mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië (Seri buku tahunan pertambangan di Hindia-Belanda), 1875-1938, kode akses 2.10.55.

Di dalamnya ada laporan 'mijnwezen / Dienst van de Mijnbouw' (pertambangan / Dinas Pertambangan)

2. Koleksi arsip Haringhuizen-Schoemaker, kode akses 2.22.07 dan 2.22.08

terdiri dari berkas-berkas mengenai pekerjaan umum di Hindia-Belanda dan Suriname, 1872-1970.

J. Haringhuizen dan H.J. Schoemaker adalah insinyur yang masing-masing bekerja di Departement van Burgerlijke Openbare Werken (Departemen Pekerjaan Umum Sipil) dan Departement van Verkeer en Waterstaat (Departemen Lalu lintas dan Pengairan). Berkas-berkas arsip itu ada di kode akses 2.22.07: nomor inventaris 97 dan 111 memuat laporan tahunan Departemen V&W tentang periode 1938-1940. Koleksi *lantaarnplaatjes* (slide bergambar) di kode akses 2.22.08.

3. Arsip Koninklijk Instituut van Ingenieurs / KIVI (Institut Kerajaan untuk Insinyur), 1847-1980, kode akses 2.19.047.01

KIVI adalah organisasi profesi untuk para insinyur, yang pada waktu itu banyak bekerja di Hindia-Belanda, baik yang bekerja untuk pemerintah ataupun swasta.

Arsip itu memuat antara lain edisi majalah *De Ingenieur in Nederlandsch-Indië* dan majalah *Indisch Bouwkundig Tijdschrift*.

4. Arsip pribadi F.A.W. Meijneken (juga dieja sebagai Meineken), 1921-1946, kode akses 2.21.205.41

Meijneken bekerja sebagai *waterstaatsingenieur* (insinyur pengairan) pada Departemen BOW dan Departemen Verkeer en Waterstaat (Departemen Lalu lintas dan Pengairan). Dia bekerja antara lain di Pelabuhan Belawan (Sumatra).

5. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber-sumber ini lihat Picarta melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl).

Algemeene voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van openbare werken in Nederlandsch-Indië: goedgekeurd bij gouvernementsbesluit van 28 mei 1941 no 9 (Syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan umum di Hindia-Belanda: disetujui berdasarkan keputusan pemerintah tertanggal 28 Mei 1941 no. 9) (1941; Batavia: Departement van Verkeer en Waterstaat).

Eenige gegevens en voorlopige cijfers betreffende de werkzaamheden van het Departement van Verkeer en Waterstaat (Beberapa data dan angka sementara tentang pelaksanaan pekerjaan di Departemen Lalu Lintas dan Pengairan) (1935-1938; Batavia).

Berisi ‘gegevens van de afdelingen van het departement en van het laboratorium voor materiaalonderzoek’ (data dari bagian-bagian departemen dan data dari laboratorium untuk

penelitian material). Juga ‘grafieken’ (grafik), antara lain grafik tentang pengeluaran dan penerimaan yang nyata dan grafik tentang pengeluaran luar biasa untuk urusan pelabuhan. Bagian mengenai tahun 1938 juga ada dalam koleksi arsip Haringhuizen-Schoemaker, nomor inventaris 97.

Luchtvaartatlas van Nederlandsch-Indië (Atlas angkutan udara Hindia-Belanda) (1934; Bandoeng).

Wegenboekjes van Midden-Java en Noord-Sumatra (Buku-buku petunjuk jalan di Jawa Tengah dan di Sumatra Utara) (1936; Batavia).

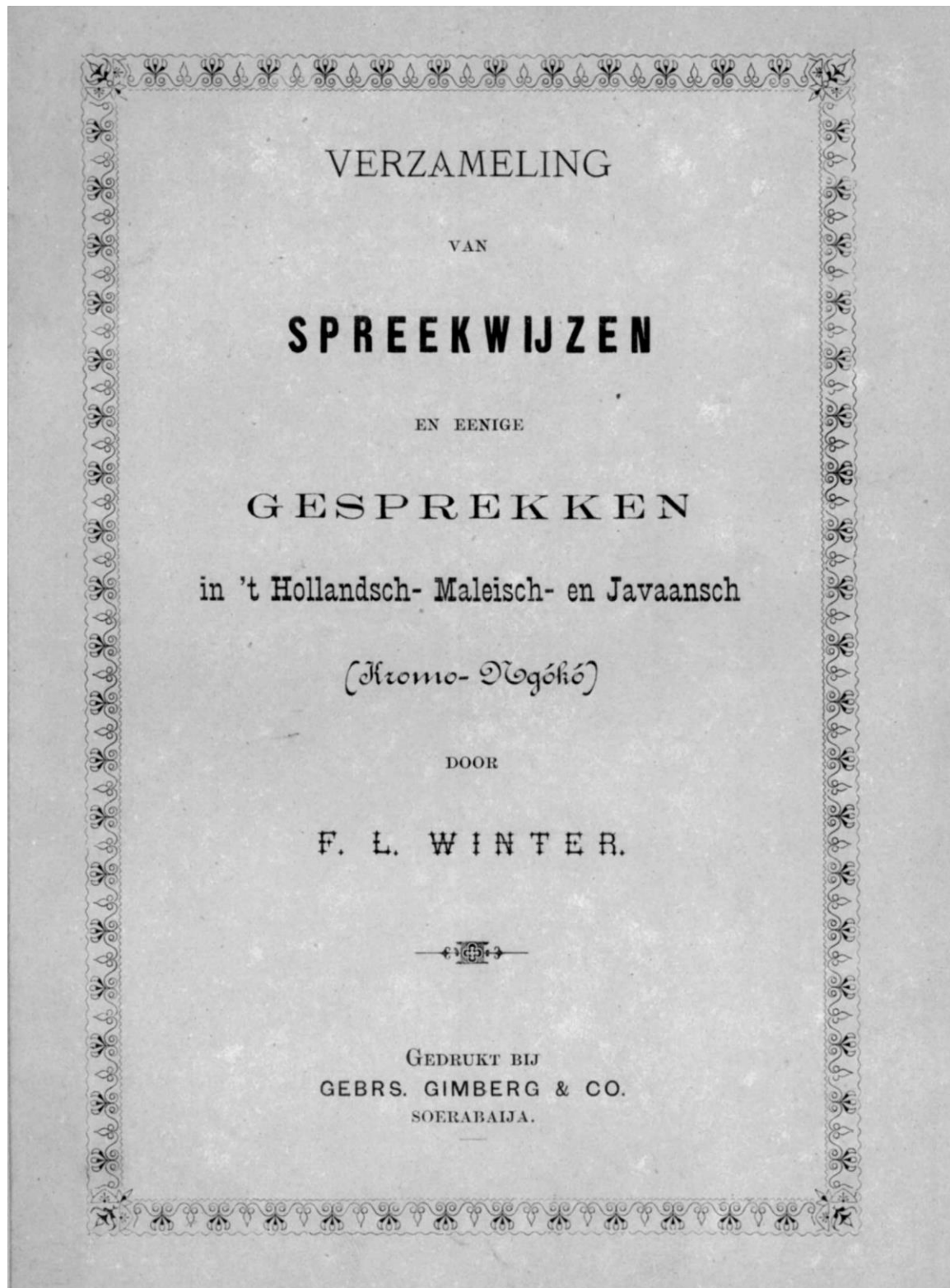
Handelingen en bijlagen van de Volksraad (Notula dan lampiran dari Dewan Rakyat). Di dalamnya antara lain ada artikel-artikel pidato dari direktur Departemen V en W.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië (Lembaran Negara Hindia-Belanda)
Untuk berkas ini dipakai *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1933 no. 509.

Daftar Pustaka

Ravesteijn, Willem (1997), *De zegenrijke heeren der wateren; Irrigatie en staat op Java 1832-1942; Een wetenschappelijke proeve op het gebied van Sociale Wetenschappen* (Delft: Delft University Press).

Ravesteijn, Willem dan Jan Kop ed. (2004), *Bouwen in de archipel; Burgerlijke Openbare Werken in Nederlands-Indië en Indonesië 1800-2000* (Zutphen: Walburg Pers).



F.L. Winter adalah *translateur* (juru bahasa) pada Bureau Javaanse Taal (Kantor Bahasa Jawa) di Soerakarta (1861-1866) (Nationaal Archief, Arsip Kementerian Urusan Tanah Jajahan 1850-1900, nomor inventaris 4415).

Sumber dan Bibliografi

44 Sumber yang digunakan, dengan penjelasan

Arsip dan sumber yang tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) 1814-1942

Untuk informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus diacu ke F.J.M. Otten (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis). Bab 2 dan 16 masing-masing menyajikan pembahasan tentang registratur⁵³ *rijksadministratie* (administrasi pusat kerajaan) dan arsip Kementerian Urusan Tanah Jajahan. Data dari kedua bab itu dipakai untuk penjelasan.

Tatanan

‘Archief Koloniën’ (Arsip Urusan Tanah Jajahan) ditata berdasarkan sejenis sistem verbal: seri kronologis berkas, diatur berdasarkan tanggal penanganan. Penanganan itu terdiri dari keputusan kementerian, ditulis pada lembar kertas yang dilipat dua. Berkas-berkas itu, yang menghasilkan keputusan (*voorstukken* ‘berkas-berkas awal’), disertakan pada sampul. *Openbare verballen* (Arsip-arsip verbal umum) dilengkapi dengan tanggal dan nomor. *Geheime verballen* (Arsip-arsip verbal rahasia) hingga tahun 1900 menyandang tanggal dan nomor dengan tambahan ‘geh’.⁵⁴ *Kabinetsverballen* (Arsip-arsip verbal kabinet) hingga tahun 1900 menyandang tanggal, huruf, dan tambahan ‘kab’.⁵⁵ *Geheime- en kabinetsverballen* (Arsip kabinet dan rahasia) setelah tahun 1900 dilengkapi dengan tanggal dan huruf. Mencari dalam arsip verbal memungkinkan jika diketahui periode ketika seseorang melakukan tindakan atau suatu peristiwa terjadi. Untuk mencari berkas-berkas yang relevan, harus digunakan akses-akses asli dari masa itu dalam bentuk indeks (yang dibuat per tahun kalender) dan register kata kunci. Indeks terbagi dalam pelbagai rubrik. Sebelum suatu berkas disimpan, perlu diteliti berkas tersebut masuk rubrik mana. Selanjutnya berkas itu dicatat dalam rubrik yang bersangkutan dengan mencantumkan tanggal dan nomor atau huruf dari keputusan penanganan. Pada uraian dalam indeks dipakai kata-kata kunci (nama orang, geografi, hal / urusan), yang dicatat dalam register kata kunci. Kata-kata kunci dalam register itu mengacu ke halaman-halaman indeks.

Penandaan Exhibitum (Ekshibitum) berarti ‘telah ditangani’. Disingkat menjadi Exh., istilah itu diikuti oleh tanggal (Catatan: penyebutan bulan dalam angka di awal berarti tanggal harinya!)⁵⁶ dan nomor / huruf, dituliskan pada berkas-berkas yang masuk.

⁵³ Penataan dan penyimpanan berkas-berkas arsip.

⁵⁴ ‘geh’ singkatan dari *geheim* yang berarti ‘rahasia’.

⁵⁵ ‘kab’ singkatan dari *kabinet*.

⁵⁶ Misalnya, 4-1-1906 sebenarnya berarti ‘1-4-1906: tanggal 1, bulan April, tahun 1906’.

Bagian dari *exhibita* (pelbagai berkas ekshibitum) itu masuk sebagai ‘berkas-berkas awal’ dalam arsip verbal.

Pelbagai berkas ekshibitum itu yang tidak menghasilkan keputusan penanganan, disimpan secara kronologis: berkas-berkas itu terdapat dalam ‘bundel harian’ sebelum arsip verbal. Arsip kabinet dan rahasia mulai tahun 1900 berisi seri tersendiri dari pelbagai berkas ekshibitum meliputi periode 1916-1940 (lihat kode akses 2.10.36.051).

Kode akses arsip verbal Urusan Tanah Jajahan:

Periode 1814-1849: 2.10.01 (arsip umum, arsip kabinet dan rahasia)
Periode 1850-1900: 2.10.02 (idem)
Periode setelah tahun 1900: 2.10.36.011; 2.10.36.04 (arsip verbal umum)
2.10.36.051; 2.10.36.013 (arsip kabinet dan rahasia)

Indeks

Pada setiap bab dalam buku panduan ini terdapat acuan ke rubrik-rubrik yang relevan dalam indeks-indeks pada arsip verbal umum. Rubrik-rubrik itu dibagi dalam periode 1814-1849; 1850-1900; mulai tahun 1900: berdasarkan pembagian ini Arsip Urusan Tanah Jajahan dapat diakses. Berikut ini diberikan ikhtisar rubrik-rubrik yang disebut.

1814-1849: ‘Binnenlandse aangelegenheden’ (Urusan dalam negeri); ‘Boeken en geschriften’ (Buku dan tulisan); ‘Celebes’ (Sulawesi); ‘Inlandse vorsten en groten’ (Raja en pejabat pribumi); ‘Java en Madoera’ (Jawa dan Madura); ‘C(K)ultures en landelijke inkomsten’ (Budidaya tanaman dan pendapatan negeri); ‘C(K)ultuurstelsel in het algemeen’ (Sistem Tanam Paksa pada umumnya); ‘(Genootschap van) Kunsten en Wetenschappen (te Batavia)’ (Ikatan Kesenian dan Ilmu Pengetahuan di Batavia); ‘Ontdekkingsreizen’ (Perjalanan ekspedisi); ‘Oost-Indische archipel’ (Kepulauan Hindia-Timur); ‘Regenten en hoofden’ (Bupati dan kepala pribumi); ‘Residenties op Java’ (Karesidenan di Jawa); ‘Sumatra’.

1850-1900: ‘Afstand en verhuringen van land’ (Pelepasan dan penyewaan tanah); ‘Agrarische aangelegenheden’ (Urusan agraria); ‘Algemene rekenkamer en comptabiliteit’ (Badan pemeriksa keuangan dan perbendaharaan negara); ‘(benoeming van) Ambtenaren (in het algemeen / oosterse talen en zaken / voor of in Oost-Indië)’ (Pengangkatan para pegawai pemerintahan pada umumnya / bahasa dan hal-hal timur / untuk atau di Hindia-Timur); ‘Atjeh’ (Aceh); ‘Banka’ (Bangka); ‘Belastingen in Oost-Indië / belastingen in het algemeen’ (Pajak di Hindia-Timur / pajak pada umumnya); ‘Binnenlandse aangelegenheden’ (Urusan dalam negeri); ‘Boedels en nalatenschappen’ (Harta benda dan peninggalan / warisan); ‘Boeken en geschriften’ (Buku dan tulisan); ‘Borneo’ (Kalimantan); ‘Boswezen’ (Perhutanan); ‘Burgerlijke stand’ (Catatan sipil); ‘Constructiewinkel in Oost-Indië’ (Toko perlengkapan militer dan konstruksi material di Hindia-Timur); ‘C(K)ultures (ook gespecificeerd)’ (Budidaya tanaman, juga terspesifikasi); ‘Departementen van algemeen bestuur’ (Departemen-departemen pemerintahan umum); ‘Drukkerijen en dagbladen’ (Percetakan dan surat kabar harian); ‘Drukpers’ (Barang cetakan); ‘Eredienst (niet Mohammedaans / ook Mohammedaans)’ (Ibadah: bukan muslim / juga muslim); ‘Fabrieken

en trafieken' (Pabrik dan perusahaan industri bahan dasar); 'Financiën en begroting van Oost-Indië' (Keuangan dan anggaran Hindia-Timur); 'Gebouwen en werken in Oost-Indië' (Bangunan dan pekerjaan umum di Hindia-Timur); '(Burgerlijke) Geneeskundige dienst in de koloniën' (Dinas Kesehatan Sipil di tanah jajahan); 'Gevangenissen' (Penjara); 'Gewestelijk en plaatselijk Europees bestuur' (Pemerintahan daerah dan setempat Eropa); 'Handel' (Perdagangan); 'Herendiensten' (Kerja pengabdian); 'Huwelijken' (Perkawinan); 'Inkomende en uitgaande rechten in Oost-Indië / in en uitgaande rechten en accijnzen' (Bea masuk dan keluar di Hindia-Belanda / bea dan cukai untuk masuk dan keluar); 'Inlands bestuur en politie' (Pemerintahan pribumi dan kepolisian); 'Inlandse vorsten en inlandse hoofden' (Raja pribumi dan kepala pribumi); 'Invordering en uitbetaling van gelden' (Penagihan dan pembayaran uang); 'Java en Madoera' (Jawa dan Madura); 'Javasche Bank' (Bank Jawa); 'Justitiwezen in Oost-Indië' (Sistem yustisi di Hindia-Timur); 'Kasbeheer en wisseltrekking' (Pengelolaan kas dan penarikan / penguangan wesel); 'Kina' (Kina); 'Koffie' (Kopi); 'Koloniale ambtenaren in het algemeen' (Pegawai pemerintah kolonial pada umumnya); 'Kolonisatie (landverhuizing en koelies)' (Kolonisasi: emigrasi dan kuli); 'Kortingen' (Pemotongan); 'Kultuurstelsel op Java' (Sistem Tanam Paksa di Jawa); 'Kunsten en Wetenschappen' (Kesenian dan Ilmu Pengetahuan); 'Kwijtscheldingen' (Penghapusan hutang); 'Landbouw (in het algemeen) en veeteelt' (Pertanian pada umumnya dan peternakan); 'Landelijke inkomsten' (Pendapatan negara); 'Landrente' (Pajak tanah); 'Leningen' (Peminjaman); 'Maatschappij van Weldadigheid' (Organisasi pemberantasan kemiskinan); 'Ministerie' (Kementerian); 'Mohammedaanse erediensten' (Ibadah Islam); 'Muntwezen in Oost-Indië' (Sistem mata uang di Hindia-Timur); 'Mijnwezen (in Oost-Indië)' (Pertambangan di Hindia-Timur); 'Naamloze maatschappijen / vennootschappen' (Perseroan Terbatas); 'Nalatenschappen' (Peninggalan / warisan); 'Nationale militie en schutterijen' (Milisi nasional dan pertahanan sipil); 'Natuurkundig onderzoek in Oost-Indië' (Penelitian fisika di Hindia-Timur); 'Onderwijs' (Pendidikan); 'Onlusten (in Oost-Indië)' (Kerusuhan di Hindia-Timur); 'Oost-Indische archipel (ook uitgesplitst op regio)' (Kepulauan Hindia-Timur, juga terpilah berdasarkan daerah); 'Oost-Indische begroting' (Anggaran Hindia-Timur); 'Openbare werken' (Pekerjaan umum); 'Opium(pacht in Oost-Indië)' (Pengaturan perizinan opium di Hindia-Timur); 'Paspoorten' (Paspor); 'Pensioenen van ambtenaren voor Oost-Indië' (Pensiun pegawai pemerintah untuk Hindia-Timur); 'Postwezen in Oost-Indië / Posterijen, telegrafen en telefonen' (Perposan di Hindia-Timur / Pos, telegraf, dan telepon); 'Rechtswezen' (Sistem hukum); 'Regering der koloniën' (Pemerintah tanah jajahan); 'Riouw' (Riau); 'Schoolwezen (in Oost-Indië)' (Perihal sekolah di Hindia-Timur); 'Slavenstand / slavenhandel' (kaum budak / perdagangan budak); 'Slavernij en zeeroof' (Perbudakan dan perompakan); 'Spoor- en tramwegen en stoomwezen' (Perihal kereta api, tram, dan tenaga uap); 'Staatsbegroting' (Anggaran negara); 'Statistiek' (Statistik); 'Stoomwezen in Oost-Indië' (Perihal mesin uap di Hindia-Timur); 'Successierechten' (Pajak warisan); 'Suiker' (Gula); 'Sumatra (in het algemeen)' (Sumatra pada umumnya); 'Sumatra's Westkust' (Pantai/Pesisir Barat Sumatra); 'Tractaten, contracten of overeenkomsten met inlandse vorsten in de kolonie' (Traktat, kontrak atau kesepakatan dengan raja pribumi di tanah jajahan); 'Transportmiddelen in Oost-Indië / Transportwezen' (Alat angkutan di Hindia-Timur / Sistem Transportasi); 'Verkoop van producten' (Penjualan produk); 'Verpachtingen in Oost-Indië / verpachte middelen' (Penyewaan di Hindia-Timur / hal-hal yang disewakan);

‘Visserijen’ (Perikanan); ‘Wissels van Oost-Indië’ (Sistem perweselan di Hindia-Timur); ‘Zeebrieven en uitklaringen’ (Surat laut dan surat perizinan ekspor); ‘Zeeroverijen / zeeroof’ (Perompakan/perompak); ‘Zeevrachten en transporten’ (Muatan laut dan pengangkutannya); ‘Zegels en leges’ (Cap / materai dan biaya administrasi); ‘Zout-administratie (in Oost-Indië)’ (Administrasi pergaraman di Hindia-Timur).

Mulai tahun 1900: ‘Accijnzen (in- en uitgaande rechten; in en uitvoerrechten)’ (Cukai: bea masuk dan keluar; peraturan bea impor dan ekspor); ‘Accountants’ (Akuntan); ‘Agrarische aangelegenheden / zaken’ (Perihal agraria); ‘Algemene Rekenkamer en comptabiliteit’ (Badan Pemeriksa Keuangan dan perbendaharaan negara); ‘Ambtenaren (belastingen; bij het boswezen; de bureaudienst; in- en uitvoerrechten en accijnzen; de landbouw; de pandhuisdienst; de waterstaat; burgerlijke openbare werken; gouvernementsbedrijven; het mijnwezen; de PTT-dienst; de Staatsspoorwegen; de rechterlijke macht)’ (Pegawai pemerintahan: dinas perpajakan, perhutanan; dinas biro; peraturan bea dan cukai impor dan ekspor; pertanian; dinas rumah pegadaian; dinas pengairan; dinas pekerjaan umum sipil; perusahaan-perusahaan pemerintah; pertambangan; dinas PTT; Jawatan Kereta Api; kekuasaan pengadilan); ‘Arbeid’ (Perburuhan); ‘Arbeidsaangelegenheden (Perihal perburuhan)’; ‘Arbeidsinspectie (kolonisatie, landverhuizing, koelies)’ (Inspeksi buruh: kolonisasi, emigrasi, kuli); ‘Armenzorg / armwezen (en opvoedingswezen)’ (Perawatan orang miskin / perihal kemiskinan dan pendidikan); ‘Automobielen’ (Otomobil); ‘Bank, Javasche’ (Bank Jawa); ‘Bankwezen (Nederlandsch-Indisch)’ (Perbankan Hindia-Belanda); ‘Bannelingen’ (Orang-orang buangan); ‘Bedevaart’ (Ziarah); ‘Bedrijfsreglementeringen’ (Pengaturan usaha); ‘Bedrijvenwetten’ (Undang-Undang perusahaan); ‘Begroting (comptabiliteit en -; Oost-Indische -)’ (Anggaran: perbendaharaan negara dan anggaran; anggaran Hindia-Timur); ‘Begrotingsaangelegenheden / kwesties’ (Perihal / permasalahan penganggaran); ‘Belasting(en) / Belastingwezen’ (Pajak-pajak / Sistem perpajakan); ‘Benkoelen’ (Bengkulu); ‘(Bestrijding) handel in vrouwen en kinderen en van de handel in ontuchtige uitgaven’ (Pemberantasan perdagangan perempuan dan anak dan perdagangan tindakan asusila); ‘Bestuur (uitgesplitst in binnenlands / Europees / Inlands / gewestelijk en plaatselijk / provincies)’ (Pemerintahan yang terbagi atas: dalam negeri / Eropa / Pribumi / daerah dan setempat / provinsi); ‘Bestuurshervorming’ (Reformasi pemerintahan); ‘Betrekkingen met inlandse vorsten en staten’ (Hubungan dengan raja dan pemerintahan pribumi); ‘Betrekkingen met vreemde mogendheden’ (hubungan dengan negara-negara asing); ‘Beveiliging (fabrieken en werkplaatsen)’ (Keamanan: pabrik dan tempat kerja); ‘Bezoldigingen’ (Penggajian); ‘Bezuiniging’ (Penghematan / perampangan); ‘Bodemkunde’ (Ilmu tanah); ‘Boeken en geschriften (boekwerken / drukwerken)’ (Buku dan tulisan: buku-buku tebal / barang cetakan); ‘Bosbouw / Boswezen (congressen)’ (Perhutanan: kongres-kongres); ‘Botanische congressen’ (Kongres-kongres botani); ‘Bruggen en wegen’ (Jembatan dan jalan); ‘Buitengewesten’ (Wilayah Luar Jawa dan Madura); ‘(Burgerlijke) openbare werken’ (Pekerjaan umum sipil); ‘Burgerlijke stand’ (Catatan sipil); ‘Celebes’ (Sulawesi); ‘Chinezen’ (Orang-orang Cina); ‘(Dienst voor) Chinese aangelegenheden (zaken)’ (Dinas untuk urusan Cina); ‘Cocaïne, opium en –’ (Opium dan kokain); ‘(Internationale) Conferentie(s)’ (Konferensi internasional); ‘Congressen’ (kongres-kongres); ‘Consulaire zaken’ (Urusan konsuler); ‘Coöperatie’ (Koperasi); ‘Credietwezen’ (Sistem kredit); ‘Cultures’

(Budidaya tanaman); ‘Dactyloscopie’ (Pemeriksaan sidik jari); ‘Decentralisatie’ (Desentralisasi); ‘Departementen van algemeen bestuur’ (Departemen-departemen urusan umum); ‘Desawezen’ (Perihal desa); ‘Dienst der Oost-Aziatische zaken’ (Dinas Urusan Asia-Timur); ‘Drinkwatervoorziening’ (Sarana air minum); ‘Drukpers’ (Barang cetakan); ‘Elektriciteit (waterkracht en -)’ (Tenaga air dan listrik); ‘Eredienst (uitgesplitst in Mohammedaans / niet-Mohammedaans / bedevaart / hedjaz)’ (Ibadah terbagi dalam: muslim / bukan-muslim / ziarah, naik haji / Hijaz); ‘Erfpacht’ (Erfpah); ‘Financiële aangelegenheden / financieel beheer’ (Perihal keuangan / pengelolaan keuangan); ‘Gevangeniswezen’ (Perihal penjara); ‘Goud’ (Emas); ‘Gouvernementsbedrijven’ (Perusahaan-perusahaan pemerintahan); ‘Gratieverzoeken’ (Permohonan grasi); ‘Grondbezit (-rechten) / gronden’ (Hak pemilikan tanah / tanah lahan); ‘Grote Oost’ (Timur Besar); ‘Handel (binnenlandse; - en scheepvaart; - en nijverheid; begroting dep. LNH)’ (Perdagangan: dalam negeri; perdagangan dan pelayaran; perdagangan dan industri kerajinan; anggaran Departemen Pertanian, Industri, dan Perdagangan); ‘Handel in vrouwen en kinderen en (van de) handel in ontuchtige uitgaven’ (Perdagangan perempuan dan anak dan perdagangan tindakan asusila); ‘Handelspolitiek (-voorlichting; -wetgeving)’ (Politik perdagangan: penerangan; perundang-undangan); ‘Havens (exploitatie van – en dokinrichtingen)’ (Pelabuhan: eksploitasi dan penataan galangan kapal); Hedjaz (Hijaz); ‘Herendiensten’ (Kerja pengabdian); ‘Hygiëne (conferenties; tentoonstellingen; volkenbondszaken)’ (Higiene / kebersihan lingkungan: konferensi; pameran; urusan liga bangsa-bangsa); ‘Indische Centrale Aanschaffingsdienst’ (Dinas Pengadaan Pusat Hindia); ‘Industriële eigendom’ (milik industrial); ‘In- en externeringsprocedures’ (Prosedur internering / pengiriman ke pengasingan dan prosedur eksternering / pengiriman ke pengasingan bagi orang yang bukan kelahiran Hindia); ‘Ingezetenen / ingezetenschap’ (Penduduk / kependudukan); ‘Inkomsten (onverpachte middelen en -)’ (Pendapatan: hal-hal yang tidak disewakan dan pendapatan lainnya); ‘Inlandse aangelegenheden’ (Perihal pribumi); ‘Inlandse gemeenten’ (Masyarakat adat / pribumi); ‘Inlands onderwijs’ (Pendidikan pribumi); ‘Inlandse zelfbesturen’ (Kepemerintahan wilayah otonom pribumi); ‘In- en uitvoer’ (Impor dan ekspor); ‘Invoerrechten’ (Bea impor); ‘Invorderingen en belastingsschuld’ (Penagihan dan hutang pajak); ‘Irrigatie’ (Irigasi); ‘Japanners’ (Orang-orang Jepang); ‘(Kantoor voor) Japanse zaken’ (Kantor untuk urusan Jepang); ‘Java en Madoera’ (Jawa dan Madura); ‘Kadaster’; ‘Kamers van Koophandel’ (Kamar Dagang); ‘Kasbeheer (en wisseltrekking)’ (Pengelolaan kas dan penarikan wesel); ‘Kinderwetgeving’ (Perundang-undangan anak-anak); ‘Kinine (bast)’ (Kina: kulit kayu); ‘Kina en coca’ (Kina dan koka); ‘Koelies’ (Kuli); ‘Koersen, wissel-’ (Kurs wesel); ‘Koffie’ (Kopi); ‘Kolonisatie (emigratie, inlandse en transmigratie; landverhuizers en koelies)’ (Kolonisasi: emigrasi dan transmigrasi pribumi; emigran dan kuli); ‘Kunsten en wetenschappen (en geschenken)’ (Kesenian dan Ilmu Pengetahuan, dan hadiah); ‘Kwijtscheldingen en dispensatiën’ (Penghapusan hutang dan dispensasi); ‘Landbouw (en cultures; - en tuinbouw; -instellingen; -verdragen)’ (Pertanian dan budidaya tanaman; Pertanian dan perkebunan; Lembaga-lembaga pertanian; Perjanjian pertanian); ‘Landerijen, particuliere’ (Kawasan tanah luas swasta); ‘Landrente’ (Sewa tanah); ‘Landschapskassen’ (Kantor perbendaharaan negeri); ‘Landsproducten’ (Produk negeri); ‘Loterijen’ (Lotere); ‘Luchtvaart- (zaken en congressen)’ (Urusan dan kongres angkutan udara); ‘Monopolies’ (monopoli); ‘Muntwezen’ (Sistem mata uang); ‘Mijnwezen’ (Pertambangan); ‘Naamloze vennootschappen en verenigingen’

(Perseroan terbatas dan perhimpunan / perserikatan); ‘Nalatenschappen’ (Peninggalan / warisan); ‘Naturalisatie’ (Naturalisasi); ‘Notaristambt, wet op het —’ (Peraturan Jabatan Notaris); ‘Nieuw-Guinea’; ‘Nijverheid’ (Industri kerajinan); ‘Octrooien’ (Hak paten); ‘Onderdaanschap’ (Kewarganegaraan); ‘Onderwijs (lager / middelbaar / hoger / gesubsidieerd / Europees / - en eredienst / inlands)’ (Pendidikan rendah / menengah / tinggi / bersubsidi / Eropa / pendidikan dan ibadah / pribumi); ‘Onteigening (-sordonnantie)’ (Ordonansi pencabutan hak milik); ‘Oost-Aziatische zaken’ (Urusan Asia-Timur); ‘Oostkust van Sumatra’ (Pesisir / Pantai Timur Sumatra); ‘Opium(fabriek)’ (Pabrik opium); ‘Opvoedingswezen (tucht- en -)’ (Kesusilaan dan sistem pendidikan); ‘Opium’; ‘Oudheidkundige dienst (Oudheidkunde)’ (Dinas purbakala: ilmu purbakala / arkeologi); ‘Padangse boven- en benedenlanden’ (Dataran tinggi dan rendah Padang); ‘Pakketvaart / stoomwezen’ (Dinas pelayaran pos / sistem tenaga uap); ‘Palembang’; ‘Pandelingschap (slavernij en -)’ (Perihal perbudakan); ‘Pandhuizen’ (Rumah pegadaian); ‘Paspoorten’ (Paspor); ‘Penitentiair congres’ (Kongres tentang penghukuman); ‘Pensioenen / pensioenfondsen’ (Pensiun / Dana pensiun); ‘Persbreidel(ing)’ (Pengekangan / pembungkaman pers); ‘Poenale sanctie’ (Sanksi hukuman); ‘Politie (rechtswezen en -)’ (Sistem hukum dan Kepolisian); ‘Politieke stromingen (en maatregelen)’ (Aliran politik dan tindakan); ‘Politieke en economische toestanden / zaken / rapporten en statistieken’ (Situasi / hal / laporan politik dan ekonomi); ‘Politieke verslagen (en berichten)’ (Laporan dan berita politik); ‘PTT (Posterijen, telegrafen en telefonen)’ (PTT: Pos, Telegraf, dan Telepon); ‘Postspaarbank Nederlandsch-Indië’ (Bank tabungan pos Hindia-Belanda); ‘Prae- en protohistorie, congressen’ (Kongres pra- dan protosejarah); ‘Rechtswezen (in Oost-Indië)’ (Sistem hukum di Hindia-Timur); ‘Regering in de koloniën’ (Pemerintah di tanah jajahan); ‘Regering en hoge colleges’ (Pemerintah dan dewan tinggi); ‘Regentschappen’ (Kabupatenan); ‘Reisreglement / reisregeling’ (Peraturan perjalanan); ‘Revolutionaire woelingen’ (Gejolak revolusi); ‘Rubber’ (Karet); ‘Rijst (politiek)’ (Politik beras); ‘Salarissen’ (Gaji); ‘Schuld (Indische -; vlottende -)’ (Hutang: hutang Hindia; hutang jangka pendek); ‘Slavernij’ (Perbudakan); ‘Spoor- en tramwegen en stoomwezen’ (Perihal kereta api, tram, dan tenaga uap); ‘Spoor- en tramwegen (gouvernementstransporten)’ (Jawatan kereta api dan tram: transportasi pemerintah); ‘Statistiek’ (Statistik); ‘Steenkolen’ (Batubara); ‘Successierechten’ (Pajak warisan); ‘Suiker’ (Gula); ‘Sumatra (-’s Oostkust; Westkust)’ (Pesisir / Pantai Timur Sumatra; Pesisir / Pantai Barat Sumatra); ‘Thee’ (Teh); ‘Tin’ (Timah); ‘Toelating / verwijdering’ (Yang diizinkan masuk / yang diusir keluar); ‘Tolrechten’ (Hak pemungutan tol); ‘Transporten’ (Transpor / angkutan); ‘Uitleveringen’ (Penyerahan ekstradisi); ‘Uitvoer’ (Ekspor); ‘Veeteelt (en veeartsenkunde)’ (Peternakan dan ilmu hewan); ‘Veiligheidstoezicht’ (Pengawasan keamanan); ‘Venduhuizen’ (Rumah lelang); ‘Vennootschappen’ (Perseroan); ‘Verenigingen’ (Perhimpunan); ‘Verkeerscoördinatie’ (Koordinasi lalu lintas); ‘Verkoop van producten’ (Penjualan produk); ‘Verpachte middelen’ (Hal-hal yang disewakan); ‘Verponding’ (Pajak atas tanah dan bangunan); ‘Veterinaire dienst’ (Dinas veteriner); ‘Visserij’ (Perikanan); ‘Voedselvoorziening’ (Sarana pangan); ‘Volkscredietwezen (en coöperatie)’ (Sistem kredit rakyat dan koperasi); ‘Volksgezondheid (ziekten / hygiëne / quarantaine)’ (Kesehatan masyarakat: penyakit / higiene / karantina); ‘Volksraad’ (Dewan Rakyat); ‘Vorstenlanden’ (Keempat kerajaan di Jawa: Kesunanan Surakarta, kesultanan Yogyakarta, Kerajaan Mangkunegara, Kerajaan Paku Alam); ‘Vreemde Oosterlingen’ (Orang Timur Asing);

‘Weeskamers’ (Balai harta peninggalan); ‘Wegverkeer’ (Lalu lintas jalan); ‘Welvaartsdiensten’ (Dinas Kemakmuran); ‘Werving, koelies’ (Perekrutan, kuli); ‘Wetenschappen’ (Ilmu pengetahuan); ‘Ijkwezen’ (Jawatan Tera); ‘Zeeroof, slavernij en –’ (Perbudakan dan perompakan); ‘Zegels en leges / zegelrecht’ (Cap / materai dan biaya administrasi); ‘Ziekten’ (Penyakit); ‘Zilver’ (Perak); ‘Zout(regie)’ (Jawatan garam).

Centrale indices / Indeks-indeks pusat (s/d tahun 1921)

Openbaar verbaal archief (Arsip verbal umum) meliputi periode 1814-1921 dapat diakses dengan bantuan *centrale indices* (indeks-indeks pusat). Jadi, di dalamnya juga dapat dicari berkas-berkas tentang harta kekayaan seberang laut Belanda di Barat dan Afrika. Di tahun 1859 pada Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) dibentuk suatu bagian yang tersendiri untuk urusan Hindia-Timur, disebut *afdeling A* (bagian A) atau *1ste afdeling* (bagian ke-1). Bagian itu mengurus daftar-daftar pencatatannya sendiri: daftar-daftar itu juga terbagi dalam rubrik-rubrik. Kedua daftar tersendiri itu berisi gambaran dari indeks-indeks di arsip umum, arsip kabinet, dan arsip rahasia sekitar 1830-1859: menyangkut arsip-arsip verbal dan pelbagai berkas ekshibitum yang bagi bagian A atau ke-1 itu penting dalam menangani urusan-urusan yang sedang berjalan (lihat kode akses 2.10.02, nomor inventaris 9199-9201). Daftar-daftar ini menjadi pintu masuk yang berguna dalam melakukan penelitian tentang *archief Koloniën* (arsip Urusan Tanah Jajahan) sebelum tahun 1850.

Akses-akses pada berbagai bagian di Kementerian (setelah tahun 1921)

Pada tahun 1921 *centrale indices* (indeks pusat) dihapuskan. Untuk penelitian dalam periode itu selanjutnya perlu dibuatkan pengaksesan ke berbagai bagian itu. *1e afdeling* (bagian ke-1) yang disebutkan sebelumnya, menangani semua urusan Hindia-Timur hingga tahun 1918. Kemudian segala kegiatan pekerjaan disebarkan ke lebih banyak bagian, menurut ikhtisar berikut ini:

- **1ste afdeling (bagian ke-1)** mulai tahun 1918 menangani: ‘juridische zaken’ (urusan yuridis), ‘rechtswezen’ (sistem hukum), ‘volkenrecht’ (hukum internasional), ‘weeskamers’ (balai harta peninggalan), dan seterusnya (jadi dengan sebagian bidang kerja dari Departement van Justitie / Departemen Kehakiman);
- **2de afdeling (bagian ke-2)** setelah tahun 1918 menangani: ‘geldwezen en belastingen’ (keuangan dan pajak);
- **di bawah 3de afdeling (bagian ke-3)** mulai tahun 1918 terletak penanganan: ‘begrotingen en comptabiliteit’ (anggaran dan perbendaharaan);
- **Termasuk 4de afdeling (bagian ke-4)** mulai tahun 1918 adalah bidang-bidang kerja dari pelbagai departemen di Hindia: Departement van Binnenlands Bestuur / BB (Departemen Pemerintahan Dalam Negeri); Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan). Mulai tahun 1924 ditambah lagi dengan bidang kerja dari Departement van Onderwijs en Eredienst (Departemen Pendidikan dan Ibadah). Ketika pada tahun 1933 Departemen Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan digantikan oleh Departement van Economische Zaken (Departemen Urusan Ekonomi), di dalam *4de afdeling* didirikan Bureau Economische Zaken (Biro Urusan Ekonomi) tersendiri: Biro itu mengurus agendanya

sendiri, dengan register kata kunci. Pada tahun 1938 di bagian tersebut ditambah lagi dengan Bureau Welvaartszaken (Biro Urusan Kemakmuran);

- **5de afdeling (bagian ke-5)** pada periode 1918-1924 menangani semua urusan yang termasuk dalam bidang kerja dari Departemen Pendidikan dan Ibadah. Pada periode 1928-1950 bagian itu mengatur bidang-bidang kerja dari Departement van Burgerlijke Openbare Werken (Departemen Pekerjaan Umum Sipil), Departement van Gouvernementsbedrijven (Departemen Perusahaan Negara), dan Departement van Verkeer en Waterstaat (Departemen Lalu Lintas dan Pengairan). Terdapat indeks-indeks tersendiri dari berkas-berkas (juga dari periode sebelum tahun 1921) mengenai perusahaan negara; 'opiumfabriek' (pabrik opium); 'landsdrukkerij' (percetakan negara); 'waterkracht en electriciteit' (pembangkit listrik dan tenaga air); 'burgerlijke openbare werken' (pekerjaan umum sipil); 'mijnwezen' (pertambangan); 'tin' (timah); 'steenkool' (batubara); 'spoor- en tramwegen' (jawatan kereta api dan tram), 'luchtvaart' (angkutan udara);
- **8ste afdeling (bagian ke-8)** (didirikan pada tahun 1938) mengambil alih dari *4de afdeling* (bagian ke-4) penanganan tentang semua urusan, yang termasuk dalam Departemen Urusan Ekonomi dan perdagangan luar negeri.

Data di atas diambil dari kode akses 2.10.36.011.

Kode ini berisi:

- paparan dari akses-akses asli pada masa itu di *openbaar archief* (arsip umum) setelah tahun 1900;
- register kata kunci pada rubrik-rubrik indeks di dalam indeks-indeks pada *openbaar verbaal* (arsip verbal umum) dan *mailrapporten* (laporan surat) dari Kementerian Urusan Tanah Jajahan meliputi tahun 1901-1950;
- register kata kunci berdasarkan nama geografis.

Openbaar archief – geheim / kabinetsarchief (arsip umum – arsip kabinet / rahasia)

Tidak ada perbedaan tajam antara kedua data ini. Arsip umum juga berisi surat rahasia, laporan dan advis dari para pejabat kolonial: di dalam arsip kabinet dan rahasia juga tersimpan berkas-berkas umum. Disarankan untuk lebih dahulu memulai penelitian dalam arsip umum dan selanjutnya memeriksa apakah arsip kabinet dan rahasia mengandung berkas-berkas yang relevan.

Di bawah ini disebutkan sejumlah tema yang berkas-berkasnya dapat ditemukan dalam arsip kabinet dan rahasia: 'onlusten, stakingen' (kerusuhan, pemogokan); 'opstanden (b.v. de Djambi-opstand (1916), de opstanden op Java en Sumatra (1926-1927)' (pemberontakan: misalnya pemberontakan Jambi tahun 1916, pemberontakan di Jawa dan Sumatra pada tahun 1926-1927); 'militaire expedities' (ekspedisi militer); 'oorlogen (b.v. Atjeh)' (perang: misalnya perang Aceh); 'grensregelingen (b.v. op Borneo)' (peraturan perbatasan: misalnya di Kalimantan); 'het toekennen en beperken van het recht op vereniging en vergadering' (pengenaan dan pembatasan hukum pada perhimpunan dan rapat); persbreidel (pengekangan/ pembungkaman pers); 'rapportage over Indonesische verenigingen / partijen / vakorganisaties en hun leiders en eventueel te nemen maatregelen' (laporan tentang berbagai perhimpunan /

partai / organisasi-bidang Indonesia dan para pemimpin mereka dan kemungkinan tindakan-tindakan yang diambil); ‘toepassing van de zgn. exorbitante rechten (in- en externering, kamp Boven-Digoel)’ (penerapan dari yang disebut hak-hak luar biasa: internering / pengiriman ke pengasingan dan eksternering / pengiriman ke pengasingan bagi orang yang bukan kelahiran Hindia, pengasingan Boven-Digul); ‘bijzonder (ongesubsidieerd) onderwijs (b.v. op Mohammedaanse grondslag, Taman Siswoscholen)’ (pendidikan luar biasa tak-bersubsidi: misalnya pendidikan dengan dasar Islam, sekolah-sekolah Taman Siswo); ‘Islamitische aangelegenheden’ (perihal Islam); ‘rapportage over Vreemde Oosterlingen (Chinezen, Arabieren)’ (laporan tentang Orang Asing Timur: Cina dan Arab); ‘betrekkingen met zelfbestuurders en buitenlandse mogendheden (met name China, Japan)’ (hubungan dengan para pemimpin wilayah yang otonom dan negara-negara asing, terutama Cina dan Jepang); ‘benoemingen van hoge ambtenaren, b.v. vice-presidenten van de Raad van Indië’ (pengangkatan para pegawai tinggi pemerintah: misalnya wakil ketua Dewan Hindia); ‘aanslagen op bestuursambtenaren’ (percobaan pembunuhan pada para pegawai pemerintahan); ‘aangaan van geldleningen’ (pengadaan peminjaman uang); restrictiepolitiek in de jaren ’30 (politik pembatasan di tahun 30-an).

Pada setiap bab dalam buku panduan ini ditunjukkan apakah arsip kabinet dan rahasia itu memang berisi atau tidak berisi berkas-berkas dari topik yang dibahas.

Seri-seri khusus

***Serie mailrapporten* / Seri laporan surat, 1869-1950**

Seri laporan surat adalah daftar laporan pendek, yang masuk ke kementerian setiap bulan. Daftar laporan pendek itu dinomori berurutan. Kemungkinan bahan itu dilengkapi lampiran tambahan (advis, salinan surat, laporan, dan ikhtisar). Penomoran berjalan sesuai dengan tahun kalender (dari 1 Januari sampai 31 desember). Jika laporan surat dimuat dalam arsip verbal, maka dibuat catatannya dalam daftar. Mulai tahun 1914 juga terdapat laporan surat rahasia, dikenali berdasarkan tanda-x di belakang nomornya.

- Kode akses laporan surat umum: 2.10.02; 2.10.10; 2.10.36.02; 2.10.36.03.
- Kode akses laporan surat rahasia: 2.10.30.06; 2.10.36.07.

Pelbagai *openbare en geheime mailrapporten* (laporan surat umum dan rahasia) berkenaan dengan kegiatan Jepang di Hindia-Belanda mulai tahun 1900 dimuat dalam *List of mailreports on the Japanese activities in Dutch East Indies from 1901 to 1940* (dengan ringkasan dalam bahasa Jepang), yang disusun oleh Kenji Tsuchiya dan Takashi Shiraishi (1979; Kyoto-Tokyo).

Serie Memories van Overgave (Seri Memori Serah-Terima), 1852-1962, kode akses 2.10.39. Ini adalah paparan (panjang lebar) dari wilayah pemerintahan, disusun oleh pegawai pemerintahan yang meninggalkan jabatannya untuk kebutuhan penggantinya. Bersama dengan *Serie Politieke verslagen en berichten uit de Buitengewesten* (Seri Laporan dan berita politik dari Wilayah Luar Jawa dan Madura), 1898-1940, kode akses 2.10.52.01, keduanya

membentuk suatu landasan yang baik untuk penelitian tentang suatu daerah. Dari seri-seri ini dapat dilakukan penelitian selanjutnya dalam *indices* (indeks-indeks).

Serie Oost-Indische besluiten / Seri keputusan-keputusan Hindia-Timur (dari gubernur-jenderal), 1850 – Januari 1932, kode akses 2.10.02.

Menyangkut keputusan-keputusan umum, dapat diakses melalui indeks-indeks. Lampiran-lampiran dari berbagai keputusan ini berada dalam arsip Algemene Secretarie (Sekretariat Umum), yang disimpan dalam Arsip Nasional di Jakarta.

Arsip Urusan Tanah Jajahan tahun 1850-1900 juga berisi *serie geheime Oost-Indische besluiten* (Seri keputusan Hindia-Timur yang rahasia) tahun 1850-1900. Mulai tahun 1900 *geheime gouvernementsbesluiten* (keputusan pemerintah yang rahasia) dimuat dalam arsip verbal dan seri laporan surat (kode akses seperti disebut di atas).

Serie Stamboeken en stamkaarten / Seri Buku induk dan kartu induk dari para pegawai sipil di Hindia-Belanda tahun 1814-1963, kode akses 2.10.36.015, sebagiannya dengan register kata kunci (kode akses 2.10.06 s/d 2.10.08). Sebagai tambahan adalah *serie personeelsdossiers* (seri dosir / berkas kepegawaian), kode akses 2.10.36.10.

Kaarten en tekeningen / Peta dan gambar, termasuk dalam arsip kementerian, kode akses 4.Miko.

Archief van het Commissariaat voor Indische Zaken / Arsip Komisariat Urusan Hindia, (1880) 1927-1949 (1950), kode akses 2.10.49.

Dengan memberlakukan Wet op de Staatsinrichting (Undang-Undang Tata Negara) pada tahun 1925, Hindia-Belanda menduduki posisi yang lebih otonom. Hal itu ditegaskan dengan didirikan suatu kantor perwakilan sendiri di Belanda, yaitu Commissariaat voor Indische Zaken / CIZ. Komisariat ini mengambil alih dari Kementerian Urusan Tanah Jajahan sejumlah tugas, bagian, biro, dan dinasny. Arsipnya berisi berkas-berkas menyangkut pendidikan dan pengiriman pegawai untuk dinas sipil di Hindia-Belanda dan juga mengenai urusan ekonomi-keuangan di tahun 30-an.

Publikasi sumber dari arsip Urusan Tanah Jajahan

Sebagian dari berbagai surat dan advis dari para direktur pelbagai departemen, para kepala dinas-dinas pemerintah, para penasihat pemerintah, para pegawai pemerintahan, diterbitkan dalam publikasi sumber berikut:

- P. Creutzberg (1972-1975), *Het economisch beleid in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Wolters-Noordhoff)
- E. Gobée dan C. Adriaanse (1957-1965), *Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936* (3 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff)
- R.C. Kwantes (1975-1982), *De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Tjeenk Willink)
- H.A. Poeze (1982-1994), *Politiek-politioneele overzichten van Nederlandsch-Indië 1927-1941* (4 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Dordrecht: Foris, Leiden: KITLV Press)

- S.L. van der Wal (1963), *Het onderwijsbeleid in Nederlandsch-Indië 1900-1940* (Groningen: Wolters)
- S.L. van der Wal (1964-1965), *De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië* (2 jilid; Groningen: Wolters)
- S.L. van der Wal (1967), *De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indië* (Groningen: Wolters)

Perpustakaan dari Kementerian Urusan Tanah Jajahan

Kementerian juga menerima banyak bahan cetakan dari Hindia-Belanda, misalnya berbagai laporan tahunan dan publikasi-publikasi lainnya dari pelbagai dinas pemerintahan. Sebagian besar dari bahan itu disimpan di perpustakaan, yang kemudian menjadi bagian dari Universiteitsbibliotheek / UB (Perpustakaan Universitas) di Leiden.

Alamat: Witte Singel 27 (Gedung WSD 1169), 2311 BG Leiden.

Alamat pos: Postbus 9501, 2300 RA Leiden. Situs: <http://ub.leidenuniv.nl>.

2. Arsip-arsip pribadi

- C. Adriaanse, kode akses 2.21.205.01
- F.M. Baron van Asbeck, kode akses 2.21.183.03
- J. van Baal, kode akses 2.21.205.02 (bagian-bagian dari arsipnya di Universiteitsbibliotheek / UB 'Perpustakaan Universitas Leiden')
- R.K.A. Bertsch, kode akses 2.22.09, lampiran 3 (bagian dari kumpulan perolehan lepas dari para pegawai pemerintahan Hindia)
- J.F.R.S. van den Bossche, kode akses 2.21.030
- G.W. Caudri, kode akses 2.21.205.14
- J.Th. Cremer, kode akses 2.21.043 (bagian dari arsip-arsip keturunan Cremer)
- Deli-Maatschappij dan perusahaan-perusahaan yang berfusi dengannya, kode akses 2.20.46
- J.D.L. le Febvre, kode akses 2.21.205.01
- Th.A. Fruin, kode akses 2.21.222 (bagian arsip keluarga Fruin)
- W.H. van Helsdingen, kode akses 2.21.183.30
- M.B. van der Jagt, kode akses 2.21.205.26
- G. Jansen, kode akses 2.21.228
- A.M. Joekes, kode akses 2.21.094
- Koninklijk Instituut voor Hooger Technisch Onderwijs in Nederlandsch-Indië (Institut Kerajaan untuk Pendidikan Tinggi Teknik di Hindia-Belanda) dan Stichting Bandoengsche Technische Hoogeschool Fonds (Yayasan Dana Sekolah Tinggi Teknik Bandung), kode akses 2.20.37.01
- J.C.A. Lichtenbelt, kode akses 2.21.205.34
- F.N. Nieuwenhuijzen, kode akses 2.21.205.44
- A. Pruys van der Hoeven, kode akses 2.21.301 (bagian arsip keluarga Van Rees)
- D.F.W. van Rees, kode akses 2.21.301
- P. Scholten, kode akses 2.21.319
- W.F. Theunissen, kode akses 2.21.160
- H.A.F. de Vogel, kode akses 2.21.205.66

- L.C. Westenenk, kode akses 2.21.205.71 (bagian-bagian arsipnya di Universiteitsbibliotheek / UB ‘Perpustakaan Universitas Leiden’ dan pada keluarga)

3. Daftar (bagian-bagian) arsip menyangkut Hindia-Belanda dalam bentuk microfiche dan film

Catatan: di dalam daftar ini juga dimuat data yang tidak disebutkan dalam bab-bab dari buku panduan ini.

Arsip-arsip dari Kementerian Urusan Tanah Jajahan

- Indeks-indeks pada *openbaar verbaalarchief* (arsip verbal umum) 1814-1849, kode akses 2.10.01
- Indeks-indeks pada *geheim- en kabinetsarchief* (arsip kabinet dan rahasia) 1825-1839, kode akses 2.10.01
- Indeks-indeks pada arsip verbal umum 1850-1921 (indeks pusat), kode akses 2.10.02; 2.10.36.011
- Indeks-indeks pada arsip kabinet dan rahasia 1901-1958, kode akses 2.10.36.013
- *Serie openbare en geheime mailrapporten* (Seri laporan surat umum dan rahasia) 1869-1962, kode akses 2.10.02; 2.10.10; 2.10.36.02; 2.10.36.03; 2.10.36.06; 2.10.36.07
- *Serie Memories van Overgave* (Seri Memori Serah-Terima) 1852-1962, kode akses 2.10.39
- *Serie Politieke verslagen en berichten uit de Buitengewesten* (Seri Laporan dan berita politik dari Wilayah Luar Jawa dan Madura) 1898-1940, kode akses 2.10.52.01
- Daftar-daftar catatan usaha dari Hindia-Timur dan Hindia-Barat, 1818-1933, kode akses 2.10.36.012
- Indeks dari koran-koran berbahasa Belanda di Hindia-Belanda, 1810-1923, kode akses 2.10.36.111
- Indeks dari topik-topik kolonial dalam koran-koran Belanda, 1843-1947, kode akses 2.10.36.112
- Arsip dari Direktorat Budidaya Tanaman dan berkas-berkas lainnya tentang budidaya tanaman, 1726-1902, kode akses 2.10.13 (berkas-berkas aslinya disimpan di Arsip Nasional di Jakarta)
- Arsip dari prof.dr. W.H. de Vriese perihal penelitiannya terhadap budidaya tanaman di Hindia-Belanda, 1857-1862, kode akses 2.10.21
- Arsip dari Komisi penelitian berbagai pabrik gula di Jawa (Komisi Umbgrove), (1853-1858) 1854-1857, kode akses 2.10.11
- Arsip dari ir. J. van der Waerden, anggota yang didelegasikan dan ketua dari Commissie tot Ontwikkeling van de Fabrieksnijverheid in Nederlandsch-Indië (Komisi Pembangunan Industri di Hindia-Belanda), (1904) 1919-1926 (1940), kode akses 2.10.42
- Arsip dari Staatscommissie voor slavenemancipatie (Komisi Negara untuk emansipasi budak), 1853-1856, kode akses 2.10.32
- Peta dan gambar, 1814-1963, kode akses 4.Miko

- Arsip dari Kantoort voor Bevolkingszaken Nederlands Nieuw Guinea (Kantor Urusan Penduduk Nieuw Guinea Belanda), (1912) 1950-1962, kode akses 2.10.25

Arsip-arsip dari Kementerian Luar Negeri

- Arsip dari Konsulat Belanda di Jedah (Turki/Saudi-Arabia), 1872-1930, kemudian Kedutaan Belanda di Saudi-Arabia (Jedah) 1930-1950, kode akses 2.05.53
- Arsip-arsip dari wakil konsulat di Mekah (Saudi-Arabia), 1939-1950 dan dokter kedutaan di Mekah, 1937-1950, kode akses 2.05.106

Arsip-arsip pribadi

- Cuplikan-cuplikan dari pelbagai arsip dari N. Engelhard, 1682-1832, kode akses 2.21.004 dan 2.21.004.21; G.J. Schneiter, 1788-1829, kode akses 2.21.007.57; J. van den Bosch, 1807-1844, kode akses 2.21.28, 2.21.29; J.C. Baud, 1804-1859, kode akses 2.21.007.58
- Prof. C.G.C. Reinwardt sebagai Direktur Urusan Pertanian, Kesenian, dan Ilmu Pengetahuan, (1755) 1808-1828, kode akses 2.21.204
- L.L.A. Maurenbrecher, 1934-1970, kode akses 2.21.221
- J. van Baal, 1934-1988, kode akses 2.21.205.02
- A.J. Piekaar, 1933-1990, kode akses 2.21.283
- Arsip dari Sekolah Kolonial untuk para wanita dan anak perempuan, 1920-1949, kode akses 2.20.24
- Arsip dari Vereniging Kartinfonds (Perhimpunan Dana Kartini), 1912-1960 (1979), kode akses 2.20.38.03
- Komite Hindia untuk penelitian-penelitian ilmiah dan para pengikutnya, 1888-1948, kode akses 2.20.34
- Arsip dari mr.dr. H.A. Lorentz mengenai ekspedisinya ke Nieuw-Guinea, 1903-1914, kode akses 2.21.183.51

Sumber yang tercetak

- *Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandse koloniën in Oost- en West-Indië voor zoover zij verspreid is in tijdschriften en mengelwerken* (1895-1935; 11 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff)

4. Sumber asli yang tercetak pada masa itu

Catatan: untuk ketersediaan dan keberadaan sumber, gunakan Picarta, melalui halaman ikhtisar dari Koninklijk Bibliotheek / KB (www.kb.nl). Untuk sumber-sumber asli pada masa itu yang berkaitan dengan topik spesifik, lihat bab-bab dalam buku panduan ini:

- *Handboek van cultuur- en handelsondernemingen in Nederlandsch-Indië* (Buku Pedoman usaha budidaya tanaman dan perdagangan) (1888-1940; 52 jilid; Amsterdam: De Bussy)
- *Handelingen en bijlagen van de Staten-Generaal* (Notula dan lampiran dari Dewan Perwakilan)

Catatan: Termasuk dalam lampiran adalah Koloniaal Verslag (Laporan Kolonial).

Setelah tahun 1931 ini muncul sebagai publikasi tersendiri dengan judul *Indisch Verslag*.

- *Handelingen en bijlagen van de Volksraad* (Notula dan lampiran dari Dewan Rakyat)
- *Jaarverslagen van de provincies West-, Midden- en Oost- Java en van de stadsgemeenten* (Laporan tahunan dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan dari kotapraja)
- *Javasche Courant*
- *Provinciale bladen van West-, Midden- en Oost- Java* (Majalah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur)
- *Regeringsalmanak van Nederlands-Indië* (Almanak Pemerintah Hindia-Belanda)
- *Staatsblad van Nederlandsch-Indië, met Bijbladen* (Lembaran Negara Hindia-Belanda, dengan Lembaran Tambahan)
- W.H. van Helsdingen (1928), *Tien jaar Volksraad Arbeid 1918-1928* (Sepuluh tahun Pekerjaan Dewan Rakyat 1918-1928) (Batavia: Landsdrukkerij)
- W.H. van Helsdingen (1938), *Tien jaar Volksraad Arbeid 1928-1938* (Sepuluh tahun Pekerjaan Dewan Rakyat 1928-1938) (Batavia: Landsdrukkerij)

5. Panduan

- Jaquet, F.G.P. (1983), *Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands 1796-1949* (München-New York-London-Paris: Saur).
- Kompagnie, J.H. (1991), *Verenigingen- en Stichtingenregistratie* (Jilid 2 dari Serie Gidjes van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief; cetakan ke-3; 's-Gravenhage: Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling).
- Kompagnie, J.H. ed. (1994), *Publikatiebladen van de overheid in Nederland en zijn koloniën* (Jilid 6 dari Serie Gidjes van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief; 's-Gravenhage: Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling).

45 Bibliografi

A

- Aalst, C.J.K. van (1924), 'J.Th. Cremer', *Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1923-1924* (Leiden), hlm. 48-64.
- Akihary, Huib (1990), *Architectuur en stedenbouw in Indonesië 1870/1970* (Cetakan ke-2; Zutphen: Walburg Pers).
- Anrooij, Francien van (1979), 'Crisis en financieel beleid in Nederlandsch-Indië (1920-1925)', dalam: Francien van Anrooij dkk. (ed.), *Between people and statistics; Essays on modern Indonesian history presented to P. Creutzberg* (Den Haag: Nijhoff), hlm. 119-132.
- Asbeck, F.M. van dkk. (1949), *Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan van het rechtswetenschappelijk hoger onderwijs in Indonesië op 28 oktober 1949* (Groningen-Jakarta: Wolters).
- Aveling, H. ed. (1979), *The development of Indonesian society* (St. Lucia: University of Queensland Press).

B

- Baal, J. van (1939), 'De bevolking van Zuid-Nieuw-Guinea onder Nederlands bestuur, 36 jaren', *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* no. 79, hlm. 309-414.
- Baal, J. van (1976), 'Tussen kolonie en nationale staat: de koloniale staat', dalam: H.J.M. Claessen, J. Kaayk, dan R.J.A. Lambregts, *Dekolonisatie en vrijheid* (Assen: Van Gorcum), hlm. 92-108.
- Baal, J. van (1977), 'Voltooid verleden', dalam: S.L. van der Wal (ed.), *Besturen overzee; Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië*, (Franeker: Wever), hlm. 110-129.
- Baal, J. van (1986-1989), *Ontglipt verleden; Verhaal van mijn jaren in een wereld die voorbijging* (2 jilid: I: *Tot 1947; Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog*, II: *Leven in verandering, 1947-1958*; Franeker: Wever).

- Baal, J. van, K.W. Galis, dan Koentjaraningrat (1984), *West Irian, a bibliography* (Dordrecht: Foris).
- Bak, A.G. (1942), *Geschiedenis van het ontstaan van den Beniso geschetst ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan* ('s-Gravenhage: Beniso).
- Balbian Verster, J.F.L. de (1919), *Deli-Maatschappij 1869-1919; Gedenkschrift bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan* (Amsterdam: Roeloffzen-Hübner).
- Balbian Verster, J.F.L. de ed. (1924), *Jeugd en jongengelingsjaren van Jacob Theodoor Cremer (30 juni 1847 – 14 augustus 1923)* (Otobiografi; Den Haag: Leopold).
- Baudet, H. dan I.J. Brugmans (1961), *Balans van beleid; Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië* (Assen: van Gorcum).
- Bekaar, J. (1913-1914), *Hoe wij insulinde besturen* (2 jilid; Haarlem: Tjeenk Willink).
- Benda, Harry J. (1983), *The crescent and the rising sun. Indonesian Islam under the Japanese occupation 1942-1945* (Dordrecht: Foris).
- Benda, Harry J. dan Lance Castles (1969), 'The Samin movement', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 125, hlm 207-241.
- Berg, L.W.C. van den (1898-1899), 'Levensbericht van mr. T.H. der Kinderen', *Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden*, hlm. 158-210.
- Berge, Tom van den (2014), *H.J. van Mook 1894-1965; Een vrij en gelukkig Indonesië* (Bussum: Thot),
- Bernard, Ch.J. (1930), *Gedenkschrift ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel 1905-1930* (Weltevreden: Kolff).
- Bernet Kempers, A.J. (1978), *Herstel in eigen waarde; Monumentenzorg in Indonesië* (Zutphen: Walburg Press).
- Bertrand, Romain (2005), *État colonial, noblesse et nationalisme à Java. La tradition parfaite* (Parijs: Karthala).
- Bertsch, R.K.A. (1941), 'Het binnenlandsch bestuur', dalam: W.H. van Helsdingen dan H. Hogenberk (ed.), *Daar wèrd wat groots verricht ... Nederlandsch-Indië in de XXste eeuw* (Amsterdam: Elsevier), hlm. 458-470.

- *Biografisch Woordenboek van Nederland*, versi digital, (<http://resources.huygens.knaw.nl/bwn/1880-2000/lemmata>).
- Bloembergen, M. (2002), *De koloniale vertoning; Nederland en Indië op de wereldtentoonstellingen (1880-1931)* (Amsterdam: Wereldbibliotheek).
- Bloembergen, M. (2009), *De geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië; Uit zorg en angst* (Leiden / Amsterdam: KITLV Uitgeverij dan Boom; Terjemahan buku berjudul *Polisi zaman Hindia Belanda; Dari kepedulian dan ketakutan*, 2011, Jakarta: KITLV Jakarta dan Penerbit Kompas).
- Boels, Henk, Janny de Jong, dan C.A. Tamse (2003), *Eer en fortuin; Leven in Nederland en Indië 1824-1900; Autobiografie van gouverneur-generaal James Loudon* (Amsterdam: Bataafsche Leeuw).
- Bongenaar, Karel E.M. [2005], *De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië: 1855-1942* (Zutphen: Walburg).
- Boomgaard, P. (1986), 'The Welfare Services in Indonesia 1900-1942', *Itinerario* X, no. 1, hlm. 57-81.
- Boomgaard, Peter (1994), 'Colonial forest policy in Java in transition', dalam: R. Cribb (ed.), *The late colonial state; Political and economic foundations of the Netherlands Indies 1880-1942* (Leiden: KITLV Press), hlm 117-137.
- Bool, H.L. (1907), *De landbouwconcessies in de Residentie Oostkust van Sumatra* (Utrecht).
- Bosma, U., A. Sens, dan G. Termorshuizen (2005), *Journalistiek in de tropen; De Indisch- en Indonesisch-Nederlandse pers 1850-1958* (Amsterdam: Aksant, Persmuseum).
- Bousquet, G.H. (1938), *La politique musulmane et coloniale des Pays-Bas* (Paris: Hartmann).
- Bree, L. de, (1928-1930), *Gedenkboek van de Javasche Bank 1828 – 24 januari – 1928*. (2 jilid, Weltevreden: Kolff)
- Breman, J. (1992), *Koelies, planters en koloniale politiek; Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust in het begin van de twintigste eeuw* (Cetakan ke-3; Leiden: KITLV Uitgeverij).
- Broersma, R. (1919-1922), *Oostkust van Sumatra. I: De ontluiking van Deli, II: De ontwikkeling van het gewest* (2 jilid; 1919, Batavia: Javasche Boekhandel en Drukkerij; 1922, Deventer: Dixon).

- Broeshart, A.C. , J.R. van Diessen, R.G. Gill, J.P. Zeydner ed. (1994), *Soerabaja; Beeld van een stad* (Purmerend: Asia Maior).
- Brugmans, I.J. (1938), *Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië* (Groningen-Batavia: Wolters).
- Bruinink-Darlang, A.M.C. (1986), *Het penitentiair stelsel in Nederlands-Indië van 1905 tot 1940* (Alblasserdam)
- Burger, D.H. (1975), *Sociologisch-economische geschiedenis van Indonesia* (2 jild, Wageningen: Landbouwhogeschool, afd. Agrarische Geschiedenis).

C

- *Catalogus der bibliotheek* (1909, 1912), *Catalogus der bibliotheek van het departement van Justitie* (Batavia: Landsdrukkerij).
- *Catalogus der bibliotheek* (1911, 1930), *Catalogus der bibliotheek van het Departement der Burgerlijke Openbare Werken* (Weltevreden).
- *Catalogus van bibliotheek* (1909, 1917), *Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Onderwijs en Eeredienst* (Batavia: Landsdrukkerij).
- *Catalogus van boekwerken* (1925), *Catalogus van boekwerken, enz. uitmakende de bibliotheek van den Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië* ('s-Gravenhage: Bibliotheek van den Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië).
- Clemens, A.H.P. dan J.Th. Lindblad (1989), *Het belang van de Buitengewesten; Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942* (Amsterdam: NEHA)
- Coolhaas, W.Ph. (1985), *Controleur BB; Herinneringen van een jong bestuursambtenaar in Nederlands-Indië* (Utrecht: HES).
- Coté, Joost (2001), 'Being white in tropical Asia; Racial discourses in the Dutch and Australian colonies at the turn of the twentieth century', *Itinerario* XXV no. 3-4, hlm. 112-141.
- Cramer, J.C.W. (1929), *Het volkscredietwezen in Nederlandsch-Indië* (Amsterdam: Paris).
- Cremer, H., P.H. Ledeboer dkk. (1941), *Gedenkschrift aangeboden aan den heer Herbert Cremer directeur NV Deli-Maatschappij; Gedenkschrift Deli-Maatschappij 1916-1941* (Amsterdam: De Bussy).

- Cremer, J.Th. (1876), *Een woord uit Deli tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal; Art. 2 no. 27 van het politiereglement voor inlanders, met het oog op werkovereenkomsten met vreemde Oosterlingen* (Amsterdam: Van Tyen).
- Cremer, J.Th., 'Deli(sche) schetsen', *Eigen Haard* (1888, edisi. 3 dan 17 November; 1889, edisi 2 Februari dan 1 Juni; 1890, edisi no. 37 dan 43; 1908, edisi 14 November; 1909, edisi 30 Januari).
- Cremer, J.Th. (1885), 'Emigratie van Hindu's naar Sumatra's Oostkust', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* edisi terbitan ke-14, hlm. 301-311.
- Cremer, J.Th. (1914), *Ons land van onbeperkte mogelijkheden: reisschetsen* (Lampiran dari 'Nieuws van den dag', 1 Juli; Amsterdam).
- Creutzberg, P. ed. (1972-1975), *Het economisch beleid in Nederlandsch-Indië* (4 jilid; Groningen: Wolters-Noordhoff).
- Creutzberg, P. dkk. (1976), *Public finance 1816-1939* (Den Haag: Nijhoff).
- Cribb, R. ed. (1994), *The late colonial state; Political and economic foundations of the Netherlands Indies 1880-1942* (Leiden: KITLV Press).
- Cribb, R. (2000), *Historical atlas of Indonesia* (Richmond, Surrey: Curzon Press).

D

- Damsté, H.T. (1932-1933), 'Levensbericht van Louis Constant Westenenk', *Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden*, hlm. 183-194.
- Dekker, Albert dan Hanneke van Katwijk (1993), *Recht en rechtspraak in Nederlands-Indië* (KITLV, serie werkdocumenten no. 12, Leiden: KITLV Uitgeverij).
- *De Technische Hoogeschool te Bandoeng, stichting van het Koninklijk Instituut voor Hooger Technisch Onderwijs in Nederlandsch-Indië, geopend 3 juli 1920 door zijne excellentie den gouverneur-generaal* (1920, brosur, Weltevreden: Landsdrukkerij).
- Dewantoro, Ki Hadjar [Soewardi Soerjaningrat] (1935), *Een en ander over 'Nationaal Onderwijs' en het Instituut 'Taman Siswo' te Jogjakarta* (Seri Brosur Wasita no. 2; Yogyakarta).
- Dierikx, Marc (1986), *Bevlogen jaren; Nederlandse burgerluchtvaart tussen de wereldoorlogen* (Houten: Romen).

- Dijk, Kees van (2007), *The Netherlands Indies and the Great War 1914-1918* (Leiden: KITLV Press).
- Djajadiningrat, Achmad (1936), *Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat*. Diolah oleh Diet Kramer (Amsterdam: Kolff).
- Djojohadikoesoemo, R.M. Soemitro (1943), *Het volkscredietwezen in de depressie* (Haarlem: De Erven F. Bohn).
- Doel, H.W. van den (1994), *De stille macht; Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera 1808-1942* (Amsterdam: Bakker).
- Doorn, J.A.A. van (1994), *De laatste eeuw van Indië; Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project* (Amsterdam: Bakker).
- Drewes, G.W.J. (1957), *Snouck Hurgronje en de Islamwetenschap; Herdenking van de 100e geboortedag van prof.dr. C. Snouck Hurgronje, 10 februari 1957* (Leiden: Universitaire Pers).
- Drewes, G.W.J. (1961), 'D.A. Rinkes. A note on his life and work', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 117, hlm. 417-435.
- Drewes, G.W.J. (1985), 'The life-story of an old-time Priangan regent as told by himself', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 141, hlm. 399-422.
- Drooglever, P.J. (1980), *De Vaderlandse Club, 1929-1942; Totoks en de Indische politiek* (Franeker: Wever).

E

- Embden, D. van ed. dkk (1926), *Gedenkboek van de Vrijzinnig Democratische Bond 17 maart 1901-1926* (Den Haag).
- *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië*, dengan suplemen (1917-1939; 9 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff, Leiden: Brill)
- Enthoven, E. (1929), *NV Deli-Maatschappij; Gedenkschrift bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan aansluitende bij het gedenkboek van 1 november 1919* (Amsterdam: Deli-Maatschappij).
- Esveld, N.E.H. van (1958), *Treub; Over de drempel der nieuwe samenleving* (Assen: Van Gorcum).

F

- Fasseur, C. (1975), *Kultuurstelsel en koloniale baten; De Nederlandse exploitatie van Java, 1840-1860* (Leidse Historische Reeks 20; Leiden: Universitaire Pers).
- Fasseur, C. ed. (1980), 'Dagboek van een Nederlands bestuursambtenaar uit het midden van de 19e eeuw; H.A.F. de Vogel', dalam: C. Fasseur, *Geld en geweten; Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische archipel* (2 jild; Den Haag: Nijhoff), I, hlm. 163-172.
- Fasseur, C. (2001), *Rechtsschool en raciale vooroordelen* (Amsterdam: Balans).
- Fasseur, C. dan D.H.A. Kolff (1986), 'Some remarks on the development of colonial bureaucracies in India and Indonesia', *Itinerario* X no. 1, hlm. 31-55.
- Febvre, J.D.L. Le (1928), 'Het rapport over den Sumatra-opstand', *De Socialistische Gids*, hlm. 680-692.
- Feuilletau de Bruyn, W.K.H. (1941), *Tien moeilijke jaren voor landbouw en industrie in Nederlands-Indië 1930-1940* (Deventer: Van Hoeve).
- Francis, E. (1864), *Herinneringen uit mijnen dienstdtijd in Nederlandsch-Indië* (Leiden: Francis).
- Friedericy, H.J. (1984), 'De eerste etappe' dan 'De Raadsman', dalam: H.J. Friedericy, *Verzameld werk* (Amsterdam: Querido), hlm. 243-287 dan hlm. 175-241.
- Fromberg, P.H. (1926), 'Nota betreffende de leiding der politie in Nederlandsch-Indië, MR. P.H. Fromberg's verspreide geschriften, verzameld door Chung Hwa Hui Chineseche Vereeniging in Nederland (Leiden: Leidsche Uitgeversmaatschappij), hlm. 795-810.
- Fruin, Th.A. (1923), 'Een en ander over de tabakscultuur voor de inlandse markt in de regenschappen Bandjarnegara, Wonosobo, Temanggoeng en Magelang', *Het Blaadje voor het Volkscredietwezen* (september), hlm. 267-326.
- Fruin, Th.A. (1923), 'Kerftabak op Java', *Koloniale Studiën* II, hlm. 347-384.
- Fruin, Th.A. (1926), *Handleiding voor de controle door de plaatselijke ambtenaar voor het volkscredietwezen* (sebagian dalam bahasa Melayu; Batavia).
- Fruin, Th.A. (1927), *Leidraad voor de inrichting en controle van volksbanken* (Batavia).
- Fruin, Th.A. (1935), *Voorloopige handleiding voor het credietbedrijf der Algemeene volkscredietbank* (Batavia: Algemeene Volkscredietbank).

- Fruin, Th.A. (1938), 'Het credietwezen', dalam: W.H. van Helsdingen, *Daar wèrd wat groots verricht ...: Nederlands-Indië in de XXste eeuw* (Amsterdam: Elsevier), hlm. 369-379.
- Furnivall, J.S. (1967), *Netherlands India; A study of plural economy* (Cetakan ke-2; Cambridge: University Press).

G

- Gellner, E. (1998), *Language and solitude. Wittgenstein, Malinowski and the Habsburg dilemma* (Cambridge University Press).
- *Gemeente Medan* (1934), *Gemeente Medan 1909-1934* (Medan: Deli Courant).
- Gent, L.F. van, W.A. Penard, dan D.A. Rinkes ed. (1923), *Gedenkboek van Nederlandsch-Indië ter gelegenheid van het regeeringsjubileum van H.M. de Koningin 1898-1923* (Batavia-Leiden: Kolff).
- Gobée, E. dan C. Adriaanse ed. (1957-1965), *Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936* (3 jilid; Rijks Geschiedkundige Publicatiën kl. serie 33-35; 's-Gravenhage: Nijhoff).
- Gonggrijp, G.L. (1944), *Brieven van Opheffer* (Cetakan ke-3; Maastricht: Leiter-Nypels).
- Goor, J. van (1997), *De Nederlandse koloniën; Geschiedenis van de Nederlandse expansie, 1600-1975* (Cetakan ke-2; Den Haag: SDU).
- Gorkom, K.W. van (1896), *Gids voor de controleurs bij het Binnenlandsch Bestuur op Java en Madoera* (Cetakan ke-2; Batavia: Kolff).
- Gouda, Frances (1995), 'Teaching Indonesian girls in Java en Bali, 1900-1942; Dutch progressives, the infatuation with "oriental" refinement and "western" ideas about proper womanhood', *Women's History Review* 4, no. 1, hlm. 25-62.
- Gouka, N.G.B. (2001), *De petitie-Soetardjo: een Hollandse misser in Indië? (1936-1938)* (Amsterdam: Rozenberg).
- Graaff, B.G.J. de (1997), *Kalm temidden van woedende golven; Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving, 1912-1940* (Zutphen: SDU).
- Graaff, B.G.J. de, W.J.M. Klaassen, dan J. Woltring (1985-1996), *Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945, periode B 1931-1940* (4 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff).

- Graaff, Bob de dan Elsbeth Locher-Scholten (2007), *J.P. Graaf van Limburg Stirum, 1873-1948; Tegendraads landvoogd en diplomaat* (Zwolle: Waanders).
- Graaff, M.G.H.A. (1995), 'Inleiding', dalam: M.G.H.A. Graaff, *Inventaris van het archief van de procureur-generaal bij het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië 1945-1949* (Den Haag: Algemeen Rijksarchief Den Haag).
- Groeneboer, K. (1997), *Koloniale taalpolitiek in Oost en West; Nederlandsch-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba* (Amsterdam: Amsterdam University Press).

H

- Hamerster, A.J. et al. (1928), *Rapport van de Commissie van onderzoek, ingesteld bij gouvernementsbesluit van 13 februari 1927 no. 1a* [sejenis Laporan Pantai Barat] (Weltevreden: Landsdrukkerij).
- *Handboek van cultuur- en handelsondernemingen (1888-1940), Handboek van cultuur- en handelsondernemingen in Nederlandsch-Indië* (52 jilid, Amsterdam: De Bussy).
- Harst, S. van der (1945), *Overzicht van de bestuurshervorming in de Buitengewesten van Nederlandsch-Indië, in het bijzonder op Sumatra* (Utrecht: Oosthoek).
- Hartgerink, H.J.H. (1942), *De Staten-Generaal en het volksonderwijs in Nederlandsch-Indië 1848-1918* (Groningen-Batavia: Wolters).
- Haslach, R.D. (1985), *Nishi no kaze, hare; Nederlands-Indische inlichtingendienst contra agressor Japan* (Weesp: Van Kampen).
- Hazairin (1936), *De Redjang; De volksordening, het verwantschaps-, huwelijks- en erfrecht* (Bandung: Nix).
- Helsdingen, W.H. van (1941), 'Het centraal en regionaal bewind', dalam: W.H. van Helsdingen dan H. Hogenberk ed., *Daar wèrd wat groots verricht ...: Nederlands-Indië in de XXste eeuw* (Amsterdam: Elsevier), hlm. 447-457.
- Helsdingen, W.H. van (1961), 'De staatkundige ontwikkeling', dalam: H. Baudet dan I.J. Brugmans (ed.), *Balans van beleid; Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlands-Indië* (Assen: Van Gorcum), hlm. 187-207.
- Helsdingen, W.H. van dan H. Hogenberk ed. (1941), *Daar wèrd wat groots verricht ... : Nederlandsch-Indië in de XXste eeuw* (Amsterdam: Elsevier).

- Heteren, G. van dkk (1989), *Nederlandse geneeskunde in de indische archipel 1816-1942: verslag van een symposium gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Prof.Dr. D. de Moulin als hoogleraar in de geschiedenis der geneeskunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, 30 september 1989* (Amsterdam: Rodopi).
- Hoedt, Th.G.E. (1930), *Indische bergcultuurondernemingen voornamelijk in Zuid-Sumatra* (Wageningen: Veenman).
- Hoefte, Rosemarijn, Peter Meel, dan Hans Renders ed. (2008), *Tropenlevens; De (post)koloniale biografie* (Leiden: KITLV Uitgeverij).

J

- Jagt, M.B. van der (1915), 'Ethische koers en bestuursambtenaar', *Koloniaal Tijdschrift*, hlm. 1191-1215, 1328-1345.
- Jagt, M.B. van der (1955), *Mémoires van M.B. van der Jagt; Oud-gouverneur van Soerakarta* (Den Haag: Leopold).
- Jansen, G. (1925), *Grantrechten in Deli* (Mededeeling / Oostkust van Sumatra Instituut 2; Amsterdam: Oostkust van Sumatra Instituut).
- Jansen, G. (1930), 'De decentralisatie en de grond', dalam: F.W.M. Kerchman (ed.), *25 jaren decentralisatie in Nederlandsch-Indië 1905-1930, gedenkboek uitgegeven door de Vereeniging van Locale Belangen* (Weltevreden), hlm. 145-158.
- Jaquet, L.G.M. (1978), *Aflossing van de wacht; Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indië* (Rotterdam: Ad Donker).
- Jaquet, L.G.M. (1983), *Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands*. München: Saur.
- Jedamski, D. (1995), 'The subjective factor in cultural change, between political strategies en ethical idea(l)s: D.A. Rinkes, a "Marginal Man" in the colonial context', *Kabar Seberang; Sulating Maphilindo* no. 24-25, hlm. 190-210.
- Jedamski, D. (1997), 'De taalpolitiek van de Balai Poestaka', dalam: K. Groeneboer ed., *Koloniale taalpolitiek in Oost en West; Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba* (Amsterdam: Amsterdam University Press), hlm. 159-185.
- Joekes, A.M. (1926), 'De Vrijzinnig-Democraten en Indië', dalam: D. van Embden dkk (ed.), *Gedenkboek van de vrijzinnig Democratische Bond 17 maart 1901-1926*, hlm. 149-157.

- Joekes, Th. (1996), *Man en paard; Herinneringen* (Meppel: De Feniks Pers).
- Jong, J.J.P. de (1998), *De waaier van het fortuin; Van handelscompagnie tot koloniaal imperium* (Den Haag: SDU).
- Jongejan, W.G.F. (tanpa tahun), *Rede ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië op 24 augustus 1946, uitgesproken door den Voorzitter van den Raad* (tanpa tempat terbit).

K

- Kamp, Jan Bartholomeus van der (1955), *De bedrijfsverenigingen in de overjarige ondernemingsculturen van Indonesië; In het bijzonder in het gebied van het Algemeen Landbouw Syndicaat en het Zuid- en West Sumatra Syndicaat* (Jakarta: Ruijgrok).
- Kapteyn, P.G.J. ed. (1989), *F.M. van baron van Asbeck 1889-1968* (T.M.C. Asserinstituut; Den Haag: Asserinstituut).
- Kartodirdjo, Sartono (1984), 'The regents of Java as middlemen; A symbolic action approach', *Modern Indonesia; Tradition and transformation; A sociohistorical perspective* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 150-179.
- Kemp, P.H. van der (1899), 'Het departement van Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indië', *Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur* XVII, hlm. 277-303.
- Keller, G. (1898-1899), 'Levensbericht van H.J. Bool', *Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden*, hlm. 31-56.
- Kerchman, F.W.M. ed. (1930), *25 jaren decentralisatie in Nederlandsch-Indië 1905-1930; Gedenkboek uitgegeven door de Vereeniging van Locale Belangen* (Weltevreden).
- Kern, H. (1906), 'J.L.A. Brandes', *Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden*, hlm. 30-51.
- Kern, R.A. (1955), 'Levensbericht van Emile Gobeé', *Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1953-1955* (Leiden: Brill), hlm. 59-64.
- Kernkamp, W.J.A. (1941), 'Regeering en Islam', dalam: W.H. van Helsdingen dan H. Hogenberk ed., *Daar werd wat groots verricht: Nederlands-Indië in de XXste eeuw* (Amsterdam: Elsevier), hlm. 191-208.
- Kersten, Albert ed. (1976), 'Inleiding', *Het dagboek van dr. G.H.C. Hart, Londen mei 1940-mei 1941* (Den Haag: Nijhoff).

- Ketel, A.P. (1934), *1894 tot 1934; Veertig jaren medische zending; Zendingsziekenhuis te Modjowarno; Tevens beknopt verslag over het jaar 1933* (Surabaya: Van Dorp).
- Keuning, J. (1961), 'Het adatrecht en de rechtsbedeling over de inheemse bevolking', dalam: H. Baudet dan I.J. Brugmans, *Balans en beleid; Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië* (Assen: Van Gorcum), hlm. 223-237.
- Kinderen, T.H. der (1875), *De algemeene verordeningen tot regeling van het regtswezen in het gouvernement Sumatra's Westkust, toegelicht uit officieele bescheiden* (2 jild; Batavia: Ogilvie).
- Kinderen, T.H. der (1882), *Formulierboek ten gebruike bij de toepassing van het reglement tot regeling van het regtswezen in het gouvernement Sumatra's Westkust (Staatsblad 1874 no. 94b), voor zooveel betreft de regtspleging bij de Distrikts-, Magistraatsgerigten, de Landraden en Rapats, benevens de uitoefening der politie* (Batavia: Landsdrukkerij).
- Kleintjes, Ph. (1933), *Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië* (Jilid 2; Cetakan ke-6; Amsterdam 1933: De Bussy)
- Kommers, J.H.M. (1979), *Besturen in een onbekende wereld; Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië: 1800-1830; Een antropologische studie* (Meppel: Krips Repro).
- Kompagnie, J.H. (1991), *Verenigingen- en Stichtingenregistratie* (Jilid 2 Serie Gidjes van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief; cetakan ke-3; 's-Gravenhage: Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling)
- Kompagnie, J.H. ed. (1994), *Publikatiebladen van de overheid in Nederland en zijn koloniën* (Jilid 6 dari Serie Gidjes van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief; 's-Gravenhage: Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling).
- Konijnenburg, Emile van (1897), *Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1847-1897* (Den Haag: Van Langenhuysen).
- Koningsveld, P.Sj. van (1987), *Snouck Hurgronje en de Islam; Acht artikelen over leven en werk van een oriëntalist uit het koloniale tijdperk* (Leiden: Documentatiebureau Islam-Christendom, Rijksuniversiteit Leiden), hlm. 279-280.
- Kousbroek, R. (1992), *Het Oostindisch kampsyndroom; Anathema's 6* (Cetakan ke-3; Amsterdam).

- Kuitenbrouwer, M. (1985), *Nederland en de opkomst van het moderne imperialisme; Koloniën en buitenlandse politiek 1870-1902* (Amsterdam-Dieren: Bataafsche Leeuw).
- Kuitenbrouwer, M. (2001), *Tussen orientalisme en wetenschap; Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in historisch verband 1851-2001* (Leiden: KITLV Uitgeverij).
- Kwantes, R. C. ed. (1975-1982), *De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië* (4 jild; Groningen: Tjeenk Willink).
- Kwantes, R.C. (1977), 'Taga' samo tinggi, doedoeé samo randah', dalam: S.L. van der Wal (ed.), *Besturen overzee; Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië* (Franeker: Wever), hlm. 217-235.

L

- Laffan, M.F.(2003), *Islamic nationhood and colonial Indonesia; The umma below the winds* (London: Routledge; New York: Curzon).
- Lieftrinck, J.H. (1917), *Onderzoek naar de heffing van belasting en de vordering van heerendiensten in eenige deelen der buitenbezittingen* (Batavia: Landsdrukkerij).
- *Lijst van periodieken* (1927), *Lijst van periodieken (jaarboeken en jaarverslagen uitgezonderd) van de Centrale bibliotheek van het Departement van Gouvernementsbedrijven* (Bandung).
- Locher-Scholten, E.B. (1981), *Ethiek in fragmenten; Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische archipel 1877-1942* (Utrecht: Hes).
- Locher-Scholten, E. (1994), *Sumatraans sultanaat en koloniale staat; De relatie Djambi-Batavia (1830-1907) en het Nederlandse imperialisme* (Leiden: KITLV Uitgeverij).
- Locher-Scholten, E.B. (1996), 'Een bronnenpublicatie als signaal van koloniaal trauma? Ontstaan en ontvangst van de Officiële bescheiden', *Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden* Vol. 111 No. 4, hlm. 473-492.
- Loderichs, M.A. dkk. (1997), *Medan; Beeld van een stad* (Purmerend: Asia Maior).
- Loghem, J.J. van dkk. (1948), *Indië voor de oorlog*, [Enam artikel tentang ilmu kesehatan; cetak lepas dari *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde*] (Haarlem).
- Lohanda, M. (2001), *The kapitan Cina of Batavia 1837-1942; A history of Chinese establishment in colonial society* (Cetakan ke-2; Jakarta: Djambatan).

- Lohanda, Mona (2002), *Growing pains; The Chinese and the Dutch in colonial Java, 1890-1942* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka).

M

- Maassen, C.C.J. dan A.P.G. Hens (1934), *Agrarische regelingen voor het gouvernementsgebied van Java en Madoera* (2 jild, 3 bundel; Batavia: Ruygrok).
- Makkink, H. (2002), 'Het ontstaan van de Technische Hoogeschool Bandoeng', *Zicht op Delft* (terbitan perhimpunan alumni Technische Universiteit Delft, 4 September 2002), hlm. 11-13.
- Maddison, Angus dan Gé Prince (1989), *Economic growth in Indonesia 1820-1940* (Dordrecht: Foris).
- Mandere, H.Ch.G.J. van der (1928), *De Javasuikerindustrie in heden en verleden, gezien in het bijzonder in hare sociaal-economische beteekenis* (Amsterdam: Bureau Industria).
- Mansvelt, W.M.F., P. Creutzberg, dkk. (1975-1996), *Changing economy in Indonesia; A selection of statistical source material from the early 19th century up to 1940* (16 jild; Den Haag: Nijhoff).
- Marle, A. van (1951-1952), 'De groep der Europeanen in Nederlands-Indië, iets over ontstaan en groei', *Indonesië* no. 5, hlm. 97-121; 314-341; 481-507.
- Meijer Ranneft, J.W. (1917), 'De verwording van het B.B. op Java', *Koloniaal Tijdschrift* I, hlm. 145-180.
- Miedema, J. dan W.A.L. Stokhof (1990), *Irian Jaya source materials* No. 1, Introduction (Leiden: DSALCUL, Jakarta: IRIS).
- Miert, Hans van (1995), *Een koel hoofd en een warm hart; Nationalisme, javanisme en jeugdbeweging in Nederlands-Indië, 1918-1930* (Amsterdam: Bataafsche Leeuw).
- Modderman, P.W., T. Volker, dan G. van der Veen (1929), *Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Deli Planters Vereeniging* (Weltevreden: Kolff).

N

- Niel, R. van (1984), *The emergence of the modern Indonesian elite* (Seri 'Indonesische herdrukken van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde'; Dordrecht: Foris).

- Nieuwenhuys, R. (1973), *Oost-Indische spiegel; Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden* (Cetakan ke-2; Amsterdam: Querido).
- *Notulen der jaarlijksche algemeene ledenvergadering (1923-1939), Notulen der jaarlijksche algemeene ledenvergadering van den Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië* ('s-Gravenhage: Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië).

O

- Oki, Akira (1977), *Social change in the West Sumatra village: 1908-1945*. PhD thesis, Australian National University, Canberra.
- *Opening der Rechtshoogeschool (1925), Opening der Rechtshoogeschool te Batavia op 28 October 1924* (brosur; Batavia: Volkslectuur).
- Oorschot, H.J. van (1956), *De ontwikkeling van de nijverheid in Indonesië* (Den Haag-Bandoeng: Van Hoeve).
- Otten, F.J.M. (2004), *Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940* (ING onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis).

P

- *Parlement en politiek*, versi digital, (http://www.parlement.com/id/vg0911204eze/a_m_dolf_joekes): lema A.M. Joekes.
- Peluso, Nancy Lee (1992), *Rich forests, poor people; Resource control and resistance in Java* (Berkeley-Los Angeles-Oxford: University of California Press).
- Pelzer, K.J. (1978), *Planter and peasant; Colonial policy and the agrarian struggle in East Sumatra 1863-1947* (Den Haag: Nijhoff).
- Perk, A. (1957), *Historische ontwikkeling van de landbouwvoorlichting in Indonesië* (5 jilid; Wageningen).
- *Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld* (1938), (Amsterdam: Van Holkema).
- Pierson, N.G. (1902-1903), 'Levensbericht van I.D. Fransen van de Putte', *Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden*, hlm. 17-79.

- Pijper, G.F. (1961), 'De Islampolitiek der Nederlandse regering', dalam: H. Baudet dan I.J. Brugmans, *Balans van beleid; Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië* (Assen: Van Gorcum), hlm. 209-222.
- Poeze, H.A., dengan sumbangan tulisan dari C. van Dijk dan I. van der Meulen (1986), *In het land van de overheerser. I. Indonesiërs in Nederland 1600-1950* (Dordrecht-Holland / Cinnaminson-U.S.A.: Foris).
- Poeze, H.A. ed. 1982-1994), *Politiek-politioneele overzichten van Nederlandsch-Indië 1927-1941* (4 jilid; 's-Gravenhage-Dordrecht-Leiden: KITLV Uitgeverij).
- Prince, Gé (1989), 'Dutch economic policy in Indonesia, 1870-1942', dalam: Angus Maddison dan Gé Prince, *Economic growth in Indonesia 1820-1940* (Dordrecht-Holland / Providence-U.S.A.: Foris), hlm. 203-226.
- Prins, J. dkk (1956), *Wij gedenken ... Gedenkboek van de Vereniging van Ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië* (Utrecht: Oosthoek).
- Pruys van der Hoeven, A. (1894), *Veertig jaren Indische dienst* (Den Haag: Belinfante).

R

- Raalte, E. van ed. (1964), *Troonredes. Openingsredes. Inhuldigingsredes 1814-1963* ('s-Gravenhage), hlm. 193-194.
- Ravesteijn, Willem (1997), *De zegenrijke heeren der wateren; Irrigatie en staat op Java 1832-1942; Een wetenschappelijke proeve op het gebied van Sociale Wetenschappen* (Delft: Delft University Press).
- Ravesteijn, Willem dan Jan Kop ed. (2004): *Bouwen in de archipel; Burgerlijke Openbare Werken in Nederlands-Indië en Indonesië 1800-2000* (Zutphen: Walburg Pers).
- Rees, D.F.W. van ed. (1895), *Verzameling van agrarische verordeningen in Nederlandsch-Indië* (2 jilid; Batavia: H. Prange).
- Rees, D.F.W. van (1901), *De staatsarmenzorg voor Europeanen in Nederlandsch-Indië* (Batavia: Landsdrukkerij).
- Rees, D.F.W. van (1901-1902), *Het pauperisme onder de Europeanen in Nederlandsch-Indië* (Batavia: Landsdrukkerij).
- Rees, D.F.W. van (1903), *Rapport der pauperisme-commissie, ingesteld bij artikel 2 van het regeeringsbesluit van 29 juni 1902 no. 9* (Batavia: Landsdrukkerij).

- *Repertorium op de literatuur* (1895-1935), *Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandse koloniën in Oost- en West-Indië voor zoover zij verspreid is in tijdschriften en mengelwerken* (11 jilid; 's-Gravenhage: Nijhoff).
- Resink, G.J. (1974), 'Rechtshoogeschool, jongereneed, "Stuw" en gestuwden', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 130, hlm 428-449.
- Ricklefs, M.C. (2001), *A history of modern Indonesia c. 1300 to the present* (Cetakan ke-3; Stanford: Stanford University Press).
- Rochemont, J.I. de (1875), *Loudon en Atsjin* (Batavia: Ernst).

S

- Snouck Hurgronje, C. (1893-1895), *De Atjehers* (2 jilid dalam 3 bundel; Batavia: Landsdrukkerij).
- Snouck Hurgronje, C. (1918), *Beschouwingen over bestuursbeleid: naar aanleiding van den Djambi-opstand in 1916* (Batavia: Landsdrukkerij).
- Somer, J.M. (1934), *De korte verklaring* (Breda: KMA).
- Steenhoek, R. (1987), 'De Dienst der Oost-Aziatische Zaken (1935-1942); Zijn bijdrage aan de kennis van Japan in Nederlands-Indië', dalam: E. Locher-Scholten (ed.), *Beelden van Japan in het vooroorlogse Nederlands-Indië; Resultaten van een doctoraal-werkcollege* (Leiden: Werkgroep Europese Expansie).
- Stok, P.J.C. van der (1913), *Gouvernementsexploitatie in Nederlandsch-Indië* (Leiden).
- Stoler, A.L. (1985), *Capitalism and confrontation in Sumatra's plantation belt, 1870-1979* (New Haven - London: Yale University Press).
- Stutterheim, W.F. (1936), *Een oudheidkundig jubileum 1913-1938* (Batavia: Oudheidkundige Dienst Nederlandsch-Indië).
- Sutherland, H. (1979), *The making of a bureaucratic elite; The colonial transformation of the Javanese priyaji* (Singapore: Heinemann).
- Suminto, Husnul Aqib (1985), *Politik Islam pemerintah Hindia Belanda: het Kantoor voor Inlandsche Zaken 1899-1942* (Jakarta: Fakultas Ushuluddin, IAIN Syarif Hidayatullah).

- Swanenburg, B.D. (1963), *Iwan de Verschrikkelijke; Leven en werken van Dr. P.V. van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden herschiep* (Cetakan ke-3; Maastricht: Leiter-Nijpels).

T

- Taselaar, Arjen (1998), *De Nederlandse koloniale lobby; Ondernemers en de Indische politiek 1914-1940* (Leiden: Research School CNWS, School of Asian, African, and Amerindian Studies).
- Ter nagedachtenis (1932), 'Ter nagedachtenis aan dr. J.W. IJzerman', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië* 89, hlm. I-XXIX.
- Theunissen, W.F. (1940), 'The Public Health Service: a brief survey', *Bulletin of the Colonial Institute* III, 3-4, hlm. 160-161.
- Theunissen, W.F. (1941), *Gezondheidszorg in Nederlandsch-Indië; 12 radiovoordrachten betreffende den dienst der volksgezondheid* (Surabaya).
- Tichelaar, J.J. (1927), *De Java-Suikerindustrie en hare beteekenis voor land en volk* (Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indië).
- Treub, M.W.F. (1923), *Nederland in de Oost; Reisindrukken* (Haarlem: Tjeenk Willink).
- Treub, M.W.F. (tanpa tahun), *Regeeringsbemoeyenis met het bedrijfsleven in Nederland en Ned.-Indië; Rede uitgesproken op 9 december 1924 te Wageningen voor de 6e wetenschappelijke samenkomst voor Indische landbouwtechnici, met verlof hier te lande* (Roermond).

V

- Velde, J.J. van de (1982), *Brieven uit Sumatra 1928-1949* (Franeker: Wever).
- Visser, A. (1982), *Een merkwaardige loopbaan; Herinneringen van een bestuursambtenaar in Nederlandsch-Indië/Indonesië (1932-1950)* (Franeker: Wever).
- Vries, E. de (1961), 'De welvaartsdiensten', dalam: H. Baudet dan I.J. Brugmans, *Balans van beleid; Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië* (Assen: Van Gorcum), hlm. 267-289.
- Vrijheid, H.M. (pengolah, 1941), *De Nederlandsch-Indische wetboeken zooals zij zijn gewijzigd en aangevuld tot op 1 juli 1941 benevens de belangrijkste der tot hunne verklaring dienstige algemeene verordeningen, met verwijzing naar de betreffende Nederlandsche, Fransche en Nederlandsch-Indische wetsbepalingen* (Jilid 1, Surabaya: Fuhri).

W

- Waal, E. de (1867), *Aanteekeningen over koloniale onderwerpen, XI, De departementen van algemeen bestuur in Nederlandsch-Indië* ('s-Gravenhage: Nijhoff).
- Wal, S. L. van der ed. (1963), *Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940* (Groningen: Wolters).
- Wal, S. L. van der ed. (1964-1965), *De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië* (2 jilid; Groningen: Wolters).
- Wal, S. L. van der ed. (1967), *De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indië* (Groningen: Wolters).
- Wal, S.L. van der ed. (1968), *Herinneringen van jhr. mr. B.C. de Jonge, met brieven uit zijn nalatenschap* (Groningen: Wolters-Noordhoff), hlm. 187.
- Wal, S.L. van der ed. (1977), *Besturen overzee; Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië* (Franeker: Wever).
- *Weekblad voor Privaatrecht* (tanpa tahun), *Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie* (edisi tahun 106, no. 5314, nomor peringatan dalam rangka hari kelahiran Paul Scholten yang ke-100; diterbitkan oleh Koninklijke Notariële Broederschap).
- Weisfelt, J. (1972), *De Deli Spoorweg Maatschappij als factor in de economische ontwikkeling van de Oostkust van Sumatra* (Rotterdam: Bronder-Offset).
- Wellan, J.W.J. (1932), *Zuid-Sumatra; Economisch overzicht van de gewesten Djambi, Palembang, de Lampoengsche districten en Benkoelen* (Wageningen: Veenman).
- Wenckebach, H.J.E. (1915), 'Het departement van Gouvernementsbedrijven in Nederlandsch-Indië; Voordracht, gehouden in de vergadering van het Kon. Instituut van Ingenieurs van 27 maart 1915', *De Ingenieur* (22 Mei), hlm. 429-445.
- Westenek, L.C. (1918), *De Minangkabausche Nagari* (Cetakan ke-3; Weltevreden: Visser).
- Westenek, L.C. (1962), *Waar mensch en tijger burens zijn* (Cetakan ke-4, cetakan pertama 1927; Den Haag: Leopold).
- Westenek, L.C. (1932), *Het rijk van Bittertong* (Anumerta; Den Haag: Leopold).
- Wertheim, W.F. (1956), *Indonesian society in transition; A study of social change* (Den Haag / Bandoeng: Van Hoeve).

Z

- Zalingen, P.J.A.F. Vos van (1973), *Douwes Dekker en de Indische Partij: een onderzoek naar de achtergronden van 'onafhankelijkheidsbeweging' van 1912* (Skripsi sarjana, Leiden).
- Zijlmans, G.C. (1985), *Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst: het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950* (Amsterdam: Bataafsche Leeuw).

Glosarium

A

adatrecht	: hukum adat
Agrarische Wet	: Undang-Undang Agraria

B

batig slot	: saldo keuntungan
------------	--------------------

C

contingentering	: sistem kuota
controleur	: pengawas
Cultuurstelsel	: Sistem Tanam Paksa

D

Decentralisatiebesluit	: Keputusan Desentralisasi
Decentralisatiewet	: Undang-Undang Desentralisasi

E

erfpacht	: tanah erfpah
Ethische Politiek	: Politik Etis

G

Gouvernementsbesluit	: Keputusan Pemerintah
----------------------	------------------------

I

Indische Comptabiliteitswet	: Undang-Undang Perbendaharaan Hindia
-----------------------------	---------------------------------------

K

Koelieordonnantie	: Ordonansi Buruh Kuli
Koninklijk Besluit	: Keputusan Raja
Korte Verklaring	: Perjanjian Pendek

L

Lang Contract	: Kontrak Panjang
---------------	-------------------

N

Nagari-ordonnantie	: Ordonansi Nagari
--------------------	--------------------

P

poenale sanctie	: sanksi hukuman
-----------------	------------------

R

regent	: bupati
Regeringsreglement Nederlandsch-Indië	: Peraturan Pemerintah Hindia-Belanda
resident	: residen
restrictieovereenkomst	: perjanjian pembatasan

S

Staatsblad van Nederlandsch-Indië, met Bijbladen	: Lembaran Negara Hindia-Belanda, dengan Lembaran Tambahan
---	---

W

Wet op de Bestuurs hervorming	: Undang-Undang Reformasi Pemerintahan
Wet op de Staatsinrichting	: Undang-Undang Tata Negara

Indeks Nama

Daftar ini memuat nama orang dan nama daerah.

A

Aalst, C.J.K. van 149-52, 218
Aceh *lihat* Atjeh
Adriaanse, C. 119, 146-8
Alphen, D.F. van 31
Ambon 32-3, 100, 146
André de la Porte, G. 159
Asbeck, F.M. van 119, 142-5
Atjeh (Aceh) 31-3, 62-3, 66, 80, 82, 115, 117, 194

B

Baal, J. van 28, 33, 36, 102-5, 259
Bakkers, J.A. 31
Bali 32, 41, 135-6
Bangka *lihat* Banka
Banka (Bangka) 31, 57-8
Berg, L.W.C. van den 115
Berg, N.P. van den 199
Bertsch, R.K.A. 32, 85, 91-3
Bik (koleksi) 125
Biliton *lihat* Billiton
Billiton (Biliton) 58
Blumberger, J.Th. Petrus 32
Bodenhausen, C.W. 219
Boeton (Buton) 100-1
Böhm, A.H. 33
Bool, H.J. 173
Borneo (Kalimantan) 26, 31-3, 41, 47, 58, 62, 78, 80, 236
Bossche, J.F.R.S. van den 31, 57-9
Brandes, J.L.A. 79, 122, 126
Brits-Indië (Hindia-Britania) 122, 207
Bruins, G.W.J. 186
Buitengewesten (Wilayah Luar Jawa dan Madura) 14-5, 21, 30, 34, 39, 47, 67, 69, 74-5, 78, 80, 100-1, 132, 146
Buton *lihat* Boeton

C

Caudri, G.W. 33, 100-1

Celebes (Sulawesi) 31, 33, 47, 60, 62, 100
Ceram (Seram) 32
Cina 16, 51-4, 97, 156, 189, 193, 197
Cool, W. 151, 233
Coolhaas, W. Ph. 32, 36
Cort van der Linden (kabinet) 219
Cremer, J.Th. 122, 189-93, 195
Creutzberg, K.F. 14, 110

D

Dam, G. van 32
Deli (Sumatra) 97-9, 189, 193
Deventer, C.Th. van 135-40
Deventer-Maas, E.M.L. van 135, 139-40
Djajadiningrat, A. 12, 36
Djajadiningrat, H. 128, 130, 154
Djeddah (Jeddah) 108, 115, 118, 146-7, 261
Douwes Dekker, Eduard 24

E

Elout, C.P.J. 31
Engelhard, N. 125, 261

F

Febvre, J.D.L. le 32, 74-7
Fillietaz-Bousquet, R. de 31
Flores 33
Fock, D. 75, 116, 128, 138, 219
Francis, E.M. 31, 36, 58
Fransen van de Putte, I.D. 6, 14, 61, 63, 107, 114
Friedericy, H.J. 36
Fromberg, P.H. 159
Fruin, Th.A. 49-50, 94-6

G

Gelderen, J. van 180
Gerretson, F.C. 140
Gesseler Verschuier, P.R.W. van 32
Gevers, A. 214
Gobée, E. 116, 118-9, 142, 146, 148
Gonggrijp, G.L. 24, 36, 83
Götzen, L. 173
Graaff, S. de 25, 43
Graeff, A.C.D. de 116, 123, 157, 219

Graf, L.I. 33
Groeneveldt, W. 122
Groothoff, A. 32, 41, 185, 210, 215, 240-1
Gutteling, H.M. 179
Gybland Oosterhof, H.H.A. van 140

H

Haar, B. ter 128
Haisma-Rahder, W.J. 215
Haringhuizen, J. 232, 234, 245
Hart, G.H.C. 183, 187, 219
Hazeu, G.A.J. 112, 119
Helsdingen, W.H. van 32, 87-90, 113, 120, 259
Heutsz, J.B. van 71, 74, 115, 119
Heynen, H.J. 33
Heyting, L.C. 32
Hijnekamp, W.H.A. 32
Hindia-Britania *lihat* Brits-Indië
Hogendorp, C.S.W. van 31
Hogendorp, D.C.A. 31
Holle, K.F. 210
Hooff sr., H.W.S. van 214
Hoorweg, A. 32
Houven van Oordt, J.B. van der 71
Hucht, van der (keluarga) 214

I

Idenburg, P.J.A. 135
IJzerman, J.W. 121, 149, 152
Immink, A.J. 158
Indocina Perancis 122
Irian *lihat* Nieuw-Guinea (Guinea Baru)

J

Jagt, M.B. van der 32, 36, 83-6
Jansen, G. 32, 97-9, 195
Japing, C.H. 41
Jaquet, L.G.M. 36, 55, 101
Jawa *lihat* Java
Java (Jawa) *passim*
Jeddah *lihat* Djeddah
Jepang 16, 51-6
Joekes, A.M. 32, 138
Joekes, A.M. jr. 32, 112, 119, 135-141

Jonge, B.C. de 146, 172, 177, 185, 210, 217

Jonkman, J.A. 88

Jordaan, J.M. 32, 125

K

Kalimantan *lihat* Celebes

Kartini 135, 138-40

Kempen, C.J. van 32

Kempen Valk, J.J. van 32

Kepulauan Sangi *lihat* Sangi-eilanden

Kepulauan Sunda *lihat* Soenda-eilanden

Kepulauan Tukang Besi *lihat* Toekanbesi-eilanden

Kern, R.A. 112, 116, 119-20

Ki Hadjar Dewantoro *lihat* Soewardi Soerjaningrat

Kinderen, T.H. der 57, 59, 160, 165

Kock, A.H.W. de 31

Kollewijn, R.D. 129

Koningsberger, J.C. 219

Kraemer, H. 142

Krom, N.J. 122-3

Kuyper-kabinet 6

L

Langen, L.H. de 33

Lanting, P.A. 32

Lichtenbelt, J.C.A. 112, 135-6

Liefrinck, F.A. 138-9

Liefrinck, J.H. 74, 76-7, 138-9

Limburg Stirum, J.P. van 75, 119, 138, 199-200, 206, 218

Lith, P.C.A. 146

Logeman, J.H.A. 128-9

Lombok 32

Loudon, J. 61-3

Lovink, A.H.J. 55

Lovink, H.J. 180

M

Madoera (Madura) *passim*

Madura *lihat* Madoera

Maluku *lihat* Molukken

Marchant, H.P. 119

Maurenbrecher, L.L.A. 33, 261

Meijer Ranneft, J.W. 23, 32, 41, 44-5, 84, 88, 119, 179, 185

Meijneken, F.A.W. 233, 245

Mekah *lihat* Mekka

Mekka (Mekah) 108, 115, 146, 148, 261

Middelberg, L. 240

Molukken (Maluku) 32-3

Mook, H.J. van 182, 187

N

Nienhuys, J. 97

Nieuw-Guinea (Guinea Baru) 33, 41, 102-4, 162, 261

Nieuwenhuijzen, F.N. 31, 60-3

Nortier, A. 142

O

Onvlee, L. 33

P

Peyl, Th.J. van der 33

Piekaar, A.J. 33, 261

Pijnacker Hordijk, C. 119

Pijper, G.F. 119-20

Prins, J. 32

Pruys van der Hoeven, A. 32, 36, 61-3

R

Rappard, W.E. 32

Rees, D.F.W. van 43, 45, 67, 69-72

Rees, O. van 31

Rhemrev, J.C.T. 194, 197

Rinkes, D.A. 120

Riouw (Riau) 31-2, 60, 62, 251

Rochussen, J.J. 60, 229

Rollin Couquerque, L.M. 31

Rookmaker, H.R. 32

Rooseboom, W. 122

Roux, C.C.F.M. le 33

Ruibing, A.H. 33

Rutgers, A.A.L. 180

S

Sangi-eilanden (Kepulauan Sangi) 33

Saoedi-Arabië (Saudi-Arabia) 118-9, 147-8, 261

Saudi-Arabia *lihat* Saoedi-Arabië

Savornin Lohman, B.C. de 140

Sayyid ‘Uthmân 116, 227

Schneither, G.J.Chr. 125, 261
 Schoemaker, H.J. 232, 234, 245
 Scholten, P. 128-31
 Scholten van Oud-Haarlem, C.J. 164
 Schrieke, B.J.O. 135
 Schrieke, J.J. 165
 Schüller, C.W. 32
 Seram *lihat* Ceram
 Sitsen, M.H.A. 32
 Snouck Hurgronje, C. 24-5, 78, 82, 115, 118-20, 143, 145, 146, 148
 Soemba (Sumba) 33
 Soenda-eilanden (Kepulauan Sunda) 32
 Soetardjo 88, 90
 Soewardi Soerjaningrat 105, 143-4, 190
 Sonius, H.W.J. 32
 Steenis, C.G.G.J. van 179
 Stein Callenfels, P.V. van 123, 127
 Stieltjes, J.J. 232
 Sulawesi *lihat* Celebes
 Sumatra 26-7, 31-3, 39, 57-60, 66-8, 74-6, 78-81, 94, 97-100, 143, 146, 161, 183, 189, 193-5,
 211-7, 233, 236, 245
 Sumba *lihat* Soemba
 Swaan, W. 233

T

Teeuw, A. 33
 Ternate 32
 Theunissen, W.F. 112, 132-4
 Tichelman, G.L. 32, 41
 Timor (dan wilayahnya) 32-3
 Tjong A Fie 97, 174
 Toekanbesi-eilanden (Kepulauan Tukang Besi) 100
 Treub, M. 176, 180
 Treub, M.W.F. 219, 225-6
 Turki *lihat* Turkije
 Turkije (Turki) 118, 147, 261

V

Veer, A. van der 61
 Velde, J.J. van de 33, 36
 Venema, H.R. 33
 Visser, A. 31
 Vleer, A.J. 33
 Vliegen, W.H. 219

Vogel, H.A.F. de 32, 36, 64-5
Vollenhoven, C. van 142, 164
Vorstman, J.A. 33

W

Waerden, J. van der 239, 260
Weijer, G.A.Ph. 221
Wellenstein, E.P. 173, 180, 187, 219
Welter, Ch.J.I.M. 221
Wenckebach, H.J.E. 236, 242
Westenenk, L.C. 32, 78-82, 125
Wichers, H.L. 164
Wijck, C.H.A. van der 115, 190
Wilayah Luar Jawa dan Madura *lihat* Buitengewesten
Wolterbeek Muller, D.G. 159
Wurth, Th. 179

Indeks Kata Kunci

A

(maskapai) angkutan udara (luchtvaart(maatschappijen)) 79, 219, 240, 243

B

Bagian

Dinas Kesehatan Sipil (Afdeling Burgerlijke Geneeskundige Dienst) *lihat* Dinas Kesehatan Sipil

Urusan Kepemerintahan Wilayah Luar Jawa dan Madura (Afdeling Bestuurszaken voor de Buitengewesten) 15, 19

balai penelitian (proefstations) 39, 179-80, 194, 199, 202-3, 205, 208, 216

Bank Jawa *lihat* Javasche Bank

budidaya

karet 132, 178, 183, 193, 207, *juga lihat* perkebunan karet

kopi 41, 78, 176

tanaman gunung *lihat* perkebunan kopi, teh, karet, dan kina

teh *lihat* perkebunan teh

tembakau 60, 94, 189, 218, 223, *juga lihat* perusahaan tembakau, Deli-Maatschappij

D

Deli-Maatschappij 45, 98, 189-91, 193-8, 211, 218, 233, 259, *juga lihat* budidaya tembakau, perusahaan tembakau

Departemen

Angkatan Laut (Departement van Marine) 229

Kehakiman (Departement van Justitie) 7, 15, 109-10, 160-6, 194, 255,

Kuangan (Departement van Financiën) 5, 109, 169-73, 177, 236-7

Lalu Lintas dan Pengairan (Departement van Verkeer en Waterstaat) 7, 230, 232, 234, 237, 243-6

Pemerintahan Dalam Negeri (Departement van Binnenlands Bestuur) 5, 13-4, 21, 33-4, 38, 43, 47, 71, 109, 161-2, 176, 229, 237, 255

Pekerjaan Umum Sipil (Departement van Burgerlijke Openbare Werken) 7, 43, 122, 150, 176, 229-236, 243, 245, 256

Pendidikan, Ibadah, (dan Industri Kerajinan) (Departement van Onderwijs, Eredienst (en Nijverheid)) 5, 87, 107-14, 116, 121, 124, 135, 162, 176, 230, 236, 255

Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan (Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel) 7, 15, 39, 53, 109, 162, 176-82, 255

Perusahaan Pemerintah (Departement van Gouvernementsbedrijven) 7, 109, 182, 229, 236-42

Urusan Ekonomi (Departement van Economische Zaken) 7, 48, 177, 179, 182-8, 202, 209, 219-20, 237, 243, 255

Dewan

Direksi Departemen (Raad van Departementsdirecteuren) 109

Hindia (Raad van Indië) 5, 45, 57, 59, 61, 63, 66-8, 70-2, 74, 78, 81, 107, 128, 157, 172, 185, 210, 257,

Pengusaha (Ondernemersraad) 186, 218, 220-1, 224-5

Rakyat (Volksraad) 19, 25, 33, 84-5, 87-9, 113, 116, 128, 134, 136, 161, 165, 172, 180, 187, 197, 205, 216, 219, 225, 234, 241, 246

Dinas

Intelijen Politik (Politieke Inlichtingendienst) 156

Kehutanan (Dienst van het Boswezen) 38-42

Kesehatan Rakyat (Dienst der Volksgezondheid) 110, *juga lihat* Dinas Kesehatan Sipil

Kesehatan Sipil (Burgerlijke Geneeskundige Dienst) 108, 110-1, 230

Pembangkit Listrik dan Tenaga Air (Dienst voor Waterkracht en Electriciteit) 41, 237, 240-1

Penyuluhan Pertanian (Landbouwvoorlichtingsdienst) 48, 176

Purbakala (Oudheidkundige Dienst) 121-7

Reserse Umum (Dienst der Algemene Recherche) 156-8

Urusan Asia Timur (Dienst voor Oost-Aziatische Zaken) 51-6, 180, 187

Direktorat Budidaya Tanaman dan Pendapatan Negeri (Directie der Cultures en Landelijke Inkomsten) 14, 23, 250

E

Encyclopaedisch Bureau 16, 19, 82

G

gubernur-jenderal *passim*

I

Ikatan Kesenian dan Ilmu Pengetahuan Batavia (Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen) 57, 79, 108, 121-3, 126

Inspeksi

Buruh (Arbeidsinspectie) 74, 161, 163, 165, 194, 200

untuk Urusan Agraria (Inspectie voor Agrarische Zaken) 15, 43-6, 70-1, 109, 193, 199

Institut Kerajaan untuk Insinyur (Koninklijk Instituut van Ingenieurs) 150, 232, 235, 239, 242, 245

Institut Kolonial (Koloniaal Instituut / Tropeninstituut) 70, 190

J

Jaksa Agung (Procureur-Generaal) 116, 156-60

Javasche Bank 169, 170, 199

Jawatan Kereta Api dan Tram Uap (spoorweg-, stoomtraammaatschappijen) 98, 189-90, 221-229, 231, 233, 236-8, 240

K

kabupaten (regentschap) 10, 21-3. 25-30, 87, 132

Kantor

Buruh (Kantoor van Arbeid) 200, 206

Pusat Statistik (Centraal Kantoor voor de Statistiek) 172, 177, 180

Urusan Penduduk (Kantoor voor Bevolkingszaken) 102-4

Kementerian

Kehakiman (Ministerie van Justitie) 151

Luar Negeri (Ministerie van Buitenlandse Zaken) 10, 50, 55, 95, 118, 147, 185, 197

Urusan Ekonomi (Ministerie van Economische Zaken) 185

Urusan Tanah Jajahan (Ministerie van Koloniën) 249-60, *passim*

kepemerintahan wilayah yang otonom (zelfbestuur) 10, 22, 34, 61, 84, 161

Komisariat Urusan Hindia (Commissariaat voor Indische Zaken) 31, 81, 185, 258

komisaris pemerintah (regeringscommissaris) 25, 57, 66, 79, 81, 186, 200, 240

Komite Kolonisasi Pusat (Centraal Kolonisatie Comité) 44, 46

Korps Pegawai Pemerintahan Dalam Negeri (Corps Binnenlandse Bestuursambtenaren) 6

kotapraja (stadsgemeente) 26-7, 33-4, 87, 91, 97-8, 132, 230, 243

M

Mahkamah Agung (Hooggerechtshof) 94, 156, 158, 160, 164

Maskapai Dagang Belanda (Nederlandsche Handel-Maatschappij / NHM) 149, 189, 193, 200, 203-4, 211-3, 218, 221, 223-4

Menteri Urusan Tanah Jajahan (Minister van Koloniën) 5-6, 14, 25, 43, 61, 107, 109, 115, 121, 128, 149

P

pegawai

pemerintah Eropa 14, 21-37, 47

pemerintah pribumi 14, 19, 21-37, 47, 60

pemerintah

daerah (gewestelijk bestuur) 22, 34, 121, 199, 207

provinsi (provinciaal bestuur) 34

setempat (plaatselijk bestuur) 16, 22, 25-6, 29, 75, 80, 95, 100, 121

pemimpin wilayah yang otonom (zelfbestuurder) 14, 16, 21, 97, 160, 257

Penasihat

bagi yang sedang belajar (Raadsman voor Studerenden) 79, 81

untuk Urusan Cina (Adviseur voor Chinese Zaken) 16, 52, 97

untuk Urusan Jepang (Adviseur voor Japanse Zaken) 16, 53

untuk Urusan Pribumi (Adviseur voor Inlandse Zaken) 7, 24, 78, 108, 112, 115-20, 123-4, 143, 146, 156

penguasa negeri *lihat* gubernur-jenderal

perbankan 223

Perhimpunan Pengusaha (Ondernemersbond) 183, 186, 207-8, 219-21, 225

perkebunan

karet 183, 186, 193, 208, 210, 212-6
kina 186, 208, 215
kopi (dan kakao) 186, 208, 212, 214-5
teh 186, 208, 213, 215

perusahaan

dagang (handelsondernemingen) 218, 223, *juga lihat* Maskapai Dagang Belanda
gas dan listrik 219, 224
gula (suikerondernemingen) 23, 64, 199-200, 202-4
industri (industriële ondernemingen) 223-4
karet 207
kina 207
kopi 207, 211, *juga lihat* budidaya kopi, perkebunan kopi
pelayaran kapal uap (stoomvaartmaatschappijen) 81, 222
tambang / pertambangan (mijnbouwmaatschappijen) 58, 223, 239-41
teh 207, 214 *juga lihat* budidaya teh, perkebunan teh
tembakau 64, 223

R

Rechtshogeschool 128-31

S

sekolah(an) (scholen / onderwijsinstellingen) 24, 107-8, 113, 128-30, 135-6, 139, 142-4, 149-53, 176, 179, 194.
Sekretariat Umum (Algemene Secretarie) 16, 30, 60, 69-71, 121, 124-5, 128, 142-3, 258
Sindikrat Pertanian Umum (Landbouwsyndicaat) 183, 207-8, 216
sistem kredit rakyat (volkskredietwezen) 15, 47-50, 87, 94-5, 109

T

Technische Hogeschool 149-53

Kolofon buku asli *De koloniale staat 1854-1942*

Terbitan

Nationaal Archief
Prins Willem-Alexanderhof 20
Postbus 90520
2509 LM Den Haag
Telepon: +31 (0)70 331 54 00
www.nationaalarchief.nl
info@nationaalarchief.nl

Penyusun

Francien van Anrooij

Penyunting akhir

Paul Brood, Nationaal Archief Den Haag

Tiras

500 eks.

Foto sampul

‘Para kepala Jawa sekitar tahun 1890’ (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde / KITLV no. 27787)

Percetakan

HooibergHaasbeek, Meppel

Desain

Arno Geels, BNO, Den Haag

Kolofon edisi revisi *De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942*

Terbitan

Nationaal Archief
Prins Willem-Alexanderhof 20
Postbus 90520
2509 LM Den Haag
Telepon: +31 (0)70 331 54 00
www.nationaalarchief.nl
info@nationaalarchief.nl

Penyusun

Francien van Anrooij

Penerjemah

Nurhayu W. Santoso
Susi Moeimam

Tiras

Publikasi digital

Foto sampul

‘Para kepala Jawa sekitar tahun 1890’ (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde / KITLV no. 27787)

Desain buku asli

Arno Geels, BNO, Den Haag

De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942

Pada abad ke-19 dan 20 beberapa anak muda yang diseleksi secara ketat dan seksama sebagai pegawai pemerintahan diberangkatkan dari Belanda ke (Hindia) Timur. Pada masa pendidikan, mereka diajarkan mengenai bahasa, adat, dan budaya masyarakat Kepulauan Nusantara itu. Bersama-sama dengan kaum elite Indonesia, mereka membangun negara kolonial, yang di kemudian hari menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka.

Arsip-arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) di Nationaal Archief (Arsip Nasional Den Haag) memuat ribuan surat, advis, dan laporan yang merekam proses yang penting ini. Dalam arsip-arsip pribadi permasalahan didekati melalui individu atau organisasi. Semua material tersebut memberi kejelasan tentang tindakan dan usaha dari generasi-generasi yang berturutan itu. Buku panduan ini berusaha memberi gambaran struktur dari arsip-arsip dan kaitan antararsip itu. Dengan buku ini penelitian arsip-arsip yang kaya data itu dapat dimungkinkan.